



RKPD KOTA DUMAI TAHUN 2019

(PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2019)

MENGEMBANGKAN INSTRUMEN PENDUKUNG YANG KONDUSIF BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA DUMAI MAKMUR DAN MADANI
YANG DIDUKUNG OLEH MASYARAKAT YANG KOMPETITIF, KREATIF SERTA PENGUATAN INVESTASI DAN PASAR
UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN MASYARAKAT

PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN 2018



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka perlu menetapkan penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2019;
 - b. bahwa rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai pedoman Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4432);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);

18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 23 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Dumai
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016-2021.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
KETENTUAN RKPD TAHUN 2019

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2019 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perangkat daerah.

- (3) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan Tahun 2019.
- (4) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2019 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
 - b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja OPD Tahun 2019; dan
 - c. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

Pasal 3

- (1) Penjabaran RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. BAB VII Penutup.
- (2) Penjabaran RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Program dan kegiatan dalam RKPD ini dilaksanakan oleh OPD dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam penyesuaian RKPD Kota Dumai agar dijadikan dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019, KUA Tahun Anggaran 2018 dan PPAS Tahun Anggaran 2019 dan RKA-SKPD Tahun 2019.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 14 September 2018

WALIKOTA DUMAI,



ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 14 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 24 SERI E

NO	1
TANGGAL	14/09/2018

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum *Warahmatullahi Wabarokatuh*,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Kami telah dapat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2019. RKPD Kota Dumai Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Menetapkan 8 (Delapan) Prioritas Daerah dan dengan tema pembangunan Tahun 2019 “*Mengembangkan Instrumen Pendukung Yang Kondusif Bagi Terwujudnya Masyarakat Kota Dumai Makmur Dan Madani Yang Didukung Oleh Masyarakat Yang Kompetitif, Kreatif Serta Penguatan Investasi Dan Pasar Untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat*”. Kemudian Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2016-2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2019 sebagai penjabaran tahun Ketiga periode RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 yang merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen Perangkat Daerah dan Stakeholder dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel sesuai dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. akan dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum

APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Dumai tahun 2019. Diharapkan hasil perencanaan pada tahun Perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 dapat direalisasikan secara optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai sehingga dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kota Dumai tahun 2016 – 2021 nantinya.

Akhirnya, Kami berharap semoga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh lapisan masyarakat, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan daerah menuju masa depan yang lebih baik.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.4 Maksud Dan Tujuan	I-16
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-17
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi	II-1
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
b. Letak dan Kondisi Geografis	II-1
c. Topografi	II-2
d. Geologi	II-3
e. Hidrologi	II-4
f. Klimatologi	II-5
g. Demografi	II-6
h. Wilayah Rawan Bencana	II-11
i. Potensi Pengembangan Wilayah	II-14
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-15
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-16
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-37
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-51
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-57
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-57
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-105
2.3.3 Fokus Urusan Layanan Pilihan	II-147
2.3.4 Fokus Urusan Penunjang	II-157
2.2. Aspek Daya Saing Daerah	II-166
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-166
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-167
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-170
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II-176
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD Tahun ke-2	II-185
2.2.1 Evaluasi Kinerja Tahun 2018	II-185
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-188
2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-188
A. Aspek Geografi dan Demografi	II-189
B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-190
C. Aspek Pelayanan Umum	II-192
D. Aspek Daya Saing Daerah	II-193
E. Isu yang berkaitan dengan pelaksanaan <i>Sustainable Development Goals</i>	II-202

	(SDG's) Tahun 2019	
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-214
	A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-214
	B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-220
	C. Urusan Pilihan	II-231
	D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang	II-235
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH		III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2019	III-2
3.1.2	Telahan Kebijakan nasional terkait dengan Kota Dumai	III-15
3.1.3	Telahan Kebijakan Provinsi yang terkait dengan Kota Dumai (Perubahan RPJM Provinsi Riau 2014-2019)	III-16
3.1.4	Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Dumai Secara Umum	III-17
3.1.5	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020	III-18
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-20
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan	III-21
	1. Pendapatan Asli Daerah	III-23
	2. Dana Perimbangan	III-24
	3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	III-24
3.2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-24
	3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-24
	3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-30
	3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-48
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019		IV-1
4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019	IV-1
4.1.1	Rancangan RPJMD Tahun 2016-2021	IV-1
4.1.2	Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	IV-3
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021	IV-11
4.1.4	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan tahapan lima tahun ke-3 (2016-2020) RPJP Kota Dumai Tahun 2005-2025	IV-14
4.1.5	Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2019	IV-19
4.1.6	Skala Prioritas Penyusunanm RKPD Tahun 2019 pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019	IV-22
4.2	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2019	IV-24
4.3	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Target 2019 Terhadap Prioritas RKPD Tahun 2019	IV-35
4.4	Pelaksanaan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's) Target 2019 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019	IV-37
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2019		V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		VI-1
BAB VII PENUTUP		VII-1
LAMPIRAN I EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2017 DAN REALISASI RPJMD KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021		
LAMPIRAN II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) tahun 2019		

DAFTAR TABEL

BAB. I. PENDAHULUAN

Tabel 1. 1	Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2019.....	I -10
------------	---	-------

BAB. II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tabel 2.1	Sungai-sungai yang mengalir menurut kecamatan di Kota Dumai.....	II -4
Tabel 2.2	Banyaknya hari hujan di kota Dumai selama tahun 2010-2016.....	II -6
Tabel 2.3	Banyaknya curah hujan di kota Dumai selama tahun 2010-2016	II -6
Tabel 2.4	Laju pertumbuhan penduduk kota Dumai tahun 2002-2016	II -7
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan Rata-Rata Kota Dumai Tahun 2010-2016 Menurut Kecamatan	II -8
Tabel 2.6	Kepadatan penduduk kota Dumai tahun 2010-2016	II -9
Tabel 2.7	Rasio jenis kelamin penduduk kota Dumai tahun 2002-2016	II -9
Tabel 2.8	Banyaknya kejadian kebakaran hutan dan lahan di kota Dumai	II -11
Tabel 2.9	PDRB kota Dumai tahun 2011-2016 atas dasar harga konstan (ADHK) menurut lapangan usaha tahun 2010-2016	II -16
Tabel 2.10	PDRB kota Dumai atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha tahun 2010-2016	II -17
Tabel 2.11	Kontribusi sektoral PDRB 2011-2015	II -18
Tabel 2.12	Struktur perekonomian regional kota Dumai tahun 2012-2016	II -19
Tabel 2.13	Struktur perekonomian sektoral kota Dumai tahun 2012-2016	II -21
Tabel 2.14	Laju pertumbuhan ekonomi kota Dumai tahun 2012-2016	II -22
Tabel 2.15	Hasil analisis tipologi kelas kota Dumai tahun 2011-2016	II -25
Tabel 2.16	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Dumai Tahun 2012-2016	II -26
Tabel 2.17	Perbandingan Indikator Kemiskinan Tahun 2010-2016 Kota Dumai dan Provinsi Riau	II -27
Tabel 2.18	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -30
Tabel 2.19	Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Tahun 2014-2016 Kota Dumai vs Provinsi Riau	II -33
Tabel 2.20	Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2016	II -36
Tabel 2.21	Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2016	II -36
Tabel 2.22	Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA	II -40
Tabel 2.23	Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan.....	II -41
Tabel 2.24	Angka Partisipasi Murni Kota Dumai Tahun 2010-2016.....	II -42
Tabel 2.25	Penerima Bantuan Iuran (PBI).....	II-51
Tabel 2.26	Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar.....	II -52
Tabel 2.27	Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	II -53
Tabel 2.28	Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Dasar	II -53
Tabel 2.29	Rata-rata Implementasi Nilai-nilai agama pada Pendidikan Sekolah Dasar.....	II -54
Tabel 2.30	Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.....	II -54
Tabel 2.31	Rata-rata Implementasi Nilai-nilai agama pada Pendidikan Sekolah Dasar.....	II -54
Tabel 2.32	Indikator Kinerja Sasaran Berkaitan Dengan Seni Dan Budaya Tahun 2017.....	II -55
Tabel 2.33	Jumlah Grup dan Gedung Kesenian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.....	II -55
Tabel 2.34	Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabor dan Jumlah Klub Olahraga.....	II -56
Tabel 2.35	Jumlah Fasilitas Olahraga di Provinsi Riau.....	II -57
Tabel 2.36	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio jumlah siswa SD/MI dan SMP/MTs terhadap Jumlah Kelas di Kota Dumai Tahun 2010-2016.....	II -58
Tabel 2.37	Rata-rata Jumlah Siswa per Sekolah dan Jumlah Siswa per Guru di Masing-masing Kecamatan di Kota Dumai Untuk Jenjang SD dan SMP Tahun 2017.....	II -59
Tabel 2.38	Rasio Guru per Siswa SMA/SMK/MA di Kota Dumai Tahun 2010-2016.....	II -63
Tabel 2.39	Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai Tahun 2015-2017.....	II -64
Tabel 2.40	Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2015-2017.....	II -65
Tabel 2.41	Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2011 - 2017.....	II -66
Tabel 2.42	Jumlah Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Dumai Tahun 2011-2017.....	II -68
Tabel 2.43	Angka Kelulusan Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2011-2017.....	II -69
Tabel 2.44	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2010-2017.....	II -70
Tabel 2.45	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dan Persentase Telah Bersertifikasi di Kota Dumai.....	II -71

Tabel 2.46	Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk Tahun 2010-2016.....	II -73
Tabel 2.47	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Duma Tahun 2010-2016.....	II -73
Tabel 2.48	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-2016	II -75
Tabel 2.49	Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai	II -76
Tabel 2.50	Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2017	II -84
Tabel 2.51	Cakupan Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -85
Tabel 2.52	Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -85
Tabel 2.53	Kondisi Puskesmas Keliling dan Ambulans di Puskesmas Se-Kota Dumai Tahun 2016	II -85
Tabel 2.54	Sebaran Puskemas Pembantu di Kota Dumai	II -84
Tabel 2.55	Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -87
Tabel 2.56	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2010-2018	II -90
Tabel 2.57	Kondisi Jalan di Kota Dumai Tahun 2017 dan 2018 per Kecamatan	II -91
Tabel 2.58	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2010 – 2015	II -91
Tabel 2.59	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2018	II -93
Tabel 2.60	Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -94
Tabel 2.61	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB Kota Dumai Tahun 2011-2018	II -95
Tabel 2.62	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai	II -97
Tabel 2.63	Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai	II -98
Tabel 2.64	Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2015-2018	II -99
Tabel 2.65	Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2011-2018	II -100
Tabel 2.66	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -100
Tabel 2.67	Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -101
Tabel 2.68	Persentase Peningkatan Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -102
Tabel 2.69	Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai	II -102
Tabel 2.70	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Dumai	II -102
Tabel 2.71	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai	II -103
Tabel 2.72	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai	II -103
Tabel 2.73	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai	II -103
Tabel 2.74	Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Permukiman di Kota Dumai	II -104
Tabel 2.75	Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2012-2016	II -104
Tabel 2.76	Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2012-2017	II -105
Tabel 2.77	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2012- 2017	II -106
Tabel 2.78	Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -107
Tabel 2.79	Keselamatan dan Perlindungan di Kota Dumai Tahun 2010- 2015	II -107
Tabel 2.80	Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai Tahun 2012-2017	II -108
Tabel 2.81	Perusahaan Wajib Laport Tahun 2011-2016	II -108
Tabel 2.82	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2010-2017	II -108
Tabel 2.83	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai Tahun 2010-2017	II -109
Tabel 2.84	Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja	II -111
Tabel 2.85	Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2010-2017	II -111
Tabel 2.86	Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan Komoditas Pangan (Ton) Kota Dumai Tahun 2017	II -112
Tabel 2.87	Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2011–2017	II -113
Tabel 2.88	Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani	II -115
Tabel 2.89	Permasalahan Pertanahan Yang Sudah Diselesaikan	II -117
Tabel 2.90	Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2010-2017	II -118
Tabel 2.91	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2010-2017	II -118
Tabel 2.92	Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai	II -119
Tabel 2.93	Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai Tahun 2018	II -120
Tabel 2.94	Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai Tahun 2016-2017	II -121
Tabel 2.95	Ambang Batas Baku Mutu Air Sumur	II -121
Tabel 2.96	Hasil Pengujian Kualitas Air Laut di Kota Dumai Tahun 2016-2017	II -123
Tabel 2.97	Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai	II -124
Tabel 2.98	Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai di Kota Dumai Tahun 2016-2017	II -125

Tabel 2.99	Kepemilikan KTP Tahun 2010-2017	II -126
Tabel 2.100	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2010-2016	II -127
Tabel 2.101	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2010-2016	II -127
Tabel 2.102	Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -128
Tabel 2.103	Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai Tahun 2012-2016	II -129
Tabel 2.104	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai	II -130
Tabel 2.105	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2012-2017	II -130
Tabel 2.106	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2010-2017	II -131
Tabel 2.107	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2010-2017	II -132
Tabel 2.108	Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai	II -133
Tabel 2.109	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2010-2017	II -133
Tabel 2.110	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai (Rp.) Tahun 2010-2017	II -133
Tabel 2.111	Aplikasi Fungsional yang Digunakan Oleh Perangkat Daerah Pada Tahun 2017	II -135
Tabel 2.112	Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai	II -136
Tabel 2.113	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2010-2017	II -137
Tabel 2.114	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2011-2015	II -137
Tabel 2.115	Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2015-2017	II -138
Tabel 2.116	Rekapitulasi Perkembangan UMKM Kota Dumai Tahun 2016 dan 2017	II -138
Tabel 2.117	Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai	II -139
Tabel 2.118	Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Dumai 2012-2017	II -140
Tabel 2.119	Persentase Nilai Realisasi PMDN dan PMA Kota Dumai	II -141
Tabel 2.120	Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai	II -141
Tabel 2.121	Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai	II -142
Tabel 2.122	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2010-2017	II -142
Tabel 2.123	Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai	II -143
Tabel 2.124	Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -143
Tabel 2.125	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai	II -144
Tabel 2.126	Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk	II -145
Tabel 2.127	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Tahun 2010-2017	II -146
Tabel 2.128	Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2012-2017	II -147
Tabel 2.129	Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Dumai	II -147
Tabel 2.130	Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok	II -149
Tabel 2.131	Rekapitulasi Kelompok Tani yang Telah Dibina	II -149
Tabel 2.132	Luas Areal Perkebunan (Ha) Menurut Jenis Tanaman per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017	II -150
Tabel 2.133	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Dumai Tahun 2010-2016 (%)	II -151
Tabel 2.134	Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai	II -151
Tabel 2.135	Produksi Perikanan Budidaya (Kg) di Kota Dumai	II -153
Tabel 2.136	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2010-2016	II -154
Tabel 2.137	Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai Sumber: Dumai Dalam Angka	II-154
Tabel 2.138	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2010-2016	II -155
Tabel 2.139	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2011-2016	II -155
Tabel 2.140	Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai	II -155
Tabel 2.141	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016-2018	II -161
Tabel 2.142	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Belanja Pendidikan, dan Belanja Kesehatan Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -162
Tabel 2.143	Jumlah ASN Kota Dumai Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Tahun 2010-2017	II-164
Tabel 2.144	Jumlah ASN Kota Dumai Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2010-2017	II-164
Tabel 2.145	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) Kota Dumai Tahun 2010-2017	II-166
Tabel 2.146	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Dumai	II-166
Tabel 2.147	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai	II-167
Tabel 2.148	Jumlah Orang dan Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2011-2016	II-168
Tabel 2.149	Banyaknya Hotel di Kota Dumai	II-170
Tabel 2.150	Angka Kriminalitas di Kota Dumai 2010-2017	II-171

Tabel 2.151	Lama Proses Perijinan di Kota Dumai	II-171
Tabel 2.152	Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai	II-173
Tabel 2.153	Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2011-2017	II-177
Tabel 2.154	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai	II-178
Tabel 2.155	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Dumai	II-178
Tabel 2.156	Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun	II-203
Tabel 2.157	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	II-206
Tabel 2.158	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	II-207
Tabel 2.159	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia	II-206
Tabel 2.160	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan	II-206
Tabel 2.161	Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi	II-203
Tabel 2.162	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi	II-203
Tabel 2.163	Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara	II-212
Tabel 2.164	Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	II-213
Tabel 2.165	Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan	II-213
BAB. III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH		
Tabel 3.1	Perkembangan PDRB Kota Dumai Tahun 2011-2016.....	III – 8
Tabel 3.2	Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2010 - 2016.....	III – 9
Tabel 3.3	Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2016.....	III - 10
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan serta Proyeksi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2016 s.d 2020.....	III - 22
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2016 s.d 2020.....	III - 31
Tabel 3.6	Rekap Perbandingan Belanja Langsung Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir Renja OPD Kota Dumai Tahun 2019.....	III - 33
Tabel 3.7	Ringkasan program dan kegiatan Tahun 2019 berdasarkan prioritas pembangunan daerah tahun 2019.....	III - 36
Tabel 3.8	Rekap Perbandingan usulan belanja pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus T.A 2019.....	III - 40
Tabel 3.9	Lampiran rekapitulasi usulan DAK Kota Dumai tahun 2019.....	III - 40
Tabel 3.10	Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun 2016 – 2020.....	III - 50
BAB. IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019		
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	IV - 12
Tabel 4.2	Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang kota Dumai tahapan lima tahun ketiga (RPJMD 2016-2021) dari RPJPD kota Dumai Tahun 2005-2025.....	IV - 15
Tabel 4.3	Sasaran Daerah Provinsi Riau	IV - 20
Tabel 4.4	Perbandingan Prioritas Tahun 2018 dan 2019.....	IV - 24
Tabel 4.5	Prioritas, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Dumai Tahun 2019.....	IV - 25
Tabel 4.6	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat Tahun 2019 Kedalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2019.....	IV - 31
Tabel 4.7	Sinkronisasi Prioritas Provinsi Riau Tahun 2019 kedalam prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2019.....	IV - 32
Tabel 4.8	Sinkronisasi SPM Tahun 2019 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019.....	IV - 35
Tabel 4.9	Sinkronisasi bidang pengembangan utama SDGs kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2019.....	IV - 37
BAB. V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2019		
Tabel 5.1	Matrik Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program Tahun 2019.....	V – 2
BAB. VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2019.....	VI - 2
Tabel 6.2	Keterkaitan Antara Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai.....	VI - 8
Tabel 6.3	Indikator Kinerja Utama Terwujudnya masyarakat Dumai yang Makmur dan Madani pada Tahun 2021.....	VI - 12

DAFTAR GAMBAR

BAB. I PENDAHULUAN

Gambar 1. 1	Diagram Alir Penyusunan RKP.....	I -7
Gambar 1. 2	Gambar RPJMD Dengan RKP.....	I -8
Gambar 1. 3	Skedul Perencanaan dan Penganggaran Tahunan.....	I -9

BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambar 2.1	Peta Kota Dumai.....	II -2
Gambar 2.2	Diagram Pie kemiringan Lereng Kota Dumai.....	II -3
Gambar 2.3	Piramida penduduk Kota Dumai Tahun 2016.....	II -10
Gambar 2.4	Peta Rawan Bencana Banjir Kota Dumai	II -13
Gambar 2.5	Struktur prekonomian sektoral kota dumai tahun 2012-2016	II -20
Gambar 2.6	Struktur Perekonomian Regional Antar Kabupaten/Kota Se- Riau Tahun 2010-2016	II -22
Gambar 2.7	Struktur Perekonomian Sektoral Kota Dumai Tahun 2012-2016 (%)	II -21
Gambar 2.8	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012-2016 Kota Dumai terhadap Provinsi Riau	II -23
Gambar 2.9	PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai vs Provinsi Riau Tahun 2011-2016	II -24
Gambar 2.10	Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2011-2016	II -28
Gambar 2.11	Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2010-2016 Kota Dumai dan Provinsi Riau	II -28
Gambar 2.12	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2010-2016 Kota Dumai dan Provinsi Riau	II -29
Gambar 2.13	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -30
Gambar 2.14	Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2009-2016	II -31
Gambar 2.15	Perkembangan Inflasi/Deflasi Tahun 2016 Kota Dumai vs Provinsi Riau	II -33
Gambar 2.16	Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2010-2016	II -37
Gambar 2.17	Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2011-2017	II -38
Gambar 2.18	Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2016	II -39
Gambar 2.19	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -43
Gambar 2.20	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -44
Gambar 2.21	Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -45
Gambar 2.22	Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -46
Gambar 2.23	Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -48
Gambar 2.24	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -49
Gambar 2.25	Perkembangan Rasio Guru per Siswa SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -61
Gambar 2.26	Grafk Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/MA/SMK di Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -62
Gambar 2.27	Perkembangan Rasio Guru per Siswa Tingkat SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -63
Gambar 2.28	Persentase Ruang Kelas SD/MI di Kota Dumai Dengan Kondisi Baik Tahun 2015-2017	II -64
Gambar 2.29	Persentase Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Dengan Kondisi Baik Tahun 2015-2017	II -65
Gambar 2.30	Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2011-2017	II -66
Gambar 2.31	Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2011-2017	II -68
Gambar 2.32	Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2010-2017	II -69
Gambar 2.33	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2010-2017	II -70
Gambar 2.34	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Dumai	II -71
Gambar 2.35	Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -73
Gambar 2.36	Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -74
Gambar 2.37	Rasio Tenaga Medis per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2012-201	II -75

Gambar 2.38	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai	II -78
Gambar 2.39	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	II -81
Gambar 2.40	Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+ Kota Dumai Tahun 2014-2017	II -82
Gambar 2.41	Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai	II -83
Gambar 2.42	Perbandingan Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dengan Panjang Jalan Seluruhnya (KM) di Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -90
Gambar 2.43	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -92
Gambar 2.44	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai	II -93
Gambar 2.45	Panjang Jalan Yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -95
Gambar 2.46	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB di Kota Dumai	II -95
Gambar 2.47	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Air Minum di Kota Dumai Tahun 2010-2016	II -96
Gambar 2.48	Jumlah Pelanggan Kota Dumai	II -97
Gambar 2.49	Jumlah Kawasan Kumuh	II -99
Gambar 2.50	Rumah Layak Huni	II -99
Gambar 2.51	Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin	II -100
Gambar 2.52	Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja dan Pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja	II -111
Gambar 2.53	Jumlah Ahli Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2011 – 2017	II -113
Gambar 2.54	Jumlah Perpustakaan di Kota Dumai Tahun 2010-2017	II -145
Gambar 2.55	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	II -146
Gambar 2.56	Rasio Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya	II -148
Gambar 2.57	Perkembangan Produksi Perikanan Laut di Kota Dumai	II -152
Gambar 2.58	Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya di Kota Dumai	II -153
Gambar 2.59	Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan (Unit/Km) di Kota Dumai	II -168
Gambar 2.60	Fokus <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's).....	II -201
BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019		
Gambar 4.1	Prioritas Pemerintah Pusat Tahun 2019	IV- 22



BAB I PENDAHULUAN

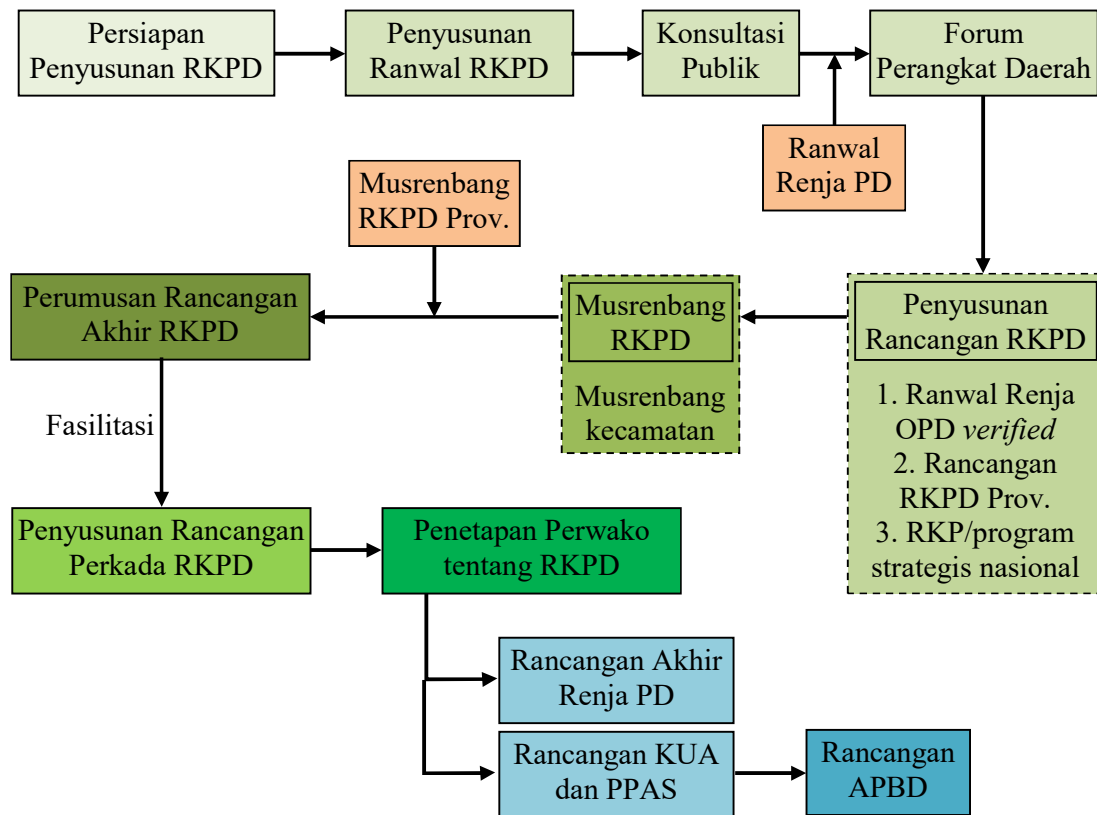
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen yang dimaksud adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2019 dilakukan melalui berbagai tahapan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Diagram Alir Penyusunan RKPDP
Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan Kota Dumai tahun 2019 yang merupakan penjabaran Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 tahun ke-3. Penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2019 ini sudah mengacu kepada dua peraturan pokok yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Rancangan awal RKPD Kota Dumai Tahun 2019 disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021, rancangan awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2019, RKP Tahun 2019, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Walikota akan dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sekaligus sebagai pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan KUA dan PPAS tersebut akan disampaikan Walikota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2019 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik, dan kerangka berfikir ilmiah digunakan untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para dengan pemangku kepentingan. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Dumai antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Provinsi. Sedangkan proses *top-down* antara lain diimplementasikan dalam bentuk Program *Dedicated* yaitu perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal serta pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencanaan hingga proses evaluasi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019;
24. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025;

25. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Dumai;
27. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
28. Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

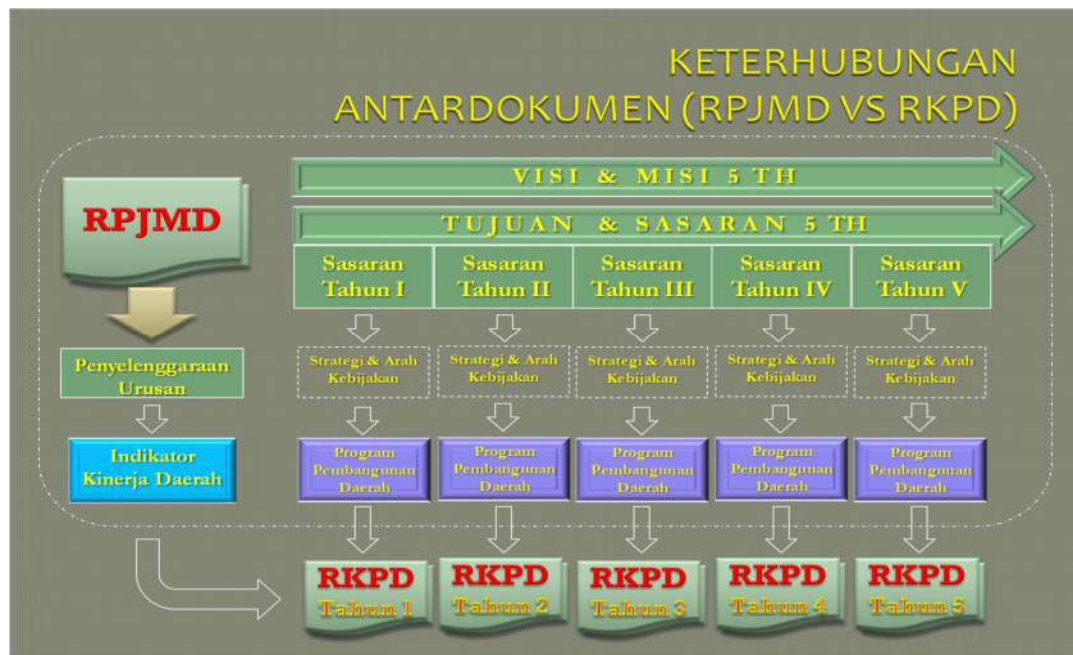
Rancangan RKPD Kota Dumai Tahun 2019 disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021, rancangan awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2019, RKP Tahun 2019 dan program strategis nasional dengan tujuan terciptanya perencanaan yang selaras dan sinergi antar daerah-provinsi-pusat, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Adapun hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan tersebut dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2019 dengan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

RKPD Kota Dumai Tahun 2019 merupakan penjabaran rencana pembangunan tahun ketiga pada perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021. Rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2019 telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang tertuang di dalam perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021. Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kota Dumai tahun ketiga (2019) yang tertuang di dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 adalah

Mengembangkan instrumen pendukung yang kondusif bagi terwujudnya masyarakat Kota Dumai makmur dan madani yang didukung oleh masyarakat yang kompetitif, kreatif serta penguatan investasi dan pasar untuk mendukung perekonomian masyarakat. Kebijakan umum tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara teknis akan diwujudkan melalui program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian visi Kota Dumai. Secara rinci sasaran dan 8 prioritas pembangunan Kota Dumai tahun 2019 dapat dilihat pada Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2019. Sedangkan program-program yang direncanakan untuk mencapai prioritas pembangunan tahun 2019 dapat dilihat secara rinci pada Bab V RKPD Kota Dumai Tahun 2019.



Gambar 1.2. Hubungan RPJMD Dengan RKPDP
 Sumber : Diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017

Tabel 1.1. Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2019
Sumber: RKPD Provinsi Riau Tahun 2019

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
1. Penurunan Tingkat Kemiskinan	Penanganan Rumah Tangga yang termasuk dalam Desil 1 dan Desil 2	Penyediaan kebutuhan dasar rumah tangga berupa pangan, jaminan kesehatan, perumahan dan biaya pendidikan	- Program Pendidikan Menengah; - Program Bantuan Operasional Sekolah; - Program Pembiayaan Kesehatan; - Program Pengembangan Perubahan; - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Penanganan Rumah Tangga yang termasuk dalam Desil 3	Penyediaan, pendampingan dan bimbingan usaha masyarakat melalui bantuan ternak, perikanan, sarana prasarana pertanian dan perhutanan sosial	- Program Penyehatan Lingkungan - Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan - Program peningkatan Kesejahteraan petani - Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
	Penanganan Rumah Tangga yang termasuk Desil 4	Peningkatan usaha masyarakat melalui bantuan alat dan mesin dan fasilitasi akses modal	- Program Peningkatan Kesempatan Kerja - Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
	Pembangunan infrastruktur pada daerah kantong kemiskinan	Pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan listrik, air bersih, sarana prasarana pendidikan dan sarana prasarana kesehatan	- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program Pengelolaan dan Penyediaan Air Minum
	Peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pada daerah kantong kemiskinan	Pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui koperasi dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM - Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
2. Menumbuh kembangkan Industri Manufaktur	Meningkatkan dan memantapkan jaringan	Pembangunan jalan dan jembatan menuju kawasan industry dan IKM	- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
	infrastruktur pada kawasan industri dan IKM	Penyediaan listrik, air bersih, sarana prasarana pendukung lainnya	Jembatan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk mendukung kawasan dan pengelolaan IKM	Pemenuhan sarana dan prasarana SMK, Penyediaan bantuan alat dan mesin dan meningkatkan dan optimalisasi peran Balai Latihan Kerja untuk industry	Program Pendidikan Menengah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Peningkatan akses masyarakat terhadap determinan kemiskinan	Memberikan kemudahan akses pendidikan dan kesempatan kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
	Peningkatan daya saing perekonomian dan meningkatkan iklim usaha investasi yang kondusif	Meningkatkan dan optimalisasi peran Balai Latihan Kerja dan fasilitasi bantuan akses permodalan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
	3. Meningkatkan Produktivitas Pertanian	Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan	Penyediaan bantuan sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan perhutanan sosial
		Hilirisasi Produk-produk pertanian dan Penanganan Pasca Panen Produk Pertanian	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
		Pembangunan dan Perbaikan Jaringan Irigasi Tanaman Pangan dan Pembangunan dan Perbaikan tata air mikro tana,an perkebunan dan kehutanan	Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
4. Pengembangan Pariwisata dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya	Penguatan jaringan infrastruktur pada destinasi wisata	Pembangunan jalan dan jembatan pada destinasi wisata Penyediaan listrik, air bersih, pembangunan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Perencanaan dan Pengembangan Bidang

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
		pasar pariwisata dan sarana prasarana pendukung lainnya	Ketenagalistrikan
	Peningkatan sumberdaya manusia pada destinasi dan event-event pariwisata	Pembangunan sekolah di sekitar daerah pariwisata Pendidikan dan pelatihan tenaga kepariwisataan dan pembinaan masyarakat sadar pariwisata	Program Pendidikan Menengah Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pariwisata
	Peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada destinasi dan event-event pariwisata	Pembangunan sarana prasarana kesehatan sekitar daerah pariwisata dan penyediaan sarana prasarana kesehatan sekitar daerah pariwisata	
	Peningkatan dan penerapan nilai Budaya Melayu dan keagamaan	Meng HAKI kan 300 karya seni Penerapan kurikulum muatan lokal budaya melayu Fasilitasi pertunjukan karya seni budaya melayu di destinasi dan event pariwisata	Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya - Program Pengelolaan Keragaman Budaya - Program pengembangan Destinasi Pariwisata - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan wilayah pesisir dan laut serta kepariwisataan	Pembangunan sarana dan prasana usaha ekonomi masyarakat di sekitar destinasi pariwisata Pembangunan sarana dan prasarana wisata alam mangrove, hutan lindung, wisata pantai dan hutan raya dan kota	- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Seni Budaya - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK - Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan - Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
5. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Perbatasan	Memperkuat dan memantapkan jaringan infrastruktur di	Pembangunan jaan dan jembatan di wilayah pesisir dan perbatasan,	- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas
	wilayah pesisir dan perbatasan	Penyediaan listrik, air bersih, dan sarana prasarana pendukung lainnya	- Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan - Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum
		Pemenuhan dermaga di wilayah pesisir	- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum
	Peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat di wilayah pesisir dan perbatasan	Pembangunan dan penyediaan sarana prasarana kesehatan di wilayah pesisir dan perbatasan	- Program pengembangan dan pendayagunaan Sumberdaya Kesehatan
	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di wilayah pesisir dan perbatasan	Pembangunan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan di wilayah pesisir dan perbatasan	Program Pendidikan Menengah
		Pemenuhan tenaga pendidik di daerah pesisir dan perbatasan	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
	Meningkatkan akses terhadap determinan kemiskinan di wilayah pesisir dan perbatasan	Penyediaan bantuan pembudidayaan perikanan laut di wilayah pesisir dan perbatasan	- Program Pengembangan Budidaya Perikanan - Program pengembangan Perikanan Tangkap
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan wilayah pesisir dan laut serta pariwisata	Pembangunan sarana dan prasarana serta pengelolaan wisata pantai dan wisata alam mangrove	- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam - Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan - Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Secara umum sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2019 telah memperhatikan sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang telah tertuang di dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2019.

3. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2019 dengan RKP Tahun 2019 dan Program Strategis Nasional.

Penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2019 berpedoman pada Program Strategis Nasional dan RKP Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan tahun kelima pada RPJMN 2015-2019. RKP Tahun 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019. Tema RKP Tahun 2019 adalah “ **Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas** ”. Untuk pencapaian tema yang telah ditetapkan, maka prioritas nasional serta program prioritas untuk masing-masing prioritas tersebut pada RKP Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, dengan program prioritas:
 - i. Percepatan pengurangan kemiskinan;
 - ii. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat;
 - iii. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - iv. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak; dan
 - v. Peningkatan tata kelola layanan dasar.
- 2) Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, dengan program prioritas:
 - i. Peningkatan konektivitas dan TIK;
 - ii. Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat;
 - iii. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa;

- iv. Penanggulangan bencana; dan
 - v. Peningkatan sistem logistik.
- 3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif lainnya, dengan program prioritas:
- i. Peningkatan ekspor dan nilai tambah produk pertanian;
 - ii. Percepatan peningkatan ekspor dan nilai tambah industri pengolahan;
 - iii. Peningkatan nilai tambah jasa produktif;
 - iv. Percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja; dan
 - v. Pengembangan Iptek dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas.
- 4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air, dengan program prioritas:
- i. Peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi;
 - ii. Peningkatan produksi, akses dan kualitas konsumsi pangan;
 - iii. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air; dan
 - iv. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan.
- 5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu, dengan program prioritas:
- i. Kantibmas dan keamanan siber;
 - ii. Kesuksesan Pemilihan Umum;
 - iii. Pertahanan wilayah nasional;
 - iv. Kepastian hukum dan reformasi birokrasi; dan
 - v. Efektivitas diplomasi.

Secara umum prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2019 telah mempedomani dan memperhatikan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang tertuang di dalam perubahan RKP Tahun 2019 dan program strategis nasional (untuk lebih jelas akan

dijelaskan pada Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019).

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPA Sementara yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Walikota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya RKPD ini akan dijabarkan dalam RKA Perangkat Daerah sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2019 adalah:

1. Terwujudnya program pembangunan Pemerintah Kota Dumai yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2021;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta
5. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan:

1. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis

- jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2019 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
 3. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2019;
 4. Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Dumai, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
 5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2019, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2019, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2019 dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi Riau.

Maksud dan Tujuan

1.4 Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2019.

Sistematika Dokumen RKPD

1.5 Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan di bawah ini:

Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Meyajikan kondisi umum geografis Kota Dumai, diantaranya: kondisi geografi Kota Dumai, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2 Menyajikan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

Aspek Pelayanan Umum

2.1.3 Menyajikan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4 Menyajikan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitasi wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun 2017 dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Mencantumkan tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dengan format Tabel T-C.19.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.
Menyajikan rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Menyajikan permasalahan prioritas daerah yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. \sub subbab ini menjelaskan apa yang menjadi masalah di masa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Dumai.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh

3.2 Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Menjelaskan gambaran prioritas pembangunan tahun 2019 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2019.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Dumai merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang mempunyai luas wilayah 1.727,38 km². Kota Dumai memiliki 7 (Tujuh) kecamatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) kelurahan. Batas wilayah administratif Kota Dumai adalah sebagai berikut :

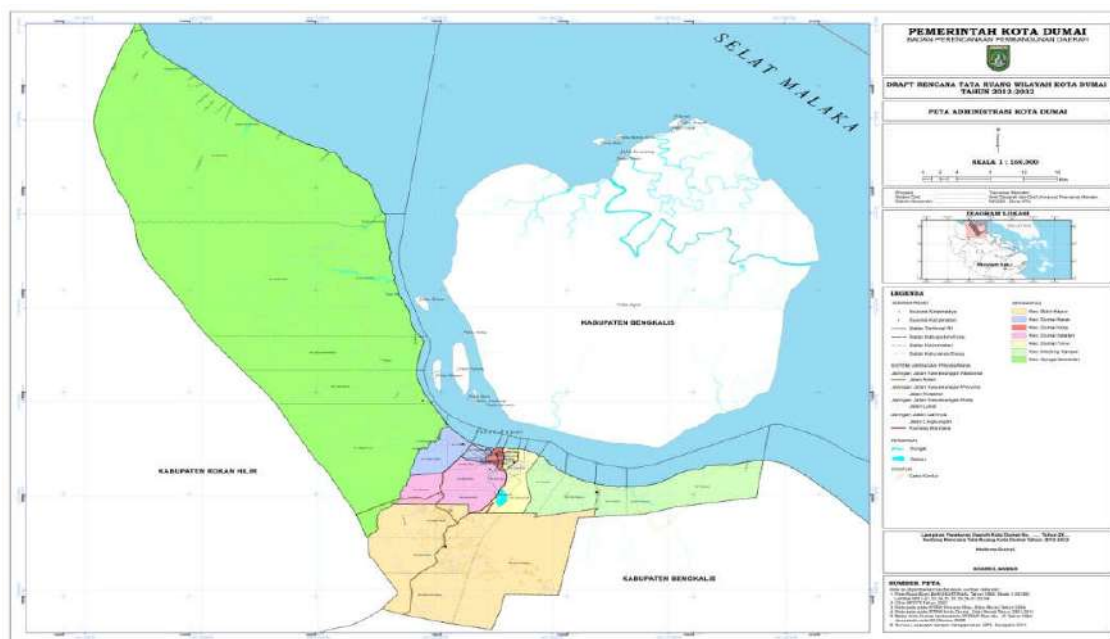
- Utara : Selat Rupat, Kabupaten Bengkalis.
- Timur : Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
- Selatan : Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
- Barat : Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Dumai merupakan kabupaten/kota di Provinsi Riau yang terletak di pesisir Pulau Sumatera yang berhadapan dengan Selat Malaka yang merupakan jalur transportasi perdagangan yang strategis. Ditinjau dari letak geografis, Kota Dumai terletak antara 101°23'37" -101°28'13" Bujur Timur dan 1°23'23" - 1°24'23" Lintang Utara dengan luas wilayah 1.727,38 km².

Kota Dumai memiliki 15 sungai besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah Kota Dumai dengan total panjang keseluruhannya sepanjang 222 km, yang bermuara ke Selat Rupat dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan. Berikut gambar 2.1 Peta Kota Dumai.

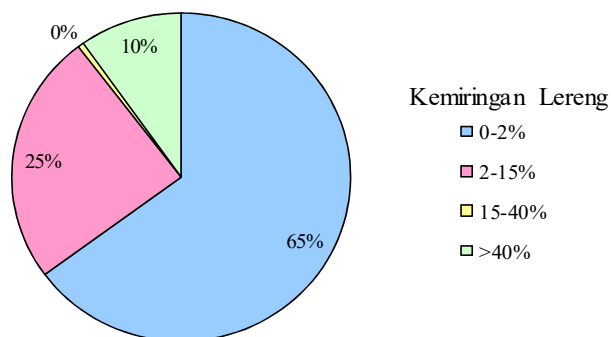
Gambar 2.1 Peta Kota Dumai



c. Topografi

Jika dilihat dari segi topografi, Kota Dumai termasuk ke dalam kategori daerah yang datar dengan kemiringan lereng $0 < 3\%$, di mana sebelah utara Kota Dumai umumnya merupakan dataran yang landai dan ke selatan semakin bergelombang. Kota Dumai berada pada ketinggian antara 1–50 meter di atas permukaan laut, dan secara morfologis sebagian besar atau sekitar 41.032 Ha (64,90%) merupakan daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0-2%, sekitar 15.642 Ha (24,71%) merupakan daerah yang landai sampai berombak memiliki kemiringan lereng 2-15%, dan sekitar 364 Ha (0,58%) merupakan daerah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 15-40% serta sekitar 6.200 Ha (9,81%) merupakan daerah berbukit memiliki kemiringan lereng $>40\%$, yang terletak di bagian Selatan Kota Dumai yaitu Kelurahan Bukit Timah dan Bukit Datuk di Kecamatan Dumai Barat, Kelurahan Bukit Batrem di Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan Bukit Nenas, Bukit Kayu Kapur di Kecamatan Bukit Kapur. Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 2.2

Gambar 2.2 Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai



d. Geologi

Kota Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan. Formasi geologi Kota Dumai sebagian besar terbentuk dari formasi Alluvium Muda dan Alluvium Tua yang berawa-rawa di wilayah pesisir Kota Dumai. Struktur geologi di Kota Dumai sebagian besar terbentuk dari endapan kuartar yang membentuk lahan bergambut.

Pada umumnya struktur tanah di Kota Dumai terdiri dari jenis Podsolid Merah Kuning dari batuan endapan dan jenis alluvial di kawasan yang relatif tinggi (bagian Selatan Kota Dumai), serta tanah jenis organosol (tanah bergambut) dan gley hamus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah di wilayah pesisir Kota Dumai. Karakter negatif lahan gambut ini memiliki bahan organik yang tinggi, volume udara tanah yang besar dan mudah menyerap air sehingga akan mengurangi daya tekan dan daya beban.

Kemampuan lahan di Wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Terdapat dua kelompok atau golongan tanah, yaitu Typic Tropaquepts atau Fluvisol Gleik dan Hydric Trophemis atau Humic Histosol. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut, yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai ini. Dilihat secara topografi, Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0–3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Hal ini mengindikasikan bahwa

dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat-tempat tertentu sering terjadi banjir terutama pada air laut sedang pasang.

e. Hidrologi

Wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai. Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor), pada umumnya kurang baik. Sebagian lagi, tepatnya di wilayah yang tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai.

Di Kota Dumai terdapat 51 sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai seperti yang tersaji pada Tabel 2.1 Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai.

Tabel 2.1 Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai

No	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Bukit Kapur	-
2.	Medang Kampai	1. Sungai Puak 2. Sungai Kemeli Kecil 3. Sungai Pelintung 4. Sungai Kemeli 5. Sungai Beruang 6. Sungai Selinsing 7. Sungai Guntung

No	Kecamatan	Nama Sungai
3.	Sungai Sembilan	1. Sungai Nyirih 2. Sungai Siput 3. Sungai Bunian 4. Sungai Sepit 5. Sungai Perpat 6. Sungai Parit 7. Sungai Sepi 8. Sungai Tiram 9. Sungai Pauh 10. Sungai Bakau Tua 11. Sungai Teluk Dalam 12. Sungai Teluk Kijuk 13. Sungai Tengar Besar 14. Sungai Tengar Kecil 15. Sungai Tawar Kecil 16. Sungai Tawar Besar 17. Sungai Sempit Kecil 18. Sungai Sempit Besar 19. Sungai Tembuan 20. Sungai Tianjung 21. Sungai Santahalu 22. Sungai Penempul 23. Sungai Geniot 24. Sungai Geniot Kecil 25. Sungai Buluhala 26. Sungai Teras 27. Sungai Penyengat 28. Sungai Ilir 29. Sungai Danau 30. Sungai Hulu 31. Sungai Sembilan 32. Sungai Mampu 33. Sungai Mampu Kecil 34. Sungai Nerbit Kecil 35. Sungai Nerbit Besar 36. Sungai Paul 37. Sungai Mesjid 38. Sungai Banain 39. Sungai Saliyo 40. Sungai Bulu Ala 41. Sungai Tambuan 42. Sungai Teritib 43. Sungai Selat Mati
4.	Dumai Barat	Sungai Mesjid
5.	Dumai Selatan	-
6.	Dumai Timur	Sungai Dumai
7.	Dumai Kota	-

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2017

f. Klimatologi

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut yaitu iklim tropis basah dengan kelembaban udara rata-rata di tahun 2016 berkisar antara 75-83%. Sedangkan suhu udara pada tahun 2016 berkisar antara 21°C-36,8°C. Terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan terbanyak selama tahun 2016 terjadi pada bulan Mei sedangkan terkecil terjadi pada bulan Februari dengan nilai berturut-turut sebesar 358,3 mm³ dan 59,3 mm³. Sementara itu jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November yaitu sebanyak 21 hari dan terkecil pada bulan Maret dan Agustus yaitu sebanyak 9 hari. Berikut Tabel 2.2 dan 2.3. Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2016. Dan Banyaknya Curah Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2016. Kondisi klimatologi seperti ini sangat mendukung pengembangan perumahan maupun kegiatan pertanian, seperti persawahan, perkebunan, dan perikanan.

Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2016

Bulan	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016
Januari	15	19	13	13	13	13	16
Februari	12	6	11	11	11	11	11
Maret	12	15	11	11	11	11	9
April	13	16	11	11	11	11	17
Mei	17	5	14	14	14	14	15
Juni	13	9	7	7	7	7	15
Juli	17	9	14	14	14	14	13
Agustus	13	8	18	18	18	18	9
September	tad	15	7	7	7	7	13
Oktober	tad	22	17	17	17	17	15
Nopember	tad	26	21	21	21	21	21
Desember	tad	14	24	24	24	24	20
	112	164	168	168	168	168	174

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka

Tabel 2.3 Banyaknya Curah Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2016

Bulan	Curah Hujan (mm ³)						
	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016
Januari	144,0	182,3	130,0	130,0	200,0	200,0	121,6
Februari	58,0	29,3	132,0	132,0	150,0	150,0	59,3
Maret	329,0	45,0	198,0	198,0	201,0	201,0	94,0
April	207,0	403,4	261,0	261,0	226,0	226,0	194,2
Mei	330,0	23,3	157,0	157,0	190,0	190,0	358,3
Juni	331,0	77,4	49,0	49,0	160,0	160,0	64,6
Juli	425,0	162,1	203,0	203,0	160,0	160,0	122,4
Agustus	188,0	167,1	499,0	499,0	200,0	200,0	79,7
September	Tad	356,3	153,0	153,0	257,0	257,0	171,7
Oktober	Tad	260,8	121,0	121,0	290,0	290,0	82,3
Nopember	Tad	311,3	313,0	313,0	299,0	299,0	318,0
Desember	Tad	230,8	368,0	368,0	258,0	258,0	166,5
	2.012,0	2.249,1	2.584,0	2.584,0	2.591,0	2.591,0	1.832,6

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka

g. Demografi

1. Kependudukan

Laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai menunjukkan penurunan selama periode 2002-2016. Dalam kurun waktu tersebut laju pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 laju pertumbuhan penduduknya cenderung stagnan dengan besar pertumbuhan penduduk sebesar 4,83%. Mulai tahun 2005 sampai tahun 2008 terus mengalami penurunan dengan besaran pertumbuhan di tahun 2008 sebesar 2,45%. Namun di tahun 2008 dan 2009 pertumbuhan penduduk Kota Dumai kembali mengalami peningkatan menjadi 4,08%. Kemudian mengalami penurunan yang sangat tajam di tahun 2010 dengan

pertumbuhan sebesar 1,37%, namun pertumbuhannya kembali mengalami peningkatan di tahun 2011 dan 2012. Mulai tahun 2013 sampai tahun 2016 jumlah penduduk Kota Dumai tidak mengalami pertumbuhan, atau dengan kata lain pertumbuhan penduduknya terus mengalami penurunan dengan total pertumbuhan di tahun 2016 sebesar 2,08%. Selama periode 2002-2016, laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 5,74%, sedangkan laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2010 dengan angka pertumbuhan sebesar 1,37%. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai tahun 2002-2016 adalah sebesar 3,55%. Selain kematian penduduk, kegiatan transmigrasi dan banyaknya minat menjadi tenaga kerja ke luar daerah maupun luar negeri menjadi salah satu indikator berkurangnya jumlah penduduk di beberapa kecamatan. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Dumai Tahun 2002-2016 dapat dilihat pada table 2.4.

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Dumai Tahun 2002-2016

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2002	99.514	92.476	191.990	4,83
2003	106.696	94.567	201.263	4,83
2004	111.851	99.133	210.984	4,83
2005	112.924	106.427	219.351	3,97
2006	112.958	112.291	225.249	2,69
2007	115.902	115.219	231.121	2,61
2008	121.739	118.814	240.553	4,08
2009	129.992	120.375	250.367	4,08
2010	131.465	122.338	253.803	1,37
2011	133.645	126.268	259.913	2,41
2012	137.715	130.307	268.022	3,12
2013	140.776	133.313	274.089	2,26
2014	143.900	136.209	280.109	2,20
2015	146.792	139.175	285.967	2,09
2016	149.791	142.117	291.908	2,08

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka

Jumlah penduduk paling banyak selama periode 2010-2016 terdapat di Kecamatan Dumai Timur dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Medang Kampai. Pertumbuhan penduduk tahunan rata-rata tertinggi selama periode 2010-2016 terjadi di Kecamatan Bukit Kapur yaitu sebesar 2,62%. Berikut ini tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan Rata-Rata Kota Dumai Selama Tahun 2010-2016.

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan Rata-Rata Kota Dumai Tahun 2010-2016 Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)							Pertumbuhan Penduduk tahunan rata-rata (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Bukit Kapur	38.051	40.133	42,082	45.933	42.399	43.403	44.447	2,62
Medang Kampai	10.199	10.611	10.983	11.235	11.240	11.470	11.701	2,32
Sungai Sembilan	27.465	28.767	29.920	32.065	30.475	31.158	31.860	2,50
Dumai Barat	35.785	37.423	38.871	38.068	39.688	40.572	41.479	2,49
Dumai Timur	54.854	56.946	58.793	60.482	60.450	61.685	62.932	2,32
Dumai Kota	41.504	41.887	42.122	41.815	45.264	46.063	46.844	2,04
Dumai Selatan	45.945	47.209	48.752	50.429	50.593	51.616	52.645	2,29
Kota Dumai	253.803	262.976	271.523	280.027	280.199	285.967	291.908	2,36

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka

2. Kepadatan dan Sebaran Penduduk

Tiga kecamatan di Kota Dumai dengan kepadatan penduduk paling tinggi berturut-turut adalah Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Barat, dan Kecamatan Dumai Timur. Kepadatan dan sebaran penduduk yang tinggi di ketiga kecamatan tersebut disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan luas wilayahnya didominasi oleh guna lahan terbangun sehingga terjadi pemusatan pemukiman dan kegiatan perkotaan lainnya. Kegiatan perdagangan, jasa dan pelabuhan laut Dumai (pelabuhan ekspor dan penumpang yang cukup ramai) yang terfokus pada tiga wilayah Kecamatan yaitu Dumai Kota, Dumai Timur dan Dumai Barat, memberikan andil yang cukup besar terhadap konsentrasi penduduk Kota Dumai.

Sampai dengan tahun 2016, jumlah penduduk di Kota Dumai mencapai 291.908 jiwa, dengan jumlah penduduk paling banyak ada di Kecamatan Dumai Timur yaitu sebanyak 62.932 jiwa. Jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya, maka kepadatan penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Dumai Kota yaitu sebesar 3.603 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah berada di Kecamatan Medang Kampai dan Sungai Sembilan berturut-turut sebesar 31 dan 33 jiwa/km². Kedua kecamatan tersebut merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Kapur pada tahun 2001. Berikut ini tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2010-2016.

Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2010-2016

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bukit Kapur	200,00	190	201	210	230	212	217	222
Medang Kampai	373,00	27	28	29	30	30	31	31
Sungai Sembilan	975,38	28	29	31	33	31	32	33
Dumai Barat	44,98	796	832	864	846	882	902	922
Dumai Timur	47,52	1.154	1.198	1.237	1.273	1.272	1.298	1.324
Dumai Kota	13,00	3.193	3.222	3.240	3.217	3.482	3.543	3.603
Dumai Selatan	73,50	625	642	663	686	688	702	716
Kota Dumai	1.727,38	147	152	157	157	162	165	169

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka

3. Struktur Penduduk

a. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan (*sex ratio*) di Kota Dumai pada tahun 2003 sebesar 112,83, artinya setiap 100 penduduk perempuan di Kota Dumai terdapat 112 penduduk laki-laki. Seluruh Kecamatan di Kota Dumai memiliki *sex ratio* > 100, artinya seluruh kecamatan di Kota Dumai jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak daripada perempuan.

Tabel 2.7 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Dumai Tahun 2002-2016

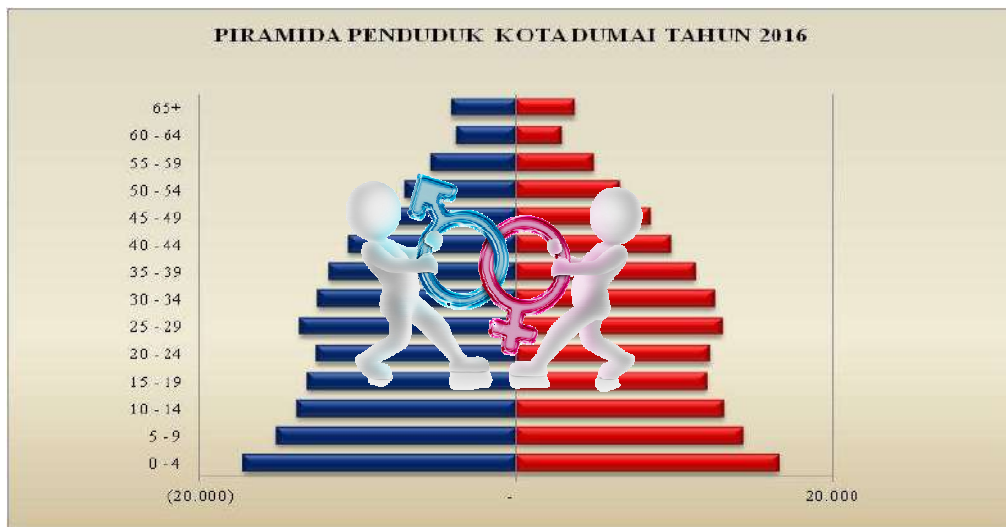
TAHUN Year	P E N D U D U K Population			SEX RATIO Sex Ratio
	LAKI-LAKI Male	PEREMPUAN Female	LAKI-LAKI + PEREMPUAN Male + Female	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2002	99.514	92.476	191.990	108
2003	106.696	94.567	201.263	113
2004	111.851	99.133	210.984	113
2005	112.924	106.427	219.351	106
2006	112.958	112.291	225.249	101
2007	115.902	115.219	231.121	101
2008	121.739	118.814	240.553	102
2009	129.992	120.375	250.367	108
2010	131.465	122.338	253.803	107
2011	133.645	126.268	259.913	106
2012	137.715	130.307	268.022	106
2013	140.776	133.313	274.089	106
2014	143.900	136.209	280.109	106
2015	146.792	139.175	285.967	105
2016	149.791	142.117	291.908	105

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka

b. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Komposisi penduduk menurut kelompok umur seperti yang terlihat pada gambar 2.3 di bawah ini yang menunjukkan bahwa Kota Dumai dikategorikan sebagai penduduk muda. Hal tersebut dikarenakan oleh presentase penduduk muda terhadap total penduduk masih cukup besar.

Penduduk usia produktif yang banyak merupakan potensi sumberdaya manusia suatu wilayah. Jika dilihat secara demografis struktur penduduk Kota Dumai memiliki potensi untuk pengembangan wilayah. Pada tahun 2016 sebanyak 66,36% penduduk termasuk dalam kategori penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun), sedangkan 33,64% lagi merupakan penduduk usia tidak produktif. Hal ini berarti angka beban tanggungan penduduk Kota Dumai sebesar 51 artinya tiap 100 orang penduduk produktif harus menanggung 51 orang penduduk tidak produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Berikut ini gambar 2.3 Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2016.



Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2016
Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2017

Komposisi penduduk menurut kelompok umur memperlihatkan bahwa penduduk usia produktif lebih banyak menanggung anak-anak yang belum aktif secara ekonomi. Apabila dicermati lebih lanjut, 11,61% penduduk Kota Dumai merupakan balita, 10,12% merupakan penduduk usia 5-9 tahun, dan 2,69% merupakan penduduk usia >65 tahun. Kondisi ini menuntut perhatian Pemerintah Kota dalam penanganan penduduk balita dan usia 5-9 tahun terutama dari segi kesehatan dan asupan gizi serta pelayanan pendidikan dasar.

h. Wilayah Rawan Bencana

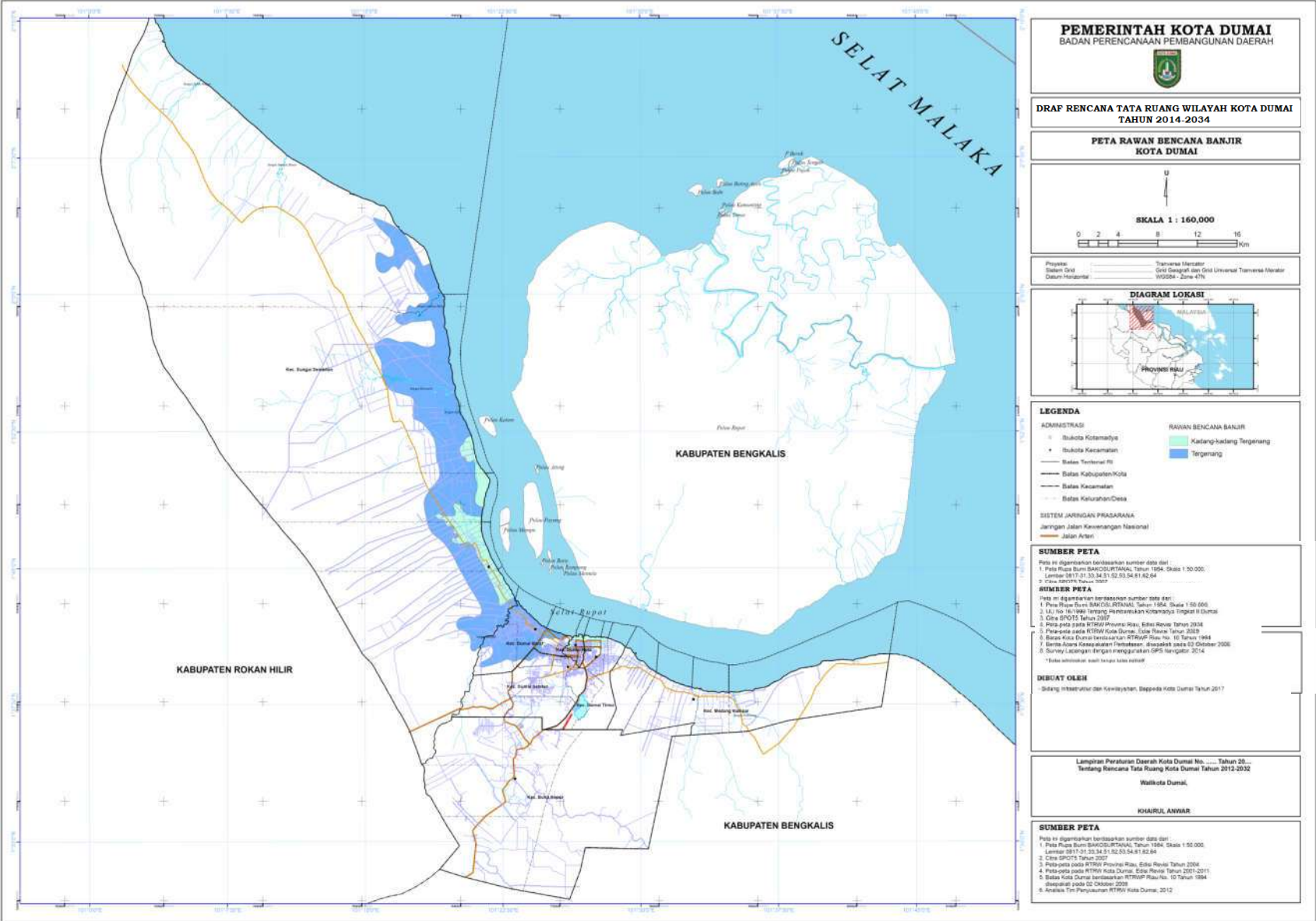
Potensi bencana yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya di Kota Dumai adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan ini selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian/perkebunan. Selain itu terdapat juga potensi angin puting beliung yang disebabkan tingginya potensi Edi Sirkulasi dimana dorongan kecepatan angin mencapai lebih dari 30 km/jam. Edi Sirkulasi yang menyebabkan kecepatan angin ini dikarenakan faktor masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan. Jika dilihat dari banyaknya kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan, maka selama periode 2013-2016 terjadi peningkatan kejadian bencana, dimana bencana kebakaran hutan dan lahan paling banyak terjadi pada tahun 2014 dan 2016 berturut-turut sebanyak 275 kejadian dan 259 kejadian. Berikut tabel 2.8 Banyaknya a Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai.

Tabel 2.8 Banyaknya Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai

Bulan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Januari				-	3	-	7
Februari				-	6	36	53
Maret				-	191	16	56
April				-	1	9	8
Mei				-	1	4	-
Juni				63	54	6	10
Juli		N/A		7	14	43	10
Agustus				-	1	2	83
September				-	3	11	14
Oktober				-	1	2	18
November				-	-	-	-
Desember				-	-	-	-
Jumlah Kejadian				70	275	129	259

Selain bencana kebakaran hutan dan lahan, masalah banjir hingga saat ini masih menjadi persoalan utama di kawasan pinggiran Kota Dumai. Ketika hujan dan pasang laut naik, kondisi pinggiran kota dan sebagian jalan di tengah kota memprihatinkan. Jika dilihat dari peta rawan bencana banjir, maka kecamatan yang memiliki rawan bencana banjir adalah Kecamatan Sungai Sembilan dan Dumai Barat. Hal itu disebabkan hampir sebagian besar daratan di Dumai merupakan lahan gambut, sehingga setiap hujan dan pasang, air selalu tertahan cukup lama. Berikut ini Gambar 2.4 Peta Rawan Bencana Banjir Yang Terjadi Di Kota Dumai.

Gambar 2.4 Peta Rawan Bencana Banjir Kota Dumai



i. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan kondisi geografis, Kota Dumai berada di pesisir pantai bagian timur Pulau Sumatera, terlindungi oleh Pulau Rupat, sehingga sangat strategis untuk berkembang menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan.

Berdasarkan kondisi topografinya yang relative datar, diperkirakan Kota Dumai dapat digunakan untuk pembangunan kota namun perkembangannya masih dibatasi oleh kendala-kendala pemanfaatan lahan karena hampir sebagian besar wilayah Kota Dumai merupakan dataran rendah. Selain untuk kawasan pembangunan kota, Kota Dumai juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan pertanian dan perkebunan karena lapisan tanah dominan yang terhampar di wilayah Kota Dumai merupakan lapisan tanah gambut dengan kedalaman 0-0,5 m. Apabila dilakukan pengamatan secara komprehensif dengan didasari karakteristik tanah gambut yang dimiliki dan elevasi wilayah rata-rata yang berkisar 2 meter di atas permukaan laut, maka pada hakekatnya kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan kondisi klimatologi, Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut (iklim tropis basah) dengan kelembaban udara rata-rata di tahun 2016 berkisar antara 75-83%. Kondisi klimatologi seperti ini sangat mendukung pengembangan perumahan maupun perikanan.

Berdasarkan kondisi geologi, umumnya struktur tanah di Kota Dumai terdiri dari tanah *Podsolik* merah kuning dari batuan endapan dan *Alluvial* serta tanah *Organosol* dan *Gley* humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Kemampuan lahan di wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0-3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Mengingat bahwa tanah gambut di wilayah kota Dumai ini memiliki rata-rata kedalaman 0,5 m

dan merujuk bahwa pada lapisan di bawah gambut ini adalah tanah dasar yang memiliki daya dukung yang cukup baik, maka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi/geoteknik yang sudah maju, kendala struktur tanah di kota Dumai ini tidaklah menjadi permasalahan penting dalam upaya membangun infrastruktur perkotaan. Persoalan penting yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya mengembangkan berbagai infrastruktur perkotaan adalah elevasi wilayah khususnya di bagian wilayah Dumai Kota, Dumai Barat dan Dumai Timur yang hanya berkisar 0-3 meter di atas permukaan laut, hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat dan waktu tertentu sering terjadi banjir terutama pada saat air laut sedang pasang. Terkait hal tersebut, maka diperlukan berbagai upaya khususnya dengan dukungan teknologi dan manajemen sumber daya kawasan yang memadai untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang berdimensi dan berskala besar.

Berdasarkan kondisi hidrologi, wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai kecuali pada sebagian wilayah yang lebih tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai. Di Kota Dumai terdapat 51 sungai besar dan kecil yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai, semuanya bermuara ke Selat Rupa dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dalam menyusun RKPD Kota Dumai Tahun 2019, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap

variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Perkembangan PDRB

Dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah harus memperhatikan seluruh aspek pembangunan. Sebagai ukuran kuantitatif maka data-data PDRB tetap merupakan informasi yang berguna dan mendasar, walaupun belum bisa menggambarkan aspek pembangunan secara keseluruhan.

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat melalui perkembangan PDRB. Selama tahun 2010-2016, PDRB Kota Dumai terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, PDRB ADHK Kota Dumai dengan migas adalah sebesar 21,5 triliun rupiah, sedangkan PDRB ADHB Kota Dumai dengan migas adalah sebesar 27,9 triliun rupiah. Peningkatan PDRB ini menunjukkan adanya kegiatan ekonomi masyarakat yang terus berkembang di Kota Dumai. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9 PDRB Kota Dumai Tahun 2011-2016 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016

No	Kategori	PDRB ADHK 2010 (Juta Rupiah)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.110.864,13	1.195.515,02	1.131.619,66	1.119.969,79	1.138.071,39	1.139.159,31	1.152.198,89
B.	Pertambangan dan penggalan	85.132,64	87.980,96	86.416,17	86.479,50	87.258,58	87.421,17	83.885,46
C.	Industri pengolahan	9.227.341,39	9.468.325,99	10.035.476,89	10.414.550,79	11.059.234,35	11.357.155,83	12.069.822,54
D.	Pengadaan listrik dan gas.	9.076,81	8.604,19	10.521,20	11.612,14	13.196,96	14.483,65	17.107,96
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3.273,55	3.374,30	3.341,93	3.363,44	3.428,96	3.523,70	3.517,99
F.	Konstruksi	2.064.270,00	2.230.760,63	2.117.406,69	2.181.412,05	2.081.314,46	2.119.777,32	2.184.087,17
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3.392.881,84	3.681.731,10	3.652.938,24	3.735.616,92	3.771.270,34	3.776.043,56	3.887.613,26

No	Kategori	PDRB ADHK 2010 (Juta Rupiah)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
H.	Transportasi dan pergudangan	429.14 3,06	477.52 3,61	503.23 9,11	537.46 1,38	590.80 1,20	602.75 2,39	632.13 8,13
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	99.042, 45	113.14 1,90	123.31 9,23	134.37 8,76	146.74 4,72	150.19 1,31	154.06 6,50
J.	Informasi dan komunikasi	127.00 2,09	145.29 0,05	170.54 7,14	206.13 4,11	229.29 4,86	245.69 7,40	255.85 0,29
K.	Jasa keuangan dan asuransi	322.90 2,25	308.61 3,79	397.95 9,44	471.33 2,89	285.15 4,19	265.53 6,84	265.88 3,62
L.	Real estate	78.109, 95	87.925, 61	83.055, 84	86.988, 13	90.248, 56	94.773, 07	96.113, 61
M, N	Jasa perusahaan	710,22	808, 63	831,69	883,50	958.60	1.032,1 5	1.069,3 8
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	389.02 6,06	407.17 0,47	412.48 3,99	419.71 7,32	421.46 5,77	429.98 8,77	430.68 3,13
P.	Jasa pendidikan	67.853, 67	84.449, 20	78.210, 66	82.520, 25	89.917, 60	94.631, 35	95.277, 88
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	23.592, 93	25.735, 63	26.531, 16	28.650, 41	29.384, 74	32.305, 65	32.586, 29
R, S, T, U	Jasa lainnya	65.249, 44	79.469, 74	75.946, 65	84.596, 52	94.630, 46	102.02 0,06	106.50 1,69
PDRB		17.495, 472,48	18.242, 262,30	18.909, 845,69	18.909, 845,69	19.605, 667,87	20.132, 375,74	20.516, 493,53

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan harga konstan tahun 2010 Kota Dumai terus mengami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2016 yakni 20.516.493,53 jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mengalami kenaikan sebesar 384.117.79.

Sedangkan untuk Perkembangan PDRB Kota Dumai berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha tahun 2010-2016 pada tabel 2.10.

Tabel 2.10 PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016

No	Sektor/Sub sektor	PDRB ADHB (JUTA RUPIAH)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.110.8 64,13	1.195.5 15,02	1.247.5 13,76	1.290.6 63,15	1.437.5 74,71	1.551.1 70,34	1.687.6 41,38
B.	Pertambangan dan penggalan	85.132, 64	87.981, 96	90.719, 37	93.218, 95	108.90 4,95	120.47 1,72	121.85 9,63
C.	Industri pengolahan	9.227.3 41,39	9.468.3 26,99	9.345.3 65,12	10.909. 915,76	12.499. 495,37	13.521. 271,09	15.058. 108,05
D.	Pengadaan listrik dan gas.	9.076,8 1	8.604,1 9	7.674,1 8	7.555,5 7	11.694, 09	18.026, 24	24.522, 43
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3.273,5 5	3.374,3 0	3.520,3 6	3.454,5 1	3.653,8 6	4.044,5 5	4.293,0 5
F.	Konstruksi	2.064.2 70,00	2.230.7 60,63	2.337.0 85,15	2.556.6 24,71	2.562.1 76,39	2.869.8 84,03	3.214.6 57,79
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3.392.8 81,84	3.681.7 31,10	3.861.6 49,38	4.014.8 13,24	4.589.1 45,67	4.691.5 23,15	5.000.2 94,68
H.	Transportasi dan pergudangan	429.14 3,06	477.52 3,61	551.24 1,25	615.01 2,00	727.10 6,64	807.76 3,79	877.79 6,94

No	Sektor/Sub sektor	PDRB ADHB (JUTA RUPIAH)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	99.042,45	113.141,90	126.321,93	162.081,92	200.381,58	235.071,24	260.520,57
J.	Informasi dan komunikasi	127.002,09	145.290,05	173.009,54	198.535,24	234.989,02	270.710,40	294.246,73
K.	Jasa keuangan dan asuransi	322.902,25	308.613,79	462.454,81	578.397,53	366.129,13	355.025,11	365.887,32
L.	Real estate	78.109,95	87.925,61	92.715,08	100.011,55	113.119,61	127.215,13	134.709,46
M, N	Jasa perusahaan	710,22	808,63	965,13	1.070,51	1.223,74	1.419,08	1.554,95
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	389.026,06	407.170,47	453.573,61	474.552,02	494.473,40	524.615,72	541.616,22
P.	Jasa pendidikan	67.853,67	84.449,20	89.696,05	96.837,53	122.921,41	142.978,73	149.543,32
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	23.592,93	25.735,63	29.852,50	33.349,65	37.775,23	46.880,43	49.787,22
R, S, T, U	Jasa lainnya	65.249,44	79.469,74	83.006,22	95.672,32	117.702,05	142.498,86	158.356,28
PDRB		17.495.472,48	18.406.420,82	18.956.363,40	21.231.766,16	23.628.466,85	25.430.569,61	27.945.396,02

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan harga konstan tahun 2010 Kota Dumai terus mengami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2016 yakni 20.516.493,53 jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mengalami kenaikan sebesar 2.514.826,41. Adapun Kontribusi Sektoral PDRB 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11 Kontribusi Sektoral PDRB 2011-2015

No	Sektor/Sub sektor	Kontribusi Sektoral (%)					Pergeseran (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
a.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	6,50	6,58	6,08	6,09	6,10	-0,40
b.	Pertambangan & pengalihan	0,48	0,48	0,44	0,46	0,48	0,00
c.	Industri pengolahan	51,44	49,30	51,38	52,46	51,92	0,48
d.	Pengadaan listrik dan gas.	0,05	0,04	0,04	0,05	0,06	0,01
e.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
f.	Bangunan	12,12	12,33	12,04	10,57	11,12	-1,00
g.	Perdagangan besar dan eceran, reparasimobil dan sepeda motor	20,00	20,37	18,91	20,15	19,83	-0,17
h.	Transportasi dan pergudangan	2,59	2,91	2,90	3,06	3,19	0,60
i.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,61	0,67	0,76	0,93	0,93	0,32
j.	Informasi dan komunikasi	0,79	0,91	0,94	0,99	1,07	0,28
k.	Jasa keuangan dan asuransi	1,68	2,44	2,72	1,54	1,40	-0,28
l.	Real estate	0,48	0,49	0,47	0,48	0,50	0,02
m, n	Jasa perusahaan	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
o.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosialwajib	2,21	2,39	2,24	2,08	2,07	-0,14
p.	Jasa pendidikan	0,46	0,47	0,46	0,52	0,56	0,10
q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,14	0,16	0,16	0,16	0,18	0,04
r, s, t, u	Jasa lainnya	0,43	0,44	0,45	0,50	0,56	0,13
Total		100	100	100	100	100	0,0

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai 2016

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk menganalisis struktur ekonomi wilayah, baik struktur perekonomian regional maupun struktur perekonomian sektoral. Struktur perekonomian regional digunakan untuk menganalisis peran masing-masing kabupaten/kota baik secara keseluruhan maupun sektoral dalam wilayah provinsinya. Distribusi peran ekonomi sub wilayah kabupaten/kota juga menunjukkan tingkat konsentrasi dan pemerataan perekonomian wilayah. Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2012-2016 terlihat pada Tabel 2.12 dan Gambar 2.5 Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2012-2016

Tabel 2.12 Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2012-2016

Tahun	PDRB Kota Dumai (Juta Rupiah)	PDRB Provinsi Riau (Juta Rupiah)	Share Regional (%)
2010	17.495.472,48	388.578.226,96	4,50
2011	18.406.420,81	485.295.542,43	3,79
2012	18.956.363,45	554.062.615,67	3,42
2013	21.231.766,16	605.745.884,95	3,51
2014	23.628.466,85	673.956.309,10	3,51
2015	25.430.569,61	650.874.017,19	3,91
2016	27.945.396,02	683.314.201,68	4,09

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah



Gambar 2.5 Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Dari tabel dan Gambar di atas terlihat bahwa peran PDRB Kota Dumai terhadap PDRB Provinsi Riau dari tahun 2010-2016 berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2012 sampai tahun 2016 dengan besar kontribusi rata-rata 3-4%,

namun besarnya kontribusi tersebut tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Tiga kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terbesar pada PDRB Provinsi Riau tahun 2012-2016 berturut-turut adalah Kab. Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Kab. Siak. Berikut gambar 2.6 Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2010-2016



Gambar 2.6 Struktur Perekonomian Regional Antar Kabupaten/Kota Se- Riau Tahun 2010-2016

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

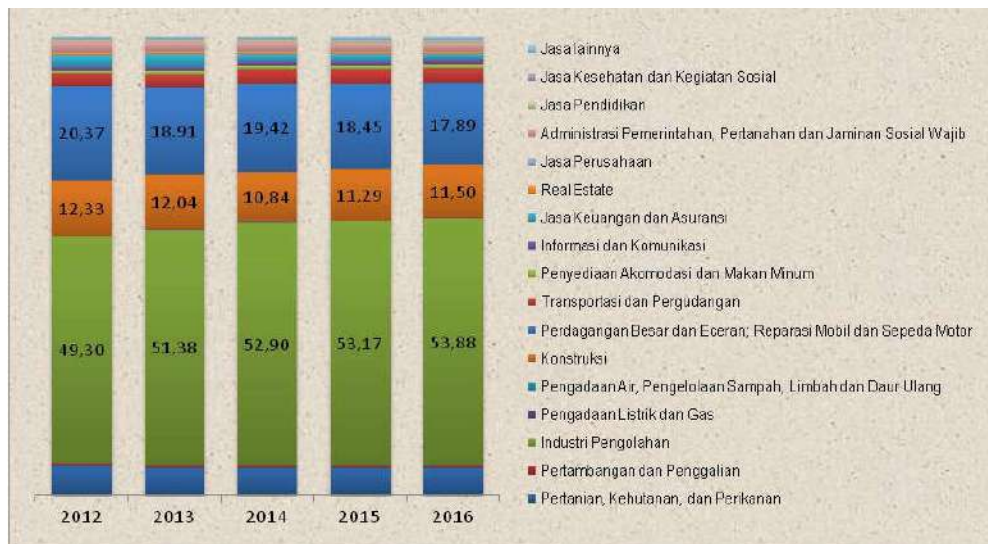
Struktur perekonomian sektoral digunakan untuk menganalisis peran sektor dalam pembangunan wilayah, dimana dominasi peran suatu sektor menunjukkan basis perekonomian wilayah. Struktur perekonomian sektoral Kota Dumai tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.13 dan Gambar 2.7. Dari tabel dan gambar tersebut terlihat bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2016 struktur perekonomian Kota Dumai didominasi oleh peran sektor industri pengolahan dengan besar kontribusi rata-rata >50%. Artinya, identifikasi awal sektor utama di Kota Dumai sebagai sumber pertumbuhan ekonomi adalah **sektor industri pengolahan**. Berdasarkan kriteria dari UNIDO (*United Nations for Industrial Development Organization*) berikut Kota Dumai masuk dalam kategori wilayah industri:

1. PDRB sektor industri <10%, wilayah non industri;
2. PDRB sektor industri 10-20%, wilayah memasuki proses industrialisasi;
3. PDRB sektor industri 20-30%, wilayah tergolong semi industri;
4. PDRB sektor industri >30%, wilayah industri.

Tabel 2.13 Struktur Perekonomian Sektoral Kota Dumai
Tahun 2012-2016

Sektor/Sub sektor	KONTRIBUSI SEKTORAL (%)					Pergeseran (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	6,58	6,08	6,08	6,10	6,04	-0,54
Pertambangan dan penggalian	0,48	0,44	0,46	0,47	0,44	-0,05
Industri pengolahan	49,30	51,38	52,90	53,17	53,88	4,58
Pengadaan listrik dan gas.	0,04	0,04	0,05	0,07	0,09	0,05
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
Konstruksi	12,33	12,04	10,84	11,29	11,50	-0,83
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	20,37	18,91	19,42	18,45	17,89	-2,48
Transportasi dan pergudangan	2,91	2,90	3,08	3,18	3,14	0,23
Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,67	0,76	0,85	0,92	0,93	0,27
Informasi dan komunikasi	0,91	0,94	0,99	1,06	1,05	0,14
Jasa keuangan dan asuransi	2,44	2,72	1,55	1,40	1,31	-1,13
Real estate	0,49	0,47	0,48	0,50	0,48	-0,01
Jasa perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosialwajib	2,39	2,24	2,09	2,06	1,94	-0,45
Jasa pendidikan	0,47	0,46	0,52	0,56	0,54	0,06
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,16	0,16	0,16	0,18	0,18	0,02
Jasa lainnya	0,44	0,45	0,50	0,56	0,57	0,13

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka



Gambar 2.7 Struktur Perekonomian Sektoral Kota Dumai
Tahun 2012-2016 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

2. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu memberikan hasil yang positif jika diikuti pula oleh tingginya pertumbuhan penduduk, apalagi jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diikuti dengan kualitas sumberdaya manusia yang produktif, maka yang terjadi adalah penurunan produktivitas yang akan menyebabkan kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2012-2016

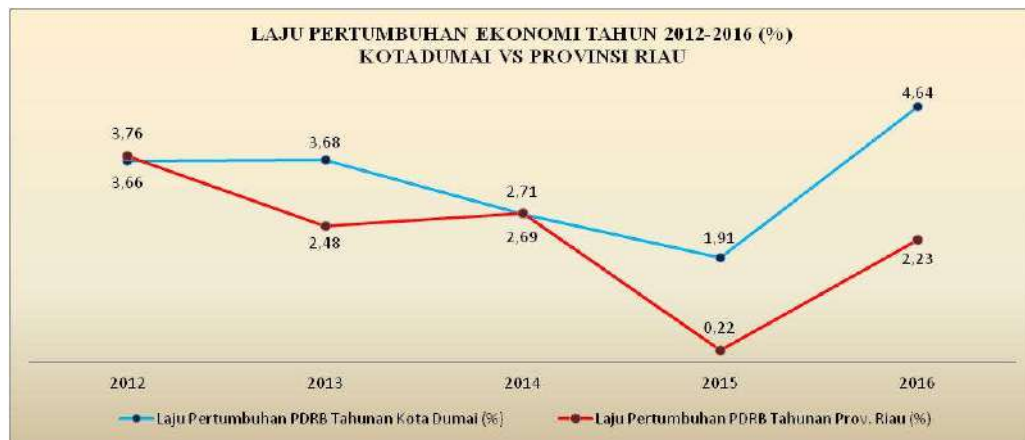
Sektor	Laju Pertumbuhan Ekonomi (r) Tahunan (%)					Rata-rata (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,06	-1,03	1,62	0,10	1,14	0,45
Pertambangan dan Penggalian	1,01	0,07	0,90	0,19	-4,04	-0,74
Industri Pengolahan	2,70	3,78	6,19	2,69	6,28	4,72
Pengadaan Listrik dan Gas	6,69	10,37	13,65	9,75	18,12	12,92
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,87	0,64	1,95	2,76	-0,16	1,29
Konstruksi	3,73	3,02	-4,59	1,85	3,03	0,78
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,08	2,26	0,95	0,13	2,95	1,57
Transportasi dan Pergudangan	10,94	6,80	9,92	2,02	4,88	5,87
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,20	8,97	9,20	2,35	2,58	5,72
Informasi dan Komunikasi	17,88	20,87	11,24	7,15	4,13	10,67
Jasa Keuangan dan Asuransi	36,21	18,44	-39,50	-6,88	0,13	-9,59
Real Estate	1,59	4,73	3,75	5,01	1,41	3,72
Jasa Perusahaan	7,68	6,23	8,50	7,67	3,61	6,49
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,60	1,75	0,42	2,02	0,16	1,09
Jasa Pendidikan	4,35	5,51	8,96	5,24	0,68	5,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,60	7,99	2,56	9,94	0,87	5,27
Jasa lainnya	5,54	11,39	11,86	7,81	4,39	8,82
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (%)	3,66	3,68	2,69	1,91	4,64	3,22

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak ada 1 (satu) sektor ekonomi pun pada PDRB Kota Dumai yang terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Bahkan sektor industri pengolahan yang menjadi sektor utama penggerak perekonomian Kota Dumai, pada tahun 2014 dapat dikatakan tidak tumbuh. Sektor industri pengolahan ini di tahun 2016 mengalami

pertumbuhan tertinggi selama periode 2012-2016, tetapi laju pertumbuhannya masih dibawah laju pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas, dan sektor ini memiliki laju pertumbuhan rata-rata selama periode 2012-2016 sebesar 4,72%. Sektor ekonomi yang mengalami laju pertumbuhan rata-rata tertinggi selama periode 2012-2016 adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 12,92%. Sama halnya dengan sektor industri pengolahan, sektor ini mengalami perlambatan di tahun 2014 dan pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan tertinggi selama periode 2012-2016.

Secara umum, berdasarkan olahan data pada Tabel 2.16 terlihat bahwa perekonomian Kota Dumai terus mengalami perlambatan dari tahun 2013 sampai tahun 2015, kemudian akhirnya mengalami pertumbuhan sebesar 4,64% di tahun 2016. Selama periode 2012-2016, laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Kota Dumai sebesar 3,22%, lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Riau yaitu sebesar 1,91%. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada Gambar 2.8.



Gambar 2.8 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012-2016 Kota Dumai terhadap Provinsi Riau
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Dari Gambar di atas terlihat bahwa selama periode 2012-2016 laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, kecuali di tahun 2012 dan 2014. Meskipun demikian, secara umum

perekonomiannya sama-sama mengalami perlambatan sebelum akhirnya mulai mengalami pertumbuhan kembali di tahun 2016. Di tahun 2015 perekonomian Kota Dumai dan Provinsi Riau mengalami titik pertumbuhan terendah atau dapat dikatakan perekonomiannya tidak tumbuh. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pengambilan strategi dan kebijakan terkait perkembangan ekonomi Kota Dumai kedepannya. Berdasarkan hasil perhitungan sektor basis pada sektor PDRB kota Dumai, maka sektor-sektor PDRB kota Dumai tahun 2016 dapat ditipologikan pada:

1. Sektor basis prospektif yaitu industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa lainnya
2. Sektor basis tidak prospektif pengadaan listrik dan gas; jasa keuangan dan asuransi; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
3. Sektor non basis prospektif jasa pendidikan
4. Sektor non basis, non prospektif Pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan & penggalan; real estate; jasa perusahaan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Berdasarkan analisa shift share dengan metode klasik didapatkan klasifikasi sebagai berikut :

1. Sektor yang mengalami pertumbuhan pesat adalah sektor pengadaan listrik dan gas ; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa pendidikan
2. Sektor Yang Berkembang Adalah Sektor pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan; Industri Pengolahan; Bangunan; Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasimobil Dan Sepeda Motor; Transportasi Dan Pergudangan; Jasa Keuangan Dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya
3. Sektor yang cenderung berpotensi adalah sektor pertambangan & penggalan

Sektor yang tidak mampu berkembang adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

3. Pendapatan per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Diperoleh dengan membagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Secara umum, semakin tinggi PDRB/kapita maka semakin tinggi tingkat perekonomian wilayah. Tapi kenyataannya PDRB/kapita tidaklah selalu menggambarkan pendapatan riil masyarakat dan distribusi pendapatan yang sama, sehingga seringkali dijumpai banyak wilayah memiliki PDRB perkapita tinggi namun masyarakatnya masih miskin dikarenakan distribusinya yang tidak merata.

Berdasarkan pengklasifikasian wilayah seperti yang tersaji pada Tabel 2.15 di bawah ini tersaji hasil analisis Tipologi Klassen untuk Kota Dumai tahun 2011-2016. Mulai tahun 2015 Kota Dumai masuk dalam kategori **wilayah cepat maju dan cepat tumbuh** karena memiliki pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.9.

Tabel 2.15 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2011-2016

Uraian	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB ADHK perkapita Kota Dumai (juta Rp.)	70,19	70,55	71,53	71,87	71,74	73,55
PDRB ADHK perkapita Provinsi Riau (juta Rp.)	71,64	72,40	72,30	72,39	70,77	70,60
Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai (%)	4,27	3,66	3,68	2,69	1,91	4,64
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau (%)	5,57	3,76	2,48	2,71	0,22	2,23
Klasifikasi Wilayah	Wilayah relatif tertinggal	Wilayah relatif tertinggal	Wilayah berkembang cepat	Wilayah relatif tertinggal	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh



Gambar 2.9 PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai vs Provinsi Riau Tahun 2011-2016
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pada Tabel 2.16 berikut tersaji perkembangan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan dan persentasenya menurut kelompok makanan dan bukan makanan di Kota Dumai tahun 2011-2016.

Tabel 2.16 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Dumai Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran Perkapita Makanan					
Nominal (Rp)	456.904	492.336	479.722	511.316	574.717
Persentase (%)	53,39	53,10	50,96	45,46	48,32
Pengeluaran Perkapita Bukan Makanan					
Nominal (Rp)	398.847	434.894	461.705	613.344	614.756
Persentase (%)	46,61	46,90	49,04	54,54	51,68
Jumlah Pengeluaran Perkapita	855.751	927.230	941.427	1.124.660	1.189.473

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2012-2016 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 855.751,- menjadi Rp. 1.189.473,-. Bila dilihat dari persentasenya, pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan, dari 53,39% pada tahun 2012 menjadi 48,32% di tahun 2016. Sebaliknya, pengeluaran untuk bukan makanan mengalami peningkatan, dari 46,61% pada tahun 2012 menjadi 51,68% di tahun 2016. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan, artinya orientasi pengeluaran bukan lagi hanya untuk makanan namun sudah untuk konsumsi non makanan yang

terdiri dari perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama lainnya dan lain-lain.

4. Tingkat Kemiskinan

Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, perkembangan beberapa indikator kemiskinan di Kota Dumai tahun 2010-2016 fluktuatif seperti tersaji pada Tabel 2.17 dan Gambar 2.10 Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2011-2016

Tabel 2.17 Perbandingan Indikator Kemiskinan Tahun 2010-2016 Kota Dumai dan Provinsi Riau

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata r (% per tahun)
Kota Dumai								
Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	287.975	298.127	311.891	328.158	341.525	353.079	369.624	4,34
Jumlah penduduk miskin(000 jiwa)	16,50	13,97	14,20	14,11	13,62	14,97	13,76	(2,98)
Persentase penduduk miskin (%)	6,45	5,27	5,24	4,98	4,83	5,26	4,74	(2,48)
Provinsi Riau								
Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	301.190	296.379	310.603	350.129	379.223	399.211	426.001	8,22
Jumlah penduduk miskin (000 jiwa)	558,00	472,45	481,30	476,46	498,28	531,39	515,40	1,73
Persentase penduduk miskin (%)	10,01	8,17	8,05	8,42	7,99	8,42	7,98	(0,22)

Sumber: Badan Pusat Statistik



Gambar 2.10 Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2011-2016

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Seperti yang terlihat pada Gambar diatas dapat diasumsikan terjadi penurunan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk tahun 2016 pemerintah kota dumai berhasil menekan tingkat kemiskinan sebesar 0,52%, hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek salah satunya pertumbuhan ekonomi yang kondusif diberbagai sektor. Berikut Gambar 2.11 Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2010-2016 Kota Dumai dan Provinsi Riau.



Gambar 2.11 Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2010-2016 Kota Dumai dan Provinsi Riau

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Pada tahun 2010 persentase penduduk miskin kota Dumai adalah 6,45%, kemudian mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar 2,48% menjadi 4,74% di tahun 2016. Sama halnya

dengan jumlah penduduk miskin Kota Dumai yang mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar 2,98%, 16,5% pada tahun 2010 menjadi 13,76% di tahun 2016. Berbeda dengan dua komponen kemiskinan sebelumnya, garis kemiskinan Kota Dumai selama periode 2010-2016 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan (r) tahunan sebesar 4,34%, Rp.287.975,00/kapita/bulan pada tahun 2010 menjadi Rp.369.624,00/kapita/bulan di tahun 2016. Selama periode 2010-2016 tersebut persentase penduduk miskin Kota Dumai lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Riau seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.12.



Gambar 2.12 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2010-2016 Kota Dumai dan Provinsi Riau

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/kapita/bulan di bawah garis kemiskinan maka akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ukuran garis kemiskinan yang paling sering digunakan adalah garis kemiskinan yang dibuat oleh World Bank yaitu US\$ 2/kapita/hari untuk negara yang masuk kategori *developing countries*. Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan seperti jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P2).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*, P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada Tabel 2.18 dan Gambar 2.13 berikut tersaji perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2010-2016 (tanpa data tahun 2013).

Tabel 2.18 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2010-2016

Uraian	2010	2011	2012	2014	2015	2016
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,07	0,57	0,99	0,38	0,59	0,62
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,26	0,13	0,29	0,06	0,11	0,13

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017



Gambar 2.13 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2010-2016

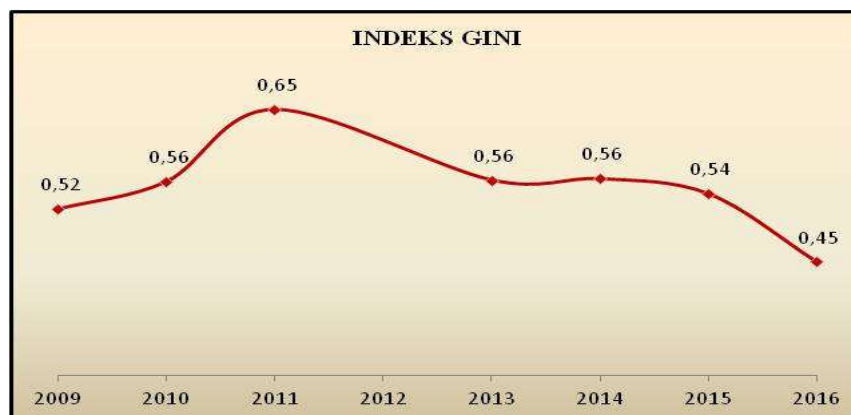
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kota Dumai cenderung berfluktuatif. Indeks kedalaman tertinggi terjadi di tahun 2010 yaitu sebesar 1,07, kemudian turun menjadi 0,57 di tahun 2011, tetapi

kembali memburuk dengan angka indeks 0,99 di tahun 2012. Selama tiga tahun terakhir (2014-2016) angka indeks kedalaman kemiskinan Kota Dumai mengalami kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2010 dan 2012, hanya saja tetap perlu menjadi perhatian bersama khususnya Pemerintah Kota karena angka indeksnya cenderung mengalami peningkatan. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan, selama periode 2014-2016 angka indeks keparahan kemiskinan mengalami peningkatan dari 0,06 menjadi 0,12. Ini mengindikasikan bahwa selama periode tersebut ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif meningkat.

5. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan munculnya kesenjangan pendapatan, yaitu perbedaan kemakmuran ekonomi antara kelompok penduduk kaya dengan yang miskin. Dalam artian, penduduk pendapatan riil dari kelompok kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang atau dengan kata lain pendapatan riil yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin. Salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2009-2014 tanpa data tahun 2012, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan/kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan tinggi. Berikut ini Gambar 2.14 Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2009-2016.



Gambar 2.14 Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2009-2016
Sumber: Universitas Riau, 2016

Indikator lain yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat adalah kriteria ketimpangan pendapatan versi Bank Dunia, dimana penduduk dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

- a) Kelompok 40% termiskin pengeluarannya < 12% dari keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan tinggi.
- b) Kelompok 40% termiskin pengeluarannya 12%–17% dari keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan sedang.
- c) Kelompok 40% termiskin pengeluarannya > 17% dari keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan tinggi

Berdasarkan hasil penghitungan ketimpangan distribusi pendapatan Kota Dumai berdasarkan pendapatan kriteria bank dunia, menunjukkan bahwa secara umum tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di kota Dumai masih termasuk kategori sedang, karena kelompok 40% termiskin pengeluarannya adalah 12,52% dari keseluruhan pengeluaran.

6. Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi merupakan indikator ekonomi yang mengindikasikan baik buruknya perekonomian suatu daerah. Tingkat inflasi yang tinggi menggambarkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, meskipun perekonomian secara menyeluruh semakin baik tidak berarti bahwa inflasi tidak terjadi. Terjadinya deflasi juga tidak selalu menunjukkan hal yang positif bagi perekonomian suatu daerah. Dengan kata lain, bahwa yang menjadi indikator perekonomian semakin baik jika angka inflasi suatu daerah stabil dan relatif rendah.

Sejak Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun dasar 2012 (2012 = 100). IHK dengan tahun dasar tersebut dihitung berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup 2012 untuk menggantikan IHK tahun 2007 = 100, yang berlaku sejak bulan Juni tahun 2008. Pergeseran tahun dasar ini dimaksudkan agar IHK yang baru mampu mencerminkan perubahan

pola konsumsi masyarakat di Indonesia, dan secara khusus diharapkan dapat menggambarkan tingkat inflasi. berikut tabel 2.19 menunjukkan perbandingan inflasi bulanan dan inflasi tahunan (Y on Y) Kota Dumai dengan Provinsi Riau tahun 2014-2016 dan Gambar 2.15 Perkembangan Inflasi/Deflasi Tahun 2016 Kota Dumai vs Provinsi Riau

Tabel 2.19 Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Tahun 2014-2016 Kota Dumai vs Provinsi Riau

Bulan	Kota Dumai			Provinsi Riau		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Inflasi Bulanan:						
Januari	0,43	-0,37	0,65	0,80	-0,61	0,33
Februari	0,30	-0,68	0,32	0,11	-0,64	-0,34
Maret	0,24	0,13	0,23	0,15	-0,01	0,47
April	0,40	0,38	-0,64	0,08	0,73	-1,10
Mei	0,14	0,98	0,06	0,16	0,53	0,20
Juni	0,66	0,59	0,79	0,58	0,70	0,43
Juli	0,83	0,78	0,46	0,96	0,61	1,06
Agustus	0,65	0,55	0,05	0,89	0,45	0,13
September	0,64	-0,23	0,64	0,42	-0,38	0,81
Oktober	0,42	0,11	0,47	0,54	-0,15	0,63
November	1,86	-0,02	0,82	1,98	0,32	1,15
Desember	1,66	0,39	0,07	1,69	1,08	0,23
Inflasi Tahunan (Y on Y)	8,53	2,63	3,98	8,65	2,65	4,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017



Gambar 2.15 Perkembangan Inflasi/Deflasi Tahun 2016 Kota Dumai vs Provinsi Riau

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Dari Tabel 2.19 diatas terlihat bahwa inflasi tahunan Kota Dumai selama kurun waktu 2014-2016 cenderung tidak stabil. Pada tahun 2014 Kota Dumai mengalami inflasi tahunan tertinggi dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015 inflasi Kota Dumai

mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6% (dari 8,53% pada tahun 2014 menjadi 2,63% di tahun 2015). Kondisi ini sejalan dengan perkembangan inflasi Provinsi Riau yang menunjukkan penurunan dari 8,65% menjadi 2,65%. Kinerja perekonomian yang sudah membaik ini kemudian mulai memburuk lagi di tahun 2016 dengan angka inflasi tahunan sebesar 3,98% (meningkat 1,35%). Hal ini sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Dumai secara makro. Jika dilihat dari kondisi inflasi bulanan tahun 2016 seperti yang tersaji pada Gambar 2.9 diatas, terlihat bahwa inflasi bulanan tertinggi di Kota Dumai dan Provinsi Riau sama-sama terjadi di bulan November. Sedangkan inflasi bulanan terendah terjadi di bulan April, dimana Kota Dumai dan Provinsi Riau sama-sama mengalami deflasi. Secara umum tingkat inflasi/deflasi bulanan yang terjadi di Kota Dumai dan Provinsi Riau sama, hanya saja pada bulan Februari kondisi perekonomian Provinsi Riau lebih baik dibandingkan dengan kondisi perekonomian Kota Dumai, dimana Provinsi Riau mengalami deflasi sebesar 0,34% sementara Kota Dumai mengalami inflasi sebesar 0.32%.

7. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah menunjukkan produktivitas suatu wilayah dalam memberikan kesejahteraan dan perbaikan perekonomian bagi para pekerja yang berada dalam sektor-sektor pembentuk PDRB. Produktivitas total daerah diperoleh dengan membagi total PDRB dengan Jumlah total Pekerja yang bekerja pada sektor-sektor pembentuk PDRB. Karena keterbatasan data ketenagakerjaan yang dimiliki, maka produktivitas total daerah Kota Dumai yang dapat diukur adalah produktivitas total daerah Kota Dumai tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Produktivitas Total Daerah} &= \frac{\text{PDRB}}{\text{jumlah pekerja}} \\
 &= (25.430.569,61 \times 10^6) / 117.280 \\
 &= 216.836.371,16
 \end{aligned}$$

Produktivitas menunjukkan nilai rupiah yang diterima pekerja yang bekerja diseluruh sektor pembentuk PDRB. Analisis komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan nilai produktivitas total daerah dengan pendapatan perkapita dan perbandingan antar sektor. Semakin tinggi dan besar produktivitas suatu sektor, semakin besar perannya bagi pembangunan.

8. Kondisi IPM Kota Dumai

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran pencapaian suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak..

Sejak tahun 2014 penghitungan IPM menggunakan metodologi baru dengan perubahan pada beberapa indikatornya diantaranya angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Domestik Bruto (PNB) per kapita. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka ini didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh seseorang sejak lahir. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk dapat mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Rata rata lama sekolah didefinisikan sebagai banyaknya tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Keempat indikator IPM tersebut cenderung meningkat selama tahun 2010-2016.

Selama periode 2010-2016 IPM Kota Dumai terus meningkat. Sejak tahun 2011 IPM Kota Dumai berada pada kategori tinggi dengan angka berturut-turut sampai tahun 2016 adalah sebesar 70,43 ; 71,07 ; 71,59 ; 71,86 ; 72,20 ; 72,96. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kota Dumai semakin membaik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kondisi ekonominya. Meskipun demikian, angka IPM yang cukup tinggi tidak sepenuhnya

merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan penduduk dapat dicapai jika pemerataan hasil pembangunan telah terealisasi. Berikut table 2.20 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2016.

Tabel 2.20 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2016

Cakupan Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Dumai	69,55	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96
Provinsi Riau	68,65	68,90	69,15	69,91	70,33	70,84	71,20
Nasional	66,53	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18

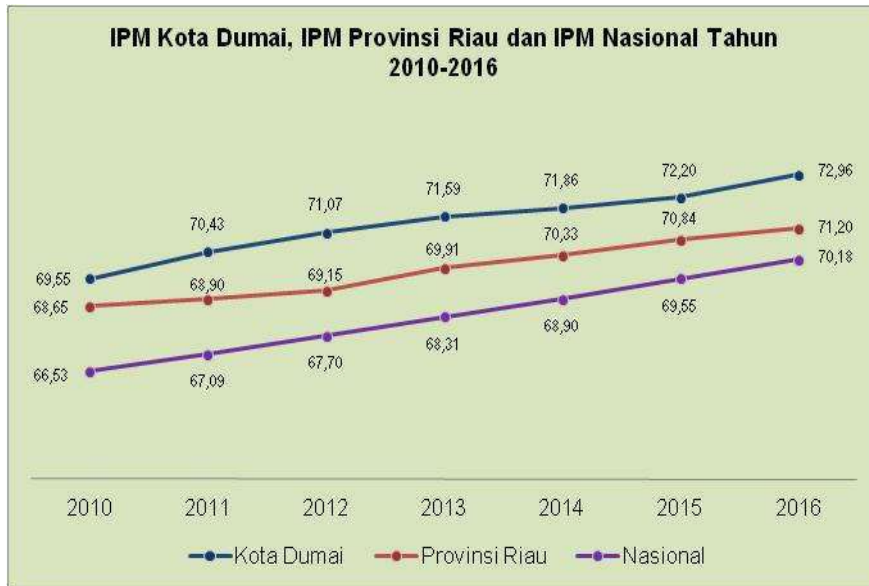
Sumber: BPS, 2017

Jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, selama kurun waktu 2010-2016, IPM Kota Dumai menempati urutan kedua setelah Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 2.20. Pada tahun 2016, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, hanya 6 kabupaten/kota yang memiliki angka IPM dengan kategori tinggi, yaitu: Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis, Kampar, dan Pelalawan. Di sisi lain dalam lingkup yang lebih luas, IPM Kota Dumai lebih tinggi daripada IPM Provinsi Riau maupun IPM nasional seperti yang tersaji pada Tabel 2.20 di atas. Pada tahun 2016 IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau, maupun IPM nasional berada pada kategori tinggi dengan angka IPM berturut-turut sebesar 72,96 ; 71,20 ; 70,18. Berikut tabel 2.21 Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2016 dan Gambar Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2010-2016.

Tabel 2.21 Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2016

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kuantan Singingi	65,07	65,72	66,31	66,65	67,47	68,32	68,66
Indragiri Hulu	65,10	65,93	66,50	66,68	67,11	68,00	68,67
Indragiri Hilir	61,98	62,82	63,04	63,44	63,80	64,80	65,35
Pelalawan	65,95	66,58	67,25	68,29	68,67	69,82	70,21
Siak	69,78	70,20	70,45	70,84	71,45	72,17	72,70
Kampar	68,62	69,64	70,08	70,46	70,72	71,28	71,39
Rokan Hulu	63,59	64,20	64,99	66,07	67,02	67,29	67,68
Bengkalis	69,29	69,72	70,26	70,60	70,84	71,29	71,98
Rokan Hilir	64,13	64,76	65,09	65,46	66,22	66,81	67,52
Kepulauan Meranti	59,71	60,38	61,49	62,53	62,91	63,25	63,90
Pekanbaru	77,34	77,71	77,94	78,16	78,42	79,32	79,69
Dumai	69,55	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96

Sumber: BPS, 2017



Gambar 2.16 Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2010-2016
Sumber: BPS, 2017

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap sektor Pendidikan dengan indikator : angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, rasio penduduk yang bekerja. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial sebagai berikut:

A. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang dapat bisa membaca dan menulis. Angka ini mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang tentu saja berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Dumai, angka melek huruf dari tahun 2010 hingga tahun 2016 menunjukkan tren yang sangat baik. Pada tahun 2010 angka melek huruf sebesar 99,31%, dan pada tahun-tahun

berikutnya, selalu mengalami kenaikan hingga tahun 2013. Angka melek huruf pada tahun 2013-2016 konstan pada angka 99,43%, hal ini menunjukkan keberhasilan program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai, dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai. Berikut Gambar 2.17 Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2011-2017.



Gambar 2.17 Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2011-2017
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Menurut Badan Pusat Statistik angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi: (a) partisipasi sekolah; (b) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; (c) ijazah tertinggi yang dimiliki; (d) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Angka ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin

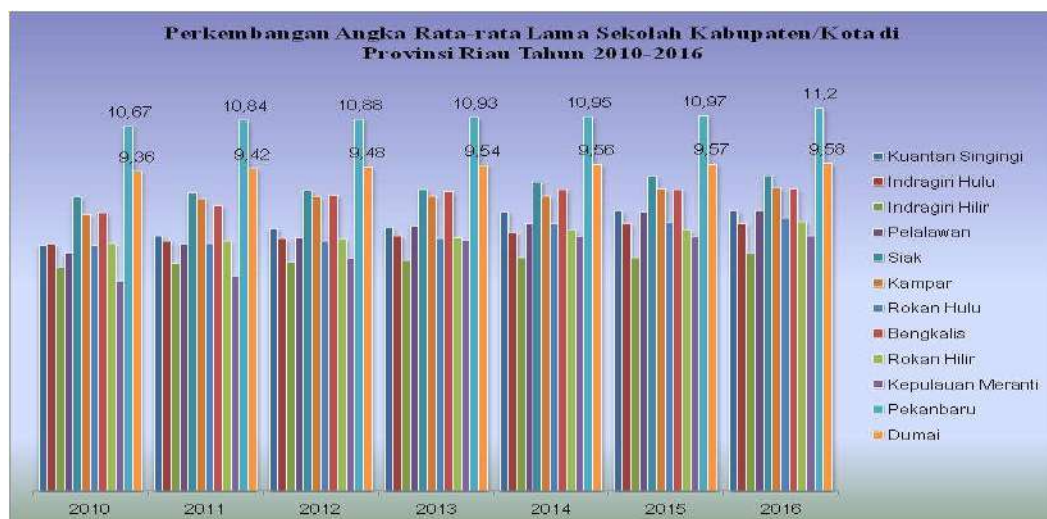
lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Berikut Gambar 2.18 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2010-2016



Gambar 2.18 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Dumai selama kurun waktu 2010-2016 terus mengalami peningkatan. menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat kota Dumai terus meningkat dalam membiayai pendidikan. Secara tingkat Provinsi Riau, untuk angka rata-rata lama sekolah Kota Dumai menempati urutan nomor 2 setelah Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan kecenderungan bahwa kota Dumai menjadi pondasi terpenting dalam pembangunan manusia dari sisi Pendidikan. Berikut Gambar 2.19 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2016.



Gambar 2.19 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2016

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

3. Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

Menurut Badan Pusat Statistik, angka partisipasi kasar menunjukkan perbandingan antara rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Masih menurut BPS kegunaan APK adalah menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.22 Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Dumai Tahun 2010-2016
Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
APK SD/MI	113,80	115,05	>100	>100	107,27	107,20	107,79
APK SMP/MTs	108,38	110,20	>100	>100	89,67	91,58	100,18
APK SMA/SMK/MA	84,22	85,37	75,37	85,68	73,45	78,36	87,97

Angka partisipasi kasar di Kota Dumai dari tahun 2010 hingga tahun 2016 pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA menunjukkan tren perkembangan yang sedikit fluktuatif. Secara umum, pada tahun 2016 APK Kota Dumai untuk semua jenjang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada APK SMP/MTs yaitu dari 91,58 pada tahun 2015 meningkat menjadi 100,18 pada tahun 2016.

4. Angka pendidikan yang ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan menunjukkan jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan oleh masyarakat dalam persentase. Semakin tinggi angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan tertentu misalnya perguruan tinggi. Semakin banyak masyarakat yang mampu menyelesaikan pendidikan secara maksimal di suatu wilayah menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sangat baik. Selain faktor keinginan, faktor kemampuan secara ekonomi

masyarakat juga dapat menjadi faktor pendorong. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan pendidikan juga dapat menjadi pendorong tingkat partisipasi masyarakat. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai dan tersebar serta pilihan yang beragam, merupakan salah satu pilihan alternatif bagi masyarakat.

Tabel 2.23 Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Dumai Tahun 2011-2016

Sumber: Dinas Pendidikan dan Badan Pusat Statistik

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tdk/Belum Pernah Sekolah	28,10%	NA	NA	32,10%	34,30%	9,38%
Tidak/Belum tamat SD	12,10%			11,00%	10,30%	
SD/MI/Sederajat	17,80%			16,80%	16,20%	30,70%
SLPT/MTs	13,00%			12,20%	12,00%	13,34%
SMA/SMK	23,20%			22,40%	21,90%	36,74%
D I/II	0,70%			0,60%	0,60%	0,85%
AKADEMI/D III	1,80%			1,80%	1,70%	2,54%
S1/Sarjana	3,10%			3,00%	2,90%	6,45%
S2/S3/Pasca Sarjana	0,10%			0,10%	0,10%	

Berdasarkan tabel diatas, secara umum sampai tahun 2016 persentase jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh mayoritas masyarakat yang berada di Kota Dumai adalah jenjang SMA/SMK. Selama 6 tahun, mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2016, perkembangan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan ini cukup baik. Pada tahun 2016 sebanyak 36,74% penduduk Kota Dumai menamatkan pendidikan SMA/SMK. Disamping itu jumlah penduduk yang tidak/belum tamat SD atau tidak pernah sekolah sama sekali menurun drastis dari ±45% menjadi 9,38%. Hal ini menunjukkan ada perbaikan dari dalam diri masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, sebagai jembatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh kemungkinan meningkatnya pendapatan masyarakat, sehingga mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Kemungkinan adanya intervensi dari pemerintah daerah, antara lain dengan program pendidikan gratis juga mampu mendorong hal ini.

Dua hal yang patut menjadi perhatian pemerintah Kota Dumai diantaranya: (1) masih ada masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan dasar atau belum lulus jenjang pendidikan SD; dan (2) masih rendahnya persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi DI/DII/DIII/IV/S1/S2/S3. Rendahnya persentase lulusan pendidikan tinggi ini bisa disebabkan oleh kurangnya perguruan tinggi yang tersedia di Kota Dumai, juga rendahnya akreditasi perguruan tinggi yang ada sehingga banyak lulusan SMA/SMK/MA yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar Kota Dumai. Ketersediaan jumlah perguruan tinggi beserta akreditasinya ini juga akan mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja yang berpotensi, terampil dan mampu berdaya saing.

5. Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

Angka partisipasi murni menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat yang berada pada jenjang sekolah tertentu, yang bersekolah. Angka partisipasi murni adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam merangsang minat masyarakat untuk bersekolah. Semakin besar nilai APM suatu daerah pada jenjang pendidikan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu daerah.

Tabel 2.24 Angka Partisipasi Murni Kota Dumai Tahun 2010-2016
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai dan Badan Pusat Statistik

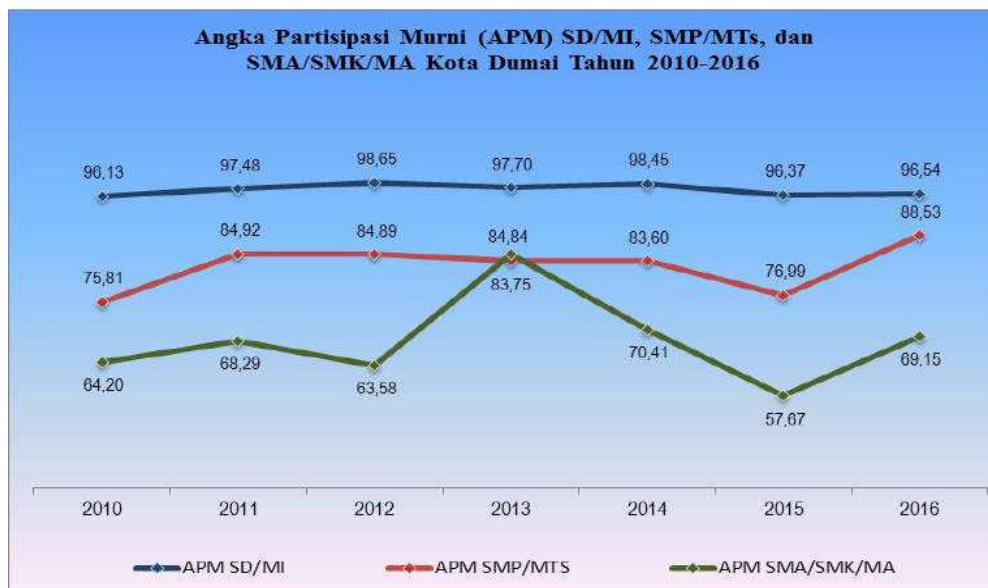
Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
APM SD/MI	96,13	97,48	98,65	97,70	98,45	96,37	96,54
APM SMP/MTs	75,81	84,92	84,89	83,75	83,60	76,99	88,53
APM SMA/SMK/MA	64,20	68,29	63,58	84,84	70,41	57,67	69,15

Berdasarkan tabel diatas, tren perkembangan angka partisipasi murni dari tahun 2010 hingga tahun 2016 fluktuatif. Pada tahun 2010, nilai APM SD/MI adalah sebesar 96,13%, kemudian mengalami perkembangan yang fluktuatif sampai tahun 2016 dengan angka partisipasi murni di tahun 2016 sebesar 96,54%. Sama halnya dengan

nilai APM SD/MI, APM SMP/MTs dan APM SMA/SMK/MA juga mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2010-2016. Secara umum nilai APM SMP/MTs dan APM SMA/SMK/MA tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2010 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.26 diatas.

Disamping itu, diantara ketiga jenjang pendidikan, nilai APM yang terendah ada pada jenjang SMA/SMK/MA. Berfluktuatifnya nilai APM tersebut, terutama untuk jenjang SMA sederajat, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sebaran fasilitas pendidikan yang tidak merata sampai ke pinggiran Kota Dumai sehingga membuat orang tua kesulitan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Beflukuatuifnya APM ini juga dipengaruhi oleh menurunnya angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA.

Menurunnya angka melanjutkan sekolah tentunya akan menurunkan nilai APM. Kondisi ini harus dicermati oleh Pemerintah Kota Dumai khususnya Dinas Pendidikan, bahwa minat masyarakat untuk bersekolah semakin menurun, jumlah siswa yang bersekolah juga semakin menurun.



Gambar 2.20 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Dumai dan Badan Pusat Statistik

6. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup menggambarkan derajat kesehatan suatu wilayah. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin tinggi pula tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh penduduk di suatu wilayah. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 cenderung meningkat seperti yang tersaji pada Gambar 2.21. Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya kemungkinan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian. Keadaan ini terkait dengan pola hidup sehat masyarakat serta tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah untuk dicapai, serta kesadaran yang tinggi untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu wilayah bisa diminimalisir melalui pelaksanaan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya, termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan program pemberantasan kemiskinan.



Gambar 2.21 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

A. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran

Kematian prenatal merupakan kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yang lahir dalam keadaan meninggal dalam masa tujuh hari setelah persalinan. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Selama tahun 2010 – 2016 realisasi capaian Angka Kematian Bayi adalah sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Dumai dari tahun 2010 s.d. tahun 2016 Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2010-2016 pada Gambar 2.22. Pada tahun 2014 angka kematian bayi sudah menurun dari 14,70 di tahun 2013 menjadi 13,08 di tahun 2014, tetapi kembali mengalami peningkatan di tahun 2015 sebesar 14,09.

Kemudian turun kembali di tahun 2016 menjadi 13,73. Adapun Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia.



Gambar 2.22 Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai

Banyak faktor yang dapat menyebabkan kenaikan angka kematian bayi antara lain faktor ekonomi, terlambat pertolongan, pengetahuan orang tua masih relatif kurang. Faktor ekonomi orang tua yang rendah

seringkali membuat ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup saat mengandung, sehingga bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) saat lahir. Pengetahuan dan kesadaran orang tua yang masih rendah, antara lain mengenai pentingnya asupan gizi yang cukup saat kehamilan, pemeriksaan kehamilan secara rutin ke dokter dan lain-lain juga menjadi salah satu penyebab resiko kematian bayi waktu lahir. Penyebab kematian bayi juga dapat dikarenakan adanya kelainan bawaan, asfiksia (sesak napas pada saat lahir) dan juga kehamilan dengan resiko tinggi akibat usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua.

2. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak umur kurang dari 5 tahun per 1.000 penduduk. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Selama tahun 2010–2016 realisasi capaian angka kematian balita adalah sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup. Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai dari tahun 2010 s.d. tahun 2016 menunjukkan kecenderungan meningkat seperti yang tersaji pada Gambar 2.23. Pada tahun 2014 angka kematian balita sudah menurun dari 16,90 di tahun 2013 menjadi 15,87 di tahun 2014, namun kembali mengalami peningkatan di tahun 2015 dan 2016 berturut-turut sebesar 16,64 dan 16,88. Penyebab kematian balita masih didominasi oleh kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia.



Gambar 2.23 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai

3. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan maupun penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan, per 100.000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memantau kematian terkait dengan kehamilan.

AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan ibu dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Hal tersebut disebabkan antara lain kurangnya pemahaman ibu hamil tentang resiko yang terkait dengan kehamilan seperti 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Sering dan dan jarak Terlalu Dekat) dan juga 3 Terlambat (Terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga, terlambat merujuk, dan terlambat mendapat pelayanan di fasilitas rujukan). Penyebab langsung kematian ibu antara lain: *eklampsi*, pendarahan, *partus macet*, infeksi, *abortus* dan lain-lain. Penyebab tidak langsung antara lain: penyakit infeksi seperti malaria, *thypoid* serta penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit gula dan penyakit lainnya.

Angka kematian ibu melahirkan berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Meningkatnya angka kematian ibu ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai. Warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatannya. Penyebab kematian ibu pada umumnya karena perdarahan dan eklampsi/pre eklampsi.

Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai Tahun 2010-2016 dapat dilihat pada Gambar 2.24, adapun angka kematian ibu melahirkan di tahun 2016 adalah sebesar 109,32 per 100.000 kelahiran hidup.



Gambar 2.24 Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai Tahun 2010-2016
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dari data angka kematian bayi dan ibu, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 terjadi peningkatan pada kedua indikator tersebut. Hal ini terjadi karena data angka kematian bayi dan ibu melahirkan di Kota Dumai sulit untuk dipantau. Misal, kasus bayi yang sakit atau ibu yang melakukan persalinan di luar Kota Dumai karena tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai kemudian pindah ke Kota Dumai dan menggunakan fasilitas layanan kesehatan di Kota Dumai. Kriteria pencatatan data kematian ibu dan bayi di beberapa unit pelayanan kesehatan kadang berbeda-beda, seperti KTP ibu yang merupakan penduduk luar Kota Dumai atau KTP orang tua bayi yang masih Kota Dumai walaupun sudah lama pindah ke luar Kota Dumai ikut tercatat dalam registrasi.

4. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup menggambarkan derajat kesehatan suatu wilayah. Semakin tinggi angka harapan hidup,

semakin tinggi pula tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh penduduk di suatu wilayah. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 cenderung meningkat seperti yang tersaji pada gambar 2.25. Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya kemungkinan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian. Keadaan ini terkait dengan pola hidup sehat masyarakat serta tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah untuk dicapai, serta kesadaran yang tinggi untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Keberhasilan program kesehatan dan program sosial ekonomi antara lain dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk di suatu wilayah. Jika pembangunan sosial ekonomi semakin baik maka kecenderungan Angka Harapan Hidup akan semakin tinggi, dan sebaliknya jika Angka Harapan Hidup lebih rendah mengisyaratkan terjadinya degradasi pada beberapa sektor pembangunan sosial ekonomi suatu wilayah. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu wilayah bisa diminimalisir melalui pelaksanaan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya, termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan program pemberantasan kemiskinan.



Gambar 2.25 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

5. Persentase Balita Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di posyandu terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi buruk pada balita dapat diantisipasi.

Selama tahun 2010–2016 realisasi capaian persentase balita gizi buruk adalah 0,01%. Faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita antara lain, kualitas kehamilan yang buruk karena kekurangan asupan gizi, kehamilan resiko tinggi (karena usia ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR).

Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi juga dapat terjadi di keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan anak yang kurang sehat, antara lain kurangnya perhatian orang tua karena terlalu sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan karena adanya penyakit penyerta seperti jantung. Selain itu kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan berat badannya rendah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai fokus pada penurunan tingkat kematian ibu dan bayi serta peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Dumai terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, maka Pemerintah Kota Dumai memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan kesehatan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sumber dana bantuan iuran bagi masyarakat tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kota Dumai, data penerima bantuan iuran selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.25 Penerima Batuan Iuran (PBI)
Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

Sumber Dana	2015	2016	2017	2018
APBD Kota Dumai	66.113	64.514	64.949	66.200
APBN	62.158	62.158	61.414	61.166
Jumlah	128.271	126.672	126.363	127.366

Pada tahun 2017 terdapat 126.363 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Dumai. Dengan kata lain, pada tahun 2017 sekitar 42% penduduk kurang mampu atau miskin di Kota Dumai telah menikmati layanan kesehatan gratis dari Pemerintah Kota Dumai.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

Analisis kinerja seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator- indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga.

A. Seni Budaya

Kota Dumai berada pada simpul persinggahan mobilitas antar bangsa dan suku, mempunyai konsekuensi tumbuh dan berkembang menjadi kota multikultur. Kondisi ini harus disikapi dengan mewujudkan kehidupan masyarakat Dumai yang harmonis dalam keragaman budaya, suku dan ras serta agama sehingga menjadikan kehidupan masyarakat Dumai yang berkembang dan semakin modern. Untuk mendukung perkembangan tersebut diperlukan tatanan dengan penerapan budaya melayu yang agamis ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial dan ketertiban umum termasuk dalam pengembangan nilai budaya dari aspek pembangunan sarana dan prasarana dengan yang mengarah pada arsitektur melayu dalam pembangunan dan pengembangan perkotaan di Kota Dumai. Terkait penerapan budaya melayu yang agamis, tentunya harus dimulai dari pembinaan generasi penerus terutama implementasi Pendidikan budaya melayu serta implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar.

Pengembangan budaya melayu di Kota Dumai baik dalam tatanan Pendidikan yang kemudian diimplementasikan dalam pola dan tingkah laku kehidupan sehari-hari harus menjadi perhatian. Dalam dunia Pendidikan yang merupakan dasar bagi pembentukan karakter masyarakat melayu yang agamis perlu implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan, data implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan dasar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.26 Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah Seluruhnya	Implementasi Muatan Lokal Budaya Melayu Riau			
		2013	2014	2015	2016
SD	105	5	5	5	66
Persentase		5%	5%	5%	63%

Penerapan kurikulum budaya melayu Riau tingkat sekolah dasar baru diterapkan untuk kelas 4,5 dan 6, sedangkan untuk kelas 3 kebawah belum diajar kurikulum tersebut sebagai kurikulum muatan lokal.

Tabel 2.27 Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah Seluruhnya	Implementasi Muatan Lokal Budaya Melayu Riau			
		2013	2014	2015	2016
SMP/MTs	35	23	23	24	28
Persentase		66%	66%	69%	80%

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa penerapan kurikulum muatan lokal budaya melayu Riau pada tahun 2017 di tingkat Sekolah Dasar baru mencapai 63% sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama sudah mencapai 80% dan dapat disimpulkan bahwa implementasi penerapan kurikulum muatan lokal pada Pendidikan dasar pada tahun 2016 adalah sebesar 71,5%.

Budaya melayu sangat melekat dengan islam, dalam pembangunan masyarakat harus juga berbasis nilai-nilai agama. Pengembangan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari harus dimulai sejak dini, sekolah juga memegang peranan penting dalam hal ini. Data penerapan nilai-nilai agama dalam Pendidikan dasar dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.28 Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Dasar
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

Kegiatan	Jumlah Sekolah Dasar/MI	Sekolah Dasar yang menerapkan kegiatan agama Islam diluar kurikulum wajib					
		2014		2015		2016	
Membaca Yasin Bersama	105	68	64%	68	64%	70	65%
Sholat Zuhur Berjamaah		34	32%	43	40%	46	43%
Membaca Ayat Pendek/Hapalan Al-Quran		89	83%	89	83%	92	86%
Berdoa setiap memulai pelajaran		95	89%	95	89%	98	92%

Apabila data diatas dirata-ratakan, maka rata-rata implementasi nilai-nilai agama pada Pendidikan dasar dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.29 Rata-rata Implementasi Nilai-nilai agama pada Pendidikan Sekolah Dasar

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

Kegiatan	Tahun		
	2014	2015	2016
Implementasi kegiatan agama Islam diluar kurikulum wajib	67%	69%	71%

Rata-rata pelaksanaan nilai-nilai agama diluar kurikulum wajib pada tingkat sekolah dasar pada tahun 2016 adalah sebesar 71%.

Tabel 2.30 Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

Kegiatan	Jumlah Sekolah Dsar/MI	Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan kegiatan agama Islam diluar kurikulum wajib					
		2014		2015		2016	
Membaca Yasin Bersama	35	28	78%	29	81%	31	86%
Sholat Zuhur Berjamaah		18	50%	19	53%	23	64%
Membaca Ayat Pendek/Hapalan Al-Quran		23	64%	25	69%	31	86%
Berdoa setiap memulai pelajaran		30	83%	31	86%	33	92%

Apabila data diatas dirata-ratakan, maka rata-rata implementasi nilai-nilai agama pada Pendidikan dasar dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.31 Rata-rata Implementasi Nilai-nilai agama pada Pendidikan Sekolah Dasar

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

Kegiatan	Tahun		
	2014	2015	2016
Implementasi kegiatan agama Islam diluar kurikulum wajib	69%	72%	82%

Rata-rata pelaksanaan nilai-nilai agama diluar kurikulum wajib pada tingkat sekolah menengah pertama pada tahun 2016 adalah sebesar 82%.

Di Kota Dumai terdapat Lembaga Adat Melayu dan Paguyuban berbagai suku bangsa di Indonesia. Peranan dan keberadaan Lembaga Adat Melayu di Kota Dumai belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu sangat diperlukan penguatan dan peningkatan peranan Lembaga Adat Melayu, serta kerja keras Dinas

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Pada Tabel 2.32 berikut disajikan data target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang berkaitan dengan seni budaya tahun 2017.

Tabel 2.32 Indikator Kinerja Sasaran Berkaitan Dengan Seni Dan Budaya Tahun 2017

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2018

Indikator kinerja sasaran	Target Capaian Kinerja 2017	Realisasi sampai Tahun 2017	Capaian Kinerja
Sanggar seni dan budaya yang dibina	85 sanggar	40 sanggar	47,06
Jumlah grup kesenian	40	35	87,50
Jumlah Gedung Kesenian	1	0	0

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk sanggar seni dan budaya dari target 85 sanggar yang dibina hanya terealisasi 40 sanggar yang dibina. Untuk jumlah grup kesenian dari target 40 grup kesenian hanya terealisasi 35 grup. Sedangkan pembangunan 1 (satu) gedung kesenian belum terealisasi. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Riau, jumlah grup kesenian di Dumai menempati urutan paling bawah, sama halnya dengan Pelalawan.

Jumlah grup kesenian yang terbanyak ada di Kabupaten Kampar yaitu sebanyak 76 grup seperti yang tersaji pada Tabel 2.33. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa hanya terdapat 6 (enam) gedung kesenian di Provinsi Riau.

Tabel 2.33 Jumlah Grup dan Gedung Kesenian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Grup Kesenian	Jumlah Gedung Kesenian
Kuantan Singingi	10	1
Indragiri Hulu	24	-
Indragiri Hilir	3	1
Pelalawan	1	-
Siak	2	-
Kampar	76	-
Rokan Hulu	24	-
Rokan Hilir	3	1
Bengkalis	3	1
Kep. Meranti	3	-
Pekanbaru	7	2
Dumai	1	-
Jumlah	158	6

Rendahnya jumlah grup seni budaya Melayu, minimnya sarana/prasarana seni budaya, belum maksimalnya peranan Lembaga Adat Melayu, dan Pembelajaran seni budaya Melayu Riau di sekolah disebabkan oleh belum maksimalnya kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dalam mendukung Misi ke 7 (tujuh) yaitu “**Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu**’. Oleh karena itu, upaya untuk menumbuhkembangkan jati diri dan kebudayaan Melayu harus menjadi isu terpenting dalam pembangunan Kota Dumai ke depan.

B. Olahraga

Di Kota Dumai terdapat banyak klub olahraga yang bernaung dibawah KONI Dumai. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai berperan penting dalam membina klub-klub olahraga yang bernaung di bawah KONI Dumai tersebut agar dapat memajukan dan mengharumkan Kota Dumai melalui kompetisi/perlombaan yang diikuti. Oleh karena itu, perlu penguatan dan peningkatan peranan klub olahraga tersebut kedepannya. Pada Tabel 2.34 berikut disajikan data berdasarkan jumlah pembinaan cabor dan jumlah klub olahraga.

Tabel 2.34 Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabor dan Jumlah Klub Olahraga

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2018

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah pembinaan cabang olahraga	cabor	9	28	32	114
Jumlah klub olahraga	Klub	0	112	112	100

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pembinaan cabang olahraga dan klub olahraga sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi yang dicapai. Di sisi lain, jika dilihat dari fasilitas olahraga, jumlah fasilitas olahraga di kota Dumai masih sangat minim dibandingkan dengan yang ada di Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35 Jumlah Fasilitas Olahraga di Provinsi Riau
 Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2018

Kabupaten / Kota	Fasilitas Olahraga					
	Stadion	GOR	Padang & Lapangan	Hall	PKM	Kolam & Danau
Kuantan Singingi	Sport Centre (Sepak Bola)	-	-	-	-	-
Indragiri Hilir	Sport Centre (Sepak Bola)	-	-	-	-	-
Pelalawan	-	Pangkalan Kerinci	-	-	-	-
Siak	-	Sepatu Roda	-	-	-	-
Kampar	-	Kampar (Pencak)	Labersa (Golf)	-	-	-
Bengkalis	-	-	-	PAS (Bela Diri Tarung Drajat)	-	-
Pekanbaru	1. Grand Stadion-UNRI (Sepak Bola) 2. Kaharudin Nasution Rumbai (Senam Bola) 3. SC Rumbai (Hockey)	1. Remaja (Bulu Tangkis) 2. Angkasa (Bulu Tangkis) 3. SC Rumbai (Senam) 4. Tribuana (Karate)	1. Chevron (Soft Ball) 2. UNRI (Kawasan Olahraga) 3. UNRI (Panjat Tebing) 4. UIR Panahan	1. SC Rumbai (Basket) 2. SC Rumbai (Renang) 3. SC Rumbai (Menembak) 4. SC Rumbai (Volly Ball) 5. UIR Volly Ball	1. UNILAK (Anggar) 2. UNRI (Yudo) 3. UIN (Taekwondo) 4. UIR (Gulat)	Danau Buatan (Sky Air)
Dumai	-	-	Chevron (Tennis Meja)	-	-	Sasana Tirta Pertamina

2.1. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

A. Pendidikan

1. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk dalam usia sekolah. Dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan jumlah sekolah yang ada setiap 10.000 penduduk. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Dumai Dalam Angka, dari tahun 2010 hingga 2016, rasio ketersediaan sekolah dibanding dengan penduduk usia

sekolah mengalami perkembangan yang positif. Pada tahun 2010 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI menunjukkan angka 101. Angka ini menunjukkan ada sekitar 101 sekolah SD untuk 10.000 penduduk. Pada tahun 2016 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI adalah 108 hal ini berarti terdapat sekitar 108 sekolah SD untuk setiap 10.000 penduduk. Untuk jenjang SMP rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTS antara tahun 2010 hingga tahun 2016 juga menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2010 menunjukkan nilai 44 dan pada tahun 2016 naik menjadi 55.

Tabel 2.36 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio jumlah siswa SD/MI dan SMP/MTs terhadap Jumlah Kelas di Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Dinas Pendidikan dan Badan Pusat Statistik

Tingkatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs							
SD	101	96	106	101	107	106	108
SMP	44	50	51	51	54	53	55
Rasio jumlah siswa SD/MI dan SMP/MTs terhadap Jumlah Kelas							
SD	1:35	1:32	1:36	1:37	1:38	1:38	1:34
SMP/MTs	1:42	1:43	1:44	1:35	1:41	1:41	1:33

Jumlah siswa untuk jenjang SD pada tahun 2010 adalah sebanyak 33.983 siswa dan terjadi kenaikan sebanyak 4.216 siswa pada tahun 2016 yakni menjadi 38.199 siswa. Jumlah ruang kelas juga terdapat penambahan, pada tahun 2010 terdapat 954 ruang, kemudian bertambah sebanyak 180 ruang pada tahun 2016 menjadi 1.134 ruang. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio jumlah siswa SD terhadap jumlah ruang kelas pada tahun 2016 yakni 1:34 artinya 1 ruang kelas manampung 34 siswa. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang SD 1 ruang kelas maksimal jumlah siswa sebanyak 32 orang (1:32) sehingga Kota Dumai masih kekurangan ruang kelas jenjang SD.

Untuk jenjang SMP, jumlah siswa di tahun 2010 adalah sebanyak 13.102 siswa. Terjadi kenaikan jumlah siswa pada tahun 2016

menjadi 13.157 siswa. Untuk jumlah kelas juga terdapat penambahan yakni 308 ruang pada tahun 2010 menjadi 404 ruang pada 2016. Pada Tabel 2.26 diatas juga dapat dilihat bahwa rasio jumlah siswa per jumlah ruang kelas menunjukkan kondisi yang semakin membaik, dari 1:42 tahun 2010 menjadi 1:33 pada tahun 2016. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang SMP, 1 ruang kelas maksimal jumlah siswa sebanyak 32 orang (1:32) sehingga Kota Dumai masih kekurangan ruang kelas jenjang SMP.

Disamping belum terpenuhinya rasio antara jumlah siswa per ruang kelas dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ada, baik untuk jenjang SD maupun SMP, jumlah dan kualitas sekolahnya pun belum merata per kecamatan di Kota Dumai. Minat sekolah penduduk usia sekolah di Kota Dumai masih tertuju pada sekolah-sekolah yang berada di kecamatan-kecamatan di wilayah kota seperti data yang tersaji pada Tabel 2.37. Hal ini terjadi karena sekolah-sekolah tersebut lebih mudah untuk diakses. Disamping itu sarana dan prasarana pendukung di sekolah tersebut juga lebih lengkap dan lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran. Dari tabel 2.37 tersebut juga dapat dilihat bahwa distribusi guru belum merata per kecamatan. Di kecamatan-kecamatan yang dekat dengan perkotaan rata-rata jumlah guru per sekolah untuk jenjang SD dan SMP lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang jauh dari perkotaan. Hal ini juga terjadi karena tingginya minat penduduk usia sekolah di Kota Dumai untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang dekat dengan pusat kota.

Tabel 2.37 Rata-rata Jumlah Siswa per Sekolah dan Jumlah Siswa per Guru di Masing-masing Kecamatan di Kota Dumai Untuk Jenjang SD dan SMP Tahun 2017

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018, data diolah

Kecamatan	Jumlah Sekolah (unit)		Jumlah Siswa (orang)		Jumlah Guru (orang)		Rata-rata Jumlah Siswa per Sekolah		Rata-rata Jumlah Guru per Sekolah	
	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
Bukit Kapur	17	6	6.358	1.843	309	118	374	307	18	20

Kecamatan	Jumlah Sekolah (unit)		Jumlah Siswa (orang)		Jumlah Guru (orang)		Rata-rata Jumlah Siswa per Sekolah		Rata-rata Jumlah Guru per Sekolah	
	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
Dumai Barat	10	4	4.297	124	235	124	430	501	24	31
Dumai Kota	9	4	4.051	85	226	85	450	395	25	21
Dumai Selatan	14	7	6.173	168	325	168	441	423	23	24
Dumai Timur	27	7	10.367	177	567	177	384	424	21	25
Medang Kampai	8	2	1.984	36	124	36	248	212	16	18
Sungai Sembilan	20	5	4.969	79	321	79	248	275	16	16

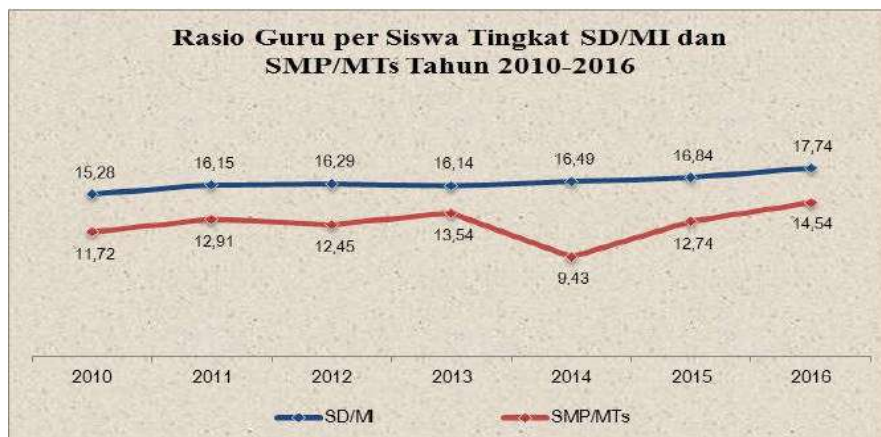
2. Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs

Angka rasio guru/murid, merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai ini mencerminkan berapa jumlah siswa yang harus diajar oleh seorang guru. Idealnya memang dalam satu kelas dan terdapat seorang guru, jumlah siswa yang berada di ruangan tersebut tidak boleh terlalu besar, karena akan menyulitkan siswa maupun guru tersebut. Berdasarkan data *time series* dari Dumai Dalam Angka, pada tahun 2010 terdapat 2.240 orang guru SD di Kota Dumai dengan jumlah siswa sebanyak 47.895 orang.

Sedangkan di tahun 2016 terdapat 2.205 orang guru SD dengan jumlah siswa sebanyak 54.809 orang. Berdasarkan data-data tersebut maka untuk tingkat SD/MI rasio guru per siswa pada tahun 2010 adalah 1:15,28, dimana rasio guru per siswa ini meningkat menjadi 1:17,74 di tahun 2016. Angka ideal rasio guru per siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 adalah 1:20. Meskipun rasio guru per siswa untuk jenjang SD selama periode 2010-2016 memenuhi angka ideal berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008, namun angkanya kian meningkat seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.26. Peningkatan ini diduga disebabkan oleh terkonsentrasinya jumlah siswa pada sekolah-sekolah di daerah

perkotaan, sehingga penyebaran siswa di daerah pinggiran menjadi sedikit. Akibatnya di daerah perkotaan banyak sekolah yang melaksanakan *double shift*.

Untuk jenjang SMP/MTs, rasio murid guru dalam rentang antara tahun 2010 hingga tahun 2016 tren perkembangannya fluktuatif. Pada tahun 2010 jumlah guru SMP/MTs adalah 1.167 orang dan jumlah siswa sebanyak 13.679 orang dengan rasio guru per siswa 1:11,72. Pada tahun 2016 jumlah guru sebanyak 1.079 orang dan jumlah siswa 15.694 orang dengan rasio guru per siswa sebanyak 1:14,54. Meskipun angka ideal rasio guru per siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 (1:20) terpenuhi, namun terjadi peningkatan rasio murid/guru dari tahun 2010 sebesar 1:11,72 menjadi 1:14,54 di tahun 2016. Hal ini disebabkan bahwa jumlah siswa terkonsentrasi pada sekolah-sekolah di daerah perkotaan, sehingga penyebaran siswa di daerah pinggiran menjadi sedikit. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan sekolah di daerah pinggiran.



Gambar 2.26 Perkembangan Rasio Guru per Siswa SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2010-2016
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

3. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk dalam usia sekolah. Dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan jumlah sekolah yang ada setiap 10.000 penduduk. Berdasarkan data dari

Dumai Dalam Angka, Untuk jenjang SMA/SMK rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK antara tahun 2010 hingga tahun 2016 justru cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2010 menunjukkan nilai 27 dan pada tahun 2016 naik menjadi 39.

Pada jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2010 jumlah siswa sebanyak 11.554 orang dengan jumlah kelas 314 ruang dengan rasio siswa per kelas adalah 1:37. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah siswa sebanyak 12.326 orang atau 1,06%. Pada tahun 2010 terdapat 314 ruang kelas dan bertambah sebanyak 35 ruang pada tahun 2015 menjadi 349 ruang. Sedangkan rasio siswa per kelas pada tahun 2010 adalah 1:37 dan tahun 2015 adalah 1:35. Untuk jenjang SMA/MA/SMK sesuai standar adalah 1:32 sama dengan jumlah SD dan SMP.



Gambar 2.27 Grafk Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/MA/SMK di Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Badan Pusat Statistik

4. Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA

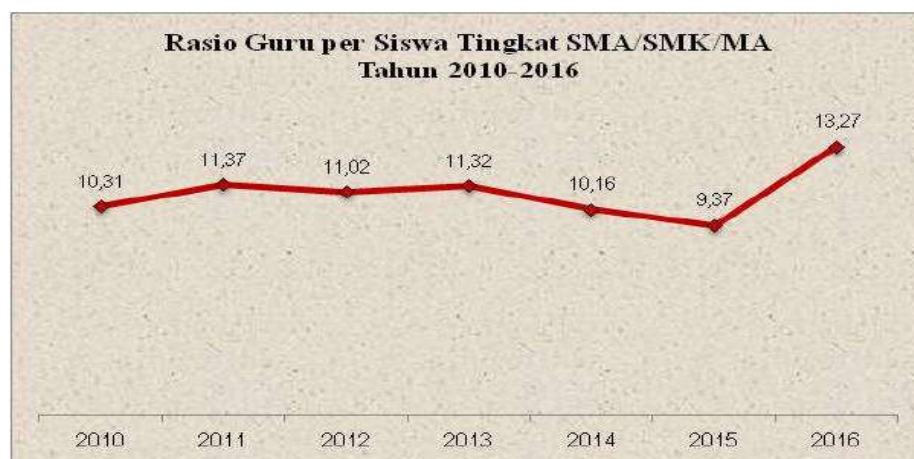
Angka rasio guru/murid, merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai ini mencerminkan berapa jumlah siswa yang harus diajar oleh seorang guru. Idealnya memang dalam satu kelas dan terdapat seorang guru, jumlah siswa yang berada di ruangan tersebut tidak boleh terlalu

besar, karena akan menyulitkan siswa maupun guru tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, rasio guru per siswa untuk jenjang SMA/SMK/MA tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2010. Pada tahun 2010 rasio guru per siswa sebesar 10,31 meningkat menjadi 13,27 pada tahun 2016. Namun secara umum selama kurun waktu 2010-2016 rasio guru per siswa SMA/SMK/MA ini cenderung berfluktuatif dengan angka terendah terjadi di tahun 2014 dan 2015 berturut-turut sebesar 10,16 dan 9,37. Menurunnya rasio guru per siswa ini terjadi karena kenaikan jumlah murid yang lebih besar bila dibandingkan dengan kenaikan jumlah guru. Dengan perkataan lain proporsi kenaikan jumlah murid tidak sebanding dengan kenaikan jumlah guru pada tahun 2014 dan 2015.

Tabel 2.38 Rasio Guru per Siswa SMA/SMK/MA di Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Dumai Dalam Angka

Tahun	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Murid/Guru
2010	643	6.627	1:10,31
2011	579	6.585	1:11,37
2012	609	6.711	1:11,02
2013	1.038	11.747	1:11,32
2014	1.202	12.213	1:10,16
2015	1.017	9.526	1:9,37
2016	899	11.929	1:13,27



Gambar 2.28 Perkembangan Rasio Guru per Siswa Tingkat SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Dumai Dalam Angka

5. Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Indikator ini sama dengan indikator angka melek huruf pada pokok bahasan fokus kesejahteraan masyarakat bagian pendidikan.

6. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Ruang Kelas Baik

Ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak akan membantu dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang baik akan berdampak pada hasil pembelajaran yang baik. Dengan kondisi bangunan yang baik maka tentu saja akan membuat aktifitas belajar siswa menjadi tidak terganggu dan berjalan dengan baik. Persentase kondisi ruang kelas SD dengan kondisi baik tahun 2017 mengalami perkembangan dibandingkan dengan tahun 2015, yang artinya semakin banyak ruang kelas dalam kondisi baik. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Dumai, kondisi ruang kelas SD/MI didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak ringan. Persentase ruang kelas SD dengan kondisi baik tahun 2015 hanya sebesar 33,66%, . Pada tahun 2017 persentasenya naik menjadi 38,55% seperti yang tersaji pada Tabel 2.41 dan Gambar 2.29.

Tabel 2.39 Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai Tahun 2015-2017
Sumber: Dinas Pendidikan, 2018

KONDISI PRASARANA RUANG KELAS	JUMLAH RUANG KELAS (UNIT)			PERSENTASE RUANG KELAS (%)		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
BAIK	345	437	446	33,66	38,54	38,55
RUSAK RINGAN	610	638	655	59,51	56,26	56,61
RUSAK BERAT	70	59	56	6,83	5,20	4,84
JUMLAH	1025	1134	1157	100,00	100,00	100,00



Gambar 2.29 Persentase Ruang Kelas SD/MI di Kota Dumai Dengan Kondisi Baik Tahun 2015-2017
Sumber: Dinas Pendidikan, 2018

7. Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Ruang Kelas Baik

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Dumai persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik yang ada di Kota Dumai tahun 2017 menunjukkan tren perkembangan yang menurun dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 2015 persentase ruang kelas untuk jenjang SMP dalam kondisi baik sebesar 28,65% dan pada tahun 2017 persentasenya mengalami penurunan menjadi 24,53%. Ruang kelas SMP dari tahun 2015 sampai tahun 2017 didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak ringan. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari para pengambil kebijakan di Kota Dumai karena dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.

Tabel 2.40 Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2015-2017

Sumber: Dinas Pendidikan, 2018

KONDISI PRASARANA RUANG KELAS	JUMLAH RUANG KELAS (UNIT)			PERSENTASE RUANG KELAS (%)		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
BAIK	98	81	105	28,65	20,05	24,53
RUSAK RINGAN	211	316	310	61,70	78,22	72,43
RUSAK BERAT	33	7	13	9,65	1,73	3,04
JUMLAH	1367	1538	1585	100,00	100,00	100,00



Gambar 2.30 Persentase Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Dengan Kondisi Baik Tahun 2015-2017

Sumber: Dinas Pendidikan, 2018

8. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nilai PAUD ini mencerminkan rasio pendidikan bagi anak-anak. Semakin tinggi nilai, maka berarti semakin banyak pula jumlah siswa pada rentang usia PAUD yang bersekolah, baik di PAUD maupun TK, dengan jenjang usia antara 4 sampai 6 tahun. Berdasarkan data dari Pendidikan, tren perkembangan jumlah PAUD dan sederajat justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, jumlah TK dan sederajat berjumlah 50 sekolah, pada tahun 2017 menjadi 101 sekolah. Dengan semakin bertambahnya jumlah PAUD atau TK maka mengindikasikan bahwa penduduk pada usia 4 sampai 6 tahun di kota Dumai semakin meningkat.

Tabel 2.41 Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2011 - 2017
Sumber: Dinas Pendidikan, 2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK/Sederajat	50	54	56	56	79	79	101



Gambar 2.31 Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2011-2017
Sumber: Dinas Pendidikan, 2018

9. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah. Dengan data ini dapat dilihat jumlah siswa yang putus sekolah, selain itu yang paling utama adalah mencari penyebab

mengapa angka putus sekolah naik dan turun. Dalam kurun waktu antara tahun 2011 hingga tahun 2014, tren perkembangan angka putus sekolah di Kota Dumai untuk semua jenjang menunjukkan adanya pertambahan, artinya persentase siswa yang putus sekolah semakin besar dan dalam kurun waktu antara 2015 hingga tahun 2017 tren perkembangan angka sekolah di Kota Dumai untuk semua jenjang menunjukkan adanya penurunan. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), angka putus sekolah pada tahun 2011 adalah sebesar 0,05%, namun pada tahun 2014 angka putus sekolah justru naik menjadi 0,26% dan pada tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami penurunan menjadi 0,013%. Pada jenjang SMP juga demikian, pada tahun 2011 angka putus sekolah adalah sebesar 0,04%, namun pada tahun 2014 angka putus sekolah mengalami kenaikan menjadi 0,40% dan pada tahun 2017 angka putus sekolah mengalami penurunan menjadi 0,025%. Sedangkan pada jenjang SMA, angka putus sekolah yang awalnya 0,14% pada tahun 2011 naik menjadi 0,97% pada tahun 2014 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,009%. Kecenderungan naiknya dan turunnya angka putus sekolah dalam beberapa tahun untuk semua jenjang pendidikan di Kota Dumai menunjukkan bahwa ada permasalahan yang cukup serius mengenai minat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, atau kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan menurun. Mulai tahun 2015, data yang disajikan Badan Pusat Statistik adalah angka partisipasi sekolah, yaitu proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Dumai tahun 2015-2017 tersaji pada Gambar 2.30.

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa angka partisipasi sekolah tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya untuk semua jenjang pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa

semakin tingginya kesadaran dan minat penduduk Kota Dumai untuk mengenyam pendidikan. Untuk angka putus sekolah SD/MI/,SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Dumai Tahun 2010-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.42 dan Gambar 2.32 berikut.

Tabel 2.42 Jumlah Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA Kota Dumai Tahun 2011-2017
Sumber: Dinas Pendidikan, 2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Putus Sekolah SD/MI	0,05	0,17	0,05	0,26	0,00	0,003	0,013
Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,04	0,04	0,00	0,40	0,00	0,049	0,025
Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,14	0,15	0,81	0,97	0,00	0,009	



Gambar 2.32 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2011-2017
Sumber: Dinas Pendidikan, 2018

10. Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan, bila angka kelulusan tinggi maka proses pembelajaran di sekolah tersebut berjalan dengan baik, dan apabila angka kelulusan rendah, maka banyak orang yang akan menjustifikasi bahwa pembelajaran yang dilakukan pada satu institusi pendidikan tidak berlangsung dengan baik. Dalam rentang tahun 2011 hingga tahun 2017, angka kelulusan untuk jenjang sekolah dasar di Kota

Dumai sedikit mengalami perkembangan yang meningkat, pada tahun 2011 angka kelulusan untuk jenjang SD sebesar 99,96% namun tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 100%. Sedangkan untuk jenjang SMP, angka kelulusan berfluktuasi, pada tahun 2011 angka kelulusan 99,86% dan pada tahun 2017 angka kelulusan adalah sebesar 100%. Untuk jenjang SMA, angka kelulusan juga berfluktuasi, tahun 2011 adalah 99,57% dan pada tahun 2017 angka kelulusan menjadi 100%.

Tabel 2.43 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2011-2017
Sumber: Dinas Pendidikan, 2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kelulusan Sekolah SD/MI	99,96	100,00	100,00	99,92	100,00	100,00	100,00
Angka Kelulusan Sekolah SMP/MTS	99,86	99,21	99,85	99,94	100,00	99,96	100,00
Angka Kelulusan Sekolah SMA/SMK/MA	99,57	99,60	99,89	99,87	100,00	99,97	



Gambar 2.33 Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2010-2017
Sumber: Dinas Pendidikan, 2018

11. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

Angka melanjutkan siswa dari SD/MI ke SMP/MTs dalam rentang waktu 2011 hingga 2017 di Kota Dumai menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Angka melanjutkan tertinggi ada pada tahun 2011 dengan nilai 101,63%. Pada tahun 2017 angka melanjutkan adalah sebesar 99,86%. Sedangkan angka melanjutkan

dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK tren perkembangan dari tahun 2011 sampai tahun 2017 juga menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif, yang mana pada tahun 2011 angka melanjutkan memiliki nilai yang paling besar yaitu 101,80%. Pada tahun 2017 angka melanjutkan adalah 110,58%.

Angka melanjutkan ini menunjukkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi semakin besar. Meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Dengan mulai meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat, dan juga pendapatan masyarakat, maka masyarakat memiliki kemampuan secara ekonomi untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan tidak segan mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang terbaik. Selain faktor ekonomi, kesadaran akan pentingnya pendidikan juga mulai dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat berharap dengan pendidikan yang diperoleh oleh anak-anak mereka, maka kehidupan anak-anak mereka pada masa yang akan datang diharapkan akan dapat menjadi lebih baik.

Tabel 2.44 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2010-2017
Sumber: Dinas Pendidikan, 2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTS	101,63	99,98	97,33	88,24	84,76	83,80	99,86
Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTS ke SMA/MA/SMK	101,80	100,89	106,87	79,81	108,20	110,58	



Gambar 2.34 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2010-2017
Sumber: Dinas Pendidikan, 2018

12. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV dalam rentang waktu 2011 hingga tahun 2018 di Kota Dumai menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2011 persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebanyak 56,7%, dan pada tahun 2017 menjadi 87,29.

Tabel 2.45 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dan Persentase Telah Bersertifikasi di Kota Dumai
Sumber: Dinas Pendidikan, 2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	56,7	60,17	79,45	79,40	85,58	86,22	87,29	
Guru Bersertifikasi	443	609	883	1.349	1.476	1.575	1.611	1.633



Gambar 2.35 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Dumai
Sumber: Dinas Pendidikan, 2018



Gambar 2.34 Guru Bersertifikasi Tahun 2011-2018
Sumber: Dinas Pendidikan, 2018

Meningkatnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV berarti pengetahuan, pemahaman dan informasi yang diperoleh semakin terbuka luas, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu

pendorong untuk meningkatkan kualitas mengajar dan mendidik para guru. Peningkatan kualitas mengajar dan mendidik para guru diharapkan akan meningkatkan kualitas anak didik atau murid, serta mempersiapkan murid untuk semakin membuka wawasan pengetahuan yang lebih luas di era globalisasi ini.

B. Kesehatan

1. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

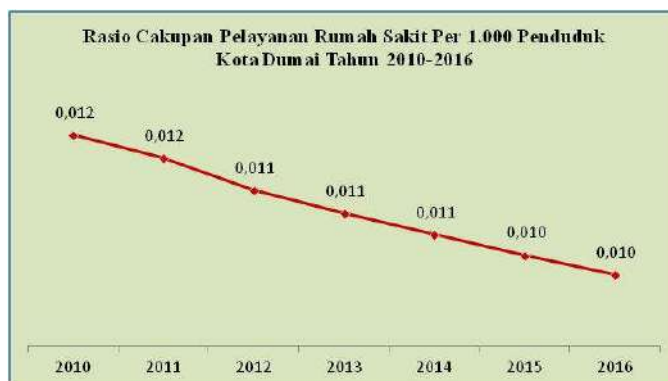
Pada tahun 2010-2016 jumlah rumah sakit yang ada di Kota Dumai sebanyak 3 rumah sakit yang terdiri dari 1 rumah sakit milik pemerintah Kota Dumai tipe C yakni RSUD Kota Dumai, 1 rumah sakit milik BUMN tipe D yakni RS Pertamina dan 1 rumah sakit milik TNI/POLRI yakni RS Bhayangkara yang mulai operasional sejak tahun 2007 (Rumah Sakit Pelabuhan sejak tahun 2007 sudah tidak operasional lagi dan berubah status menjadi Balai Pengobatan). Rasio cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Dumai tahun 2010-2016 tersaji pada Tabel 2.48 gambar 2.36.

Dapat dilihat bahwa rasio cakupan pelayanan rumah sakit tahun 2010 adalah sebesar 0,012, tahun 2016 sebesar 0,010. Data-data tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penurunan rasio cakupan pelayanan rumah sakit dari tahun 2010 ke tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani tapi tidak diiringi oleh penambahan pembangunan rumah sakit. Pada tahun 2016, per 1.000 jumlah penduduk Kota Dumai hanya sebanyak 0,010 yang dapat dilayani oleh rumah sakit.

Tabel 2.46 Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk Tahun 2010-2016

Sumber: Dinas Kesehatan dan Dumai Dalam Angka, diolah

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Rumah Sakit	3	3	3	3	3	3	3
Jumlah Penduduk	254.337	259.913	268.022	274.089	280.109	285.967	291.908
Rasio Pelayanan Cakupan Rumah Sakit per 1.000 penduduk	0,012	0,012	0,011	0,011	0,011	0,010	0,010



Gambar 2.36 Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Dinas Kesehatan dan Dumai Dalam Angka, diolah

2. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Keberhasilan pelayanan kesehatan di Kota Dumai tidak terlepas dari peran tenaga medis dokter baik dokter spesialis, dokter umum maupun dokter gigi. Jumlah dokter di Kota Dumai selama periode tahun 2010 sampai 2016 mengalami fluktuasi, dari 125 dokter pada tahun 2010 menjadi 140 dokter pada tahun 2016.

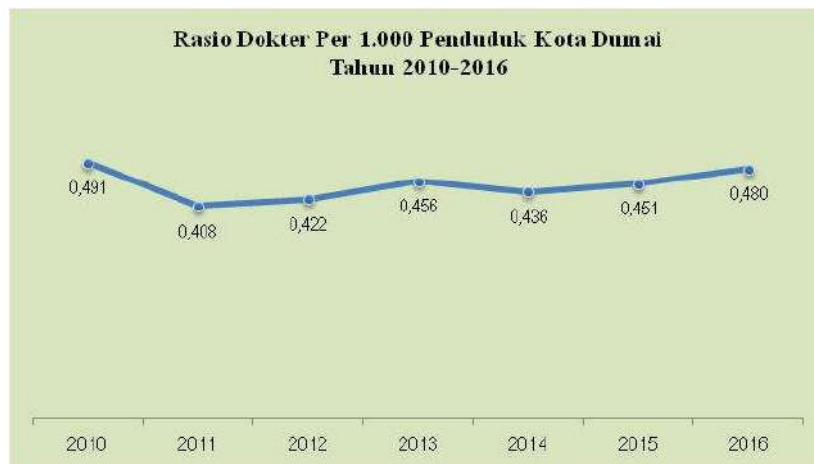
Tabel 2.47 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Dumai Dalam Angka, diolah

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Dokter	125	106	113	125	122	129	140
Jumlah penduduk	254.337	259.913	268.022	274.089	280.109	285.967	291.908
Rasio dokter per 1.000 penduduk	0,491	0,408	0,422	0,456	0,436	0,451	0,480

Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2010 adalah sebesar 0,491 yang artinya bahwa setiap 1.000 orang penduduk dilayani oleh 0,491 dokter. Dengan kata lain 1 orang dokter melayani

2.037 penduduk. Jumlah dokter di Kota Dumai mengalami fluktuasi, ini disebabkan antara lain karena terdapat perbedaan pendataan di masing-masing unit pelayanan kesehatan. Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya kriteria pendataan dokter praktek di rumah maupun di pusat pelayanan kesehatan, baik meliputi nama maupun alamatnya, sehingga dapat terjadi perhitungan ganda pada saat pendataan. Selain itu adanya pembatasan jumlah praktek tiap dokter menjadi maksimal tiga tempat menyebabkan data jumlah dokter mengalami penurunan. Akan tetapi rasio itu kemudian turun menjadi 0,480 pada tahun 2016. Ini disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Dumai, namun pertambahan jumlah dokter yang melayani tidak seimbang dengan pertambahan jumlah penduduk.



Gambar 2.37 Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Dumai Dalam Angka, diolah

3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Tenaga medis di Kota Dumai meliputi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat dan bidan. Hasil pendataan rasio tenaga medis per 1.000 orang penduduk Kota Dumai tahun 2012 sampai dengan 2016, menunjukkan peningkatan dari 0,3120 menjadi 0,3784. Berikut ini tabel 2.48 dan Gambar 2.38 yang menunjukkan perkembangan rasio tenaga medis di Kota Dumai.

Tabel 2.48 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai
Tahun 2012-2016

Sumber: Dumai Dalam Angka, diolah

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Tenaga Medis	766	808	806	1076	1082
Jumlah penduduk	268.022	274.089	280.109	285.967	291.908
Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk	0,422	0,456	0,436	0,451	0,480



Gambar 2.38 Rasio Tenaga Medis per 1.000 Penduduk Kota Dumai
Tahun 2012-2016

Sumber: Dumai Dalam Angka, diolah

Salah satu penyebab meningkatnya Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu adalah terbatasnya tenaga kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai khususnya tenaga medis yakni tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis baik di puskesmas maupun di RSUD Kota Dumai. Pada umumnya kasus kematian bayi, kematian balita dan kematian ibu merupakan kasus kematian dengan rujukan ke rumah sakit. Dengan ditetapkannya RSUD Kota Dumai menjadi rumah sakit rujukan regional oleh Pemerintah Pusat, maka pasien yang berobat ke RSUD Kota Dumai tidak hanya pasien dari Kota Dumai namun juga pasien dari Kabupaten lain di Provinsi Riau seperti dari Bengkalis, dan Rokan Hilir. Pada tahun 2017 total tenaga medis yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) sebanyak 1.109 orang yang terdiri dari dokter spesialis sebanyak 36 orang, dokter umum sebanyak 72 orang dan dokter gigi sebanyak 23 orang. Jumlah tenaga medis ini bertambah sebanyak 12 orang dari tahun 2016. Dengan demikian pada tahun

2017 rasio dokter spesialis sebesar 12 per 100.000 penduduk, rasio dokter umum sebesar 24 per 100.000 penduduk dan rasio dokter gigi sebesar 8 per 100.000 penduduk.

Tabel 2.49 Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

Uraian Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Medis	
	Tahun 2016	Tahun 2017
Dokter Spesialis	30	36
Dokter Umum	87	72
Dokter Gigi	23	23
Perawat	425	435
Bidan	314	331
Apoteker	41	38
Asisten Apoteker	17	19
Gizi	25	25
Sanitasi	10	10
Kesehatan. Masyarakat	44	52
Teknisi Medis	81	68

Permasalahan penduduk pendatang atau illegal merupakan permasalahan terbesar dalam pelaksanaan program kesehatan di Kota Dumai. Apabila permasalahan penduduk pendatang atau illegal ini tidak ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota Dumai, maka dapat berdampak pada kegagalan pencapaian pelaksanaan program kesehatan yang diukur melalui indikator Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu Melahirkan, serta persentase balita dengan gizi buruk dan gizi kurang.

Pada umumnya permasalahan kesehatan yang ada banyak merupakan kontribusi dari penduduk pendatang (illegal) tersebut. Para penduduk pendatang (illegal) pada umumnya jarang mengakses pelayanan kesehatan dasar karena status mereka yang illegal yang otomatis tidak mempunyai kartu identitas seperti KTP.

4. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).

Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani adalah Ibu hamil dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas perawatan dan rumah sakit pemerintah/swasta dengan fasilitas PONED dan PONEK (pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi komprehensif).

Kasus komplikasi kebidanan yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2010 hingga 2015 telah melewati target Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Peraturan Menteri Kesehatan No 741/Menkes/Per/VII/2008, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Dumai sudah melebihi dari target nasional (80%).

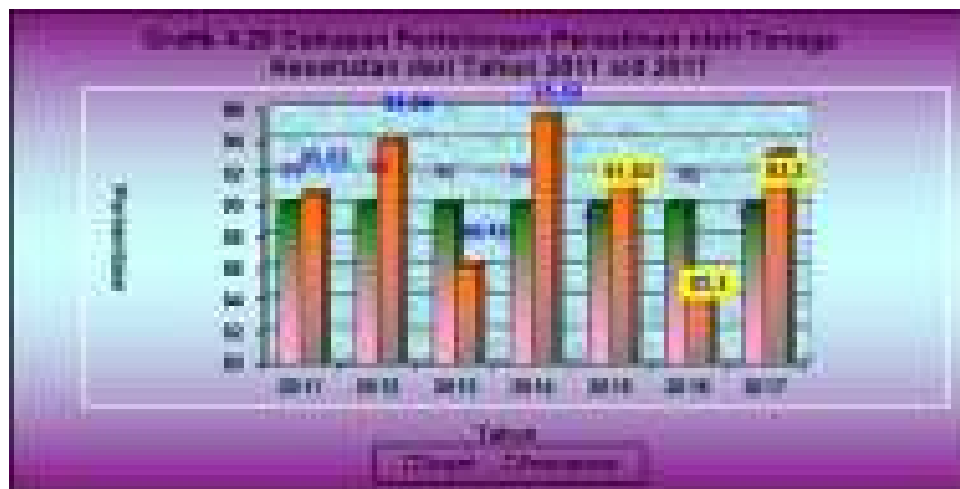
5. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Kesehatan balita tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan ibu namun dipengaruhi pula oleh faktor yang lain, diantaranya adalah proses kelahiran/persalinan. Data penolong kelahiran merupakan salah satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak maupun pelayanan kesehatan secara umum. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik daripada yang ditolong dukun atau lainnya karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan, terutama pada saat kelahiran.

Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih atau cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan adalah perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Mengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator digunakan proporsi

pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih. Dari data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, selama tahun 2011 sampai 2017 cenderung meningkat. Berikut ini perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai.

Gambar 2.39 di bawah ini menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai cenderung naik dari tahun 2011 sampai 2017. Pada tahun 2011 angka cakupan tersebut sebesar 90,65%, dan pada tahun 2017 naik menjadi 93,2%.



Gambar 2.39 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2016

Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Permenkes No 741/Menkes/VII/2008, yang menargetkan cakupan sebesar 90%, maka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai pada tahun 2011 sampai 2017 telah melebihi target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya penduduk yang memilih tenaga kesehatan sebagai penolong kelahiran utama karena semakin meningkatnya kemampuan penduduk untuk mengakses fasilitas kesehatan.

6. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT.

Untuk cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Dumai menunjukkan bahwa masyarakat Kota Dumai telah mendapatkan pelayanan imunisasi baik melalui Posyandu, Puskesmas maupun Rumah Sakit. Berikut ini tabel cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Dumai. Pada tahun 2012 sampai dengan 2014, cakupan kelurahan UCI telah mencapai 100%, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan. Berikut ini perkembangan cakupan kelurahan UCI di Kota Dumai.

Kementerian Kesehatan menargetkan pada tahun 2014 seluruh desa/ kelurahan mencapai 100% UCI (*Universal Child Immunization*) atau 90% dari seluruh bayi di desa/kelurahan tersebut memperoleh imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG, Hepatitis B, DPT-HB, Polio dan campak. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan *Human Development Index* terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan dimasa mendatang.

Kementerian Kesehatan menetapkan imunisasi sebagai upaya nyata pemerintah untuk mencapai *Millennium Development Goals* (MDGs), khususnya untuk menurunkan angka kematian anak. Indikator keberhasilan pelaksanaan imunisasi diukur dengan pencapaian UCI desa/kelurahan, yaitu minimal 80% bayi didesa/kelurahan telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar sangat penting diberikan sewaktu bayi (usia 0

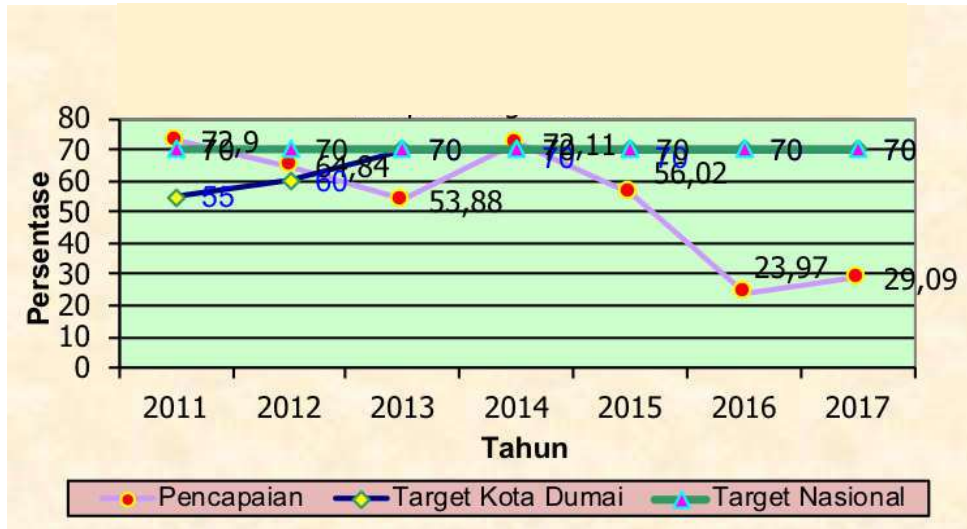
- 11 bulan) untuk memberikan kekebalan dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Tanpa imunisasi anak-anak mudah terserang berbagai penyakit, kecacatan dan kematian. GAIN UCI akan dilaksanakan secara bertahap mulai , dengan sasaran seluruh bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu BCG, Hepatitis B, DPT-HB, Polio dan campak.

Imunisasi BCG (*Bacillus Calmette-Guerin*) sebanyak 1 (satu) kali dilakukan untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Imunisasi BCG diberikan segera setelah bayi lahir di tempat pelayanan kesehatan atau mulai 1 (satu) bulan di Posyandu. Imunisasi hepatitis-B sebanyak 1 (satu) kali untuk mencegah penyakit Hepatitis B yang ditularkan dari ibu ke bayi saat persalinan dan dapat menyebabkan pengerutan hati (*sirosis*) dan kanker hati. Imunisasi Hepatitis B ini diberikan segera setelah lahir di sarana pelayanan kesehatan. Imunisasi DPT-HB sebanyak 3 (tiga) kali untuk memberi kekebalan pada penyakit difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus dan Hepatitis B. Imunisasi ini pertama kali diberikan pada usia bayi 2 (dua) bulan. Kemudian imunisasi berikutnya selisihnya 4 minggu. Pada saat ini pemberian imunisasi DPT dan Hepatitis B dalam program imunisasi dilakukan bersamaan dengan menggunakan vaksin DPT-HB. Imunisasi polio untuk memberikan kekebalan dari penyakit polio dan diberikan sebanyak 4 (empat) kali dengan jelang waktu (jarak) 4 minggu. Imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak, diberikan pada bayi umur 9 bulan.

7. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Jumlah penderita penyakit TBC yang meningkat justru merupakan nilai positif karena menunjukkan bahwa sistem surveilans di tingkat masyarakat telah optimal dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang penyakit TBC untuk memeriksakan secara dini apabila terjadi gejala-gejala yang mengarah pada penyakit TBC. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dikota Dumai berfluktuasi selama krun waktu 2011-2017. Jika

dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam Permenkes No 741/Menkes/VII/2008, yang menargetkan cakupan sebesar 100% pada tahun 2011, maka cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Dumai belum mencapai target nasional. Berikut ini cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA yang disajikan dalam gambar:



Gambar 2.40 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

Apabila ditemukan kasus TBC positif maka penderita akan segera diberi obat sejak dini dengan harapan dapat mencegah penularan dan sekaligus memutus mata rantai penularan penyakit tersebut. Penanganan kasus TBC ini perlu ada dukungan dari semua pihak, terutama anggota keluarga. Karena penderita harus meminum obat selama 6 bulan berturut turut tanpa putus.

Faktor kebosanan dan kejenuhan akan timbul. Untuk itu keluarga harus memberi dukungan penuh karena sakit TBC dapat disembuhkan, dengan catatan harus dengan rutin dan disiplin meminum obatnya.

Pada tahun 2017 dari total 297 penderita TB Paru BTA + yang ditemukan dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, sebanyak 258 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya

menunjukkan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + adalah sebesar 86,87%. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016 sebesar 88,38%, maka terlihat ada penurunan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +. Apabila dibandingkan dengan target Kota Dumai sebesar 88%, maka pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + tahun 2017 belum mencapai target. Pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 2.41 berikut.

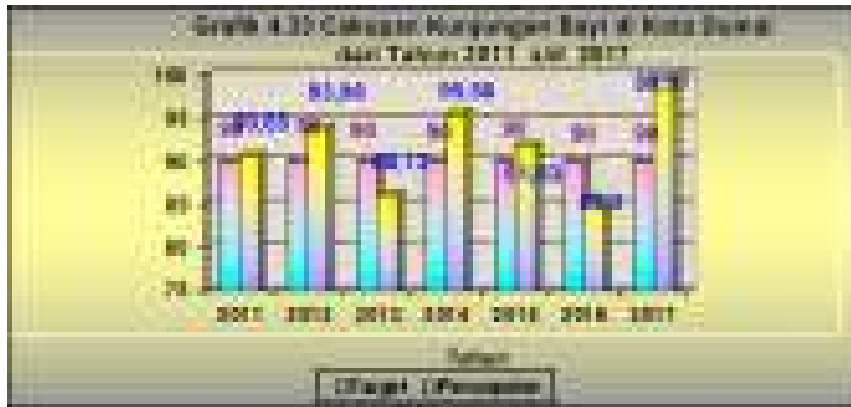


Gambar 2.41 Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+ Kota Dumai Tahun 2014-2017
 Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

8. Cakupan Kunjungan Bayi

Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK), manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2011 cakupan kunjungan bayi sebesar 90,65% dan pada tahun 2017 sebesar 99,57%.

Bila dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yakni sebesar 90%, maka angka tersebut telah melebihi target.



Gambar 2.42 Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai
Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

Cakupan kunjungan bayi di Kota Dumai diukur dari jumlah kedatangan ke pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta dengan syarat:

- a. Sampai dengan umur 1 tahun (12 bulan kurang 1 hari) sudah mendapat vitamin A sebanyak 1 kali.
- b. Penimbangan berat badan dilakukan minimal sebanyak 8 kali dalam 1 tahun.
- c. Melakukan pemeriksaan SDIDTK, yaitu pemantauan pertumbuhan perkembangan bayi (tercatat di dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak/KIA).

9. Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan
- b. Pusat pemberdayaan masyarakat
- c. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer
- d. Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer

Sarana bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu yang ada yang merupakan bangunan hibah dari pemerintah Kabupaten Bengkalis karena adanya pemekaran Kota Dumai, pada umumnya sudah berumur tua dan kondisinya sudah mulai rusak. Seluruh kelurahan di Kota Dumai telah memiliki poskeskel, namun masih ada sebanyak 9 poskeskel lagi yang belum memiliki bangunan sendiri (masih menumpang/menyewa). Karena minimnya anggaran di Dinas Kesehatan untuk melakukan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya termasuk poskeskel mengakibatkan tidak semua puskesmas dan jaringannya bisa dilakukan rehabilitasi secara maksimal. Dari 10 puskesmas, 13 puskesmas pembantu dan 24 poskeskel yang ada pada umumnya kondisinya rusak ringan (di wilayah kerja puskesmas perkotaan seperti wilayah kerja puskesmas Dumai Kota, Dumai Barat, Jaya Mukti, Bumi Ayu, Purnama dan Bukit Kapur), sedang maupun berat (di wilayah kerja puskesmas pedesaan seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Medang Kampai, Bukit Kayu Kapur dan Bukit Timah).

Tabel 2.50 Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2017
Sumber: Dinas Kesehatan

Kecamatan	Nama Puskesmas	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Jumlah Tempat Tidur
Dumai Timur	1. Jaya Mukti	√		
Dumai Barat	2. Dumai Barat	√		
	3. Purnama	√		
Bukit Kapur	4. Bukit Kapur		√	17
	5. Bukit kayu Kapur			
Sungai Sembilan	6. Sungai Sembilan		√	8
Medang Kampai	7. Medang Kampai		√	18
Dumai Kota	8. Dumai Kota	√		
Dumai Selatan	9. Bumi Ayu	√		
	10. Bukit Timah	√		

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, cakupan pelayanan puskesmas sampai tahun 2016 telah menjangkau seluruh kecamatan di Kota Dumai dengan rasio 142,86 seperti yang dapat

dilihat pada Tabel 2.51. Adapun perkembangan jumlah puskesmas dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Kota Dumai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 tersaji pada Tabel 2.52. Sedangkan untuk kondisi puskesmas keliling dan ambulans yang ada di puskesmas se Kota Dumai tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.51 Cakupan Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Dinas Kesehatan

Indikator	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah puskesmas	9	9	9	9	10	10	10
Jumlah seluruh kecamatan	5	5	7	7	7	7	7
Rasio puskesmas	180	180	128,57	128,57	142,86	142,86	142,86

Tabel 2.52 Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Dinas Kesehatan

Tahun	Jumlah Penduduk Kota Dumai	Jumlah Puskesmas	Rasio Puskesmas Per 100.000 penduduk
2010	254.337	9	3,54
2011	259.913	9	3,46
2012	268.022	9	3,36
2013	274.089	9	3,28
2014	280.109	10	3,57
2015	285.967	10	3,50
2016	291.908	10	3,43

Tabel 2.53 Kondisi Puskesmas Keliling dan Ambulans di Puskesmas Se-Kota Dumai Tahun 2016

Sumber: Dinas Kesehatan

No	Nama Puskesmas	Uraian Pengadaan Puskesmas Keliling & Ambulans			Keterangan
		Jenis/Merk	Jumlah	Tahun Pengadaan/ Sumber Dana	
1	Dumai Kota	Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
		Pusling/Toyota Kijang	1 unit	1995/APBD Kab Bengkalis	Kondisi rusak berat
2	Bumi Ayu	Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
3	Dumai Barat	Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
4	Bukit Timah	Pusling/Isuzu	1 unit	2004/APBD Propinsi Riau	Kondisi rusak sedang
		Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
5	Bukit Kapur	Pusling/Toyota Kijang LGX	1 unit	2002/APBD Propinsi Riau	Kondisi rusak berat
		Pusling/Isuzu	1 unit	2003/APBD Propinsi Riau	Kondisi rusak berat
		Ambulance/Isuzu ELV	1 unit	Hibah CSR Pertamina 2011	Baik
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik

No	Nama Puskesmas	Uraian Pengadaan Puskesmas Keliling & Ambulans			Keterangan
		Jenis/Merk	Jumlah	Tahun Pengadaan/ Sumber Dana	
6	Sungai Sembilan	Pusling/Toyota Kijang	1 unit	2002/APBD Kota Dumai	Kondisi rusak berat
		Pusling/Isuzu	1 unit	2006/APBD Kota Dumai	Dalam proses penghapusan
		Ambulance/KIA Travello	1 unit	2012/APBD Kota Duma	Baik
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
7	Medang Kampai	Pusling/KIA Travello	1 unit	2007/APBD Kota Dumai	Dalam proses penghapusan
		Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
		Pusling Toyota Avanza	1 unit	2014 (APBD)	Baik
8	Jaya Mukti	Ambulance/KIA Travello	1 unit	2012/APBD Kota Dumai	Baik
9	Purnama	Pusling Suzuki APV	1 unit	2014 (APBN)	Baik
10	Bukit Kayu Kapur	Ambulance/Suzuki APV	1 unit	2012/APBN-P (Hibah Pusat)	Baik
		Ambulannce/Mitsubisi	1 unit	2015 (Hibah Setda)	Baik

10. Cakupan Puskesmas Pembantu

Jumlah Puskesmas Pembantu di Kota Dumai sampai dengan tahun 2016 sebanyak 13 unit yang tersebar di beberapa kelurahan. Berikut ini sebaran puskesmas pembantu di Kota Dumai.

Tabel 2.54 Sebaran Puskemas Pembantu di Kota Dumai
Sumber: Dinas Kesehatan

Kecamatan	Nama Puskesmas Pembantu
Dumai Barat	1. Parit Pisang Mas
Dumai Kota	2. Rimba Sekampung
Bukit Kapur	3. Gurun Panjang
	4. Kayu Kapur
	5. Simpang Murini
	6. Suka Damai
	7. Basilam Baru
Sungai Sembilan	8. Simpang Pulai
	9. Kampung Sejati
	10. Sungai
	11. Sungai Teras
	12. Bulu Hala
	13. Pelintung
Medang Kampai	

Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari tahun 2010 sampai tahun 2016 jumlah puskesmas pembantu yang ada tetap, tetapi Kota Dumai mengalami pemekaran

menjadi 33 kelurahan di Tahun 2012 seperti yang terlihat pada Tabel 2.55 berikut.

Tabel 2.55 Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2010-2016
Sumber: Dinas Kesehatan

Indikator	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah puskesmas pembantu	13	13	13	13	13	13	13
Jumlah seluruh kelurahan	32	32	33	33	33	33	33
Rasio puskesmas pembantu	40,62	40,62	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39

11. Akses Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,

- a. Semua puskesmas harus memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam, kondisi saat ini baru 4 puskesmas di 4 kecamatan yang memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam yaitu : puskesmas Medang Kampai, Sungai sembilan, Bukit kapur dan Dumai barat.
- b. Puskesmas wajib memiliki kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan, sarana dan prasarana , kondisi saat ini di Kota Dumai rata-rata puskesmas baru memiliki \pm 45% dari 100% kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan, sarana dan prasarana.

Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis dan terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai. Kondisi di atas menyebabkan petugas kesehatan sulit dalam menjangkau masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan masyarakatpun sulit mengakses sarana pelayanan kesehatan.

Dengan kondisi wilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan yang luas dan juga memiliki daerah sulit dijangkau, serta kondisi jalan dan infrastruktur lainnya yang belum memadai mempengaruhi akses masyarakat yang perlu mendapatkan pelayanan rujukan ke RSUD Kota

Dumai khususnya pasien gawat darurat atau rujukan kasus maternal neonatal resti dan komplikasi. Meskipun ada tersedia puskesmas keliling air (speedboat), namun karena jumlahnya hanya 1 unit dan muatannya juga terbatas, maka belum bisa melayani seluruh pasien rujukan khususnya yang berada di daerah sulit. Tidak jarang kasus kematian pasien rujukan terjadi di perjalanan sebelum tiba di rumah sakit karena medan yang sulit sehingga jarak tempuh menjadi lama.

12. Penyakit Menular dan Tidak Menular

Potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi akan meningkatkan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko. Adanya peningkatan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko dari Tahun 2016 (0,70%) dan Tahun 2017 (0,96%).

Mobilitas penduduk melalui transmigrasi, pembukaan lahan perkebunan, pengembangan tambak udang serta penebangan pohon bakau sebagai industri arang bakau dan faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD dan malaria. Walaupun Kota Dumai sudah eliminasi malaria namun tetap dilakukan pemeliharaan agar tidak terjadi KLB. Angka kesakitan demam berdarah dengue pada tahun 2015 (115,89 per 100 penduduk) menurun pada tahun 2016 (91,58 per 1000 penduduk) Angka kesakitan malaria Tahun 2015 s/d 2016 cenderung statis 0,06 per 1000 penduduk

Saat ini Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan tuberkulosis terbanyak setelah india. Data Profil Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun 2017 telah melaksanakan pengobatan penderita TB Paru BTA+ sebanyak 400 Penderita. Penderita baru TB

BTA + di Kota Dumai tahun 2015 sebesar 56,02% dan tahun 2017 sebesar 23,97% (belum mencapai target)

Penyebab Diare bisa bermacam-macam. Salah satunya, diare dapat terjadi karena keracunan makanan, infeksi kuman, dan stres. Angka kesakitan diare semua umur di Kota Dumai selama tahun 2015 sebanyak 8.550 penderita atau IR sebesar 270 per 1000 penduduk bila dibandingkan target program tahun 2016 dimana IR Diare sebesar 214 per 1000 penduduk masih lebih rendah dari target.

Hepatitis dapat memberikan beragam manifestasi dan perjalanan penyakit. Hepatitis dapat mengganggu berbagai fungsi tubuh terutama yang berkaitan dengan metabolisme. Pada tahun 2017 terdapat 3.500 penderita Hepatitis di Kota Dumai.

Gaya hidup sehat bisa mencegah hadirnya berbagai penyakit tidak menular. Hipertensi dan Diabetes malitus. Pada tahun 2017 Hipertensi tercatat 19.059 Penderita (21,01 %) dan Diabetes malitus tercatat 8.026 Penderita (4,67%) perlu menjadi perhatian karena jika tidak ditanggulangi dengan baik akan menjadi komplikasi lebih berat yang menyebabkan kematian dan beban biaya pengobatan yang sangat besar. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk saat ini perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, perlu mendapatkan layanan cepat. Pada tahun 2017 terdapat 1.110 penderita gangguan jiwa 7 diantaranya dipasung.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terdapat beberapa indikator dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yakni indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, rasio rumah layak huni, rasio permukiman layak huni, panjang jalan dilalui roda empat, jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda empat).

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (Realisasi)

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik didapatkan dari formula panjang jalan kondisi baik (km) dibagi dengan panjang jalan seluruhnya (km). Perhitungan proporsi panjang jaringan jalan mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Tabel 2.56 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2010-2018

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Dumai Dalam Angka

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Panjang jalan kondisi baik (km)	900,9	907,2	955,5	868,1	955,6	826,2	639,1	618,9	627,3
Panjang jalan seluruhnya (km)	1.846,1	1.749,8	1.803,8	1.561,2	1.803,8	1.486,7	1.198,2	1.198,2	1.198,2
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	48,80%	51,85%	52,97%	55,60%	52,97%	55,57%	53,33%	51,65%	52,35%

Melihat tren yang terjadi di Kota Dumai, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2013, yakni 48,80% pada tahun 2010 naik menjadi 55,60% pada tahun 2013. Pada tahun 2014 turun menjadi 52,97%, kemudian naik kembali pada tahun 2015 menjadi 55,57%. Kembali mengalami penurunan di tahun 2016 dan 2017 berturut-turut menjadi 53,33% dan 51,6%. Di tahun 2018 kondisinya semakin membaik karena terjadi peningkatan persentase panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 52,35%. Berikut adalah Gambar yang menunjukkan hasil dari indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Dumai.



Gambar 2.43 Perbandingan Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dengan Panjang Jalan Seluruhnya (KM) di Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Dumai Dalam Angka

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik diukur untuk menunjukkan gambaran mengenai tingkat pelayanan suatu jalan dalam melayani pergerakan lalu lintas. Pada Tabel 2.59 tersaji kondisi jalan di Kota Dumai per kecamatan pada tahun 2017 dan 2018. Dari tabel tersebut terlihat bahwa lebih dari 51% ruas jalan di Kota Dumai ada pada kondisi baik. Pada tahun 2018 panjang jaringan jalan di Kota Dumai dalam kondisi baik meningkat dari 51,65% di tahun 2017 menjadi 52,35% pada tahun 2018. Begitu pula sebaliknya, pada tahun 2018 terjadi pengurangan panjang ruas jalan, baik dalam kondisi sedang, rusak ringan maupun rusak berat. Meskipun demikian, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Dumai masih jauh berada dibawah angka 0,65.

Tabel 2.57 Kondisi Jalan di Kota Dumai Tahun 2017 dan 2018 per Kecamatan
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2018

Kecamatan	Panjang Ruas Jalan (KM)	Panjang Ruas Jalan (KM) Tiap Kondisi							
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Bukit Kapur	171,67	77,17	77,25	51,36	51,44	26,17	26,17	16,89	16,89
Dumai Barat	180,58	91,15	92,88	22,19	22,19	32,63	32,07	34,61	33,45
Dumai Kota	61,26	49,95	51,00	5,04	5,04	4,00	2,95	2,28	2,28
Dumai Selatan	132,42	99,23	99,47	11,15	11,39	10,39	10,39	11,42	11,42
Dumai Timur	142,31	95,71	95,88	26,56	26,73	9,79	9,79	10,08	10,08
Medang Kampai	291,86	141,59	143,10	87,17	87,86	40,91	40,52	21,50	21,06
Sungai Sembilan	218,14	64,08	67,73	37,85	39,19	57,93	55,78	56,93	56,77

2. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk (Realisasi)

Formula yang digunakan untuk penghitungan rasio tempat ibadah persatuan penduduk adalah dengan membagi antara indikator jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dan kemudian dikalikan dengan bilangan 1000.

Tabel 2.58 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai
Tahun 2010 – 2015
Sumber: Dumai Dalam Angka

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	1,83	1,91	1,95	1,87	1,83	1,86	1,84

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Masjid	203	206	211	196	196	196	216
Mushola	205	217	219	217	217	217	216
Gereja Kristen	52	52	71	73	73	73	80
Gereja Katolik	5	4	6	6	6	6	6
Pura	N/A	10	1	1	1	1	1
Vihara	1	7	7	7	7	7	7
Konghucu	N/A	1	12	12	12	12	10

Hasil yang ditunjukkan oleh indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.44. Salah satu penyebabnya diduga adanya perubahan jumlah tempat ibadah dari tahun ke tahunnya, namun fluktuasi rasio tempat ibadah tersebut tidak selalu sebanding dengan jumlah tempat ibadah karena ada faktor lain yang berpengaruh, yaitu jumlah penduduk Kota Dumai yang selalu meningkat setiap tahunnya.



Gambar 2.44 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Dumai Dalam Angka

Hingga tahun 2016 rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai masih sangat kecil, yakni 1,84. Hal ini berarti dari setiap 1.000 penduduk Kota Dumai, hanya 2 orang saja yang dapat mengakses tempat ibadah tersebut. Namun, sebenarnya ada ukuran lain yang harus diperhatikan, yaitu luas tempat ibadah karena biasanya satu tempat ibadah dapat menampung banyak umat. Selain itu, tempat ibadah juga dapat dipakai berkali-kali dalam satu hari sehingga memungkinkan para umat untuk bergantian dalam menggunakannya.

3. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1.000. Data mengenai rasio tempat pembuangan sampah sudah merupakan data jadi yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Berikut adalah data mengenai indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai.

Dalam rentang waktu tahun 2011 hingga tahun 2017 jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rasio TPS per satuan penduduk seperti yang tersaji pada Tabel 2.59 dibawah ini:

Tabel 2.59 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2018

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS0 per Satuan Penduduk)	12 TPS	12 TPS	12 TPS	12 TPS	12 TPS	14 TPS	15 TPS	15 TPS



Gambar 2.45 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2018

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah,

pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya. Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko. Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT, dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Tata Kota.

Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan. Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

4. Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat

Indikator panjang jalan dilalui roda empat didapatkan dari hasil pembagian antara jumlah panjang jalan (km) dengan jumlah penduduk. Berikut adalah tabel yang menampilkan hitungan indikator panjang jalan dilalui roda empat di Kota Dumai.

Tabel 2.60 Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan BPS

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Panjang jalan seluruhnya (km)	900,91	907,19	955,53	868,07	955,550	826,19	639,05
Jumlah Penduduk	254.337	259.913	268.022	274.089	280.109	285.967	291.908
Panjang jalan dilalui roda 4	3,54	3,49	3,57	3,17	3,41	2,89	2,19

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil yang dihasilkan oleh indikator panjang jalan dilalui roda empat berfluktuatif dengan kecenderungan menurun, dari 3,54 pada tahun 2010 menjadi 2,19 di tahun 2016. Tidak didapatkan informasi lebih lanjut mengenai indikator ini. apabila digambarkan dengan Gambar maka indikator panjang jalan dilalui roda empat di Kota Dumai pada Gambar 2.45 seperti dibawah ini.



Gambar 2.46 Panjang Jalan Yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan BPS, diolah

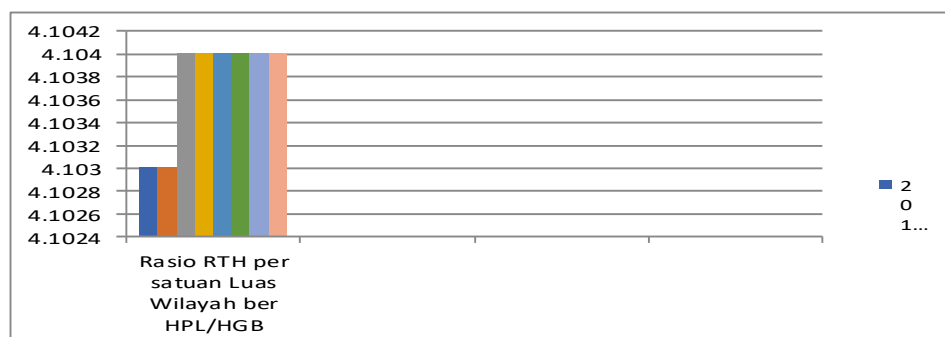
5. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB didapatkan dari perhitungan luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas wilayah ber HPL/HGB. Data mengenai rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai ini merupakan data jadi, sehingga tidak diketahui mengenai data per sub indikatornya. Berikut adalah data realisasi rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Kota Dumai.

Tabel 2.61 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB Kota Dumai Tahun 2011-2018

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%



Gambar 2.47 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kota Dumai

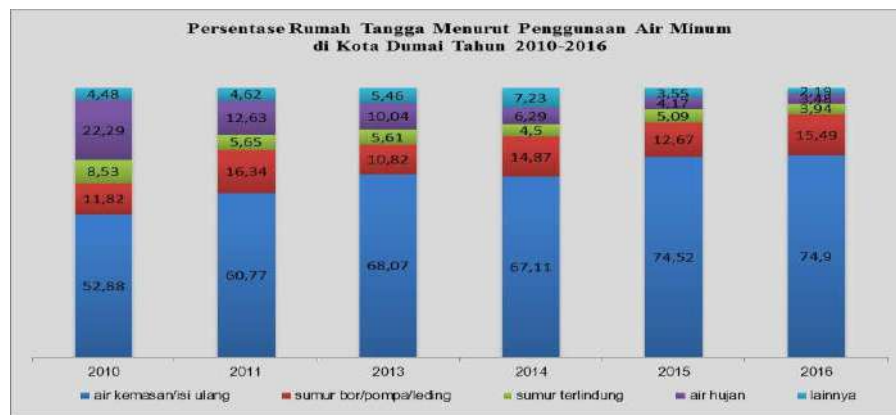
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Rasio Ruang Terbuka Hijau diatas diperoleh dengan membandingkan luas RTH dengan luas wilayah. Adapun luas wilayah yang digunakan adalah luas wilayah perkotaan Dumai yaitu wilayah diluar kawasan hutan. Dari data yang ditunjukkan oleh gambar diatas menunjukkan bahwa rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di Kota Dumai memiliki kecenderungan yang sama yakni 4,103 pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2018.

D. Perumahan dan Pemukiman

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Air minum/air bersih mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sumber-sumber air yang digunakan oleh rumah tangga sebagai sumber air minum/air bersih antara lain: air kemasan/isi ulang, sumur bor/pompa/leding, sumur terlindung, air hujan, dan lainnya. Adapun perkembangan penggunaan sumber air tersebut dari tahun 2010-2016 tersaji pada Gambar 2.48 (tanpa data tahun 2012).



Gambar 2.48 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Air Minum di Kota Dumai Tahun 2010-2016
Sumber: Statistik Daerah Kota Dumai

Dari Gambar 2.48 diatas terlihat bahwa persentase penggunaan air hujan sebagai sumber utama air minum cenderung mengalami penurunan dari 22,29% pada tahun 2010 menjadi 3,48% di tahun 2016. Sedangkan penggunaan air kemasan/isi ulang dan sumur bor/pompa/leading sebagai sumber utama air minum mengalami

peningkatan dari 64,70% pada tahun 2010 menjadi 90,39 di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap sumber utama air minum semakin mudah. Disisi lain juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terkait penggunaan air bersih untuk kesehatan juga semakin meningkat.

Satu-satunya perusahaan daerah yang menyelenggarakan fungsi memproduksi air minum di Kota Dumai adalah PDAM. Pelanggan pengguna air bersih PDAM Kota Dumai menunjukkan angka yang menurun seperti yang tersaji pada Gambar 2.49. Lebih dari 75% pelanggan PDAM di tahun 2015 merupakan pelanggan non niaga. Dari gambar tersebut terlihat bahwa pelanggan yang dilayani oleh PDAM Kota Dumai belum belum menjangkau seluruh penduduk kota.



Gambar 2.49 Jumlah Pelanggan Kota Dumai
Sumber: Dumai Dalam Angka

2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Indikator rumah tangga pengguna listrik didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Berikut adalah tabel rumah tangga pengguna listrik di Kota Dumai.

Tabel 2.62 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai
Sumber: Dumai Dalam Angka

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	37.787	43.634	48.511	54.873	59.766	64.162	68.432
Jumlah rumah tangga	63.584	64.978	67.006	68.522	70.027	71.492	72.977

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Rumah tangga pengguna listrik (%)	59,43	67,15	72,40	80,08	85,35	89,75	93,77

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah pelanggan listrik di Kota Dumai tahun 2010-2016 terus mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Pada Tabel 2.53 terlihat bahwa hampir seluruh wilayah Kota Dumai telah teraliri aliran listrik. Pada tahun 2016 sebanyak 93,77% rumah tangga telah teraliri aliran listrik.

3. Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Formula yang digunakan untuk menghitung persentase luas permukiman yang tertata adalah dengan membagikan luas area permukiman tertata dengan luas area permukiman keseluruhan dikalikan dengan bilangan 100. Data yang didapatkan dari Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai hanya data jadi tahun 2013, yakni sebesar 27,69.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, pada tahun 2015 terdapat 127,6 Ha kawasan kumuh perkotaan yang tertuang di dalam Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 448/Bappeda/2015. Adapun lokasi lokasi lingkungan dan permukiman kumuh perkotaan yang dimaksud tersaji pada Tabel 2.63 berikut.

Tabel 2.63 Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2018

Kelurahan/Kawasan	Kecamatan	Luas Kawasan (Ha)
Laksamana	Dumai Kota	21,11
Dumai Kota	Dumai Kota	6,61
Bukit Bintang Jadi	Dumai Selatan - Dumai Kota	16,27
Buluh Kasap	Dumai Timur	7,01
Mukti Palas	Dumai Timur	29,74
Pangkalan Sesai	Dumai Barat	11,30
STDI Rimba Pangkalan	Dumai Barat - Dumai Kota	15,09
Teluk Binjai	Dumai Timur	4,86
Bumi Ayu	Dumai Selatan	5,12
Ratu Sima	Dumai Selatan	10,94
Total		127,60

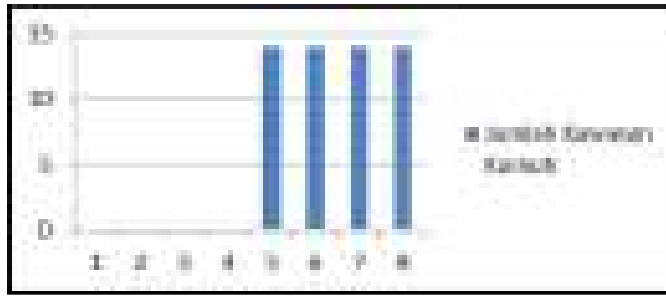
4. Jumlah Kawasan Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni dan Rasio Bangunan ber-IMB

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, pada tahun 2015 terdapat 14 Ha kawasan kumuh perkotaan dan Rumah tidak layak huni sebanyak 1.884 pada tahun yang tersaji pada Tabel 2.64 berikut.

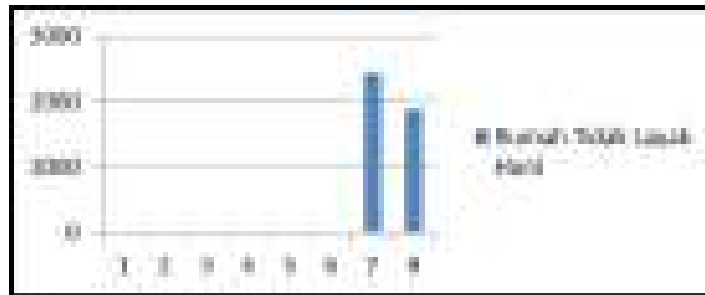
Tabel 2.64 Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2015-2018

Sumber : Dinas perumahan dan kawasan permukiman

Indikator	2015	2016	2017	2018	Sumber
Jumlah Kawasan Kumuh	14	14	14	14	Kotaku Provinsi Riau
Rumah Tidak Layak Huni	NA	NA	2.432	1.884	Kotaku Provinsi Riau



Gambar 2.50 Jumlah Kawasan Kumuh
Sumber: Dinas perumahan dan kawasan permukiman



Gambar 2.51 Rumah Layak Huni
Sumber: Dinas perumahan dan kawasan permukiman

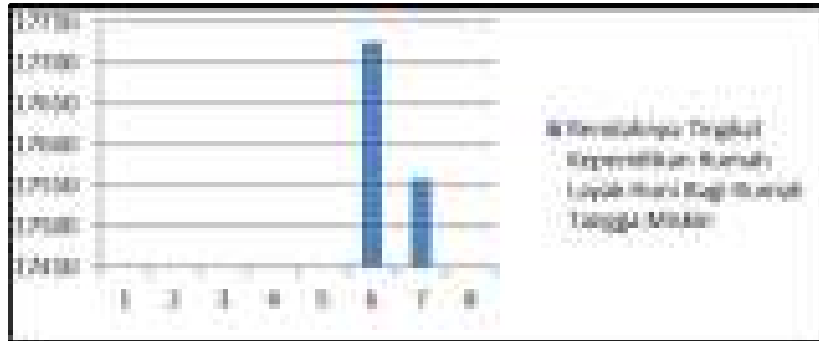
Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, dari tahun 2013 sampai tahun 2018 terdapat 1.231 berkas pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masuk ke OPD terkait, tetapi hanya sebanyak 32,74% (403 berkas) yang memperoleh izin, 0,89% (11 berkas) ditolak dan sisanya 66,37% (817 berkas) masih *pending*.

5. Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin

Tabel 2.65 Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2011-2018

Sumber : Dinas perumahan dan kawasan Permukiman

Indikator	2016	2017	Sumber
Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin	17.726	17.559	BKKBN



Gambar 2.52 Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin

Sumber: Sumber : Dinas perumahan dan kawasan permukiman

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja merupakan perbandingan antara jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada variabel rasio jumlah polisi pamong praja menggunakan data dari Badan Pusat Statistik. Rasio jumlah polisi pamong praja dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000 penduduk, dengan demikian kita akan mengetahui berapa besar pekerjaan yang dilakukan oleh polisi pamong praja, bila melihat jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan jumlah penduduk yang cukup besar.

Tabel 2.66 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Indikator	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Polisi Pamong Praja	149	136	99	91	86	90	98

Indikator	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah penduduk per 10.000*	25,43	25,99	26,80	27,41	28,01	28,60	29,19
Rasio jumlah pamong praja	5,86	5,23	3,69	3,32	3,07	3,15	3,36

Rasio jumlah polisi pamong praja di Kota Dumai dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Hal tersebut karena jumlah pamong praja yang semakin menurun sedangkan jumlah penduduk yang semakin naik terus menerus sehingga terjadi ketidakseimbangan rasio jumlah pamong praja di Kota Dumai.

2. Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Jumlah linmas per 10.000 penduduk merupakan perbandingan antara jumlah Linmas dengan jumlah penduduk per 10.000. Jumlah penduduk yang digunakan sebagai pembanding pada indikator ini adalah jumlah penduduk berdasarkan data dari BPS Kota Dumai.

Tabel 2.67 Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Indikator	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Linmas	1.581	1.584	1.584	1.590	1.593	1.599	1.599
Jumlah penduduk per 10.000*	25,43	25,99	26,80	27,41	28,01	28,60	29,19
Rasio linmas	62,16	60,94	59,10	58,01	56,87	55,92	54,78

3. Persentase Peningkatan Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan

Persentase peningkatan pos siskamling merupakan perbandingan antara jumlah siskamling dengan jumlah kelurahan. Persentase pos siskamling dihitung untuk mendapatkan jumlah siskamling yang ada di tiap-tiap kelurahan. Pos siskamling yang ada di tiap-tiap kelurahan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Berikut adalah tabel yang berisikan informasi mengenai persentase peningkatan pos siskamling per jumlah kelurahan.

Tabel 2.68 Persentase Peningkatan Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Indikator	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Pos Siskamling	173	173	173	173	173	173	173
Jumlah kelurahan	33	33	33	33	33	33	33
Persentase peningkatan pos siskamling	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07

Dari data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada penambahan jumlah siskamling disetiap kelurahan di Kota Dumai selama kurun waktu 2010-2016.

4. Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Cakupan patroli petugas Satpol PP Kota Dumai dari dapat dilihat pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69 Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Cakupan patroli petugas Satpol PP	65%	49%	92%	90%	95%	96%

Pada tahun 2016 terdapat 1.007 kegiatan penertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, dimana 80% jenis kegiatan penertibannya adalah penertiban PKL.

5. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota

Berdasarkan data dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Dumai pada tahun 2010 ada sebanyak 170 kasus dan pada tahun 2015 kasus pelanggaran K3 di kota Dumai berhasil diselesaikan sebanyak 238 kasus. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.70 berikut.

Tabel 2.70 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Dumai

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	170	132	231	236	235	238

6. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Dari data kantor kesbanglinmas Kota Dumai,petugas Linmas yang secara langsung berinteraksi dengan pada tahun 2010 adalah sebanyak 1.581 dan tahun 2015 menjadi 1.599. Karena interaksi dengan masyarakat, maka anggota Linmas bertugas untuk membantu tugas polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Tabel 2.71 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai
Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1.581	1.584	1.584	1.590	1.593	1.599	1.599

7. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dari rentang waktu tahun 2010 hingga tahun 2016 menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Data Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.72 berikut.

Tabel 2.72 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai
Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	51	123	60	25	23	29	33

8. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah di Kota Dumai dari rentang tahun 2010 hingga 2015 berjumlah 1 (satu) kegiatan. Data Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.73 berikut.

Tabel 2.73 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai
Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kegiatan pembinaan politik daerah	1 Keg.	-	-	1 Keg.	-	1 Keg.	1 Keg.

9. Resiko Bencana Kebakaran Permukiman

Salah satu permasalahan yang sampai saat ini menjadi isu penting untuk ditangani dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah meningkatnya resiko

bencana kebakaran yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan permukiman. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya manajemen pengurangan resiko bencana, khususnya kebakaran rumah penduduk/permukiman. Banyaknya kejadian kebakaran rumah penduduk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74 Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Permukiman di Kota Dumai
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2018

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Banyak kejadian kebakaran rumah penduduk	50 unit	35 unit	63 unit	34 unit	38 unit	66 unit

F. Sosial

Peningkatan sarana sosial di Kota Dumai terus ditingkatkan melalui proses pembangunan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial. Diharapkan melalui pembangunan sarana dan prasarana ini, diharapkan dapat memadukan penanganan berbagai aspek sosial serta dapat membantu masyarakat yang termarjinalkan di Kota Dumai. Adapun kondisi aspek sosial di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2012-2016 tersaji pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75 Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2012-2016
Sumber: Dinas Sosial

Uraian	TAHUN					SAT
	2012	2013	2014	2015	2016	
Penduduk Penyandang Masalah Sosial						
Penduduk rawan Sosial dan Sarana						
1). Anak Jalanan	35	35	35	8	8	Jiwa
2). Gepeng (Gembel dan Pengemis)	81	106	106	27	27	Jiwa
3). Fakir Miskin	9,423	9,423	9,423	9,423	9,423	Jiwa
4). Bayi Terlantar	18	18	18	32	32	Jiwa
5). Anak Terlantar	87	87	87	151	151	Jiwa
6). Lanjut Usia Terlantar	191	191	191	760	760	Jiwa
7). Penyandang Cacat Jiwa	392	392	392	122	122	Jiwa
8). Penyandang Cacat Ganda						Jiwa
9). Tuna Susila	96	96	96	356	356	Jiwa
10). Bekas Narapidana	61	61	61	38	38	Jiwa
11). Pengidap HIV/AIDS	159	159	159	159		Jiwa
12). Korban Penyalahgunaan NAPZA	23	23	23	30	30	Jiwa
Jumlah Panti Asuhan						

Uraian	TAHUN					SAT
	2012	2013	2014	2015	2016	
1). Panti Sosial Asuhan Anak	12	12	12	12	11	Buah
2). Panti Sosial Bina Remaja				1		Buah
3). Panti Sosial Tresna Wirda					1	Buah
Rumah singgah			1		1	Buah
Jumlah PMKS		182,074	183,963		182,009	Buah
1). PMKS Yang Tertangani		60,194	61,124		60,453	Buah
2). PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan		61,686	61,715		61,103	Buah
3). PMKS Yang Diberikan Bantuan		60,194	61,124		60,453	Buah
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)						
1). Karang Taruna		33	25		33	Buah
2). Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)		7	84		71	Orang
3). Organisasi Sosial		42	18		19	Buah
4). Lembaga swadaya masyarakat						Buah

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Ketenagakerjaan

1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi pembangunan. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.76 berikut.

Tabel 2.76 Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2012-2017
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dumai Dalam Angka

Indikator	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,72	64,14	65,26	66,94		
PHK	-	101		19	18	32
Kasus PHK	-	101	11	19	18	32
Orang Terkena PHK	-	101	124		65 orang	75 orang
Rata-Rata Kebutuhan Hidup Minimum	-	2.057.011	2.087.791	2.576.207	Berdasarkan PP 78 Tahun 2105 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup minimum dilakukan selama 5 tahun kemudian	
Rata-Rata Upah Minimum Pekerjaan Menurut Lapangan Usaha	-	1.490.000	1.995.552	2.200.000	2.453.000	2.655.372,50

Indikator	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
L. Usaha Angkutan, Penggundangan dan Komunikasi	-	6	9	11	16	Berdasarkan UU No 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana sudah menjadi kewenangan provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke kab/kota
L. Usaha Bangunan	-	102	35	39	41	
L. Usaha Industri Pengolahan	-	12	52	2	14	
L. Usaha Jasa Kemasyarakatan	-	8	3	-	3	
Keuangan, Ansuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	-	24	8	11	16	
L. Usaha Listrik, Gas dan Air	-	-	17	140	137	
L. Usaha Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dari Hotel	-	31	11	15	27	
L. Usaha Pertambangan dan Penggalan	-	1	15	5	7	
L. Usaha Pertanian, Perhutanan, Perburuhan dan Perikanan	-	2	12	6	11	

2. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.77 berikut.

Tabel 2.77 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2012- 2017
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pencari Kerja yang ditempatkan di Kota Dumai	472	1098	1308	315	1200	1210

3. Jumlah Pengangguran Terbuka

Pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Data jumlah pengangguran terbuka selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.78 berikut.

Tabel 2.78 Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2010-2016
Sumber: Dumai Dalam Angka

Indikator	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Laki-laki	2,201	2,200	2,663	2,502	3,174	3,461	3,511
Perempuan	2,429	1,474	1,940	2,359	1,378	1,757	1,656
Jumlah	4,630	3,674	4,603	4,861	4,552	5,218	5,167

4. Keselamatan dan Perlindungan

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah dengan memberikan perlindungan pada pekerja selama dia bekerja. Maksud dari pemberian perlindungan ini adalah agar pekerja merasa aman dan nyaman dalam bekerja dan merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.79 berikut.

Tabel 2.79 Keselamatan dan Perlindungan di Kota Dumai Tahun 2010- 2015
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Keselamatan dan Perlindungan	60	97	86	195	151	165

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana keselamatan dan perlindungan tenaga kerja sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2016-2017 tidak pernah disampaikan ke kabupaten/kota.

5. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan buruh dan pengusaha yang biasa terjadi adalah masalah upah minimum. Penentuan besaran upah yang dapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kearifan dari keduanya. Di Kota Dumai hampir setiap perselisihan dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan dampak berkepanjangan sehingga semua masalah 100% dapat diselesaikan. Data selengkapnya

mengenai angka perselisihan buruh dan pengusaha dapat dilihat dalam Tabel 2.80 berikut.

Tabel 2.80 Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai Tahun 2012-2017

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha	-	30	19	39	12	14

Data perusahaan wajib lapor sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan perusahaan dapat dilihat dalam Tabel 2.81 berikut.

Tabel 2.81 Perusahaan Wajib Lapor Tahun 2011-2016

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tahun	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja			
		WNI		WNA	
		LK	PR	LK	PR
2011	121	1986	201	-	-
2012	125	5837	527	20	-
2013	186	8210	1113	114	1
2014	155	8912	1030	23	-
2015	232	10384	1075	11	-
2016	272	13923	1564	66	1

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2010 jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebesar 2.986 dan pada tahun 2017 naik menjadi 5.202.

Tabel 2.82 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2010-2017

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2.986	2.986	2.986	2.986	2.986	3.046	3.974	5.202

2. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja.

PAK perempuan dihitung dengan membandingkan antara jumlah angkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar PAK perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2010 partisipasi angkatan kerja perempuan dari yang semula 1.474 pada naik menjadi 10.442 pada tahun 2016. Berikut data partisipasi angkatan kerja perempuan kota Dumai tahun 2010-2017.

Tabel 2.83 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai Tahun 2010-2017

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Partisipasi angkatan kerja perempuan	1.474	1.474	2.359	2.359	1.378	3.857	10.442	10.442

3. Pengarus Utamaan Gender

Kesetaraan gender menjadi salah satu isu strategis di daerah maupun di pusat. Sampai tahun 2016 di Kota Dumai terdapat beberapa permasalahan terkait pengarusutamaan gender yang perlu diperhatikan bersama, diantaranya:

- 1) Dari 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Dumai, masih ada OPD yang belum melaksanakan/menyusun anggaran pembangunan berdasarkan analisis gender pada program/kegiatan di OPD yang bersangkutan dengan rincian:
 - a. dari 34 OPD yang ada, baru 2 OPD yang responsif gender;
 - b. dari total 33 kantor kelurahan di Kota Dumai, seluruhnya belum responsif gender;

- c. dari 10 Puskesmas yang ada, baru 7 Puskesmas yang responsif gender.
- 2) Sarana dan prasarana belum memenuhi setiap kalangan. Dari 152 sekolah yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Dumai, baru 5 sekolah yang responsif gender.
- 3) Fasilitas umum belum menyediakan tempat-tempat privasi/khusus seperti ruang laktasi, toilet untuk penyandang disabilitas, dll.
 - a. Dari 2 pelabuhan penumpang yang ada, baru 1 pelabuhan penumpang yang sudah responsif gender;
 - b. Dari 1 terminal penumpang yang ada, belum responsif gender;
 - c. Dari 1 bandara yang ada, belum responsif gender;
 - d. Dari 4 taman wisata milik pemerintah yang ada, belum responsif gender.
- 4) Belum semua SDM aparatur perencanaan paham tentang perencanaan dan penganggaran terkait program/kegiatan responsive gender.
- 5) Masih kurangnya ketersediaan SDM aparatur yang memahami, mampu mengadvokasikan dan melakukan sosialisasi serta pendampingan terkait penyusunan GAP dan GBS.

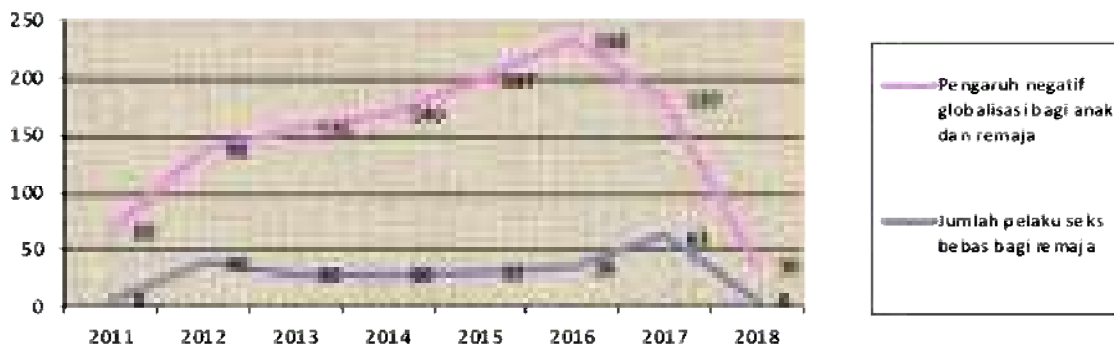
4. Bahaya Seks Bebas dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja

Bahaya Seks Bebas dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja menjadi salah satu isu strategis di daerah maupun di pusat. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2011 jumlah pelaku seks bebas bagi remaja di Kota Dumai mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebanyak 8 pelaku hingga kurun waktu 2017 meningkat menjadi 63 pelaku. Sedangkan pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja sebesar 60 pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 320 pada tahun 2017 yang dapat dilihat pada Tabel 2.84 dan Gambar 2.52 dibawah ini:

Tabel 2.84 Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja	8	40	30	30	32	36	63	8
Pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja	60	98	126	140	167	198	320	30



Gambar 2.53 Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja dan Pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2018

C. Pangan

1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg) dibagi dengan jumlah penduduk. Ketersediaan pangan utama ini perlu menjadi perhatian karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Persentase ketersediaan pangan utama di Kota Dumai dari tahun 2010 sampai tahun 2017 tersaji pada Tabel 2.85.

Tabel 2.85 Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2010-2017

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai

Indikator	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Ketersediaan Pangan Utama* (%)	42,44	46,15	36,84	26,50	41,36	35,54	38,08	15,18

*Bahan pangan utama (beras) persentasenya diambil dari rata-rata stok akhir data penerimaan dan penyaluran beras perum BULOG ditambah dgn produksi beras Kota Dumai per jumlah penduduk Kota Dumai.

Terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, pada tahun 2017 kuantitas ketersediaan pangan belum mencukupi pemenuhan kebutuhan bahan pangan masyarakat Kota Dumai seperti yang tersaji pada Tabel 2.86. Dari tabel tersebut terlihat bahwa hanya ada 3 komoditi pangan (ubi kayu, buah-buahan dan daging ayam) yang ketersediaannya surplus, dengan kata lain kebutuhan pangan masyarakat Dumai terhadap komoditi tersebut dapat terpenuhi, bahkan ketiga komoditi tersebut berpotensi untuk diekspor ke daerah lain. Sedangkan untuk komoditi kedelai, kacang hijau, sagu, dan telur ketersediaannya harus sepenuhnya diimpor dari luar Dumai.

Tabel 2.86 Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan Komoditas Pangan (Ton) Kota Dumai Tahun 2017
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, 2018

No.	Komoditi Pangan	Produksi	Kebutuhan Konsumsi	Pasokan Pangan
1.	Beras	3.952,4	28.621,6	-24.669,2
2.	Jagung	267,5	580,9	-313,4
3.	Kedelai	-	1.736,9	-1.736,9
4.	Kacang tanah	8,6	75,9	-67,3
5.	Kacang hijau	-	43,8	-43,8
6.	Ubi jalar	45,0	986,6	-941,6
7.	Ubi kayu	5.040,0	1.047,9	3.992,1
8.	Sagu	-	137,2	-137,2
9.	Buah-buahan	14.010,0	7.035,0	6.975,0
10.	Sayuran	2.361,3	11.413,6	-9.052,3
11.	Daging sapi	445,6	516,7	-71,1
12.	Daging ayam	1.743,9	1.398,2	345,7
13.	Telur	-	1.777,7	-1.777,7
14.	Ikan	876,2	11.676,3	-10.800,1

Tingginya ketergantungan impor pangan khususnya terhadap komoditi beras dikarenakan kebutuhan konsumsinya di tingkat masyarakat sangat tinggi. Hal ini terbukti dari besarnya konsumsi beras masyarakat Dumai (98,05 kg/kapita/tahun) yang melebihi rata-rata tingkat konsumsi beras dunia yaitu sebesar 60 kg/kapita/tahun.

Meskipun angka tersebut masih berada di bawah rata-rata tingkat konsumsi beras nasional 104 kg/kapita/tahun. Tingginya impor beras ini terjadi karena belum optimalnya penganekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan lokal. Dengan kata lain, masyarakat masih beranggapan bahwa beras merupakan makanan pokok dimana kebutuhannya tidak dapat digantikan oleh pangan lokal lainnya.

Disisi lain, rendahnya produksi pangan khususnya beras terjadi karena terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Luas lahan pertanian di Kota Dumai semakin sedikit, sementara untuk menambah luasan kawasan pertanian ini sangat sulit dikarenakan mayoritas lahan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai lahan pertanian di Kota Dumai merupakan kawasan hutan. Agar luas kawasan pertanian ini ke depannya tidak semakin berkurang, maka sebaiknya lahan pertanian yang ada ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi.

2. Jumlah Alih Fungsi Lahan

Jumlah alih fungsi lahan dari Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, pada tahun 2011 berjumlah 4.139 dan pada tahun 2017 menurun menjadi 2.774,30 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.87 berikut.

Tabel 2.87 Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2011–2017
Sumber : Dinas pertanian, 2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dari Pertanian menjadi non pertanian	4.139	3.586	3.045	2.804	2.614	3.038	2.774,30



Gambar 2.54 Jumlah Ahli Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2011 – 2017
Sumber : Dinas pertanian, 2018

D. Pertanahan

Pada dasarnya tanah mempunyai makna dan nilai strategis yang tinggi, baik dari sisi historis, politik, sosial budaya, terlebih ekonomi karena didalamnya tidak saja terdapat aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, politik serta hukum, sedangkan banyak pihak memiliki kepentingan terhadap tanah, sehingga tanah merupakan sumber daya yang rawan konflik.

Di Kota Dumai terdapat beberapa status tanah antara lain :

- a. Tanah Kawasan Hak Pakai PT. Cevron Fasific Indonesia
- b. Tanah Kawasan Hak Pakai PT. Pertamina
- c. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang merupakan asset Pemerintah Daerah
- d. Tanah Warga Masyarakat adalah tanah milik perseorangan
- e. Tanah – tanah perusahaan yang berstatus hak guna usaha yang bergerak di bidang HPH/HPHTI yaitu :
 1. PT. SUNTARA GAJA PATI di Sungai Sembilan
 2. PT RUAS UTAMA JAYA di Sungai Sembilan
 3. PT. DIAMOND RAYA TIMBER di Sungai Sembilan
 4. PT. ARARA ABADI DI Bukit Kapur

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi terutama dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, tanah-tanah yang ada di Daerah Kota Dumai dimungkinkan untuk dimanfaatkan, baik untuk dipakai sendiri atau disewakan, dilepaskan kepada Pemerintah, maupun Pihak Swasta yang berbadan hukum.

Untuk menjaga suasana tetap kondusif maka konflik tersebut perlu di fasilitasi Pemerintah Kota Dumai agar tidak menjurus ke hal-hal yang bersifat kekerasan. Adapun konflik tanah masyarakat dengan tanah perusahaan yang selama ini di fasilitasi oleh Pemerintah Kota Dumai yaitu. yaitu :

1. PT. SUNTARA GAJA PATI Di Kecamatan Sungai Sembilan
2. PT RUAS UTAMA JAYA Di Kecamatan Sungai Sembilan
3. PT. DIAMOND JAYA TIMBERS Di Kecamatan Sungai Sembilan

4. PT. PERTAMINA PERSERO Di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan
5. PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA Di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan
6. PT. ARARA ABADI di Kecamatan Bukit Kapur

Sedangkan konflik/permasalahan tanah lain yang ditangani oleh Pemerintah Kota Dumai adalah konflik/permasalahan tanah antara masyarakat dengan Tanah Aset Pemko Dumai. Adapun rekapitulasi permasalahan pertanahan yang sedang ditangani sampai dengan Tahun 2017 tersaji pada Tabel 2.88.

Tabel 2.88 Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani
Sumber: Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai

NO	OBJEK PERMASALAHAN	PROGRES	KETERANGAN
1.	Tanah Bekas Hak Pakai PT. CPI	<p>a. Satuan Tugas yang telah dibentuk telah melaksanakan tugas dari tanggal 1 November 2011 sampai dengan 3 bulan dengan hasil pendataan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah persil = 4.361 - Luas penguasaan tanah seluas : 3.283.084,06 M <p>b. Saat ini sedang disusun proposal hilir mengenai formulasi kebijakan yang akan diambil dalam menyelesaikan permasalahan tanah yang sudah diduduki oleh masyarakat. Studi konfrehensif bagi penyelesaian tersebut sedang dilaksanakan dengan membandingkan pada daerah-daerah yang mempunyai masalah serupa. Proposal tersebut direncanakan akan selesai pada bulan Februari 2013.</p> <p>c. Setelah proposal hilir tersebut selesai maka akan dilanjutkan dengan penyerahan proposal dan hasil pendataan kepada pihak-pihak terkait di Jakarta untuk proses penyerahan tanah tersebut kepada negara</p> <p>d. Setelah tanah tersebut diserahkan kepada Negara , maka Pemerintah Kota Dumai akan mengajukan proposalpermintaan/peruntukan tanah lengkap dengan master plan/strategi, termasuk pengaturan penyelesaian terhadap tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat.</p> <p>e. Permohonan hibah terhadap 44 bidang tanah yang diatasnya berdiri fasilitas Pemko Dumai telah diajukan hibahnya sejak tahun 2015 dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan. Dan</p>	<p>Target pengembalian kepada negara pada tahun 2012</p> <p>Rincian 4.361 persil terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Tinggal 3.867 unit - Sekolah/Perguruan Tinggi (Negeri) 8 unit - Sekolah/Perguruan Tinggi (Swasta) 6 unit - Fasilitas Pemerintah 25 unit - Usaha Pribadi 184 unit - Perusahaan swasta 3 unit - Fasilitas Umum/Sosial 14 unit - Rumah Ibadah 33 unit - Lainnya 221 <p>Kondisi Bangunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Permanen 2.356 unit - Bangunan Semi Permanen 1.728 unit - Bangunan Terbengkalai 93 unit - Lahan Kosong 3 persil - Lainnya 217 <p>Prosess penyusunan Perpres</p>

NO	OBJEK PERMASALAHAN	PROGRES	KETERANGAN
		<p>saat ini telah final dan menunggu penyerahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.</p> <p>f. PSP diajukan oleh masing-masing Instansi Vertikal</p> <p>g. Perpres tentang penyelesaian permasalahan tanah yang dikuasai oleh masyarakat sedang disusun dengan difasilitasi oleh KOMNAS HAM RI.</p>	
2.	<p>Kawasan Hutan Sungai Dumai yang terletak di Kota Dumai ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 154/RPTS-II/90 dengan luas 4.172,50 Hektare</p>	<p>Hasilnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasilnya sampai saat ini Tim Tersebut belum terbentuk 2. BPKSDA Prov.Riau secara lisan meminta agar Pemko Dumai bersedia memfasilitasi pertemuan dengan mengundang pihak-pihak terkait termasuk Kementerian LHK Jakarta untuk melakukan pertemuan di Kota Dumai dalam rangka membahas pembentukan tim tersenut sekaligus melakukan peninjauan dilapangan 	
3.	<p>Permasalahan tanah asrama haji Dumai</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disepakati untuk melakukan penelusuran kronologis perolehan tanah tersebut dengan menghubungi para sempadan dan pihak-pihak terkait 2. Hasil penelusuran sementara menyatakan bahwa tanah tersebut tidak tercatat di aset Pemerintah Kota Dumai dan di BPN Kota Dumai juga tidak ditemui dokumen pertanahannya dan kemungkinan besar dicatat di Kementerian Agama Pusat 	<p>Kementerian Agama Dumai akan menelusuri permasalahan ini ke Kementerian Agama RI di Jakarta</p>
4.	<p>Permasalahan tanah untuk jalan Abdulrab Khan Kelurahan Bukit Timah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusannya masih menunggu hasil kajian teknis dari PT.CPI tentang kelayakan dan hal-hal lain Setelah Konsultasi internal akan dilakukan pertemuan dengan DJKN Kementerian Keuangan sesuai dengan waktu yang akan ditentukan 2. PPLB yang telah disusun belum dapat disetujui karena terdapat beberapa hal yang belum dapat disepakati diantaranya Pemko Dumai diminta untuk membangun pagar penagaman pipa disepanjang jalan Abdulrab Khan yang akan ditingkatkan. Sedangkan Pemko Dumai meminta pagar tersebut dibangun oleh PT.CPI 	<p>PT. CPI masih menunggu Intrnal Memo untuk menentukan tentang Pembangunan Pagar tersebut</p>
5.	<p>Permasalahan tanah rencana pengembangan RSUD Kota Dumai kelurahan Buluh Kasab Kecamatan Dumai Kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelusuran DiBPKAD Prov Riau tidak ditemukan Daftar Tanah Aset tersebut. 2. PT.CPI meminta waktu untuk menelusuri Dokumen kepemilikan tanah tersebut 	<p>Sampai saat ini belum mendapat Jawaban dari PT.CPI</p>

NO	OBJEK PERMASALAHAN	PROGRES	KETERANGAN
6.	Permasalahan Ganti rugi tanah yang terkena jalur kereta api trans sumatera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil dari pertemuan tersebut didapati bahwa untuk proyek kereta api Trans Sumatera wilayah Kota Dumai tidak lagi termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga tidak tersedia anggaran Ganti rugi dalam tahun ini. 2. Mengusahakan Proyek tersebut dapat dimasukkan kembali kedalam PSN 	Dikhawatirkan terjadi gejala Masyarakat atas tidak jelasnya status ganti rugi ini
7.	Permasalahan tanah masyarakat atas SUJONO dikelurahan lubuk gaung kecamatan Sei Sembilan	Akan dilakukan kunjungan lapangan di Lokasi yang disengketakan	Sampai saat ini belum terlaksana
8.	Permasalahan, Tanah antara Masyarakat RT 08. Kel Bukit Nenas dengan PT. ARARA ABADI Distrik Bukit Kapur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil kunjungan lapangan mendapati bahwa sluruh tanah yang klaim oleh masyarakat berada di Areal Konsesi PT.Arara Abadi dengan kondisi Tanaman Hutan Akasia 2. Akan dibentuk Tim bersama Masyarakat dan PT Arara Abadi dengan difasilitasi oleh Pemko Dumai untuk menyusun Formulasi penyelesaian Masalah 	Kemungkinan Penyelesaian permasalahannya akan membuat rekomendasi kepada Kementerian LHK tentang Penganan Masalah tersebut

Sedangkan permasalahan yang telah diselesaikan pada Tahun 2017 berikut adalah Tabel 2.89.

Tabel 2.89 Permasalahan Pertanahan Yang Sudah Diselesaikan
Sumber: Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai

NO	OBJEK PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Permasalahan tanah yang berada di areal Kelurahan bukit batrem yang diklaim oleh masyarakat telah digadaikan ke KSU Bona Mandiri yang terletak di jalan merdeka	Permasalahan telah selesai
2.	Permasalahan Tanah Hibah Haji Andi Firman kepada Pemko Dumai	Permasalahan telah selesai

E. Lingkungan Hidup

1. Persentase Penanganan Sampah

Formula yang dipergunakan untuk menghitung persentase penanganan sampah adalah merupakan hasil bagi antara volume tempat sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Tidak dijelaskan secara terperinci yang tertulis dalam mengenai definisi volume sampah yang ditangani, apakah memiliki pengertian volume sampah yang dibuang ke TPA atau volume sampah yang diolah. Data yang tertulis dalam tabel dibawah ini merupakan data jadi mengenai persentase penanganan sampah yang

bersumber dari Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai.

Tabel 2.90 Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2010-2017
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase penanganan sampah (%)	68	68	68	69	69	69	70	70

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tren perkembangan indikator persentase penanganan sampah di Kota Dumai menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dari kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2017, yakni dari 68% di tahun 2010 meningkat menjadi 70% di tahun 2017.

2. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk telah dibahas pada salah satu indikator dalam pokok bahasan pekerjaan umum. Terdapat kesamaan diantara keduanya, yakni didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1000. Data mengenai rasio tempat pembuangan sampah sudah merupakan data jadi yang bersumber dari Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai. Berikut adalah Tabel 2.91 data mengenai indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai.

Tabel 2.91 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2010-2017
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	14 (TPS)	15 (TPS)

Selama periode 2010-2017 perkembangan indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai memiliki kecenderungan meningkat, yakni 12 TPS persatuan penduduk di tahun 2010 meningkat menjadi 15 TPS di tahun 2017.

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya. Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko. Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT, dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup.

Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan. Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

3. Peningkatan Suhu Udara dan Kualitas Udara di Kota Dumai

Kota Dumai beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara antara 27-28,3°C seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.92 (tanpa data tahun 2011). Rata-rata suhu udara tahun 2012-2015 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010, kemudian terus mengalami penurunan sampai tahun 2017 menjadi 28,09 °C. Secara umum rata-rata suhu udara di Kota Dumai selama kurun waktu 2010-2017 masih berada dalam kondisi normal. Pada tahun 2016, suhu udara tertinggi terjadi di bulan Maret yaitu sebesar 36,8°C. Sedangkan di tahun 2017, suhu udara tertinggi terjadi di bulan April yaitu sebesar 34,1°C.

Tabel 2.92 Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai
Sumber: Dumai Dalam Angka

Indikator	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Suhu rata-rata (°C)	27,64	28,32	28,32	28,32	28,32	28,20	28,09

Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018, disimpulkan bahwa kualitas udara ambien di Kota Dumai masih baik, dimana hasil pengukuran terhadap beberapa parameter seperti yang tersaji pada Tabel 2.95 berada di bawah ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan. Hanya ada dua parameter yang mendekati ambang batas baku mutu yaitu kebisingan (ambang batas baku mutu kebisingan 70 dBA) dan TSP (ambang batas baku mutu debu total/TSP 230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$). Dampak kebisingan bagi kesehatan dapat menyebabkan berbagai gangguan seperti gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan komunikasi, hingga ketulian. Sedangkan tingginya nilai TSP berdampak terhadap gangguan pernapasan manusia, menurunkan jarak pandang dan menghalangi sinar matahari, serta berdampak terhadap kerusakan beberapa material.

Tabel 2.93 Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai Tahun 2018

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Titik Pengujian Sampel	Nilai Parameter Yang Diuji									
	SO ₂	CO	NO ₂	O ₃	Pb	HC	NH ₃	H ₂ S	TSP	Kebisingan
	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	ppm	ppm	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	dBA
Simpang Polres Dumai	35,31	956,87	17,81	20,30	0,11	24,63	0,05	<0,0014	151,88	68,00
KLK Dumai	29,47	1.025,7	15,18	22,80	0,05	73,64	0,07	<0,0014	133,07	68,00
Bukit Batrem	25,26	1.124,6	13,17	31,70	0,05	46,24	0,56	<0,0014	102,90	55,00
TPA Mekarsari	23,82	863,74	10,42	37,50	0,02	54,88	0,05	<0,0014	60,26	40,00
Kawasan Industri Dumai (KID)	39,29	1.136,5	7,02	25,70	<0,00069	71,25	0,06	<0,0014	78,00	57,00
Depan Gedung BKD	24,98	865,50	16,24	22,70	0,11	36,36	0,06	<0,0014	105,58	52,00
PT. IBP Industri Lubuk Gaung	27,93	869,40	17,30	27,50	0,15	52,55	0,04	<0,0014	118,32	57,00
Jl. Dermaga ke Purnama	23,82	893,40	10,90	31,30	0,04	34,55	0,05	<0,0014	76,46	65,00

4. Kualitas Air Tanah

Kualitas air tanah yang diproksi dari kualitas air sumur di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut, sehingga membuat tingginya nilai kekeruhan dan warna, serta mengandung besi dan zat organik yang

tinggi seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.94. Bahan buangan organik ini berasal dari limbah industri yang menggunakan unsur-unsur logam seperti timbal.

Tabel 2.94 Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai Tahun 2016-2017

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter						
	pH		Kekeruhan (NTU)		Warna (PtCo)		Besi (mg/L)
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Air Sumur Kel. Tanjung Palas	4,92	6,05	30,6	31,8	1.400	1.752	3,528
Air Sumur Kel. Teluk Makmur	4,41	3,27	25,3	98,0	33	1.726	0,220
Air Sumur Kel. Bukit Kapur	5,45	6,37	160,0	<0,1	25	0,1	0,158
Air Sumur Kel. Dumai Selatan	7,30	4,18	24,0	<0,1	24	6	0,094
Air Sumur Kel. Dumai Barat	4,77	4,68	14,7	24,2	32	21	0,220
Air Sumur Kantor Camat Sungai Sembilan	4,91	5,10	163,0	48,0	87	405	0,321
Air Sumur Kec. Dumai Kota	6,91	5,63	163,0	38,0	42	79	0,386
Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter						
	Besi (mg/L)	Kadmium (mg/L)		Nitrat (mg/L)		KMnO ₄ (mg/L)	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Air Sumur Kel. Tanjung Palas	3,707	<0,001	0,011	6,9	4,9	325,50	679,40
Air Sumur Kel. Teluk Makmur	8,126	<0,001	0,012	8,2	1,9	10,59	101,10
Air Sumur Kel. Bukit Kapur	0,093	<0,001	0,016	1,9	2,0	0,79	0,47
Air Sumur Kel. Dumai Selatan	0,084	<0,001	0,011	10,3	5,8	2,21	1,26
Air Sumur Kel. Dumai Barat	0,172	<0,001	0,017	2,5	0,4	7,90	5,85
Air Sumur Kantor Camat Sungai Sembilan	3,547	<0,001	0,010	4,7	0,8	26,86	68,89
Air Sumur Kec. Dumai Kota	9,715	<0,001	<0,003	3,6	0,5	18,33	19,28

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas air sumur di Kota Dumai masih rendah karena melebihi batas ambang baku mutu air sumur seperti yang tersaji pada Tabel 2.95.

Tabel 2.95

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu
pH		6,5 - 9
Kekeruhan	NTU	25
Warna	PtCo	50
Besi	mg/L	1
Kadmium	mg/L	0,005
Nitrat	mg/L	10
KMNO ₄	mg/L	10

Dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, pada tahun 2016-2017 kualitas air hujan di Kota Dumai bersifat asam, hal ini disebabkan oleh kontaminasi atmosfer yang

berasal dari tingginya pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas pabrik maupun asap kendaraan.

5. Penyediaan Sumber Air Baku

Pelayanan air minum penduduk perkotaan di Kota Dumai dilakukan oleh PDAM Kota Dumai. Untuk mencukupi kebutuhan air penduduk perkotaan di Kota Dumai, PDAM memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Mesjid. Air baku ini diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Jalan Jend. Sudirman Dumai dengan sistem pengolahan yang digunakan adalah sistem koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PDAM Kota Dumai tahun 2017, kapasitas total air baku (Sungai Mesjid) yang tersedia tahun 2017 adalah sebesar 5.321 liter/detik. Namun sampai dengan saat ini PDAM Kota Dumai belum mampu melayani kebutuhan air seluruh penduduk perkotaan di Kota Dumai. Berdasarkan informasi yang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, pada tahun 2017 PDAM Kota Dumai hanya melayani 400 sambungan rumah, padahal tahun 2016 sudah melayani 1.300 sambungan rumah.

Untuk mencukupi kebutuhan air minum penduduk di Kecamatan Medang Kampai, Dinas PU Kota Dumai telah membangun SPAM IKK Medang Kampai dengan memanfaatkan sumber air baku berupa air permukaan dari Sungai Kemili. Sistem pengambilan menggunakan sistem sumuran/intake yang dibangun tahun 2011 kemudian di transmisikan ke unit produksi secara pompa. Air baku dari Sungai Kemili diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai dengan sistem pengolahan koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Sejak dibangun tahun 2010 sampai dengan saat ini SPAM IKK Medang Kampai belum melayani kebutuhan air penduduk di Kecamatan Medang Kampai.

6. Kualitas Air Laut dan Air Sungai di Kota Dumai

Pertambahan penduduk, banyaknya jenis usaha dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan di Kota Dumai menyebabkan semakin banyak limbah yang dihasilkan sehingga mempengaruhi

kualitas air di Kota Dumai. Wilayah Kota Dumai berada di pesisir pantai (laut) sehingga berperan menjadi tempat pembuangan akhir dari berbagai limbah cair industri dan limbah domestik. Sebagian besar usaha industri yang ada di Kota Dumai berada di wilayah pesisir pantai. Wilayah pesisir ini menjadi pilihan lokasi bagi para pengusaha industri karena pesisir pantai Kota Dumai berpotensi besar untuk dijadikan sebagai pelabuhan, sehingga memudahkan pengusaha dalam mendistribusikan hasil olahannya. Tingginya aktifitas industri di wilayah pesisir ini mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan di daerah pesisir yang salah satunya tergambar dari penurunan kualitas air di wilayah pesisir seperti yang tersaji pada Tabel 2.96.

Tabel 2.96 Hasil Pengujian Kualitas Air Laut di Kota Dumai Tahun 2016-2017
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter			
	pH		TSS (mg/L)	
	2016	2017	2016	2017
Air Dermaga PT. Ivo Mas Tunggal	7,45	7,13	42	60
Air Dermaga PT. Sari Dumai Sejati	7,57	7,15	86	124
Air Dermaga PT. Pacific Indopalm Industries	7,51	7,51	44	134
Air Dermaga PT. Inti Benua Perkasatama	7,42	7,67	44	98
Air Dermaga PT. Semen Padang	7,55	7,26	32	68
Air Dermaga PT. Meridan Sejati Surya Plantation	7,12	7,14	62	120
Air Dermaga PT. Pelindo Cab. Dumai	7,43	7,49	58	114
Air Dermaga PT. Pelindo Cab. Dumai Ujung	7,44	7,58	61	20
Air Dermaga PT. CPI	7,50	7,68	40	26
Air Dermaga PT. Pertamina RU II Dumai	7,47	7,72	170	30

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 terjadi penurunan kualitas air laut, hal ini terlihat dari hasil pengukuran parameter Padatan Tersuspensi Total (TSS) yang melebihi ambang batas baku mutu (80 mg/L) di 5 (lima) titik pengujian sampel.

Kualitas air sungai dan drainase di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut. Disamping itu juga dipengaruhi oleh limbah dari kegiatan domestik, doorsmer, hotel, klinik, dll yang tidak melalui proses pengelolaan dan pengolahan limbah cair. Dari hasil pengujian air sungai seperti yang tersaji pada Tabel 2.98 disimpulkan bahwa ada beberapa parameter yang melebihi ambang batas baku mutu.

Tabel 2.97 Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu	Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu
BOD	mg/L	12	Mangan	mg/L	0,1
COD	mg/L	100	Klorida	mg/L	600
P	mg/L	5	Flourida	mg/L	1,5
pH		6 - 9	Sulfat	mg/L	400
DO	mg/L	3	Belarang	mg/L	0,002
NO ₃	mg/L	20	NH ₃	mg/L	0,5
Nitrit	mg/L	0,06	Besi	mg/L	0,3

Tabel 2.98 Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai di Kota Dumai
Tahun 2016-2017
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter													
	BOD (mg/L)		COD (mg/L)		Posfat (mg/L)		pH		DO (mg/L)		NO ₃ (mg/L)		Nitrit (mg/L)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Sungai Bulu Hala	23,66	17,11	191,10	65,17	0,723	0,083	7,80	6,18	3,24	2,89	2,40	3,20	0,107	0,052
Sungai Teras	20,64	14,09	217,60	58,53	0,248	0,186	3,84	3,88	2,78	3,53	2,40	3,50	0,043	0,044
Sungai Mampu	6,54	19,13	292,80	72,83	0,526	0,136	3,50	4,07	3,60	4,00	2,50	3,50	0,029	0,042
Sungai Nerbit Kecil	17,62	13,84	175,90	75,98	0,470	0,099	3,85	3,80	3,24	3,80	2,60	3,20	0,037	0,037
Sungai Nerbit Besar	16,61	17,87	179,90	75,48	0,600	0,141	3,80	3,70	3,86	3,87	2,90	3,30	0,053	0,029
Sungai Rimbun Jaya	19,63	19,38	179,40	73,33	0,415	0,087	3,67	3,01	3,38	3,60	2,70	3,50	0,033	0,035
Sungai Parit Kitang	35,74	11,82	181,60	68,60	0,315	0,074	3,69	3,14	2,94	3,75	2,80	3,90	0,030	0,035
Sungai Masjid	4,59	14,85	220,50	72,23	0,298	0,070	4,13	4,49	3,63	3,10	2,20	3,30	0,032	0,034
Sungai Dumai	27,68	12,33	152,80	70,60	0,264	0,058	6,57	6,00	2,08	2,79	1,20	2,60	<0,017	0,034
Sungai Selinsing	13,59	13,34	195,40	67,57	0,146	0,026	3,61	7,05	3,08	4,20	3,50	0,50	<0,017	<0,017
Sungai Kepala Beruang	29,64	34,72	237,60	70,40	0,062	0,066	3,64	3,38	3,27	3,96	3,00	3,90	<0,017	0,039
Sungai Pelintung	3,52	1,32	230,30	69,13	0,028	0,028	5,78	6,31	3,35	3,31	1,50	0,80	<0,017	<0,017
Sungai Guntung	3,52	10,82	230,40	73,20	0,045	0,024	3,59	3,93	3,31	2,95	2,90	2,80	<0,017	0,036
Sungai Kemeli (Muara)	16,86	5,79	197,60	78,45	0,011	0,094	5,56	5,46	3,45	3,29	1,60	2,40	<0,017	0,024
Sungai Puak	17,87	3,80	214,40	77,42	0,043	0,043	3,96	3,66	3,41	3,21	2,50	3,00	<0,017	0,029
Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter													
	NH ₃ (mg/L)		Besi (mg/L)		Mangan (mg/L)		Klorida (mg/L)		Flourida (mg/L)		Sulfat (mg/L)		Belerang (mg/L)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Sungai Bulu Hala	0,122	0,924	1,702	2,417	0,093	0,245	1.429,0	922,6	0,888	<0,181	64,7	116,2	0,047	0,013
Sungai Teras	1,181	0,509	1,371	2,103	0,444	0,207	799,0	10,9	0,526	0,276	289,4	21,9	0,017	<0,01
Sungai Mampu	0,786	0,816	0,905	0,997	0,040	0,019	799,0	129,5	0,318	0,241	38,9	24,7	0,015	0,033
Sungai Nerbit Kecil	0,619	0,580	1,331	1,423	0,037	0,027	249,1	600,1	1,766	<0,181	36,0	84,9	0,011	<0,01
Sungai Nerbit Besar	0,194	0,961	2,219	0,567	0,041	0,010	362,3	219,6	0,324	<0,181	42,9	70,8	0,014	0,024
Sungai Rimbun Jaya	0,504	0,497	1,015	0,773	0,046	0,013	287,8	184,4	0,163	<0,181	39,2	106,9	0,015	0,024
Sungai Parit Kitang	0,440	0,470	0,813	0,666	0,029	0,010	285,9	119,1	0,396	0,569	43,0	87,6	0,020	0,031
Sungai Masjid	0,596	0,633	0,926	0,772	0,041	0,010	801,6	503,7	0,471	<0,181	300,9	133,0	0,014	0,021
Sungai Dumai	3,698	0,958	0,045	0,887	0,045	0,011	1.498,8	227,0	0,632	<0,181	246,9	64,8	<0,001	0,029
Sungai Selinsing	0,774	4,632	0,848	0,122	0,028	0,010	384,6	16.030,5	0,324	0,558	38,9	83,2	0,027	0,020
Sungai Kepala Beruang	0,524	0,765	1,259	0,882	0,038	0,010	1.036,3	1.108,7	1,804	<0,181	240,7	192,4	0,023	0,042
Sungai Pelintung	0,333	6,046	0,454	0,204	0,037	0,045	4.814,1	11.743,6	0,976	0,465	430,7	189,9	<0,01	0,025
Sungai Guntung	0,652	0,583	1,393	1,413	0,014	0,051	306,7	3.151,0	0,976	0,437	39,7	158,6	<0,01	0,070
Sungai Kemeli (Muara)	0,363	0,365	0,787	0,916	0,066	0,037	7.643,0	6.441,9	0,944	<0,181	430,7	156,3	<0,01	0,021
Sungai Puak	0,576	0,445	1,005	1,218	0,009	0,037	1.399,6	1.469,0	0,360	<0,181	239,5	100,3	0,014	0,016

F. Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan maupun akta Pencatatan Sipil serta masih adanya sebagian masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya untuk segera melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

1. Kepemilikan KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah).

Dari data yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dari tahun 2010 hingga tahun 2017 (tanpa data tahun 2016) persentase penduduk yang telah memiliki KTP semakin meningkat. Pada tahun 2010 rasio penduduk yang ber KTP sebesar 78%, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 94,27%.

Tabel 2.99 Kepemilikan KTP Tahun 2010-2017
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2017
Kepemilikan KTP	78%	56,41%	61,52%	59,66%	47,95%	94,27%	94,27%

*Data Agregat kependudukan semester I Tahun 2015 (KTP elektronik)

2. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Data mengenai ketersediaan database kependudukan skala nasional berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sudah ada sejak tahun 2010. Database kependudukan di Kota Dumai dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang dijalankan secara online dan terpadu. Melalui program tersebut, *database* kependudukan di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.100 secara berkala dan dapat diakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut.

Tabel 2.100 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi
Tahun 2010-2016

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ketersediaan database kependudukan skala nasional	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

3. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai sejak tahun 2005.

Tabel 2.101 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2010-2016

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa

Beberapa indikator terkait aspek pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya: (1) Jumlah kelompok binaan PKK; (2) Posyandu aktif; (3) Kualitas sumber daya lembaga masyarakat; dan (4) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.

Selama kurun waktu 2010-2016 terdapat 41 PKK aktif dengan persentase jumlah kelompok binaan PKK selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 99%. Jumlah posyandu selama kurun waktu 2010-2016 adalah sebanyak 241 posyandu dengan persentase posyandu aktif mulai tahun 2015 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 100%. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina selama kurun waktu 2010-2016 adalah 90%. Sedangkan persentase pembinaan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2012 sampai saat ini adalah sebesar 97%. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.102 berikut.

Tabel 2.102 Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setdako, 2018

Indikator	Satuan	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Jumlah kelompok binaan PKK	%	99	99	99	99	99	99	99
Jumlah PKK	PKK	41	41	41	41	41	41	41
Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Posyandu	Posyandu	241	241	241	241	241	241	241
Persentase Posyandu Aktif	%	97	97	98	98	99	100	100
Persentase LSM yang Dibina	%	90	90	90	90	90	90	90
Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	%	96	96	97	97	97	97	97

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Cakupan Peserta KB Aktif

Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang digunakan adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif adalah proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Dumai, dari tahun 2012 sampai tahun 2015 jumlah peserta KB aktif terus mengalami peningkatan, namun di tahun 2016 jumlah pesertanya turun drastis menjadi 29.287 peserta.

Tabel 2.103 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai Tahun 2012-2016
Sumber: Dumai Dalam Angka

Indikator	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Cakupan peserta KB aktif	8.863	35.597	45.344	55.628	29.287

2. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Adapun untuk keluarga sejahtera I memiliki kriteria sebagai berikut serta Tabel 2.104.

- a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
- b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
- c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik;
- d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan;
- e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi;
- f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Tabel 2.104 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai
 Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016

Indikator	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Keluarga	50.586	55.051	55.051	55.051	55.051	63.527
Keluarga Pra Sejahtera	4.642	4.118	4.118	4.118	4.118	4.118
Keluarga Sejahtera I	11.509	11.138	11.138	11.138	11.138	11.138

I. Perhubungan

Pada pokok bahasan mengenai perhubungan akan dibahas secara terinci indikator-indikator seperti jumlah arus penumpang umum, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian kelayakan angkutan umum, serta pemasangan rambu-rambu.

1. Jumlah Arus Penumpang Umum

Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang melalui pelabuhan, bandar udara, maupun terminal yang masuk/keluar daerah selama satu tahun. Berikut adalah Tabel 2.105 yang menyajikan data jumlah arus penumpang umum di Kota Dumai.

Tabel 2.105 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2012-2017

Sumber: Dinas Perhubungan dan Dumai Dalam Angka

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TERMINAL	BERANGKAT	174.680	116.080	120.225	106.390	105.890	102.670
	DATANG	176.902	116.025	120.401	108.116	108.008	105.532
PELABUHAN	BERANGKAT	270.503	269.925	233.365	123.971	130.789	129.135
	DATANG	273.990	253.645	211.070	103.876	100.342	102.586
BANDARA	BERANGKAT	22.163	22.116	10.625		12.465	11.856
	DATANG	21.320	20.852	10.876		11.782	10.354
	TRANSIT	8.952	8.580	1.385			

Dari Tabel 2.105 diatas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui terminal, pelabuhan, maupun bandara di Kota Dumai dalam rentang waktu 2012 hingga tahun 2017 mengalami fluktuasi. Namun apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut (palabuhan) masih mendominasi diantara angkutan lainnya di Kota Dumai. Terlihat sejak tahun data (2012-2017) jumlah penumpang angkutan yang melalui pelabuhan (kapal) lebih besar apabila dibandingkan dengan penumpang melalui terminal (bis) dan bandar udara (pesawat).

2. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud di sini merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Data jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.106 berikut ini.

Tabel 2.106 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2010-2017
Sumber: Dinas Perhubungan

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	4.898	9.898	4.898	4.898	4.762	5.103	4.078	4.075

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2017 menunjukkan angka yang fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel 2.83 Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai fluktuasi jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai ini, apakah karena pengujian KIR tidak terikat batasan administrasi sehingga kendaraan dari luar kota dapat melakukan pengujian KIR di Kota Dumai, atau ada terdapat alasan yang lainnya.

3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Adanya pelabuhan laut, udara, dan terminal bis dapat dikatakan menjadi salah satu sarana perhubungan yang memegang peranan penting dalam perkembangan suatu daerah. Kota Dumai memiliki pelabuhan yang merupakan salah satu “pintu masuk” bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan 80% kegiatan ekspor impor dilakukan melalui pelabuhan ini.

Tabel 2.107 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2010-2017
Sumber: Dinas Perhubungan

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pelabuhan Penumpang	1	2	2	2	2	2	2	2
Pelabuhan Ro-Ro	1	1	1	1	1	1	1	1
Bandara	1	1	1	1	1	1	1	1
Terminal Penumpang	1	1	1	1	1	1	1	1

Dari tabel 2.102 diatas diketahui bahwa terdapat masing-masing satu buah pelabuhan penumpang yakni Pelindo, satu buah pelabuhan Ro-ro, satu buah bandara yakni Pinang Kampai, serta satu buah terminal penumpang yakni yang terdapat di jalan Kelakap Tujuh. Disamping dari keempat tersebut masih terdapat beberapa pelabuhan dan terminal di Kota Dumai, diantaranya tiga buah pelabuhan yang dikelola oleh swasta (perusahaan) yakni Pelabuhan Caltex/ Chevron yang khusus untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, Pelabuhan Pertamina yang juga dipergunakan untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, serta Pelabuhan Kawasan Industri Dumai yang mengangkut minyak nabati dan pupuk NPK. Selain itu juga terdapat terminal barang yang terletak di Bukit Jin, Jalan Kelurahan Bukit Datuk.

4. Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR angkutan umum didapatkan dari hasil perhitungan jumlah angkutan umum yang melakukan uji KIR. Berikut adalah Tabel 2.108 data indikator kepemilikan KIR angkutan umum.

Tabel 2.108 Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai
Tahun 2010-2017

Sumber: Dinas Perhubungan

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kepemilikan KIR Angkutan Umum	9.797	9.797	9.797	9.797	9.523	10.206	9.920	10.020

Hasil yang ditunjukkan oleh tabel kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2017.

5. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Lama pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Dumai sejak tahun 2010 hingga tahun 2017 tersaji pada Tabel 2.109 berikut.

Tabel 2.109 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai
Tahun 2010-2017

Sumber: Dinas Perhubungan

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit

6. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Besarnya biaya pengujian yang ditetapkan dari tahun 2010 hingga tahun 2013 adalah sebesar Rp 29.000,-. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi Rp 40.000,- dan biaya tersebut masih dipergunakan hingga saat ini (tahun 2017), berikut apabila ditunjukkan dengan Tabel 2.110 berikut.

Tabel 2.110 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai (Rp.)
Tahun 2010-2017

Sumber: Dinas Perhubungan

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	29.000	29.000	29.000	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000

7. Pemasangan Rambu-rambu

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator pemasangan rambu-rambu adalah jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikalikan dengan bilangan 100. Pemasangan rambu-rambu di berbagai titik strategis dan beberapa ruas jalan, serta lingkungan permukiman penduduk sangat penting dilakukan untuk memberikan petunjuk dan mempermudah pengguna jalan dalam mencari tempat tujuan. Selain itu, rambu-rambu tersebut juga berfungsi untuk memberikan peringatan bagi pengguna jalan agar lebih waspada terhadap sesuatu yang berbahaya di ruas jalan.

Data yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kota Dumai tidak menyebutkan sub indikator yang dipergunakan untuk perhitungan pada formula pemasangan rambu-rambu. Data yang didapatkan hanyalah data mengenai jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n, dimana pada tahun 2015 terpasang rambu lalu lintas tiang tunggal sebanyak 952 unit, dan rambu cantilever type F sebanyak 389 unit, RPPJ sebanyak 87 unit, serta RPPJ portal bentang sebanyak 4 unit.

J. Komunikasi dan Informatika

1. Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah baik dalam manajemen internal organisasi maupun dalam pelaksanaan pelayanan public kepada masyarakat. Data aplikasi fungsional yang telah diterapkan pada Perangkat Daerah di Kota Dumai pada Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.111 berikut.

Tabel 2.111 Aplikasi Fungsional yang Digunakan Oleh Perangkat Daerah
Pada Tahun 2017

Sumber: Bagian Komunikasi dan Informatika Setdako Dumai

No.	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
I			
Layanan Publik			
1	Sistem Informasi Pendidikan	- Dapodik (Data Pokok Tenaga Kependidikan) - SIMDIK (Sistem Informasi Pendidikan) - BeeSMART (ujian try out online)	Disdikbud Kota Dumai
2	Sistem Informasi Kesehatan	- SIMRS (Sistem Informasi Rumah Sakit)	RSUD Kota Dumai
3	Sistem Informasi Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kemiskinan	- SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation)	Dinsos Kota Dumai
4	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	- Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA) - E-Database	BAPPEDA Kota Dumai
5	Sistem Informasi Penanaman Modal/Perizinan	- Sistem Informasi Perizinan (SiPERI)	DPMPTSP Kota Dumai
6	Sistem Informasi Pendapatan Daerah	- E-Paddum (Elektronik Pendapatan Asli Dumai) - E-Billing (Elektronik Pajak Online untuk Hotel, Restoran, dan Hiburan) - SIMPATDA (Sistem Informasi Majemen Pendapatan Daerah)	BAPENDA Kota Dumai
II			
Administrasi dan Manajemen Umum			
1	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	- Simda-BMD (Sistem Manajemen Daerah - Barang Milik Daerah)	BPKAD Kota Dumai
2	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	- e-budgeting.dumaikota.go.id	BAPPEDA Kota Dumai
3	Sistem Informasi Pengadaan	- www.lpse.dumaikota.go.id	Bagian Adm. Pembangunan Setdako Dumai
4	Sistem Informasi Pembangunan	- Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA) - E-Database	BAPPEDA Kota Dumai
5	Sistem Informasi Legislasi	- www.dprd.dumaikota.go.id - www.jdih.dumaikota.go.id	- Setwan Kota Dumai - Bagian Hukum dan HAM Setdako Dumai
6	Sistem Informasi Kearsipan	- Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) (Pasif)	DISPERSIP Kota Dumai
7	Sistem Informasi Perpustakaan	- Integrated Libery Sistem (INLIS lite)	DISPERSIP Kota Dumai
II			
Administrasi Legislasi			
1	Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum	www.jdih.dumaikota.go.id	Bagian Hukum Setdako Dumai

No.	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
IV			
Manajemen Keuangan			
1	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	e-budgeting.dumaikota.go.id	BAPPEDA Kota Dumai
2	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda	SIMDA-Keuangan	BPKAD Kota Dumai
3	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	- SIMDA-Keuangan	BPKAD Kota Dumai
VI			
Manajemen Kepegawaian			
1	Sistem Informasi Kepegawaian	- Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) - Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian(simpeg.dumaikota.go.id)	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa belum semua perangkat daerah yang menggunakan teknologi informasi dalam manajemen internal organisasi maupun pelayanan publik.

2. Website Milik Pemerintah Daerah

Website milik Pemerintah Kota Dumai ada sejak tahun 2002, dan berisikan informasi tentang fasilitas kota, pemerintahan, pelayanan, dan informasi-informasi aktual yang selalu di-*update* hampir setiap hari. Dapat dikatakan situs resmi milik Pemerintah Kota Dumai ini selalu menayangkan informasi terbaru dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi dan berita yang terjadi di Kota Dumai ini hanya dengan memantau *website* ini.

Tabel 2.112 Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai
Sumber: Bagian Komunikasi dan Informatika Setdako Dumai

Indikator	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

K. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Koperasi Aktif

Pertumbuhan usaha kecil menengah dan koperasi memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Fungsi dari koperasi adalah sebagai sarana pendukung perekonomian dan

usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil mikro menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat yang mampu bertahan ketika usaha formal tidak mampu memenuhi lapangan pekerjaan. Pertumbuhan koperasi aktif di Kota Dumai dari tahun 2010-2017 tiap tahunnya berfluktuatif sesuai Tabel 2.113 dibawah ini.

Tabel 2.113 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2010-2017
Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM dan Dumai Dalam Angka

Indikator	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017
Persentase Koperasi Aktif	64	71	55	83	83	54	81

Dari data diatas dapat diketahui bahwa perkembangan koperasi aktif di Kota Dumai perkembangannya sangat fluktuatif, namun secara rata-rata kecenderungannya meningkat sampai dengan tahun 2017.

2. Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan memberikan kontribusi perekonomian masyarakat menengah ke bawah. UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar, selain itu kelompok UMKM tahan terhadap tekanan krisis ekonomi. Kota Dumai memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kecil dari tahun ke tahun. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) banyak bergerak di bidang industri kecil, perdagangan kecil dan kerajinan.

Tabel 2.114 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2011-2015
Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Pemberdayaan Masyarakat, 2016

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Usaha Mikro dan Kecil	8.949	10.700	11.232	11.797	11.797	12.497	12.672

Adapun jumlah pendamping UMKM Kota Dumai sampai dengan Tahun 2017 hanya berjumlah 7 delapan orang, dengan 1 kecamatan 1 orang pendamping, dan apabila dibandingkan dengan jumlah UKM yang ada maka jumlah pendamping ini belum memadai dengan rasio 1 :

1.685. Adapun rincian jumlah pendamping per tahun tersaji pada Tabel 2.115 berikut:

Tabel 2.115 Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2015-2017
Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM 2017

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Jumlah Pendamping UKM	7	7	7

Selanjutnya Rekapitulasi perkembangan UMKM Kota Dumai Tahun 2017 perkecamatan tersaji pada Tabel 2.116 berikut.

Tabel 2.116 Rekapitulasi Perkembangan UMKM Kota Dumai
Tahun 2016 dan 2017
Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM 2017

No	Kecamatan	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Dumai Barat	2.377	2.402
2	Dumai Timur	2.713	2.738
3	Bukit Kapur	1.683	1.708
4	Medang Kampai	1.118	1.143
5	Dumai Selatan	964	989
6	Dumai Kota	2.153	2.178
7	Sungai Sembilan	1.489	1.514
JUMLAH		12.497	12.672

Produk unggulan yang dihasilkan oleh UMKM Kota Dumai tahun 2016 berjumlah 100 produk, pada tahun 2017 jumlah produk unggulan ini naik 48% menjadi 148 produk.

L. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA

Investasi mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Pada dasarnya kegiatan

investasi dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta. Penanaman modal di Kota Dumai dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi para investor didalam menanamkan usahanya di Kota Dumai. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Dari tahun 2010-2017, jumlah investor PMDN dan PMA menunjukkan perkembangan yang positif. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.117 berikut.

Tabel 2.117 Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai
Sumber: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, 2016

Indikator	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Perusahaan PMDN	32	42	47	53	57	60	63	64
Jumlah Perusahaan PMA	43	52	56	62	66	69	76	84

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA

Jumlah nilai investasi PMA/PMDN berskala nasional di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai investasi PMA dan PMDN terendah terjadi pada tahun 2014 dengan nilai PMA sebesar 323,45 juta USD dan nilai PMDN sebesar 1,15 triliun Rupiah. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.120. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dumai Dalam Angka Tahun 2017, nilai investasi PMDN di Kota Dumai tahun 2016 adalah sebesar 2,32 triliun Rupiah dan PMA sebesar USD 1.016,34. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, nilai investasi PMDN tahun 2017 sebesar 2,01 triliun Rupiah dan PMA sebesar 132,12 juta USD.

Tabel 2.118 Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Dumai 2012-2017

Sumber: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, 2016

Indikator	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PMDN (Milyar Rp)	11.678,35	208.541,82	1.151,99	7.883,71	2.318,98	2.007,20
PMA (juta \$)	9.300.899,17	5.960,87	323,45	977,36	236,92	132,12

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio daya serap tenaga kerja di Kota Dumai mengalami perkembangan fluktuatif dengan perkembangan naik-turun. Jumlah perusahaan tidak menentukan jumlah tenaga kerja yang tinggi juga di Kota Dumai, karena ada beberapa perusahaan besar yang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi ada perusahaan yang hanya menyerap tenaga kerja yang sedikit. Perusahaan PMDN dan PMA ini juga melibatkan tenaga kerja asing (TKA) dan tenaga kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2018, jumlah TKI/TKA yang bekerja pada perusahaan PMDN tahun 2016 dan tahun 2017 berturut-turut sebanyak 2.833/54 orang dan 2.101/48 orang. Sedangkan untuk jumlah TKI/TKA yang bekerja pada perusahaan PMA tahun 2016-2017 berturut-turut sebanyak 476/8 orang dan 224/8 orang. Berdasarkan data tersebut, maka rasio daya serap tenaga kerja tahun 2016 dan 2017 berturut-turut adalah 24,25 dan 16,09.

4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN dan PMA

Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN mengalami perubahan setiap tahunnya seperti yang tersaji pada Tabel 2.119. Pertumbuhan realisasi investasi PMDN dan PMA tertinggi terjadi pada tahun 2010 meningkat hingga mencapai 1457,5 %. Pada tahun 2007-2008, Kota Dumai mengalami penurunan nilai investasi PMA dan PMDN hingga -

95,3%, tetapi pada tahun 2010-2012 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Peningkatan nilai investasi yang tinggi menyiratkan bahwa kondisi wilayah Kota Dumai memberikan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan investasi.

Tabel 2.119 Persentase Nilai Realisasi PMDN dan PMA Kota Dumai
Sumber: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Nilai Realisasi PMDN	9,99%	1,95%	24,10%	0,11%	0,74%	102,21%	103,81
Persentase Nilai Realisasi PMA	0,02%	21,46%	9,60%	0,45%	1,27%		

M. Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah Organisasi Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental).

Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku beresiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik.

Tabel 2.120 Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai

Indikator	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah organisasi pemuda	52	52	52	52	52	52	55	55

2. Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olahraga di Kota Dumai pada tahun 2017 berjumlah 29 organisasi, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Adapun bentuk pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga, pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah, pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat, Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah dan pembinaan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan pembinaan olahraga. Namun begitu yang selalu menjadi kendala dan pembinaan adalah fasilitas sarana dan prasarana latihan atlet belum memadai.

Tabel 2.121 Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai

Indikator	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah organisasi olahraga	25	25	25	25	29	29	29	29

3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2010 adalah 1 kegiatan dan pada tahun 2017 berjumlah 2 kegiatan kepemudaan, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Tabel 2.122 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2010-2017
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai

Indikator	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kegiatan kepemudaan	1	3	2	2	3	2	1	2

Rendahnya kegiatan kepemudaan ini ternyata berdampak terhadap tingginya penggunaan narkoba di kalangan pemuda di Kota Dumai.

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai, jumlah pengguna narkoba di kalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda di Kota Dumai pada tahun 2017 adalah sebanyak 984 orang.

4. Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2010 adalah 2 kegiatan dan pada tahun 2017 berjumlah 3 kegiatan kepemudaan, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai.

Tabel 2.123 Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai

Indikator	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kegiatan olahraga	2	5	8	4	4	4	5	3

5. Lapangan Olahraga

Jumlah lapangan olahraga sampai tahun 2015 berjumlah 1 lapangan olahraga, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai.

N. Statistik

Indikator pada aspek statistik Kota Dumai yang terdiri dari tersedianya buku “Kota Dalam Angka” dan buku “PDRB Kota” telah terpenuhi, yakni dalam rentang waktu 2010 hingga 2016 tersedia keduanya.

Tabel 2.124 Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2010-2016
Sumber: Badan Pusat Statistik

Indikator	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Buku “Kota Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku “PDRB Kota”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

O. Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2010 hingga tahun 2017 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2010 jumlah festival seni dan budaya berjumlah 2 kegiatan, sempat naik pada tahun 2012 menjadi 4 kegiatan, namun terus turun hingga pada tahun 2016 hanya tinggal 2 kegiatan saja. Tetapi kembali mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 5 kegiatan. Adapun bentuk dari penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah tahun 2017 adalah panggung seni rakyat, festival lampu colok, festival layang dan gasing, festival masakan tradisional, dan malam resepsi kenegaraan. Ini membuktikan bahwa upaya penyelenggaraan festival seni dan budaya yang diwujudkan melalui festival dan lomba mulai menumbuhkan minat dan antusiasme masyarakat dalam melestarikan kebudayaan melayu.

Tabel 2.125 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai
Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga Kota Dumai dan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	4	1	2	2	2	5

P. Perpustakaan

1. Jumlah Perpustakaan

Jumlah perpustakaan yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2010 hingga tahun 2015 relatif mengalami penambahan. Pada tahun 2010 jumlah perpustakaan adalah 7 unit, dan pada tahun 2017 jumlah perpustakaan naik menjadi 15. Berikut Gambar 2.55 Jumlah Perpustakaan di Kota Dumai Tahun 2010-2017.



Gambar 2.55 Jumlah Perpustakaan di Kota Dumai Tahun 2010-2017
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2018

2. Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk di Kota Dumai dari tahun 2010 hingga tahun 2015 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2010 rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 0,28 dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 0,52. Berikut Tabel 2.128 Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk.

Tabel 2.126 Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk
Sumber: Kantor PADE Kota Dumai dan BPS, diolah

Indikator	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Perpustakaan	7	9	12	16	15	15	15
Jumlah Penduduk per 10.000	25,43	25,99	26,80	27,41	28,01	28,60	28,62
Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	0,28	0,35	0,45	0,58	0,54	0,52	0,53

3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun merupakan perbandingan antara jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun dengan jumlah penduduk per 10.000. Adapun perkembangan rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Dumai dari rentang waktu 2010 hingga 2017 terus mengalami peningkatan seperti yang tersaji pada Tabel 2.129. Pada tahun 2010 rasio jumlah pengunjung

perpustakaan per tahun sebesar 162,03, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga tahun 2017 naik menjadi 948,99.

Tabel 2.127 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Tahun 2010-2017
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai dan BPS, diolah

Indikator	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	4.121	5.964	9.555	12.846	15.704	23.985	24.902	28.242
Jumlah Penduduk per 10.000	25,43	25,99	26,80	27,41	28,01	28,60	29,19	29,76
Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	162,03	229,46	356,50	468,68	560,64	838,64	853,10	948,99

4. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kota Dumai dari rentang waktu tahun 2010 hingga tahun 2014 memiliki tren perkembangan yang semakin meningkat. Pada tahun 2010 jumlah koleksi buku adalah sebanyak 11.789 eksemplar, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 57.206 eksemplar seperti yang tersaji Pada Gambar 2.55. Jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah dari tahun 2014 sampai tahun 2017 tetap karena dari tahun 2014 sampai tahun 2017 tidak ada penambahan buku, baik melalui pembelian buku oleh perpustakaan daerah sendiri maupun hibah buku ke perpustakaan daerah oleh pihak lain. Tetapi ada hibah buku langsung oleh pihak lain ke perpustakaan kelurahan maupun ke perpustakaan rutan.



Gambar 2.56 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Q. Kearsipan

Kegiatan pengelolaan arsip secara baku yang dilakukan oleh OPD yang ada di Kota Dumai, berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk persentase arsip daerah yang dapat dikelola seperti yang terlihat pada Tabel 2.128.

Tabel 2.128 Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2012-2017

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2018

Tahun	Jumlah Dokumen Arsip
2012	83
2013	102
2014	1006
2015	748
2016	1590
2017	1791

2.3.3. FOKUS URUSAN LAYANAN PILIHAN

A. Pariwisata

1. Kunjungan wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian Kota Dumai. Sektor ini memiliki relasi yang kuat dengan sektor-sektor lainnya dan memiliki kontribusi cukup besar bagi perekonomian daerah, sehingga sektor pariwisata dikembangkan menjadi salah satu potensi daerah. Jumlah kunjungan wisata dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 mengalami perkembangan yang fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel 2.129. Jumlah kunjungan wisata tertinggi terjadi pada tahun 2015 seiring dengan meningkatnya daya tarik dan jenis pariwisata yang ada di kota Dumai yaitu sebesar 122.627 orang.

Tabel 2.129 Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Dumai

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Indikator	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kunjungan Wisata (orang)	72.183	71.133	67.060	90.723	71.274	122.627	52.020	45.340

B. Pertanian

1. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai di pengaruhi oleh besarnya luas panen dan produktivitas. Luas panen yang berhasil dilakukan tergantung tersedianya lahan sawah maupun lahan bukan sawah serta indeks pertanaman, sedangkan produktivitas padi dan palawija tergantung cara tanam atau paket teknologi yang dilakukan oleh petani di Kota Dumai. Peningkatan produktivitas padi dan palawija cenderung mengalami naik-turun pada. Data selengkapnya mengenai persentase produksi padi dan bahan pangan utama lokal.

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2010 sampai tahun 2017 dengan kecenderungan meningkat seperti yang tersaji pada Gambar 2.57. Pada tahun 2017 produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya mengalami peningkatan sebanyak 28,6% (2,59 ton/ha) dari tahun 2010 menjadi 3,33 ton/ha.



Gambar 2.57 Rasio Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai

Adapun jumlah kelompok tani perkecamatan pada saat ini adalah sebagai berikut Tabel 2.130 Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok.

Tabel 2.130 Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok
Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Dumai, 2016

No	Kecamatan	Jumlah kelompok tani (poktan)	Jumlah kelas kelompok			
			Pemula	Lanjut	Madya	Utama
1	Bukit Kapur	95	80	14	1	0
2	Dumai Barat	32	32	0	0	0
3	Dumai Kota	8	8	0	0	0
4	Dumai Selatan	33	30	3	0	0
5	Dumai Timur	35	34	1	0	0
6	Medang Kampai	50	47	3	0	0
7	Sungai Sembilan	118	91	27	0	0
Total		371	322	48	1	0

Produktivitas hasil pertanian juga dipengaruhi oleh sumber daya petani yang handal, tabel berikut menyajikan jumlah petani yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan pertanian. Adapun jumlah kelompok tani yang telah dibina sampai dengan tahun 2017 tersaji pada table 2.98. Dari Tabel 2.131 tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai tahun 2017 jumlah kelompok tani yang telah bina sejumlah 52,8% dari seluruh kelompok tani yang ada.

Tabel 2.131 Rekapitulasi Kelompok Tani yang Telah Dibina
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, 2017

Tahun	2015	2016	2017	Jumlah
Jumlah Kelompok Tani yang Telah Dibina	130	33	33	196

2. Luas Areal Perkebunan

Berdasarkan kondisi topografi, kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang. Kondisi ini membuat lahan di Kota berpotensi untuk pengembangan tanaman perkebunan. Adapun luas areal perkebunan menurut jenis tanaman di setiap kecamatan di Kota Dumai tersaji pada Tabel 2.132. Dari tabel terlihat bahwa jenis tanaman perkebunan yang dominan dikembangkan

di Kota Dumai adalah kelapa sawit. Hasil produksi dari perkebunan kelapa sawit ini digunakan sebagai bahan baku pada industri pengolahan kelapa sawit yang ada di Dumai.

Tabel 2.132 Luas Areal Perkebunan (Ha) Menurut Jenis Tanaman per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, 2018

Kecamatan	Jenis Tanaman				
	Kelapa Sawit	Karet	Kelapa	Pinang	Kakao
Bukit Kapur	12.745,0	1.254,0	84,0	7,5	1,0
Dumai Barat	118,0	-	220,0	14,0	2,0
Dumai Kota	-	-	-	-	-
Dumai Selatan	355,0	6,0		9,5	3,5
Dumai Timur	67,0	-	26,5	6,0	-
Medang Kampai	3.806,0	720,0	145,0	11,0	4,0
Sungai Sembilan	20.988,0	463,0	1.016,0	65,0	16,0
Jumlah	38.079,0	2.443,0	1.539,5	113,0	26,5

Selain kelapa sawit, areal perkebunan di Kota Dumai ditanami karet, kelapa, pinang, dan kakao. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan maka perlu dilakukan peremajaan tanaman. Peremajaan tanaman ini difokuskan untuk tanaman perkebunan yang sudah tua dan atau perkebunan yang ditanami dengan bibit yang tidak unggul.

3. Populasi Ternak Unggulan

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, jumlah ternak unggulan sampai tahun 2015 adalah sebanyak 5.235 satuan ternak. Jumlah ternak unggulan ini terus bertambah sampai tahun 2017 dengan jumlah berturut-turut 5.463 satuan ternak di tahun 2016 dan 5775 satuan ternak di tahun 2017. Sedangkan untuk jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis, kondisi di tahun 2015 terdapat 35 kasus. Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis ini tetap sama di tahun 2016, dan di tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kasus menjadi 29 kasus.

4. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Dumai. Kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Kota Dumai fluktuatif dari tahun ke tahun seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.133 berikut.

Tabel 2.133 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Dumai Tahun 2010-2016 (%)
Sumber: Dumai Dalam Angka

Indikator	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,35	6,50	6,58	6,08	6,08	6,10	6,04

C. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pertumbuhan Sektor Pengalihan Dalam PDRB

Kontribusi sektor pertambangan dan pengalihan di Kota Dumai hanya terdapat pada sub sektor pengalihan. Sektor pengalihan relatif mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014.

D. Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan Laut

Kota Dumai memiliki laut yang cukup berpotensi sebagai wadah produksi perikanan laut. Perikanan laut di Kota Dumai memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki produksi perikanan laut yang memiliki banyak jenis ikan dan produksi perikanan laut yang tinggi setiap tahunnya. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.134 berikut ini.

Tabel 2.134 Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai
Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dan Dumai Dalam Angka

Jenis Ikan	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tenggiri	11.100	29.641	22,200	17.000	30.000	40.300	86.100
Parang-parang	8.940	25.052	24.800	15.300	12.300	14.200	41.887
Senangin	9.330	20.189	17.100	15.900	24.000	17.700	0
Kakap Hitam/ Putih	8.690	20.338	17.000	12.200	9.700	8.000	0

Jenis Ikan	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gulama	13.538	27724	21.800	20.600	12.400	0	0
Lomek	12.680	31.149	23.500	17.000	27.200	57.000	125.660
Biang	12.400	32.582	21.600	15.700	0	0	0
Pari	8.450	22.946	0	13.000	14.000	800	0
Bawal	9.332	21.271	0	13.000	0	4.400	52.498
Mayung	0	0	0	0	0	0	0
Ikan lainnya	192.920	166.164	164.200	159.800	63.700	231.500	401.181
Udang lainnya	813.120	533.702	578.100	376.600	43.000	151.100	223.489
Jumlah	1.100.500	930.758	890.300	676.100	236.300	525.000	930.815

Kota Dumai memiliki beragam jenis perikanan laut yang memiliki produksi yang besar setiap tahunnya dibandingkan dengan perikanan budidaya. Dari tahun ke tahun, perkembangan produksi perikanan laut fluktuatif. Pada tahun 2011 produksi perikanan laut mencapai 1.100.500 Kg. Produksinya terus mengalami penurunan setiap tahunnya sampai tahun 2015 menjadi 236.300 Kg. Kemudian terus mengalami peningkatan sampai tahun 2017 menjadi 930.815 Kg. Untuk lebih jelasnya produksi perikanan laut Kota Dumai Tahun 2011-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.58.



Gambar 2.58 Perkembangan Produksi Perikanan Laut di Kota Dumai
Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dan Dumai Dalam Angka

2. Produksi Perikanan Budidaya

Kota Dumai memiliki potensi perikanan lain seperti perikanan darat dalam bentuk perikanan kolam dan tambak tetapi perikanan darat Kota Dumai lebih didominasi oleh budidaya kolam. Perikanan budidaya kolam

di Kota Dumai memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki banyak jenis ikan yang dapat dikembangkan. Walaupun produksi tidak sebanyak perikanan laut, perikanan budidaya kolam memiliki nilai produksi yang cukup besar di Kota Dumai. Berikut disajikan Tabel 2.135 Produksi Perikanan Kolam (Kg) di Kota Dumai.

Tabel 2.135 Produksi Perikanan Budidaya (Kg) di Kota Dumai
Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dan Dumai Dalam Angka

Jenis Ikan	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ikan Mas	80	0	0	0	0	0	0
Ikan Nila	2.188	2.710	850	400	1.626	270	2.534
Gurami	360	1.450	1.350	0	0	1.360	942
Lele	66.219	106.350	138.297	128.522	174.891	197.110	314.456
Patin	7.984	41.370	18.848	8.000	8.000	10.300	7.430
Bawal	246	3.120	3.700	800	0	500	0
Bandeng	1.300	6.330	4.950	16.827	4.816	1.240	860
Udang	895	3.020	2.410	1.689	3.888	7.620	16.136
Jumlah	79.272	164.350	170.405	156.238	190.221	218.400	342.358

Perikanan darat yang ada di Kota Dumai adalah berupa budidaya dalam kolam. Produksi perikanan budidaya ini cukup beraneka ragam dengan perkembangan produksi perikanan budidaya dari tahun 2011 sampai tahun 2017 mengalami naik-turun, seperti yang tersaji pada Gambar 2.59. Pada Tahun 2011 produksi perikanan budidaya mencapai 79.272 Kg, kemudian mengalami perkembangan produksi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, hingga tahun 2017 produksi perikanan budidaya di Kota Dumai mencapai 342.358 Kg.



Gambar 2.59 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya di Kota Dumai
Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dan Dumai Dalam Angka

E. Perdagangan

1. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang relatif berkembang di Kota Dumai. Berikut tabel 2.136 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2010-2016.

Tabel 2.136 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2010-2016

Sumber: Dumai Dalam Angka

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	19,39	20,00	20,37	18,91	19,42	18,45	17,89

2. Ekspor Bersih

Nilai ekspor Kota Dumai berfluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai ekspor ini mencapai USD 10.889.408.942 pada tahun 2016. Nilai ekspor membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Dumai. Berikut Tabel 2.137 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai.

Tabel 2.137 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai

Sumber: Dumai Dalam Angka

Uraian (USD 000)	2010	2011	2012	2013	2014	2016
Ekspor	11,770,875,896	16,485,319,670	16,485,319,670	14,195,672,775	17,746,297,425	10.889.408.942
Impor	504,700,272	1,175,177,629	1,175,177,629	1,064,462,336	778,071,820	597.294.415
Ekspor Bersih Perdagangan	11.266.175.624	15.310.142.041	15.310.142.041	13.131.210.439	16.968.225.605	10.292.114.527

Dari tabel di atas dapat dilihat ekspor bersih perdagangan di Kota Dumai selalu bernilai positif, hal tersebut karena kegiatan ekspor di Kota Dumai memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan impor.

F. Perindustrian

1. Kontribusi Sektor Perindustrian dalam PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Dumai. Kontribusinya pada PDRB Kota Dumai dapat dilihat dalam table 2.138 berikut ini.

Tabel 2.138 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai (%) Tahun 2010-2016

Sumber: Dumai Dalam Angka

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sektor Industri Pengolahan (%)	52,74	51,44	49,30	51,38	52,90	53,17	53,88

2. Pertumbuhan Industri

Sektor industri pengolahan di Kota Dumai mengalami pertumbuhan yang fluktuatif seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.139 berikut.

Tabel 2.139 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2011-2016

Sumber: PDRB Kota Dumai

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Pertumbuhan Industri terhadap PDRB	5,90	2,70	3,78	6,19	2,69	6,28

Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang menjanjikan untuk mendapatkan perhatian oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengembangan ekonomi kreatif dalam dekade terakhir menjadi alternatif solusi sekaligus strategi global dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pelambatan ekonomi global. Berikut Tabel 2.140 Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai.

Tabel 2.140 Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Pembedayaan Masyarakat

NO	BIDANG USAHA	JUMLAH PENGRAJIN	JENIS PRODUKSI	LOKASI
	I. INDUSTRI KERAJINAN			
1	Kerajinan Tenun	15	Tempat Air mineral	KEL. PURNAMA
			Tempat Tisu	KEL. BAGAN KELADI

NO	BIDANG USAHA	JUMLAH PENGRAJIN	JENIS PRODUKSI	LOKASI
			Tempat Telur	KEL. STDI
			Kain Songket	KEL. LAKSAMANA
			Tepak Sirih	KeL. RIMBA SEKAMPUNG
			Tempat Buah	KEL. BUKIT TIMAH
2	Kerajinan Kristal	14	Tempat Air mineral	KEL. PURNAMA
			Gehal	KEL. BAGAN KELADI
			Tempat Telur	KEL. BINTAN
			Bunga Kristal	KEL. RIMBA SEKAMPUNG
			Tepak Sirih	KEL. BUKIT DATUK
			Tempat Buah	
			Tempat Tisu	
3	Kerajinan Manik Manik	3	Tempat Tisu	KEL. BUKIT DATUK
			Tempat Bunga	KEL. BAGAN BESAR
			Tempat air mineral	KEL. RATU SIMA
4	Kerajinan Buah Para dan Kelapa	5	Alas kaki	KEL. MUNDAM
			Hiasan Dinding	KEL. PURNAMA
5	Kerajinan Pembuatan Bunga dan Bros Jilbab	2	Bunga	KEL. RIMBA SEKAMPUNG
			hiasan jilbab	KEL. RATU SIMA
6	Kerajinan Anyaman Pandan	10	Tikar	KEL. MUNDAM
7	Kerajinan Limbah Plastik	7	Bunga	KEL. RIMBA SEKAMPUNG
			Tas	KEL. SUKAJADI
8	Kerajinan plastik tali rafia	5	Bunga	KEL. MUNDAM
9	Kerajinan Bordir	25	Topi	KEL. JAYA MUKTI
			Pakaian	KEL. BULUH KASAP
			Lambang	KEL. TELUK BINJAI
			Mukena	KEL. BINTAN
			Jilbab	KEL. RATU SIMA
				KEL. PURNAMA
				KEL. BUKIT DATUK
				KEL. SUKAJADI
10	Kerajinan Konveksi	50	Kemeja	KEL. SUKAJADI
			Pakaian Olah Raga	KEL. BULUH KASAP
			Celana	KEL. BINTAN
			Jas	KEL. PURNAMA
			Baju Kaos	KEL. DUMAI KOTA
				KEL. RIMBA SEKAMPUNG
				KEL. JAYA MUKTI
				KEL. BUKIT NENAS

NO	BIDANG USAHA	JUMLAH PENGRAJIN	JENIS PRODUKSI	LOKASI
				KEL. PELINTUNG
				KEL. LUBUK GAUNG
				KEL. BASILAM BARU
				KEL. RATU SIMA
				KEL. KAYU KAPUR
				KEL. BAGAN BESAR
				KEL. BUKIT TIMAH
				KEL. MEKAR SARI
11	Kerajinan Limbah Kayu dan Bambu	3	KAPAL	KEL. RATU SIMA
			SOVENIR	KEL. MUNDAM
			MEJA	KEL. KAYU KAPUR
			BUNGA	
12	Kerajinan Batik	8	KAIN PANJANG	KEL. PURNAMA
			BAHAN BAJU	KEL. BAGAN KELADI
			HIASAN DINDING	
13.	Kerajinan Rotan	2	KURSI, MEJA, FERTISI	KEL. BINTAN
			KERANJANG PARSEL	KEL. DUMAI KOTA
			DLL	
II.	INDUSTRI PERCETAKAN DAN ADVERTISING			
14.	Ind. Percetakan	18	BARANG CETAKAN	Kel. Teluk Binjai
				Kl. Rimbasekampng
				Kel. Sukajadi
				Kel. Dumai Kota
15.	Ind. Advertising	25	BALEHO	KEL. BINTAN
			NEON BOK	KEL. SUKAJADI
			SPANDUK	KEL. LAKSAMANA
			STEMPEL	KEL. JAYAMUKTI
			PLAKAT	
			CENDRAMATA/PAMPHLET	
			BANNER	
JUMLAH PENGRAJIN		192		

2.3.4. FOKUS URUSAN PENUNJANG

B. Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025. Perda ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Dumai untuk melakukan Perubahan RPJMD periode 2011-2015 sehingga dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi. Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2011-2015 ditetapkan dengan perda nomor 14 Tahun 2014

Selama periode 2011-2015 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwako). RKPD merupakan Penjabaran program RPJMD ke dalam bentuk dokumen satu tahunan. Dokumen RKPD menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD Kota Dumai setiap tahunnya. RKPD Kota Dumai Tahun 2011-2015 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 tahun 2010 lampiran V dan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah. RKPD Kota Dumai ditetapkan dengan Peraturan Walikota setiap tahunnya.

C. Administrasi Pemerintahan

Salah satu permasalahan dari aspek administrasi pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Dumai sampai saat ini adalah belum ditetapkannya garis batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis dengan Peraturan Menteri, maupun garis batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan di Kota Dumai.

Sesuai dengan amanat pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah menegaskan bahwa “Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis”.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai, daerah berkewajiban untuk menentukan batas secara pasti dilapangan, yang selanjutnya hasil penentuan batas tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk Peraturan Menteri, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Guna untuk memenuhi amanat tersebut Pemerintah Kota Dumai membentuk Tim Tata Batas melalui Surat Keputusan Walikota Dumai No. 299/PEM/2001 dan Surat Keputusan Walikota Dumai No. 365 Tahun 2004 tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota Dumai. Terhitung mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota Dumai melakukan pembahasan tentang batas, baik batas daerah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis maupun dengan Kabupaten Rokan Hilir.

Dari tahun 2011-2017 upaya penyelesaian masalah perbatasan wilayah tersebut tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Dumai, untuk batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Nomor : 40/BA-PERM/BAD.I/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014. Sedangkan untuk batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya berpegang teguh pada hasil kesepakatan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Tapal Batas antara Tim PPBD Kabupaten Rokan Hilir dengan Tim PPBD Kota Dumai Tanggal 27 Januari 2006 di Pekanbaru yang telah ditandatangani bersama dan berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitive dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis adalah sepanjang 63.614,489 meter dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Bukit Kapur pada wilayah Kelurahan Gurun Panjang dan Kelurahan Bukit Kayu Kapur. Sedangkan batas dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah sepanjang 100.242,098 meter dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Sungai Sembilan pada Kelurahan Batu Teritip.

Kesepakatan tentang batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir maupun Kabupaten Bengkalis memang sudah menghasilkan beberapa kesepakatan, tetapi sampai saat ini permasalahan batas wilayah tersebut belum ditetapkan dengan Peraturan Menteri, bahkan masih terjadi negosiasi-negosiasi terkait penetapan batas wilayah tersebut.

Dalam hal batas wilayah antar kelurahan dan antar kecamatan, sampai saat ini belum secara keseluruhan dilakukan penegasan batas, namun untuk tertib administrasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan maka penegasan batas wilayah secara pasti dilapangan akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sampai selesai.

D. Urusan Pengawasan

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Dumai merupakan salah satu indikator pada aspek pengawasan. Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Riau atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan

oleh Pemerintah Kota Dumai. Adapun hasil penilaian SAKIP Kota Dumai tahun 2015-2017 tersaji pada Tabel 2.141.

Tabel 2.141 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016-2018
Sumber: Bappeda, 2018

Uraian	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
	SAKIP 2015	SAKIP 2016	SAKIP 2017
Nilai	50,20	51,76	54,02
Predikat	CC	CC	CC

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Agar terwujud pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hasil penilaian LPPD Kota Dumai tingkat Provinsi tahun 2016 adalah peringkat 8, naik 1 peringkat dari tahun 2015.

Indikator lainnya pada aspek pengawasan adalah persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dan jumlah dokumen yang direview setiap tahunnya. Kedua indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai mulai tahun 2016. Berdasarkan data dari Inspektorat Kota Dumai, pada tahun 2016 persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti adalah sebesar 67,32%, naik menjadi 69,15%

pada tahun 2017. Sedangkan untuk indikator jumlah dokumen yang direview, capaiannya pada tahun 2016 dan 2017 berturut-turut adalah sebanyak 2 dokumen (Rencana Kerja Anggaran dan LKPD) dan 3 dokumen (Rencana Kerja Anggaran, LKPD dan Laporan Kinerja).

E. Urusan Keuangan

Indikator pada aspek keuangan antara lain: (1) persentase peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi; (2) peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan; (3) Persentase belanja pendidikan; dan (4) Persentase belanja kesehatan. Perkembangan keempat indikator ini dari tahun 2010 sampai tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.142.

Tabel 2.142 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Belanja Pendidikan, dan Belanja Kesehatan Kota Dumai Tahun 2010-2016
Sumber: Badan Pendapatan Daerah dan Bappeda Kota Dumai

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PAD (Milyar Rp.)	113,39	115,40	157,47	153,22	162,54	182,35
Pajak Daerah (Milyar Rp.)	26,19	18,06	65,84	59,24	64,44	71,85
Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	157,46	(31,03)	264,48	(10,02)	8,78	11,50
Retribusi Daerah (Milyar Rp.)	32,57	45,27	35,67	25,67	15,22	29,44
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah (%)	59,23	39,00	(21,02)	(28,04)	(40,71)	93,46
Penerimaan PBB (Milyar Rp.)	N/A	N/A	26,53	29,34	29,23	33,67
Persentase Peningkatan PBB (%)	N/A	N/A	N/A	10,59	(0,39)	18,61
Belanja Daerah Kota Dumai (Milyar Rp.)	751,14	952,16	1.212,89	1.291,02	1.044,12	1.259,20
Belanja Pendidikan (Milyar Rp.)	229,33	269,15	318,88	338,19	382,06	381,54
Persentase Belanja Pendidikan (%)	30,53	28,27	26,29	26,20	36,59	30,30
Belanja Kesehatan (Milyar Rp.)	100,39	136,94	173,27	192,67	216,83	260,62
Persentase Belanja Kesehatan (%)	13,36	14,38	14,29	14,92	20,77	20,70

Dari Tabel 2.144 diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2016 meningkat sebanyak 227,35% dari PAD tahun 2010. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada PAD Kota Dumai tahun 2016 berturut-turut adalah sebesar 39,40% dan 16,15% seperti yang tersaji pada Tabel 2.120. Pendapatan yang berasal

dari pajak daerah selama periode 2011-2016 fluktuatif, pada tahun 2016 pajak daerah meningkat sebesar 11,50% dari tahun sebelumnya. Kondisi retribusi daerah dari tahun 2012 sampai tahun 2015 terus mengalami penurunan dengan total penurunan di tahun 2015 cukup tajam yaitu sebesar 40,71%. Sedangkan retribusi daerah tahun 2016 meningkat sebesar 93,46% dari tahun sebelumnya. Untuk penerimaan PBB, pada tahun 2015 penerimaan PBB mengalami penurunan sebesar 115 juta Rupiah, namun pada tahun 2016 kinerjanya kian membaik karena terjadi peningkatan penerimaan PBB sebesar 18,61% dari tahun sebelumnya.

Disisi lain, dari Tabel 2.144 diatas juga terlihat bahwa selama periode 2011-2016 lebih dari 26% belanja daerah Kota Dumai disalurkan untuk pemenuhan belanja pendidikan, tetapi perkembangan fluktuatif. Pada tahun 2016 persentase belanja pendidikan ini mengalami penurunan sebesar 6,29% dari tahun sebelumnya menjadi 30,30%. Penurunan ini juga terjadi pada belanja kesehatan, tetapi penurunannya tidak signifikan, hanya sebesar 0,07% yaitu dari 20,77% pada tahun 2015 turun menjadi 20,70% di tahun 2016.

F. Urusan Kepegawaian

Indikator pada aspek kepegawaian antara lain: (1) persentase data/informasi kepegawaian baik formasi jabatan dan penempatan mudah diakses secara cepat, lengkap dan benar; (2) Persentase menurunnya ASN dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi; (3) Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja; dan (4) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.

Untuk mengakses data/informasi kepegawaian secara cepat, lengkap dan benar maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai telah memiliki database Pegawai Negeri Sipil se-Kota Dumai

yang akurat dan *up to date* dalam sebuah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Pasca disyahkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka dilakukan penyesuaian terhadap beberapa indikator kinerja terkait aspek kepegawaian diantaranya: (1) persentase menurunnya ASN dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi direvisi menjadi persentase pelanggaran disiplin; dan (2) Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja direvisi menjadi persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Adapun jumlah ASN yang mendapat teguran karena melakukan pelanggaran disiplin selama periode 2010-2017 dan jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2010-2017 tersaji pada Tabel 2.143 dan Tabel 2.144.

Tabel 2.143 Jumlah ASN Kota Dumai Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Tahun 2010-2017

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai, 2018

Indikator	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin	11	3	6	18	12	6	6	12

Tabel 2.144 Jumlah ASN Kota Dumai Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2010-2017

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai, 2018

Indikator	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural								

Indikator	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- PIM II	-	8	5	-	-	2	-	-
- PIM III	1	-	40	11	2	5	2	-
- PIM IV	-	-	160	80	30	40	-	-

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2016 tingkat disiplin ASN kian membaik yang tercermin dari kasus pelanggaran disiplin yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, meskipun stagnan di tahun 2016. Namun di tahun 2017 kondisi disiplin ASN kembali memburuk karena terjadi peningkatan kasus pelanggaran disiplin. Pada tahun 2016 terdapat 6 ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, kemudian meningkat menjadi 12 ASN pada tahun 2017.

Selama periode 2010-2016 telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural untuk peningkatan kapasitas pejabat ASN di Kota Dumai, baik itu dalam bentuk Diklat PIM II, PIM III, dan PIM IV seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.146. Namun pada tahun 2017 diklat-diklat tersebut tidak bisa terselenggara karena terdapatnya beberapa kendala ataupun keterbatasan. Kondisi sampai tahun 2017, masih terdapat ASN yang belum mengikuti Diklat PIM dengan rincian yang belum mengikuti Diklat PIM II sebanyak 12 orang, PIM III sebanyak 32 orang, dan PIM IV sebanyak 115 orang. Dalam rangka peningkatan kapasitas pejabat ASN di Kota Dumai maka dirasa perlu untuk melaksanakan program-program terkait peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Selama periode 2010-2017 jumlah pejabat eselon II di Kota Dumai tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.145 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) Kota Dumai Tahun 2010-2017

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai, 2018

Indikator	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pejabat Eselon II	26	28	25	24	29	24	24	21

2.2. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

A. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan pendekatan untuk mengetahui pendapatan seseorang. Pendekatan ini digunakan karena data riil pendapatan perorangan sulit didapatkan. Dengan data pengeluaran per kapita ini diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui. Berdasarkan data tahun 2016, terlihat bahwa pengeluaran rata-rata per kapita masyarakat Kota Dumai adalah sebesar Rp 941.427,-. Besaran pengeluaran untuk makanan dan non makanan terlihat seimbang. Pengeluaran untuk makanan mencapai Rp. 479.722, sedangkan pengeluaran untuk non makanan mencapai Rp. 461.705. Berikut Tabel 2.146 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Dumai.

Tabel 2.146 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Dumai

Sumber: BPS

No	Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-rata Per Kapita per Bulan	
		Rupiah	%
1	Makanan	479.722	50,96
2	Bukan Makanan	461.705	49,04
	Jumlah	941.427	100,00

2.4.2. FOKUS FASILITAS WILAYAH/ INFRASTRUKTUR

A. Perhubungan

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Berikut adalah Tabel 2.147 yang menyajikan mengenai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai.

Tabel 2.147 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai
Sumber: Dinas Perhubungan, 2016

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang jalan (km)	1.561,2	1.803,8	1.486,7	1.198,2	1.198,2
Jumlah kendaraan	9.999	61.135	64.111	61.900	80.242
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	1 : 6,4	1 : 33,9	1 : 43,12	1 : 51,7	1 : 67

Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai dalam rentang waktu tahun 2013 hingga tahun 2017 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yakni dari 1:6,4 di tahun 2013 menjadi 1:67 pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang terdaftar setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk. Adapun jumlah kendaraan per panjang jalan selama tahun 2013-2017 tersaji pada Gambar 2.60.



Gambar 2.60 Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan (Unit/Km) di Kota Dumai
Sumber: Dumai Dalam Angka

2. Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum memiliki kesamaan dengan indikator jumlah arus penumpang angkutan umum pada urusan perhubungan dalam aspek pelayanan umum. Sedangkan jumlah barang yang terangkut angkutan umum dirinci berdasarkan jumlah barang dan status barang.

Tabel 2.148 Jumlah Orang dan Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2011-2016

Sumber: Dinas Perhubungan dan Dumai Dalam Angka

Prasarana Angkutan	ORANG/	JENIS	2011	2012	2013	2014	2016
	BARANG	PENUMPANG					
PELABU HAN	ORANG	BERANGKAT	260.860	270.503	269.925	233.365	235.200
		DATANG	260.879	273.990	253.645	211.070	196.451
	BARANG	MUAT	25.714.399	24.386.535	32.582.663	22.193.164	18.316.097
		BONGKAR	4.147.173	4.476.741	3.685.665	9.134.493	3.687.960
BANDARA	ORANG	BERANGKAT	24.533	22.163	22.116	10.625	30.635
		DATANG	2.480	21.320	20.852	10.876	30.858
		TRANSIT	9.422	8.952	8.580	1.385	12
	BARANG	BONGKAR	107.074	93.236	65.486	9.764	64.663
		MUAT	22.804	11.596	9.192	1.259	71.713
	BAGASI	BONGKAR	319.043	290.804	257.022	348.342	161.956
		MUAT	415.432	256.849	249.696	103.900	171.458
	POS PAKET	BONGKAR	0	0	0	0	0
MUAT		0	0	0	0	0	

Prasarana Angkutan	ORANG/ BARANG	JENIS PENUMPANG	2011	2012	2013	2014	2016
	TERMINAL	ORANG	BERANGKAT	149.734	174.680	116	NA
DATANG			155.692	176.902	116	NA	NA

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel diatas (tanpa data tahun 2015), terlihat bahwa jumlah barang yang dimuat/dibongkar melalui pelabuhan laut dalam rentang waktu tahun 2010 hingga tahun 2016 mendominasi kegiatan pengangkutan di pelabuhan Kota Dumai, hal ini dikarenakan 80% kegiatan ekspor-impor dilakukan melalui pelabuhan.

B. Penataan Ruang

Dalam pokok bahasan penataan ruang dibagi menjadi enam indikator yang terdiri dari ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan. Namun dalam laporan antara ini hanya akan dibahas lima dari enam indikator tersebut, karena indikator ketaatan terhadap RTRW tidak ditemukan datanya.

Dari data yang bersumber dari rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai diketahui Luas wilayah produktif di Kota Dumai adalah seluas 50.844,42 Ha. Luasan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan nomor 314 tahun 2016. 7.716,98 Ha atau 15,2 % dari luas seluruh wilayah budidaya (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan nomor 314 tahun 2016). Adapun Luas kawasan budidaya Kota Dumai sesuai draf RTRW adalah 195.386,2 Ha. Sedangkan luas wilayah kebanjiran adalah 20.653,87. Serta luas wilayah perkotaan Kota Dumai hanya sebesar 44.952,37 Ha atau 23 % dari seluruh wilayah budidaya di Kota Dumai (Draf RTRW).

C. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Jumlah Penginapan/ Hotel

Hotel merupakan sarana penting untuk mendukung kegiatan ekonomi Kota Dumai, antara lain kegiatan perdagangan dan pariwisata. Pada tahun 2010, hotel yang terdapat di Kota Dumai berjumlah 21 unit. Jumlah hotel terbanyak terdapat di Kecamatan Dumai Kota dengan 12 unit hotel. Berikut tabel 2.149 Banyaknya Hotel di Kota Dumai.

Tabel 2.149 Banyaknya Hotel di Kota Dumai

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Dumai Dalam Angka

Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bukit Kapur	1	1	1	1	1	1		
Medang Kampai	0	0	0	0	0	0		
Sungai Sembilan	0	0	0	0	1	0		
Dumai Barat	2	2	3	3	4	4		
Dumai Timur	7	7	7	7	8	8		
Dumai Kota	10	10	11	11	12	12		
Dumai Selatan	1	1	1	1	2	2		
Jumlah	21	21	23	23	28	27	24	28

2.4.3. FOKUS IKLIM BERINVESTASI

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kota Dumai mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, angka kriminalitas Kota Dumai mencapai 459. Kondisi tersebut semakin meningkat hingga tahun 2014 menjadi 861. Peningkatan Jumlah kasus kriminalitas kota Dumai salah satunya diakibatkan karena kota Dumai merupakan kota perlintasan (transit) dan tujuan para pencari kerja didaerah atau provinsi sekitar Riau. Meskipun tingkat kriminalitas kota Dumai cenderung meningkat, namun

tingkat penyelesaiannya rata-rata diatas 50%. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.150 berikut.

Tabel 2.150 Angka Kriminalitas di Kota Dumai 2010-2017
Sumber: Dumai Dalam Angka

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka kriminalitas	459	446	454	642	861	97*	474	527
% Diselesaikan	49,89	73,54	67,40	70,72	69,34	NA	NA	NA

2. Lama Proses Perijinan

Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, terdapat 74 jenis izin yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan lama proses perijinan 5 hari kerja seperti yang tersaji pada Tabel 2.151.

Tabel 2.151 Lama Proses Perijinan di Kota Dumai
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2018

No.	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
1	Pendaftaran Penanaman Modal	5 hari
2	Izin Prinsip Penanaman Modal	5 hari
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	5 hari
4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	5 hari
5	Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger), Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	5 hari
6	Izin Lokasi	5 hari
7	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	5 hari
8	Izin Klinik	5 hari
9	Izin Klinik Gigi	5 hari
10	Izin Penyelenggaraan Optical	5 hari
11	Izin Apotik	5 hari
12	Izin Toko Obat	5 hari
13	Izin Laboratorium	5 hari
14	Izin Rumah Bersalin	5 hari
15	Izin Praktek Terapi Wicara	5 hari
16	Izin Praktek Fisioterapis	5 hari
17	Izin Praktek Bidan	5 hari
18	Izin Dokter Spesialis	5 hari
19	Izin Dokter Umum	5 hari
20	Izin Dokter Gigi	5 hari

No.	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
21	Izin Praktek Perawat Gigi	5 hari
22	Izin Refraksionis Opician	5 hari
23	Izin Pengobatan Tradisional	5 hari
24	Izin Depot Air Isi Ulang	5 hari
25	Izin Operasional Rumah Sakit	5 hari
26	Izin Praktek Perawat Mandiri	5 hari
27	Izin Praktek Tukang Gigi	5 hari
28	Izin Praktek Apoteker	5 hari
29	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	5 hari
30	Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum	5 hari
31	Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan	5 hari
32	Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan	5 hari
33	Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan	5 hari
34	Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan	5 hari
35	Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
36	Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai dan Kartu Pengawasan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
37	Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
38	Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
39	Izin Masuk Kota	5 hari
40	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	5 hari
41	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5 hari
42	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	5 hari
43	Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 hari
44	Izin Usaha Industri (IUI)	5 hari
45	Izin Usaha Toko Modern	5 hari
46	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5 hari
47	Izin Usaha Perkebunan	5 hari
48	Izin Pengelolaan Sarang Burung Wallow	5 hari
49	Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (STD-P)	5 hari
50	Izin Usaha Penyelenggaraan Bengkel Umum	5 hari
51	Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	5 hari
52	Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	5 hari
53	Izin Penggunaan Tower Crane	5 hari
54	Izin Penggunaan Bejana Tekan	5 hari
55	Izin Penggunaan Instalasi Listrik	5 hari
56	Izin Penggunaan Motor Diesel	5 hari
57	Izin Penggunaan Penyalur Petir	5 hari
58	Izin Lingkungan (AMDAL)	5 hari
59	Izin Lingkungan (UKP-UPL)	5 hari
60	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	5 hari
61	Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)	5 hari
62	Izin Pembuangan Air Limbah	5 hari
63	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan	5 hari
64	Izin Turap	5 hari
65	Izin Bukti Pencatatan Kapal Perikanan	5 hari
66	Izin Usaha Peternakan	5 hari

No.	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
67	Izin Pendirian Sekolah Swasta (IPSS)	5 hari
68	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLNF)	5 hari
69	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	5 hari
70	Izin Penggunaan Racun Api	5 hari
71	Izin Reklame/Spanduk	5 hari
72	Izin Warnet	5 hari
73	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	5 hari
74	Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)	5 hari

Data perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Dumai dari Tahun 2011 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada table 2.152 berikut ini :

Tabel 2.152 Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai
Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2017

No	Jenis Izin	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	983	934	698	-	-	-	-
2	Izin Undang-Undang Gangguan (HO)	952	1191	1010	1087	1029	1275	591
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	765	744	839	1038	878	1055	795
4	TDP PO	239	212	248	413	313	-	-
5	TDP CV	343	416	375	347	338	-	-
6	TDP PT. Non Berbadan Hukum	37	50	60	98	60	-	-
7	TDP PT. Berbadan Hukum	83	63	206	145	230	-	-
8	TDP PT. Perubahan	53	51	37	64	23	-	-
9	TDP Koperasi	38	72	21	15	29	-	-
10	TDP Perusahaan Lain	1	-	-	-	-	-	-
11	Tanda Daftar Gudang (TDG)	-	-	-	-	-	-	-
12	Tanda Daftar Industri (TDI)	2	-	-	-	-	-	-
13	Izin Usaha Industri (IUI)	-	-	-	-	-	-	-
14	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	353	313	267	58	32	-	-
15	Izin Praktek Dokter	-	87	-	-	-	-	-
16	Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	-	-	-	-	-	-	-
17	Izin Berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	-	-	-	74	-	-	-
18	Izin Penyelenggaraan Optical	-	2	2	6	5	-	1
19	Izin Apotik	-	8	-	9	5	-	13
20	Izin Toko Obat	-	13	13	9	10	1	11
21	Izin Praktek Laboratorium	-	-	-	-	-	-	1
22	Izin Klinik/Balai Pengobatan	-	5	6	6	9	-	-
23	Izin Rumah Bersalin	-	1	-	-	-	-	-
24	Izin Praktek Terapi Wicara	-	-	-	-	-	-	-
25	Izin Praktek Fisioterapi	-	-	-	-	-	-	-

No	Jenis Izin	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	Izin Praktek Bidan	-	22	5	20	25	-	57
27	Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	-	-	-
28	Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-	-	-
29	Izin Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)	-	-	-	-	-	-	-
30	Izin Usaha Penyelenggaraan Bengkel Umum	-	-	-	-	-	-	-
31	Izin Racun Api	-	115	289	496	515	477	262
32	Izin Minuman Beralkohol	-	-	11	1	17	-	-
33	Izin Reklame	-	4	18	74	56	-	26
34	Surat Izin Praktek Dokter Umum & Spesialis	-	-	35	-	121	-	143
35	Izin Usaha Transportasi	-	-	-	-	12	-	-
36	Izin Panti Pijat	-	-	-	-	3	-	-
37	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	-	410	226	80	364	296	166
38	Izin Usaha Industri Perkebunan	-	-	1	-	-	-	-
39	Izin Pendidikan Non Formal	-	9	-	-	4	-	-
40	Izin Pengambilan Air	-	-	3	-	-	-	-
41	Izin Galian C Tanah Timbun	-	-	-	-	-	-	-
42	Izin Ketenagalistrikan Sendiri	-	-	1	-	-	-	-
43	Sertifikat Laik Operasi	-	-	3	-	-	-	-
44	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLPNF)	-	-	2	8	22	30	27
	Taman kanak-kanak	-	-	-	-	-	1	-
45	Surat Penangkapan Ikan	-	20	5	-	-	-	-
46	Surat Izin Usaha Perikanan	-	6	5	-	-	-	-
47	SIUP Cabang	13	53	-	-	-	-	-
48	Izin Restoran/Rumah Makan	-	-	-	-	-	21	-
49	Izin Karoke	-	-	-	-	-	35	-
50	Izin Salon	-	-	-	-	-	1	-
51	Izin Permainan	-	-	-	-	-	1	-
52	Legalisasi Izin Usaha Perdagangan	-	-	-	-	-	37	17
53	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	-	-	-	-	1144	890
54	Izin Pendirian Sekolah Swasta	-	-	-	-	-	4	1
55	Izin Klinik Rawat Jalan	-	-	-	-	-	-	4
56	Izin Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	13
57	Izin Perawat	-	-	-	-	-	-	2
58	Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	-	-	-	-	-	-	1
59	Izin Pengobatan Tradisional	-	-	-	-	-	-	1
60	Izin Depot Air Isi Ulang	-	-	-	-	-	-	3
61	izin Praktek Tukang Gigi	-	-	-	-	-	-	10

No	Jenis Izin	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
62	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)	-	-	-	-	-	-	5
63	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	-	-	-	-	-	12
64	Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)	-	-	-	-	-	-	6
65	Izin Pembuangan Air Limbah	-	-	-	-	-	-	4
66	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	-	-	-	-	-	-	211
JUMLAH		3862	4801	4386	4048	4100	4378	3273

3. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Jumlah pajak dan retribusi daerah yang dipungut di Kota Dumai mengalami peningkatan seiring dengan adanya perubahan peraturan perpajakan. Beberapa pajak yang dahulu dipungut oleh pemerintah pusat, saat ini menjadi pajak daerah, antara lain PBB dan pajak BPHTB. Besar kecilnya hasil pajak dan retribusi daerah akan mempengaruhinya besaran Pendapatan Asli Daerah, yang nantinya akan mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam mencukupi kebutuhan pembangunannya.

2.4.4. FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

A. Ketenagakerjaan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

1. Persentase Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010

jumlahnya mencapai 542 orang, pada tahun 2014 meningkat menjadi 678. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.153.

Tabel 2.153 Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2011-2017
Sumber : Dumai Dalam Angka, Diolah

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah lulusan S1/S2/S3	607	702	817	678	725	705	496
Jumlah Penduduk	262.976	271.523	280.027	280.109	285.967	291.908	297.638
Persentase Pekerja Lulusan S1/S2/S3	0,23%	0,26%	0,29%	0,24%	0,25%	0,24%	0,17%

2. Rasio Ketergantungan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) merupakan beban atau tanggungan dalam pembangunan. Sedangkan usia produktif (14-64 tahun) merupakan modal dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, dengan harapan produktivitas dan efektivitas yang terjadi ditunjang pula dengan sarana dan prasarana pembangunan. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Dumai pada tahun 2010 adalah 0,55, yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 55 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 0,55% ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda penduduk tua. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2014 rasio ketergantungan sebesar 0,52.

Dengan kata lain penduduk usia kerja di Kota Dumai masih dibebani tanggungjawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua. Pada rasio ketergantungan di Kota Dumai berturut-turut sebesar 0,55 , 0,55 , 0,56 , 0,52 , 0,52 , 0,52. Dari tahun 2010, rasio cenderung turun.

3. Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Berikut tabel 2.154 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai.

Tabel 2.154 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2017
Jumlah Penduduk yang bekerja	108.162	108.809	108.704	114.066	117.280	123.550
Jumlah angkatan kerja	114.636	117.663	120.520	125.545	132.113	135.684
Rasio penduduk yang bekerja	0,943	0,925	0,904	0,909	0,888	0,911

Berdasarkan tabel di atas, pada rasio penduduk yang bekerja di Kota Dumai berfluktuatif diatas 0,88. pada tahun 2011 rasio penduduk yang bekerja adalah 0,943, tahun 2012-2017 (tanpa data tahun 2016) berturut adalah 0,925 ; 0,904 ; 0,909 ; 0,888 dan 0,911. Berikut tabel 2.155 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Dumai.

Tabel 2.155 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Dumai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB	4,27	3,66	3,68	2,69	1,91	4,64	<
1.1.1.2	Laju inflasi	5,70%	3,45%	6,99%	8,53	2,63	3,98	<
1.1.1.3	PDRB per kapita	70,19 juta	70,55 juta	71,53 juta	71,87 juta	71,74 juta	73,55 juta	>
1.1.1.4	Persentase Penduduk Miskin	5,27	5,24	4,98	4,83	5,26	4,74	<
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Pendidikan							
1.2.1.1	Angka melek huruf	99,35	99,4	99,43	99,43	99,43	99,43	=
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	9,42	9,48	9,54	9,56	9,57	9,58	>
1.2.1.3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	115,05	>100	>100	107,27	107,20	107,79	>
1.2.1.4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	110,20	>100	>100	89,67	91,58	100,18	<
1.2.1.5	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK	85,37	75,37	85,68	73,45	78,36	87,97	>
1.2.1.6	APM SD	97,48	98,65	97,70	98,45	96,37	96,54	>
1.2.1.7	APM SMP	84,92	84,89	83,75	83,60	76,99	88,53	<
1.2.1.8	APM SMA	68,29	63,58	84,84	70,41	57,67	69,15	>
1.3.	Kesehatan							
1.3.1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	10,49	11,09	14,70	13,08	14,10	13,73	>
1.3.2	Angka Kematian Balita	13,4	13,9	16,9	15,87	16,64	16,88	>
1.3.3	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	172,4	84,26	64,69	114,29	145,75	109,32	<
1.3.4	Angka Usia Harapan Hidup di Kota Dumai	69,95	70,02	70,04	70,05	70,25	70,31	=
1.3.5	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Dumai	0	0	0	0	0,01	0,01	=
2.	PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Pendidikan dasar							
2.1.1.1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD	96	106	101	107	106	108	<
2.1.1.1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP	50	51	51	54	53	55	<
2.1.1.1	Rasio Guru/Murid SD	16,15	16,29	16,14	16,49	16,84	17,47	>
2.1.1.1	Rasio Guru/Murid SMP	12,91	12,45	13,54	9,43	12,74	14,54	
2.1.1.1	Sekolah Pendidikan	89,32	91,9	94,10	94,22	95,40	95,30	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	SD Kondisi Bangunan Baik							
2.1.1.1	Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik	83,51	86,6	89,23	89,35	90,05	89,80	<
2.1.1.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,05	0,17	0,05	0,26	0,00	0,003	>
2.1.1.1	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,04	0,04	0,00	0,40	0,00	0,049	=
2.1.1.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,96	100,00	100,00	99,92	100,00	100,00	<
2.1.1.1	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,86	99,21	99,85	99,94	100,00	99,96	>
2.1.1.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	101,63	99,98	97,33	88,24	84,76	83,80	<
2.1.1.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	101,80	100,89	106,87	79,81	108,20	110,58	<
2.1.1.1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	56,7	60,17	79,45	79,40	85,58	86,22	>
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,012	0,011	0,011	0,011	0,010	0,010	<
2.1.2.2	Rasio dokter per satuan penduduk	0,408	0,422	0,456	0,436	0,451	0,480	>
2.1.2.3	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,3120	0,422	0,456	0,436	0,451	0,480	>
2.1.2.4	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	3,5	14,37	85,95	90,2	90,57	86,23	<
2.1.2.5	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90,65	93,96	96,13	95,58	91,83	93,2	<
2.1.2.6	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	87,5	78,79	100	100	100	96,67	<
2.1.2.7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	72,90	64,84	53,88	72,11	56,02	23,97	>
2.1.2.8	Cakupan kunjungan bayi	90,65	93,96	86,13	95,58	91,83	85,3	<
2.1.2.9	Rasio puskesmas	180	180	128,57	128,57	142,86	142,86	=
2.1.2.1	Rasio puskesmas pembantu	40,62	40,62	39,39	39,39	39,39	39,39	=
2.1.3	Pekerjaan Umum							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
2.1.3.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	51,85%	52,97%	55,60%	52,97%	55,57%	53,33%	>
2.1.3.2	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	1,91	1,95	1,87	1,83	1,86	1,84	=
2.1.3.3	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	12 TPS	12 TPS	12 TPS	12 TPS	12 TPS	14 TPS	>
2.1.3.4	Panjang jalan dilalui roda 4	3,49	3,57	3,17	3,41	2,89	2,19	<
2.1.4	Perumahan							
2.1.4.1	Rumah tangga pengguna air bersih		1396	1396	1384	1386	1387	>
2.1.4.2	Jumlah pelanggan PDAM (Non Niaga)	1386	1386	1384	1386	1387	1389	=
2.1.4.3	Persentase Rumah tangga pengguna listrik	67,15	72,40	80,08	85,35	89,75	93,77	>
2.1.5	Penataan Ruang							
2.1.5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	4,103%	=
2.1.6	Perhubungan							
2.1.6.1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal							
	BERANGKAT	234639	174.680	116.080	120.225	106.390	105.890	<
	DATANG	230503	176.902	116.025	120.401	108.116	108.008	<
2.1.6.2	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal Pelabuhan							
	BERANGKAT	270.503	269.925	233.365	123.971	130.789	129.135	<
	DATANG	273.990	253.645	211.070	103.876	100.342	102.586	>
2.1.6.3	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal Bandara							
	BERANGKAT	22.163	22.116	10.625	NA	12.465	11.856	<
	DATANG	21.320	20.852	10.876	NA	11.782	10.354	<
	TRANSIT	8.952	8.580	1.385	NA	NA	NA	>
2.1.6.4	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	9.898	4.898	4.898	4.762	5.103	4.078	>
2.1.6.5	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	9.797	9.797	9.797	9.523	10.206	9.920	>
2.1.6.6	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	30 Menit	30 Menit	30 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
2.1.6.7	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	29.000	29.000	29.000	40.000	40.000	40.000	=
2.1.7	Lingkungan Hidup							
2.1.7.1	Persentase penanganan sampah	68	68	69	69	69	70	>
2.1.7.2	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	12 (TPS)	14 (TPS)	=
2.1.8	Kependudukan dan catatan Sipil							
2.1.8.1	Kepemilikan KTP	56,41%	61,52%	59,66%	47,95%	94,27%	94,27%	>
2.1.8.2	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.1.8.3	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.1.9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1.9.1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2.986	2.986	2.986	2.986	3.046	3.974	>
2.1.9.2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	1.474	2.359	2.359	1.378	3.857	10.442	>
2.1.10	Keluarga Berencana							
2.1.10	Cakupan peserta KB aktif	3.240	8.863	35.597	45.344	55.628	29.287	<
2.1.10	Jumlah Keluarga	50.586	55.051	55.051	55.051	55.051	63.527	>
2.1.10	Keluarga Pra Sejahtera	4.642	4.118	4.118	4.118	4.118	4.118	=
2.1.10	Keluarga Sejahtera I	11.509	11.138	11.138	11.138	11.138	11.138	=
2.1.11	Ketenagakerjaan							
2.1.11	Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Dumai	106.381	111.639	117.157	122.951	129.027	135.405	>
2.1.11	Pencari Kerja yang ditempatkan di Kota Dumai	401	NA	472	1098	1308	315	<
2.1.11	Jumlah Pengangguran Terbuka	3,674	4,603	4,861	4,552	5,218	5,167	<
2.1.11	Keselamatan dan Perlindungan	60	97	86	195	151	165	<
2.1.11	Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha	-	-	-	30	19	39	>
2.1.12	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
2.1.12	Persentase Koperasi Aktif	71	55	83	83	54	81	=
2.1.12	Usaha Mikro dan Kecil	8.949	10.700	11.232	11.797	11.797	12.497	<
2.1.13	Penanaman Modal							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
2.1.13	Jumlah Perusahaan PMDN	42	47	53	57	60	63	>
2.1.13	Jumlah Perusahaan PMA	52	56	62	66	69	76	>
2.1.13	Nilai Investasi PMDN (Rp)	9,298 T	11.678,35	208.541,82	1.151,99	7.883,71	2.318,98	>
2.1.13	Nilai Investasi PMA (\$)	1,783 T	9.300.899,17	5.960,87	323,45	977,36	236,92	>
2.1.13	Persentase Nilai Realisasi PMDN	9,99%	1,95%	24,10%	0,11%	0,74%	102,21%	>
2.1.13	Persentase Nilai Realisasi PMA	0,02%	21,46%	9,60%	0,45%	1,27%		
2.1.14	Kebudayaan							
2.1.14	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	4	1	2	2	=
2.1.15	Kepemudaan dan Olahraga							
2.1.15	Jumlah organisasi pemuda	52	52	52	52	52	52	=
2.1.15	Jumlah organisasi olahraga	25	25	25	25	29	29	=
2.1.15	Jumlah kegiatan kepemudaan	1	3	2	2	3	2	<
2.1.15	Jumlah kegiatan olahraga	2	5	8	4	4	4	=
2.1.16	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
2.1.16	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	51	123	60	25	23	29	>
2.1.16	Kegiatan pembinaan politik daerah	1 Keg.	-	-	1 Keg.	-	1 Keg.	=
2.1.16	Rasio jumlah pamong praja	5,89	5,17	3,65	3,25	3,07	3,21	>
2.1.16	Rasio linmas	62,45	60,23	58,34	56,78	56,87	57,08	>
2.1.16	Persentase peningkatan pos siskamling	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07	=
2.1.16	Persentase Cakupan patroli petugas Satpol PP	65%	49%	92%	90%	95%	96%	>
2.1.16	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	170	132	231	236	235	238	<
2.1.16	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1581	1584	1584	1590	1593	1599	>
2.1.17	Ketahanan Pangan							
2.1.17	Persentase Ketersediaan Pangan Utama*	42,44 %	46,15 %	36,84 %	26,50 %	41,36 %	35,54 %	<
2.1.18	Statistik							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
2.1.18	Buku "Kota Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.1.18	Buku "PDRB Kota"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.1.19	Perpustakaan							
2.1.19	Jumlah perpustakaan	7	9	12	16	15	15	=
	Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	0,39	0,42	0,48	0,46	0,46	0,46	=
	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	229,46	356,50	468,68	560,64	838,64	853,10	>
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	14148	15808	25847	57206	57206	57206	>
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Pertanian							
2.2.1.1	Rasio produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (Ton/Ha)*	2,86	2,74	2,74	2,62	2,77	3,25	>
2.2.1.2	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	6,50	6,58	6,08	6,08	6,10	6,04	>
2.2.2	Kelautan dan Perikanan							
2.2.2.1	Produksi Perikanan Laut (Kg)	1.100.500	930.758	890.300	676.100	236.300	525.000	>
2.2.2.2	Produksi Perikanan Budidaya (Kg)	79.272	164.350	170.405	156.238	190.221	218.400	>
2.2.3	Pariwisata							
2.2.4.1	Kunjungan Wisata (orang)	72.183	71.133	67.060	90.723	71.274	122.627	>
2.2.4	Perdagangan							
2.2.6.1	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	20,00	20,37	18,91	19,42	18,45	17,89	>
2.2.6.2	Ekspor (\$)	16,485,319,670	16,485,319,670	14,195,672,775	17,746,297,425	10.889.408.942	16,485,319,670	>
2.2.6.3	Impor (\$)	1,175,177,629	1,175,177,629	1,064,462,336	778,071,820	597.294.415	1,175,177,629	<
2.2.6.4	Ekspor Bersih Perdagangan (\$)	15.310.142.041	15.310.142.041	13.131.210.439	16.968.225.605	10.292.114.527	15.310.142.041	>
2.2.5	Perindustrian							
2.2.7.1	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	51,44	49,30	51,38	52,90	53,17	53,88	>
2.2.7.2	Persentase Pertumbuhan Industri terhadap PDRB	5,90	2,70	3,78	6,19	2,69	6,28	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
3.	DAYA SAING DAERAH							
3.1	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
3.2.1	Perhubungan							
3.2.1.1	Rasio Panjang Jalan Per Jmlh Kendaraan	NA	NA	1 : 6,4	1 : 33,9	1 : 43,12	1 : 51,7	<
3.2	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.3.1	Jumlah Penginapan/ Hotel	21	21	23	23	28	27	<
3.3.2	Angka kriminalitas	446	454	642	861	97*	474	<
3.3.3	Persentase Lulusan S1/S2/S3	0,23%	0,26%	0,29%	0,24%	0,25%	0,24%	<
3.3.4	Rasio penduduk yang bekerja	0,943	0,925	0,904	0,909	0,888	0,911	=

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun 2018 dan Realisasi RPJMD Tahun ke-2

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai tahun 2018 dilaksanakan dengan menelaah hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang di kaitkan dengan target pencapaian yang telah dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.2.1. Evaluasi Kinerja Tahun 2018

Evaluasi kinerja tahun 2017 merupakan tahapan dalam penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2019 dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun 2018. Tujuan evaluasi capaian kinerja RKPD tahun 2018 adalah untuk menilai/mengidentifikasi pencapaian kinerja serta pencapaian indikator sasaran perubahan RPJMD tahun 2016-2021 tahun ke 2 (dua) terhadap capaian perencanaan pada akhir dokumen perubahan RPJMD tahun

2016-2021. Dengan total 331 program berikut penjelasan terkait hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran pada tahun 2018 akan dijabarkan dalam format lampiran I tabel evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2018;
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran tahun 2017 akan dijabarkan dalam format lampiran I tabel evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2018;
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran tahun 2017 akan dijabarkan dalam format lampiran I tabel evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2018.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
 - a. Dalam pelaksanaan Capaian Target Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 Melalui Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 terjadi perubahan beberapa indikator dan target sasaran tahunan Program dan juga ikut merubah target pencapaian sasaran akhir RPJMD pada pencapaian Target Evaluasi RKPD, sehingga perlu dipandang untuk merevisi guna penyesuaian kembali Indikator dan Target sasaran sesuai dengan pelaksanaan tahun perencanaan kedepan dan target akhir yang dicapai pada RPJMD Tahun 2016-2021;
 - b. Untuk capaian tahun perencanaan 2018, Sasaran fokus yang sifatnya prioritas pembangunan (Program) yang belum tercapai namun memerlukan kerja keras yang perlu disertai penajaman, pengintensifan, dan percepatan pelaksanaan pada tahun perencanaan kedepannya.

1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
 - a. Jika capaian target sesuai dengan capaian maka proses dalam Perencanaan Smart serta memudahkan kepala daerah dalam menentukan arah kebijakan terkait visi dan misi yang akan dicapai di akhir masa jabatan kepala daerah.
 - b. Jika Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja OPD yang akan dicapai sehingga pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA OPD tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan (Inkonsistensi).
2. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - a. Bagi sasaran yang sulit dicapai dalam rentang waktu yang tersisa, tetap perlu diupayakan melalui penajaman, terobosan dan langkah strategis, review efektifitas, identifikasi kelemahan, dan kemungkinan penambahan alokasi anggaran, serta meningkatkan koordinasi ditiap OPD kemudian beberapa indikator program perlu menyeleksi dan menyempurnakan indikator kinerja sebagai pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan kedepannya;
 - b. Meningkatkan komitmen OPD untuk melaksanakan sesuai dengan dokumen perubahan RPJMD 2016-2021 baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran untuk menjaga konsistensi tersebut.

Untuk tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2017, target dan realisasi tahun berjalan (Tahun 2018) dan

realisasi terhadap Perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2021 akan disajikan pada **lampiran 1 dokumen RKPD Tahun 2019**.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pemerintah Kota Dumai terus berusaha melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, seiring perjalanan waktu dan perkembangan kota, tentu saja kota Dumai selalu dihadapkan oleh problematika pembangunan yang juga semakin kompleks baik yang dipicu oleh isu pembangunan yang berasal dari internal kota Dumai maupun isu yang berasal dari eksternal kota Dumai bahkan global. Isu-isu strategis tersebut terwujud dalam permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus disikapi dengan bijak serta menjadi salah satu rujukan dalam menyusun rencana kerja pembangunan kota Dumai kedepannya agar menjadi lebih baik lagi.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Dumai meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, sumberdaya manusia, ekonomi daerah, infrastruktur wilayah, serta pemerintahan. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah nasional Tahun 2016-2019, Kota Dumai diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional dengan fokus sebagai pusat administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai *outlet* pemasaran wilayah Riau bagian timur serta berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti perkebunan, industri, perdagangan, pertambangan dan perikanan.

Sebagai kawasan perbatasan, kota Dumai diarahkan pada pengembangan sebagai pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) wilayah Sumatera, dimana pengembangannya diarahkan pada:

- 1) Pengembangan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional.
- 2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah-rencana detail tata ruang kawasan perbatasan.

Ditetapkannya kota Dumai sebagai pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan strategis nasional tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan peluang pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu untuk memperkecil hilangnya peluang pembangunan dan untuk memaksimalkan agar hasil penyusunan rencana kerja pemerintah daerah ini mampu secara komprehensif mengakomodir kebutuhan pembangunan ditahun 2019, maka beberapa isu pembangunan yang telah diidentifikasi berdasarkan problematika yang telah diuraikan diatas maka disimpulkan sebagai berikut:

a. Aspek Geografi dan Demografi

- 1) Kota Dumai Masih Dihadapkan dengan kondisi wilayah rawan bencana terutama asap yang menjadi agenda rutin walaupun sanksi tegas telah ditetapkan namun kondisi ini masih saja terjadi.
- 2) Genangan Air baik yang bersifat curah hujan maupun kondisi pasang laut yang masih terdapat di beberapa titik di kota Dumai.
- 3) Ketimpangan kepadatan dan sebaran penduduk yang tinggi di tiga kecamatan Kecamatan yaitu Dumai Kota, Dumai Timur dan Dumai Barat, disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan luas wilayahnya didominasi oleh guna lahan terbangun sehingga terjadi pemusatan pemukiman dan kegiatan perkotaan lainnya. Kegiatan perdagangan, jasa dan pelabuhan laut Dumai (pelabuhan ekspor dan penumpang yang cukup ramai) yang terfokus pada tiga

wilayah memberikan andil yang cukup besar terhadap konsentrasi penduduk Kota Dumai.

- 4) Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor), pada umumnya kurang baik.

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Infrastruktur Kota memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan wilayah perkotaan karena memiliki fungsi strategis dalam mempengaruhi fungsi dan pelayanan kota kepada masyarakat baik dari segi fisik-lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, ataupun aspek lainnya. Permasalahan infrastruktur di Kota Dumai sehubungan dengan kualitas dan jumlah pelayanan infrastruktur yang tersedia dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur air minum yang merata dan berkeadilan;
- 2) Belum optimalnya jumlah dan kualitas infrastruktur jalan daerah (Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah sebagai konsekwensi angkutan darat tonase tinggi yang melewati ruas-ruas jalan dikota Dumai dan juga sebagai akibat banjir rob yang menggerus jalan);
- 3) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan dasar pemukiman penduduk (sanitasi, persampahan dan drainase);
- 4) Kondisi jaringan pedestrian yang kurang memadai dan tempat parkir yang tidak tersedia secara layak;
- 5) Masih terdapatnya Kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni dan rasio bangunan ber-IMB masih belum maksimal;

- 6) Pelayanan angkutan umum dalam kota yang masih sangat kurang;
- 7) Belum Efektifnya Terminal Penumpang yang merupakan Simpul dari Transportasi Daerah;
- 8) Penataan Angkutan Sewa yang masih menggunakan sistem antar jemput sehingga secara perlahan mengurangi penggunaan moda angkutan umum masal (Bus);
- 9) Sistem transportasi wilayah yang kurang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum optimal;
- 10) Pelayanan infrastruktur pendukung bandar udara belum optimal;
- 11) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pengusaha sektor transportasi di Kota Dumai akan arti pentingnya kesehatan udara;
- 12) Besarnya volume pergerakan kendaraan tonase berat dari/ke arah Kota Dumai dan pusat kota setiap pagi hari dan arah sebaliknya di sore hari menyebabkan polusi dan memicu kerusakan jalan;
- 13) Kawasan Pusat kota yang belum tertata secara optimal dan belum memenuhi kaidah-kaidah ketata ruangan yang baik untuk menciptakan kawasan *better space better living*;
- 14) Ruang terbuka hijau masih sangat kurang terutama wilayah di pinggiran;
- 15) Terbatasnya luasan dan sebaran ruang publik di kota Dumai sehingga memicu ketidakadilan ruang untuk masyarakat khususnya anak-anak;
- 16) Sampah masih belum dapat tertangani secara optimal dan timbulan cenderung bertambah. Pengelolaan akhir sampah belum optimal dan belum mengembangkan sistem paritispatif untuk prinsip 3R;

- 17) Konversi lahan produktif ke lahan terbangun mengakibatkan menurunnya fungsi imbuan air tanah di wilayah tangkapan air utama;
- 18) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penataan ruang, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
- 19) Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air limbah, dan persampahan.
- 20) Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Dumai melalui Peraturan Daerah Kota Dumai tentang RTRW Kota Dumai Nomor 27 Tahun 2005, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif dikarenakan penggunaan lahan oleh masyarakat Kota Dumai untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukkan awalnya.

c. Aspek Pelayanan Umum

Tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih merupakan isu yang berkembang secara internasional pada dasawarsa terakhir ini. Demikian pula di Indonesia dengan proses demokratisasi yang berjalan pesat, tuntutan untuk mewujudkan good governance menjadi komoditas penilaian masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintahan .

Untuk menuju pemerintahan Kota Dumai yang memenuhi sistim nilai yang berkembang tersebut sudah dilakukan berbagai upaya yang relevan, misalnya pembentukan LPSE, penyusunan berbagai dokumen akuntabilitas (LPPD, ILPPD, LAKIP, dsb), serta peningkatan SDM dan penyelenggaraan berbagai forum demokratisasi. Namun hal tersebut perlu ditingkatkan lagi dalam artian belum mencukupi untuk mencapai tataran pemerintahan yang diharapkan masyarakat terutama yang secara paripurna berlandaskan ciri pemerintahan yang baik. Adapun

beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam peningkatan kinerja pemerintahan di Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas perencanaan belum memadai disemua tingkatan terutama yang terkait dengan identifikasi dan prioritas masalah, akar penyebab masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Identifikasi masalah belum dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik dan indikator yang tepat.
2. Ego sektoral yang masih muncul pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menghambat sinergitas dan efektivitas pembangunan daerah.
3. Belum terwujudnya manajemen dalam penerapan aplikasi yang berbasis kinerja.
4. Belum optimalnya pengembangan *smart city* (kota cerdas), dimana target pemerintah untuk fokus pembangunan tahun 2018 yang lalu menargetkan tercapainya 100 kota cerdas/smart city di tahun 2020. Untuk riau berdasarkan kab/kota baru kab. Pelalawan dan kab. Siak.
5. Struktur organisasi pada Pemerintah Daerah yang belum proporsional, sistem manajemen pekerjaan, tanggungjawab dan beban kerja.
6. Belum terwujudnya E-Government yang transparansi dalam segala lini terkait informasi dan data ke publik serta Pelaksanaan pelayanan publik yang belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat hal ini ditandai dengan proporsi IKM dari 71,04% tahun 2015 dan 72 % pada tahun 2016.

d. Aspek daya Saing Daerah

1. Bidang Tenaga Kerja

Salah satu pengaruh perkembangan sebuah kota adalah peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Menurut perkiraan BPS, Indonesia akan mencapai bonus demografi pada tahun 2030. Bonus

Demografi adalah kondisi dimana penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari penduduk usia non produktif. Kondisi ini akan menjadi masalah dan berujung pada meningkatkan pengangguran terbuka jika tidak diantisipasi dengan penyediaan lapangan kerja oleh pemerintah ataupun swasta.

Berdasarkan data yang dipublikasikan BPS, kota Dumai pada tahun 2016 memiliki angkatan kerja usia produktif yaitu 142.099 jiwa dan tingkat pengangguran 5.925 jiwa dengan tingkat pengangguran 4,17%. Hal ini mengindikasikan bahwa kota Dumai sedang menuju proses bonus demografi dan jika tidak diantisipasi dengan arah dan kebijakan pembangunan yang tepat, maka jumlah pengangguran kota Dumai kemungkinan akan sulit untuk dikurangi.

Hal lain yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan adalah kondisi pasar kerja yang dibutuhkan sudah mengarah pada jenjang pendidikan dan kualifikasi kerja tertentu. Hal ini mengakibatkan pasar kerja yang terserap hanyalah dari angkatan kerja yang sudah memenuhi kriteria dari segi jenjang pendidikan dan kualifikasi kerja tertentu yaitu angkatan kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan dari pasar kerja yang tersedia tersebut.

Bertambahnya lapangan pekerjaan baru yang ada di Kota Dumai, nyatanya tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap terserapnya angkatan kerja lokal dari peluang ketersediaan lapangan kerja baru tersebut. Kemampuan dan keterampilan kerja yang dibutuhkan dari peluang lapangan kerja tersebut nyatanya belum mampu dipenuhi dari angkatan kerja lokal yang tersedia di Kota Dumai. Hal ini menyebabkan peluang pengisian lapangan kerja baru tersebut dipenuhi oleh angkatan kerja yang berasal dari luar Kota Dumai yang memenuhi kualifikasi kerja serta memiliki kemampuan dan keterampilan kerja yang memenuhi kriteria pasar kerja tersebut, sehingga peluang

pemenuhan pasar kerja yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh angkatan kerja yang tersedia di Kota Dumai.

Namun, perlu dicatat bahwa untuk mendukung perkembangan Kota Dumai yang cukup pesat sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan diperlukan tenaga kerja yang memiliki kualitas yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan daerah lain di sekitarnya. Penduduk kota ini diharapkan dapat menjadi tenaga kerja berkualitas. Kualitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pelatihan ketrampilan dan penguasaan teknologi. Melalui penguasaan teknologi serta ketrampilan yang memadai diharapkan penduduk kota ini dapat mengambil peluang dan manfaat dari Kota Dumai yang akan semakin berkembang pesat terkait dengan fungsi kota sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Selain itu dalam *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, Kota Dumai diarahkan sebagai pelabuhan barang bagi daratan daerah belakangnya (*hinterland*) yang terhubung dengan jalur utama Koridor Sumatera yang menghubungkan berbagai Pusat Ekonomi Nasional bahkan dapat terhubung hingga ke Pulau Jawa. Kota Dumai memiliki fungsi dan peran sebagai pintu gerbang dari laut (pelabuhan utama) bagi salah satu kluster industri dan simpul perkebunan karet serta perkebunan sawit berikut *hinterland* lainnya, termasuk Pekanbaru. Tantangan yang datang dari pesatnya perkembangan lapangan kerja di Kota Dumai adalah datangnya pekerja migran yang secara langsung menjadi saingan tenaga kerja asal Dumai untuk berkompetisi dalam merebut lapangan pekerjaan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pembangunan Bidang Tenaga Kerja di Kota Dumai adalah Kemampuan dan Keterampilan Angkatan Kerja belum kompetitif untuk memenuhi kebutuhan Pasar Kerja. Sehingga untuk mengantisipasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Dumai harus mampu mempersiapkan angkatan kerja lokal yang tersedia di Kota Dumai agar memiliki

kemampuan dan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada maupun yang akan tersedia.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu/permasalahan pembangunan bidang tenaga kerja yang dihadapi kota Dumai :

1. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia dengan meningkatkan fasilitasi rekrutmen tenaga kerja melalui pelatihan padat karya.
2. Belum meratanya komposisi tenaga kerja lokal yang bekerja diperusahaan.
3. Kurangnya rekrutmen tenaga kerja melalui bursa-bursa pekerjaan.
4. Perlunya pengawasan terhadap perusahaan dalam hal ini terkait dengan penyesuaian UMK tenaga kerja.

Belum maksimalnya pemanfaatan potensi pariwisata kota dumai sebagai salah satu penggerak kegiatan ekonomi kerakyatan.

2. Bidang Ekonomi dan Iklim Berinvestasi

Pembangunan dibidang ekonomi kota Dumai secara umum dapat dilihat dari pencapaian kontribusi setiap sektor usaha pada PDRB, pergerakan inflasi, tingkat kemiskinan dan investasi modal dalam bentuk penyediaan lapangan kerja. Permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi Kota Dumai di Bidang Ekonomi :

1. Masih Rendahnya kontribusi Sektor pertanian (5 sub sektor) dalam perekonomian sehingga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang bekerja di bidang tersebut.
2. Inflasi kota Dumai masih bersifat "*fully driven by issues*" sehingga harga masih mudah berfluktuasi akibatnya sangat mudah terjadi inflasi meskipun masih dalam tingkat yang wajar.
3. Perlunya optimalisasi strategi pengurangan tingkat kemiskinan di kota Dumai.

4. Adanya kecenderungan berkurangnya investasi baik dalam maupun luar negeri sehingga berpengaruh terhadap peluang kerja yang ada di Kota Dumai.
5. Memudahkan proses perizinan dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan.
6. Perlunya optimalisasi peran koperasi dalam ekonomi kerakyatan dalam rangka mempermudah akses permodalan UMKM dan penyerapan tenaga kerja local.

3. Bidang Sosial Budaya

Sumberdaya manusia (SDM) mempunyai peran penting dalam setiap kegiatan pembangunan. Khususnya saat ini, ketika setiap wilayah dihadapkan pada persaingan global, SDM memiliki peran kunci dalam pengembangan sebuah wilayah. Dalam era persaingan global diperlukan SDM yang berkualitas, memiliki ketrampilan serta berdaya saing tinggi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu potensi untuk pengembangan wilayah kota ini. Angka melek huruf pada tahun 2013-2016 konstan pada angka 99,43%, bahkan selama empat tahun terakhir angka melek huruf mencapai 100%. Hal ini berarti seluruh penduduk Kota Dumai sudah memiliki kemampuan membaca dan menulis. Jika seluruh penduduk sudah melek huruf akan lebih mudah untuk menerima pengetahuan, inovasi maupun teknologi baru yang berkembang cepat di era globalisasi ini. Pengetahuan merupakan kunci keberhasilan atau kemajuan manusia. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan baru akan memudahkan dan mempercepat perkembangan bagi sebuah wilayah, oleh karena penguasaan pengetahuan dan ketrampilan baru akan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk mengolah potensi dan sumber daya lokal yang tersedia. Sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan dibutuhkan pendidikan, ketrampilan

dan kreativitas penduduk yang cukup memadai untuk mampu menangkap peluang dan kesempatan yang tersedia.

Dari aspek Pendidikan, Dilihat dari angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah dan rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah di Kota Dumai seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa pelayanan pembangunan daerah Kota Dumai di bidang pendidikan dapat di katakan cukup baik, namun terdapat beberapa isu yang menjadi penting yakni

1. Rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah dilihat per kecamatan, disitu terlihat bahwa rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah kecamatan yang berada di wilayah pusat kota, jauh lebih baik dari rasio kecamatan yang berada di wilayah terluar Kota Dumai.

Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah fasilitas dan akses pelayanan pendidikan yang ada di Kota Dumai belum tersebar secara merata dan banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan saja. Masih kurangnya jumlah fasilitas dan pelayanan pendidikan di wilayah kecamatan terluar Kota Dumai terlihat dari perbedaan nilai angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah dan rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah di kecamatan yang berada di wilayah terluar Kota Dumai dengan kecamatan yang berada di wilayah perkotaan yang mana kecamatan yang berada di wilayah perkotaan memiliki nilai yang jauh lebih baik dengan perbedaan yang cukup signifikan daripada kecamatan yang berada di luar wilayah pusat Kota Dumai.

1. Belum tersedinya Gedung kesenian, yang mana selama ini untuk Gedung Lam dumai dan bukit gelanggang menjadi tempat berkesenian.

2. Sanggar seni dan budaya yang dibina pada tahun 2016 realisasinya adalah sebanyak 80 sanggar yang dibina. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah sanggar yang dapat dibina oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebanyak 40 sanggar. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan oleh terdapat beberapa sanggar yang belum memiliki izin operasional dan terdapat beberapa sanggar yang sedang dalam proses pengurusan izin sehingga hanya sanggar yang sudah memiliki izin saja yang dapat dibina.

Fokus kesehatan, berikut beberapa indikator menjadi dasar pelayanan dalam Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai berikut :

1. Pada tahun 2017 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 90 kasus dari 7.738 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 11,63 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016 dimana angka kematian bayi sebesar 13,73 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan.
2. Pada tahun 2017 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 104 kasus. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2017 di Kota Dumai sebesar 13,44 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016 dimana angka kematian bayi sebesar 16,88 per 1000 kelahiran hidup, terlihat adanya peningkatan angka kematian balita.
3. Pada tahun 2017 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 11 kasus dari 7.738 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2017 di Kota Dumai sebesar 142,16 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016, di mana angka

kematian ibu sebesar 109,32 per 100.000 kelahiran hidup, maka terlihat ada peningkatan angka kematian ibu pada tahun 2016.

4. Pada tahun 2017 dari total 297 penderita TB Paru BTA + yang ditemukan dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, sebanyak 258 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + adalah sebesar 86,87%. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 sebesar 88,38%, maka terlihat ada penurunan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +.
5. Pada tahun 2017 ditemukan 3 kasus balita dengan gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas Jaya. Dengan demikian persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai pada tahun 2017 adalah 0,01%.
6. Jumlah dan penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan juga menunjukkan nilai yang lebih baik untuk kecamatan yang berada di wilayah perkotaan dibanding kecamatan yang berada di wilayah terluar Kota Dumai.

Fokus pariwisata, sebagai salah satu pintu masuk dari luar negeri, kota Dumai sangat rentan untuk dipengaruhi oleh dari segala aspek kehidupan. Pengaruh tersebut bisa saja mengancam nilai, sikap, dan mental pemuda khususnya dan masyarakat Kota Dumai umumnya yang sangat erat dengan budaya daerah, sehingga jati diri masyarakat yang berbudaya daerah secara cepat akan hilang. Keadaan ini juga didukung oleh kemajuan teknologi dan arus informasi yang sangat mudah diakses oleh siapapun dan kapan pun. Upaya yang perlu dilakukan adalah melalui pemberdayaan kepemudaan, pelestarian dan pengembangan budaya lokal, nilai-nilai tradisional, sejarah, kepurbakalaan termasuk memelihara bahasa, aksara dan sastra daerah dan melestarikan seni serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mengenalkan budaya daerah secara global dan menjadi .

Wisatawan Domestik dan Mancanegara, Pembangunan pariwisata dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang datang. Jumlah target wisatawan mancanegara pada tahun 2017 sebanyak 52.020 wisatawan, namun realisasi pada tahun 2017 terjadi penurunan kunjungan wisatawan menjadi 45.340 wisatawan. dengan rincian kunjungan domestik sebanyak 32.825 orang, kunjungan mancanegara sebanyak 12.515 orang. Penurunan perkembangan sektor pariwisata dalam jangka panjang dapat menghilangkan peluang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dan pendapatan penduduk Kota Dumai. Hal ini disebabkan sektor pariwisata mempunyai efek pengganda terhadap pengembangan sektor-sektor ekonomi lain melalui pembelanjaan yang akan dilakukan oleh wisatawan. Selain itu berkembangnya sektor pariwisata juga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan asli daerah.

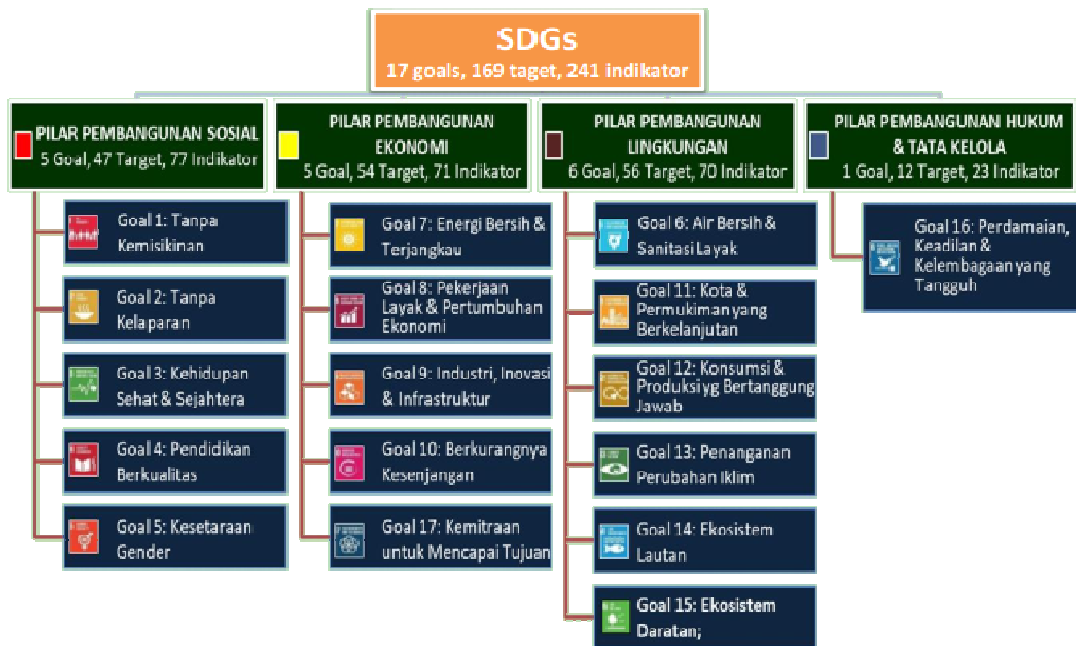
Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu/permasalahan pembangunan Sosial budaya yang dihadapi kota Dumai :

1. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat
2. Perlunya meningkatkan kualitas/kompetensi tenaga kesehatan
3. Belum meratanya rasio ketersediaan sekolah diluar dilihat per kecamatan.
4. Belum tersedianya Gedung kesenian dan kurangnya pembinaan terhadap grup kesenian.
5. Perlunya pengawasan terhadap kosmetik, obat dan makan/minuman yang beredar di masyarakat.
6. Belum maksimalnya pemanfaatan potensi pariwisata kota dumai sebagai salah satu penggerak kegiatan ekonomi kerakyatan.

e. Isu yang berkaitan dengan pelaksanaan *Sustainable Development Goals (SDG's) Tahun 2019*

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 Isu strategis dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat ini antara lain meliputi bagaimana melibatkan (*Involving*) mereka dalam berbagai forum perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan pembangunan. Komitmen Pemerintah Kota Dumai terhadap isu *good governance* dalam agenda pencapaian SDG's sehingga Rencana Aksi Daerah (RAD) menjadi hal yang mutlak untuk diwujudkan yakni empat bidang pengembangan utama yakni bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum dapat tercapai. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.61 Fokus Sustainable Development Goals (SDGs).

Gambar 2.61 Fokus *Sustainable Development Goals (SDGs)*



Untuk itu pemerintah kota Dumai berdasarkan Rancangan RAD SDGs telah menetapkan empat bidang pengembangan utama yakni bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum yang dibagi kedalam 17 tujuan sebagai berikut :

1. Pilar Pembangunan Sosial

Untuk pencapaian target pilar pembangunan Sosial terdiri dari 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun; 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan; 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia; 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia serta 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan, untuk penjabarannya dapat dilihat pada table 2.156 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun , tabel 2.157 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan, tabel 2.158 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia, tabel 2.159 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia, tabel 2.160 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan,

Tabel 2.156 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2017	2018	2019
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	4,74	4,57	<4,5	<4,5
1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengganggu, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan	1.3.1. Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	51.87%	54.72%	55.40%	66.00%

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2017	2018	2019
rentan.	1.3.1 (a) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	25%	27%	15%	15%
	1.3.1(c) Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	50%	52%	40%	40%
	1.3.1(d) Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	15%	15%	15%	15%
	1.3.1 (e) Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan	112 orang	16 orang	58 orang	80 orang
	1.3.1 (f) Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	1200 orang	1210 orang	1000 orang	1500 orang
		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	1.3.1 Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga transmigrasi	-	-	50 orang	50 orang
1.4 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain, seperti properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan, termasuk keuangan mikro.	1.41 Persentase penduduk berakses air minum	20,67 %	33,88%	34,80%	35,00%
	1.4.1(a). Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	87.10	91.30	95	95
	1.4.1(b). Persentase anak berusia 12-23 bulan yang	94.20%	97.40%	95.00%	95.00%

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2017	2018	2019
	menerima imunisasi dasar lengkap.				
	1.4.1 (d) Fasilitas lahan untuk pemakaman umum	5 Ha	5.5Ha	5.5Ha	6 Ha
	1.4.1 (e) Panjang Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	2,00%	3,42%	3,44%	3,48%
	1.4.1 (f) Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	2,04%	5,92%	6%	6%
	1.4.1 (g) Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	2,00%	2,79%	2,80%	2,83%
	1.4.1 (h) Luas wilayah dengan sarana penerangan jalan umum	3,628 Ha	3,638 Ha	3,648 Ha	3,658 Ha
	1.4.1 (i)Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100%	100%	100%	100%
	1.4.1 (j)Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B	85,26%	88,76%	92,26%	95,76%
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial dan guncangan lingkungan serta bencana	1.5.1 (a) Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	90%	92%	90%	90%
	1.5.1 (c)Persentase PMKS yang tertangani	25%	25%	25%	25%

Tabel 2.157 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2017	2018	2019
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	0.41	0.30	6	5
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	0.00	0.30	25	20
	2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta			25	20
	2.2.2* Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	0.00	0.30	5	5
	2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	74.00	41.70	80	85
2.3 Pada tahun 2020, Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	2.3.1 Angka Kecukupan Protein	50 (gram/kapita/tahun)	50 (gram/kapita/tahun)	50 (gram/kapita/tahun)	52 (gram/kapita/tahun)
2.4 Pada tahun 2020, Meningkatnya Produksi Pertanian	2.4.1 Produksi komoditi pertanian	20.154 TON	20.375 TON	20.596 TON	20.818 TON
	2.4.2 Produksi komoditi perkebunan	82.080 TON	83.756 TON	84.256 TON	84.756 TON
	2.4.3 Populasi Ternak	5.253 Satuan Ternak	5.673 Satuan Ternak	5.883 Satuan Ternak	6.093 Satuan Ternak
2.5 Pada tahun 2020, Berkurangnya angka penyakit hewan menular dan zoonosis serta menurunnya kasus cemaran Pangan Asal Hewan (PAH)	2.5.1. Jumlah Kasus Hewan Menular Strategis Zoonosis	35 Kasus	29 Kasus	23 Kasus	17 Kasus
	2.5.2 Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Non Zoonosis	35 Kasus	30 Kasus	25 Kasus	20 Kasus

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2017	2018	2019
	2.5.3. Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	17 Kasus	14 Kasus	12 Kasus	

Tabel 2.158 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2017	2018	2019
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI) yang terdata (terlaporkan).	109.32	142.16	115	110
	3.1.2* Persentase kunjungan kehamilan (ANC) yang memenuhi standar minimal 4 kali (K4)	91.72	94.84	85	90
	3.1.2(a) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	81.00	91.30	75	80
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	16.88	13.44	30	28
	3.2.1* Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup.	13.73	11.63	22	21
	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	9.84	9.18	6	5
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1 Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	36	57	62	68
	3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0.71	0.75	1	1
	3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	58.58	29.09	70	70
	3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.	0.06	0.01	1	1
		12	38.64	40	42
	3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan	17	18	<30	<30

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2017	2018	2019
	Kusta).				
	3.3.5.(a) eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	sudah melaksanakan TAS I,II ,III dan mendapat sertifikat eliminasi			
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis	18.75	19.05		
	3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.			5.8	5.6
	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	49.02	21.01	25	23
	3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	7.13	10.04	16	14
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obatobatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.4.1.(b) Unmeet need pelayanan kesehatan				
	3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	44.68	49.50	75.00	100.00
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3 Proporsi kematian akibat keracunan.	0	0	0	0

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2017	2018	2019
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100	100	100	100
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil	3.c.1 Kepadatan Dan Distribusi Tenaga Kesehatan	2.57	2.73	3.00	3.20

Tabel 2.159 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2017	2018	2019
4.1 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, adil, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	> 100 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %
	4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SLPT/MTs/ sederajat.	> 100 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2017	2018	2019
4.2 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan dan pendidikan anak usia dini, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar	4.2.2 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	83,23 %	85,73 %	88,23 %	90,73 %
4.6 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki dan perempuan, mampu membaca dan menghitung	4.6.1 Persentase masyarakat melek huruf	99,43 %	99,44 %	99,45 %	99,46 %
4.c Pada tahun 2030, Secara bermakna meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya LDCs dan SIDS	4.c.1 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV, mendapatkan Sertifikasi, memenuhi Sertifikasi, Sekolah yang mengimplementasikan MBS, dan Pendidik tentang pemahaman Kurikulum				

Tabel 2.160 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2017	2018	2019
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun	5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	1 regulasi (perwa)	1 regulasi (perwa)	1 regulasi (perwa)	1 regulasi (perwa)
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan gadis di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan manusia dan seksual, dan berbagai jenis eksploitasi	5.2.2 (a) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)	75%	78%	80%	85%
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif dari perempuan, dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan publik	5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat dan daerah (DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota).	13,33%	0%	0%	16,67%

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2017	2018	2019
	5.5.2 Rasio PNS Perempuan di Instansi Pemerintah Kota Dumai	51,8%	52,8%	52,8%	53,0%

2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Untuk pencapaian target pilar pembangunan Ekonomi terdiri dari 1. Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi; 2. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi; 3. Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara, untuk penjabarannya dapat dilihat pada table 2.161 Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi , 2.162 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi, 2.161 Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara.

Tabel 2.161 Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2017	2018	2019
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	4,74	4,57	<4,5	<4,5
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara berkembang.	8.1.1* Pertumbuhan ekonomi	4.64	4.13	4.22	4.32
	8.1.1.(a) PDRB per kapita (ADHB)	93,003 juta rupiah	97,723 juta rupiah	102,683 juta rupiah	107,894 juta rupiah
	8.1.1* Laju Pertumbuhan PDB per kapita	74.705.000	36.670.000	48.242.000	48.242.000
	8.1.1.(a) PDB per kapita	5%	5%	5%	5%

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2017	2018	2019
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	25	-	-	-
	8.9.1. (a) Kunjungan wisata	42,42	27,05	40	43

Tabel 2.162 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2017	2018	2019
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1. (a) Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (%)	55,57 %	56,24 %	56,92 %	57,59 %

Tabel 2.163 Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2017	2018	2019
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	4,74	4,57	<4,5	<4,5
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1 (A)Besaran Pemeriksaan Perusahaan	216 Perusahaan	416 Perusahaan	221 perusahaan	225 Perusahaan

3. Pilar Lingkungan Hidup

Untuk pencapaian target pilar Lingkungan Hidup terdiri dari 1. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan, untuk penjabarannya dapat dilihat pada table 2.164.

Tabel 2.164 Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan

Target (1B9:G21)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2017	2018	2019
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan..	11.1.1.(a) Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	2,04%	5,92%	6%	6%
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan member perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	4 wilayah	4 wilayah	4 wilayah	5 wilayah

4. Pilar Pembangunan Hukum

Untuk pencapaian target pilar Pembangunan Hukum terdiri dari 1. Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan, untuk penjabarannya dapat dilihat pada tabel 2.165

Tabel 2.165 Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2017	2018	2019
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1. RAD Anti Korupsi	1 dokumen pelaporan	1 dokumen pelaporan	1 dokumen pelaporan	1 dokumen pelaporan
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a) Opini BPK thp Pengelolaan Keuangan Daerah per SKPD	WDP(2016)	WDP	WDP	WTP
	16.6.1.(b) Tersusunnya LAKIP Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	13,33% (2014-2019)	0%	0%	16,67%
	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	0%	0,03%	0,03%	0,09%
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	16.9.1.(b) Kepemilikan Akta Kelahiran	80,2 %	85%	87%	90%

Target (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)		
			2017	2018	2019
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(d) Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	12 kasus	24 kasus	36 kasus	48 kasus
	16.10.2.(e) Besaran Pemeriksaan Perusahaan	216 Perusahaan	416 Perusahaan	221 perusahaan	225 Perusahaan

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan pendidikan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Belum proporsionalnya perbandingan jumlah siswa dengan jumlah sekolah di tingkat TK, SD, dan SMP;
- b) Belum meratanya sebaran guru yang masih terpusat di daerah kota sehingga daerah-daerah terpencil masih kekurangan guru untuk Perluasan Akses Pendidikan;
- c) Masih adanya tenaga pendidik/tenaga kependidikan/Kepala sekolah yang belum memenuhi kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditentukan;
- d) Terbatasnya dan masih belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan pada level dasar dan menengah yang berkompeten untuk jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan;
- e) Manajemen pengelolaan pendidikan belum efisien, efektif dan akuntabel sebagaimana yang diharapkan;

- f) Belum meratanya penyediaan dan/atau pengembangan system pembelajaran, data dan informasi pendidikan berbasis riset dan standar mutu pendidikan dasar dan menengah;
- g) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
- h) Kurangnya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dan pihak swasta dalam membantu pengembangan sector pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan murah/terjangkau;
- i) Rendahnya atau terbatasnya penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet dalam proses belajar mengajar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Dumai;

2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Kesehatan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis, terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai;
- b) Pada umumnya bangunan puskesmas pembantu serta poskeskel yang ada sudah berumur tua sehingga sudah mulai rusak;

- c) Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan medis yang bermutu dan merata di setiap puskesmas;
- d) Masih kurangnya akses, mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, serta masih terbatasnya pelaksanaan fungsi pengawasan berbasis teknologi;
- e) Belum tibanya system administrasi kependudukan, system pelaporan dan pencatatan sipil serta lemahnya pengawasan oleh dinas terkait;
- f) Penyakit Demam Berdarah (DBD) dan Malaria masih merupakan penyakit endemis di Kota Dumai. Kasus malaria dan DBD mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2014;
- g) Ketersediaan peralatan kesehatan termasuk yang ada masih kurang dan tidak layak termasuk alat transportasi darat penunjang pelayanan kesehatan;
- h) Meningkatnya prevalensi terjadinya penyakit yang disebabkan karena kepadatan penduduk tinggi dan tekanan masalah lingkungan, sebagai akibat dari [1] sanitasi dan udara yang kotor [2] varians penyakit baru yang menyebar [3] penyakit akibat penyalahgunaan obat. Selain itu penyakit-penyakit degeneratif akibat situasi kondisi perkotaan dan pola hidup juga akan cenderung membesar;
- i) Sistem layanan kesehatan pada beberapa lokasi masih menanggung beban lebih besar dibandingkan dengan kapasitasnya, termasuk mekanisme pengelolaannya;
- j) Kapasitas pelayanan puskesmas dan RSUD yang belum optimal (sarana dan prasarana);

- k) Masih rendahnya kompetensi tenaga kesehatan/paramedic terutama bagi Puskesmas di daerah terpencil dan/atau jauh dari perkotan;
- l) Kurangnya sarana dan prasarana informasi yang berbasis teknologi tentang arti pentingnya kesehatan ibu dan anak setelah persalinan (proses melahirkan ditolong oleh tenaga medis);
- m) Penyebaran penyakit-penyakit endemi yang cepat dan mudah mengalami mutasi yang dapat mempengaruhi secara tiba-tiba terhadap tingkat kesehatan penduduk. Dampak dinamika nasional diantaranya adalah [1] persoalan penyakit endemi yang perlu penanganan bersifat nasional, sehingga kebijakan strategis nasional dapat mempengaruhi kualitas kesehatan [2] dukungan logistik obat dan peralatan kesehatan nasional dan kinerja layanan kesehatan;
- n) Belum optimalnya sinergitas pelayanan kesehatan antara pemerintah dengan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Rendahnya pelayanan sambungan rumah air bersih yang dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer;
- b) Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur air bersih yang merata dan berkeadilan;
- c) Belum optimalnya jumlah dan kualitas infrastruktur jalan daerah (Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah sebagai konsekwensi angkutan darat tonase tinggi yang melewati

ruas-ruas jalan dikota Dumai dan juga sebagai akibat banjir rob yang menggerus jalan);

- d) Produk tata ruang yang telah disusun belum mempunyai kekuatan hukum;
- e) Kawasan Pusat kota yang belum tertata secara optimal dan belum memenuhi kaidah-kaidah ketataruangan yang baik untuk menciptakan kawasan *better space better living*;
- f) Ruang terbuka hijau masih sangat kurang;
- g) Terbatasnya luasan dan sebaran ruang publik di kota Dumai sehingga memicu ketidakadilan ruang untuk masyarakat khususnya anak-anak; Tingkat kerusakan infrastruktur (jalan, drainase dll) tidak sebanding dengan pembangunannya;
- h) Belum optimalnya pemanfaatan infastruktur jalan akibat kualitas jalan yang menuju ke sumber-sumber potensi perekonomian seperti pertanian, wisata dan industri yang masih rendah;

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Masih terdapatnya Kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni dan rasio bangunan ber-IMB masih belum maksimal;
- b) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan dasar sanitasi pemukiman penduduk (limbah, persampahan dan drainase);
- c) Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin;

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya manajemen pengurangan resiko bencana; (Konfirmasi data dari pak Jaya handayana)
- b) Belum optimalnya skill Sumber Daya Manusia bagi pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kota Dumai;
- c) Rawan kebakaran lahan dan ancaman meledaknya fasilitas perminyakan yang tersebar di kota Dumai; (
- d) Peningkatan resiko bencana kebakaran yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan permukiman;
- e) Pengurangan resiko bencana masih belum menjadi bagian terpadu dalam perencanaan pembangunan daerah;
- f) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Kamtibmas;
- g) Pendidikan politik masyarakat masih rendah;
- h) Penegakan hukum (*law enforcement*) belum dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- i) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat berkenaan dengan karakteristik perkotaan dan masyarakat yang heterogen.

6. Urusan sosial

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Aksesibilitas infrastruktur kota bagi penyandang difabel sangat kurang sehingga mempengaruhi kemandirian dan produktivitas mereka;

- b) Keberadaan gelandangan, pengemis, anak jalanan dan PSK;
- c) Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif;
- d) Jumlah kualitas tenaga pelayanan sosial masih sangat terbatas;
- e) Masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial di tengah-tengah masyarakat;
- f) Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia yang memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia;
 - a. Belum fokus dan lokus serta terintegrasinya penanggulangan kemiskinan sehingga terjadi ketimpangan angka kemiskinan.
 - b. Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
 - c. Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Tingkat pengangguran terbuka masih diatas 9%;
- b) Rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja atau belum adanya kesesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja yang ditandai oleh masih tingginya tingkat pengangguran terbuka;
- c) Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;

- d) Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
- e) Terbatasnya system informasi pasar kerja dan pengawasan terhadap penduduk pendatang (pencari kerja);
- f) Belum sinkronnya penyediaan tenaga kerja oleh lembaga pendidikan dengan dunia usaha;

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Masih belum optimal dan belum terpadunya pendidikan tentang bahaya seks bebas bagi remaja;
- b) Pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan remaja;
- c) Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;
- d) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
- e) Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan kebijakan anggaran masih kurang;
- f) Rendahnya akses perempuan dalam pembangunan.

3. Urusan Pangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Sumber produksi dan distribusi pangan belum diatur secara baik sehingga akses produksi dan konsumsi belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
- b) Tingginya ketergantungan impor pangan;
- c) Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas;
- d) Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan;
- e) Kuantitas ketersediaan pangan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat Kota Dumai, serta belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan lokal;
- f) Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang;
- g) Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang;

4. Urusan lingkungan Hidup

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Lingkungan Hidup, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan suhu udara dan penurunan kualitas udara ambien;
- b) Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak;
- c) Ketersediaan dan kualitas air tanah menurun, termasuk ketersediaan air bersih. Bahkan di beberapa wilayah pengembangan, kualitas air tidak layak untuk mandi dan cuci;
- d) Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;

- e) Pencemaran sungai yang mengalir kota Dumai. Beberapa sungai belum memenuhi baku mutu parameter COD/BOD dan menjadi tempat pembuangan sampah;
- f) Sampah masih belum dapat tertangani secara optimal dan timbunan cenderung bertambah. Pengelolaan akhir sampah belum optimal dan belum mengembangkan sistem partisipatif untuk prinsip 3R;
- g) Konversi lahan produktif ke lahan terbangun mengakibatkan menurunnya fungsi imbuan air tanah di wilayah tangkapan air utama;
- h) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penataan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri;
- i) Bencana kebakaran hutan dan lahan (gambut) masih menjadi bencana tahunan;
- j) Perubahan tata guna, fungsi hutan dan lahan gambut, serta okupasi kawasan konservasi;
- k) Degradasi dan deforestasi hutan dan lahan gambut;
- l) Daerah aliran sungai (DAS) dikuasai masyarakat untuk bertempat tinggal;
- m) Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir, perairan laut akibat banyaknya perusahaan yang beraktifitas di pesisir pantai serta tingginya abrasi pantai;

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Rendahnya kesadaran penduduk terhadap administrasi kependudukan;

- b) Berdasarkan kecenderungan sepuluh tahun terakhir, maka di masa 5-10 tahun mendatang, proporsi penduduk umur muda meningkat pesat. Hal dapat menjadi beban pembangunan, bahkan bila kecenderungan tersebut tidak dapat dikendalikan, dikhawatirkan jumlahnya akan terus meningkat, sehingga tidak dapat ditopang oleh daya dukung lingkungan;
- c) Tingginya laju rata-rata pertumbuhan penduduk akibat adanya migrasi dan kelahiran penduduk;
- d) Administrasi penduduk yang belum terdokumentasikan secara baik melalui e-KTP dan susahnyanya mengakses data kependudukan; sehingga sulit melakukan estimasi yang akurat terhadap kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan rumah tangga lainnya;
- e) Belum terigrasinya data kependudukan dengan data kemiskinan;

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Kurangnya tenaga pendamping UEK-SP;
- b) Masih belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga masyarakat di tingkat kelurahan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c) Sebagian besar Kelurahan masih dalam kategori berkembang, hanya sebagian kecil kelurahan yang berkategori cepat berkembang;
- d) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna masih rendah;

- e) Terjadinya penurunan semangat swadaya dan gotong royong masyarakat;
- f) Belum berfungsinya kader pemberdayaan masyarakat karena belum adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan;

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Pemahaman terhadap pendidikan alat reproduksi bagi remaja masih dianggap tabu bagi orang tua;
- b) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program keluarga berencana;
- c) Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Dumai diantaranya akibat migrasi masuk penduduk;
- d) Kualitas pelayanan KB belum maksimal;
- e) Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Dumai diantaranya akibat migrasi masuk penduduk;
- f) Belum optimalnya ketahanan keluarga;

8. Urusan Perhubungan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Perhubungan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Pelayanan angkutan umum dalam kota yang masih sangat kurang;
- b) Belum Efektifnya Terminal Penumpang yang merupakan Simpul Transportasi Daerah;
- c) Penataan Angkutan Sewa yang masih menggunakan sistem antar jemput sehingga secara perlahan mengurangi penggunaan moda angkutan umum masal (Bus);

- d) Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum optimal;
- e) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pengusaha sector transportasi di Kota Dumai akan arti pentingnya kesehatan udara;
- f) Besarnya volume pergerakan kendaraan tonase berat dari/ke arah Kota Dumai dan pusat kota setiap pagi hari dan arah sebaliknya di sore hari menyebabkan polusi dan memicu kerusakan jalan;
- g) Belum berkembangnya sistem transportasi massal dan integrasi antar moda angkutan;
- h) Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan;
- i) Masih tingginya *overloading* angkutan barang berakibat pada tingginya kerusakan jalan;
- j) Pelayanan infrastruktur pendukung bandar udara belum optimal serta rendahnya pemanfaatan pelabuhan udara Pinang kampai;

9. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya pengelolaan koperasi;
- b) Kurangnya tenaga teknis pembina koperasi;
- c) Terbatasnya akses pasar yang menyebabkan kurangnya kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa;
- d) Kurangnya promosi hasil produksi UMKM;

- e) Sentra-sentra kegiatan ekonomi yang sudah terbentuk umumnya belum mendapat dukungan optimal dari pemerintah;
- f) Permasalahan kemiskinan didaerah Hinterland dan Provinsi tentangga dapat berimbas meningkatnya urbanisasi di Kota Dumai;
- g) Program pengentasan kemiskinan belum terpadu antar OPD;
- h) Belum optimalnya Pengembangan instrumen pembiayaan non-konvensional untuk UMKM;
- i) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi;
- j) Rendahnya kemampuan managerial pengelola;
- k) Rendahnya kapasitas SDM, akses pasar, penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan;
- l) Daya saing produk koperasi, usaha kecil dan menengah lebih rendah dibandingkan dengan produk daerah lain;
- m) Rendahnya inovasi dan pengembangan produk;
- n) Belum efektifnya pembinaan dan pemberdayaan koperasi oleh *stakeholders* terkait.

10. Urusan Penanaman Modal

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Belum terbitnya peraturan tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sehingga hal ini berdampak pada penerbitan izin yaitu Izin Mendirikan Bangunan dan Izin di Bidang Penanaman Modal;
- b) Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang;

- c) Belum optimalnya Pengembangan sistem insentif terhadap investasi;
- d) Kurangnya informasi tentang peluang investasi dan regulasi, dikarenakan masih terbatasnya jaringan informasi berbasis teknologi informasi oleh instansi terkait;

11. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Prasarana Kepemudaan (gedung) yang ada di Kota Dumai belum memadai;
- b) Belum adanya pembinaan secara berkelanjutan bagi para pemuda yang telah mengikuti pelatihan;
- c) Masih tingginya penggunaan Narkoba dikalangan pemuda;
- d) Rendahnya jiwa kewirausahaan pemuda;
- e) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang mengakibatkan rendahnya kualitas atlit;
- f) Pembinaan olah raga belum optimal;
- g) Masih rendahnya kesadaran pengurus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dalam mendaftarkan organisasi dan kegiatannya
- h) Rendah pembinaan manajemen OKP.

12. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan menyangkut komunikasi dan Informatika :

- a) Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga berakibat pada belum optimalnya tata kelola pemerintahan;
- b) Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum berjalan dengan baik;

- c) Belum semua OPD memiliki website resmi dan sebagian besar website yang terdapat pada OPD belum memuat data perkembangan kinerja SKPD sesuai dengan tupoksi OPD tersebut sehingga data terkait perkembangan kinerja pembangunan daerah sulit didapatkan dan berakibat pada lambatnya dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- d) Belum dimanfaatkannya sistem IT secara online dalam pembayaran pajak dan lainnya;
- e) Belum ada data terkait dengan OPD yang sudah melakukan pelayanan administrasi secara online yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan administrasi bagi masyarakat;

13. Urusan Kebudayaan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Pemahaman masyarakat tentang nilai – nilai budaya masih rendah;
- b) Terbatasnya kerjasama dengan stakeholder (Perusahaan dan hotel) untk promosi pariwisata kota Dumai;
- c) Kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana untuk pengembangan apresiasi seni budaya;
- d) Terbatasnya Sumber Daya Manusia bidang kesenian dan kebudayaan daerah;
- e) Konten pembelajaran belum relevan, kontekstual, dan memiliki makna sosial yang sesuai dengan kekhasan persoalan sosial dan budaya daerah;
- f) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra untuk

menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;

- g) Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
- h) Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa;

14. Urusan Perpustakaan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Keterbatasan sarana dan prasarana;
- b) Keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan;
- c) Koleksi Buku perpustakaan masih sangat terbatas;
- d) Kerjasama perpustakaan daerah dengan perpustakaan yang memiliki referensi buku yang lengkap baik nasional dan internasional serta perguruan tinggi yang belum terjalin dengan baik (terkoneksi);
- e) Kurangnya minat baca masyarakat;

15. Urusan Kearsipan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Penataan arsip belum optimal pada setiap OPD masih belum optimal sebagaimana ketentuan yang berlaku;

- b) Tenaga arsiparis masih sangat terbatas hal ini disebabkan karena minat pegawai sangat rendah untuk menduduki jabatan fungsional arsiparis;

C. Urusan Pilihan

1. Urusan pertanian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Lapangan usaha pertanian belum mampu menjadi sektor basis dan tidak memiliki keunggulan kompetitif sehingga belum mampu menjadi sektor yang mampu memicu penambahan pendapatan penduduk;
- b) Terbatasnya kemampuan petani dalam teknologi pasca panen;
- c) Harga sarana dan prasarana pertanian yang tinggi;
- d) Harga produk pertanian yang cukup fluktuatif;
- e) Rendahnya produksi komoditas pertanian;
- f) Kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian masih rendah;
- g) Tekanan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian yang dapat menimbulkan dampak terhadap kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem lingkungan;
- h) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan;
- i) Tingginya ketergantungan komoditas pangan dan palawija pada daerah lain;
- j) Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian;
- k) Rendahnya perlindungan terhadap petani produsen;

2. Urusan Kelautan dan perikanan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan Kelembagaan pada pembudidaya ikan di Kota Dumai masih bersifat tradisional, sulitnya memberikan pemahaman karena sifat penyampaian informasi yang masih dari rumah ke rumah, disamping memakan waktu lama, juga informasi atau introduksi teknologi diterjemahkan sendiri-sendiri oleh pembudidaya tersebut;
- b. Produk yang dihasilkan oleh pembudidaya ikan belum menjadi produk unggulan, sifatnya masih memenuhi kebutuhan ikan segar yang dihasilkan dalam jumlah cukup kecil, atau belum menjadi bahan baku industri perikanan;
- c. Ketrampilan pendamping yang masih harus di benahi, sehingga pendamping tidak memiliki satuan indikator yang harus diselesaikan;
- d. Terbatasnya prasarana yang tersedia dalam mengelola usaha peternakan dan perikanan;
- e. Rendahnya produktivitas perikanan;
- f. Kurangnya sarana dan prasarana bagi usaha perikanan laut dan perairan umum;
- g. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- h. Tingginya biaya logistik penangkapan perikanan laut dan perairan umum akibat rendah pemanfaatan teknologi penangkapan;
- i. Distribusi dan kapasitas kelembagaan pemasaran yang rendah;

- j. Belum berkembangnya industri pengolahan ikan berskala sedang dan besar akibat keterbatasan infrastruktur;

3. Urusan Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Sektor industri pengolahan, Perdagangan besar dan eceran merupakan 2 sektor dari beberapa sektor yang menjadi sektor basis dan prospektif namun tidak memiliki keunggulan kompetitif;
- b) Belum terciptanya sistim pembinaan yang efektif dalam meningkatkan pembinaan dan pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil menengah (UDKM) sehingga pembinaan yang dilaksanakan terkesan tidak efisien;
- c) Terbatasnya sarana dan prasarana promosi dari produk-produk Industri Kecil dan Menengah sehingga pemasaran produk IKM Kota Dumai masih bersifat lokal dan sulit berkembang;
- d) Sering terjadi gangguan terhadap kelancaran arus barang khususnya bahan pokok masyarakat termasuk BBM dan gas elpiji sehingga mempengaruhi terjadinya fluktuasi harga dipasaran;
- e) Belum optimalnya akses permodalan bagi IKM;
- f) Sarana dan Prasarana Penujang kebersihan pasar belum lengkap;
- g) Belum maksimalnya penataan pedagang kaki lima dan keterbatasan lahan untuk merelokasi PKL;
- l) Sektor informal (PKL) di Kota Dumai yang berkembang sangat cepat dan cenderung tidak terkendali, sehingga

- menimbulkan eksternalitas negatif (efek samping akibat suatu kegiatan ekonomi) bagi kegiatan lainnya;
- m) Permasalahan pasar tradisional terdesak keberadaan pasar modern, karena semakin banyaknya izin yang diberikan kepada swasta untuk membangun, supermarket dan toserba pada skala retail yang mengakibatkan turunnya daya saing pasar tradisional secara langsung;
 - n) Belum optimalnya Pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional untuk membiayai PKL;
 - o) kelompok penduduk yang tergolong MBR sangat rawan terhadap kenaikan harga bahan kebutuhan pokok;

4. Urusan Pariwisata

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;
- b) Rendahnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Dumai;
- c) Kurang dan rendah kualitas infrastruktur menuju destinasi atau objek wisata;
- d) Kurang sarana dan prasarana pendukung di areal objek wisata dan fasilitas pendukung kepariwisataan;
- e) Belum memiliki ikon wisata dan paket yang komprehensif dan berdaya saing;
- f) Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan sederhana;
- g) Terbatasnya *event* budaya yang dapat disaksikan oleh wisatawan;

- h) Kurangnya jumlah produk industri kreatif yang menjadi *icon* wisata Kota Dumai;

D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

1. Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*Electronic Government*) belum optimal;
- b) Pelayanan publik masih memerlukan perbaikan di semua lini;
- c) Penyelesaian batas wilayah dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis belum selesai serta penyelesaian batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan;
- d) Banyak lahan yang belum bersertifikat dan potensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
- e) Keberadaan Kecamatan dan Kelurahan kerap diposisikan sebagai salah satu instansi yang hanya berperan dalam pelayanan masyarakat seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan bagi masyarakat serta penggerak masa dalam berbagai kegiatan Pemerintah;
- f) Masih terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi di dalam menjalankan tugas dalam pembangunan daerah;
- g) Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
- h) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*;

- i) Kurangnya pemahaman penyedia jasa konstruksi tentang regulasi jasa konstruksi;

2. Urusan Pengawasan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Pengawasan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- b) Hasil-hasil pengawasan belum sepenuhnya menjadi input terhadap manajemen pemerintahan daerah;
- c) Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;
- d) Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
- e) Penegakan supremasi hukum masih lemah;

3. Urusan Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Perencanaan Pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal;
- b) Belum optimalnya pemanfaatan rapat koordinasi dalam merencanakan dan merumuskan penyelesaian masalah dan prioritas pembangunan;
- c) Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- d) Dokumen perencanaan yang telah disusun belum dijadikan acuan sepenuhnya dalam pembangunan terutama berkaitan dengan prioritas pembangunan antara wilayah;
- e) Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi serta dokumen perencanaan;

- f) Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan yang masih rendah;
- g) Belum terpetakaan secara baik persoalan dan isu menurut wilayah sehingga arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan belum terfokus, lokus serta tepat sasaran sesuai persoalan dan isu strategis yang ada;
- h) Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih sangat rendah;
- i) Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta belum optimal dalam pembangunan daerah;
- j) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang;

4. Urusan Keuangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Keuangan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Sumber pendanaan pembangunan yang masih tergantung pada dana perimbangan dan Potensi keuangan daerah belum tergali secara optimal;
- b) Sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah belum tergarap secara optimal akibat data potensi usaha yang menjadi obejk pajak dan retribusi belum terdata dengan baik;
- c) Rendahnya kemampuan daerah dalam mensinkronkan rencana pembangunan yang dapat menjadi potensi penerimaan daerah.
- d) Kesadaran wajib pajak/retribusi daerah dalam memenuhi kewajibannya belum sebagaimana yang kita harapkan.
- j) Transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah belum optimal;

- k) Pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat;
- l) Belum adanya Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) yang jelas terkait prosedur mengenai mekanisme penyusunan anggaran. Serta Sumber pendapatan daerah dari BUMD masih terbatas;

5. Urusan Kepegawaian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Kepegawaian, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
- b) Distribusi dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan;
- c) Manajemen kepegawaian belum berjalan secara optimal;



BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH KEBIJAKAN DAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2019 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2019. Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Dumai baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan faktadan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaranpendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2019. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2019 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Dumai.

3.1.1.Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2019

a. Laju pertumbuhan Ekonomi

Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi baik secara agregat maupun menurut lapangan usaha dapat diperoleh dari PDRB atas dasar harga konstan. Mulai Tahun 2015 perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan Nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar ini dikarenakan Selama sepuluh tahun terakhir telah banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB. Adapun manfaat perubahan tahun dasar PDRB adalah :

- 1) Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Meningkatkan kualitas data PDRB;
- 3) Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

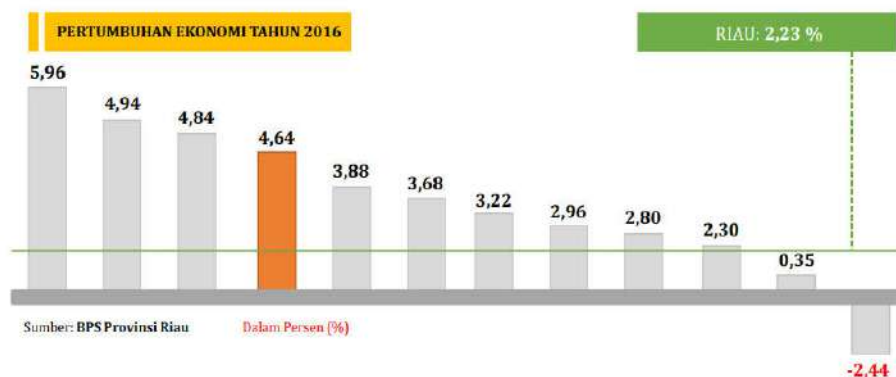
Sedangkan pengaruh akibat adanya perubahan tahun dasar terhadap perhitungan PDRB adalah:

- 1) Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok
- 2) pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- 3) Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan
- 4) Saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- 5) Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tidak memberikan gambaran perubahan produksi secara nyata karena di dalamnya masih ada pengaruh perubahan harga barang dan jasa pada tahun tersebut. Untuk itu gambaran perubahan atau pertumbuhan yang riil (nyata) hanya dapat dilihat dari perubahan PDRB atas dasar harga konstan. Tingkat perekonomian Kota Dumai dalam kurun waktu 2010-2016 dilihat berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga konstan cenderung mengalami penurunan. Perekonomian Dumai pada tahun 2016 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan Ekonomi Riau tahun 2016 sebesar 2,23, meningkat 2,01 poin dari 2015 sedangkan Laju pertumbuhan PDRB Dumai tahun 2016 mencapai 4,64 persen, sedangkan tahun 2015 sebesar 1,19 persen dan menempati posisi ke-4 se-Riau. Hal ini dikarenakan Tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi seiring dengan pengalihan upaya lain pada

sektor pariwisata dan **non-migas**. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Penyediaan Pengadaan listrik dan gas (18,12%), Industri Pengolahan (6,28%), Transportasi dan Pergudangan (4,88%) serta Jasa lainnya (4,39%). Seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau dan Kota Dumai



PDRB Perkapita kota dumai pada tahun 2016 sebesar 95,73 juta atau naik 7.38 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar 88.93. selanjutnya untuk Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai pada tahun 2016 sebesar 4,64 persen jika Dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 1,91 persen.

Tabel. 3.1 Perkembangan PDRB Kota Dumai Tahun 2011-2016

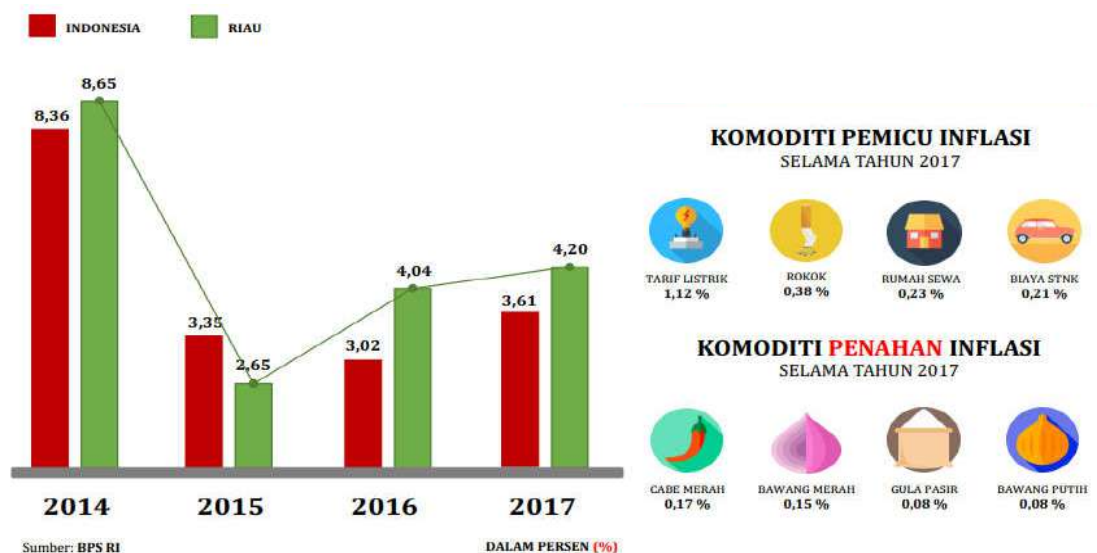
Uraian	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB ADHK perkapita Kota Dumai (juta Rp.)	70,19	70,55	71,53	71,87	71,74	73,55
PDRB ADHK perkapita Provinsi Riau (juta Rp.)	71,64	72,40	72,30	72,39	70,77	70,60
Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai (%)	4,27	3,66	3,68	2,69	1,91	4,64
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau (%)	5,57	3,76	2,48	2,71	0,22	2,23
Klasifikasi Wilayah	Wilayah relatif tertinggal	Wilayah relatif tertinggal	Wilayah berkembang cepat	Wilayah relatif tertinggal	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh

Secara umum ada tiga lapangan usaha yang cukup dominan dalam pembentukan total PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Dumai tahun 2016 yaitu industri pengolahan (C), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor (G) serta Bangunan (F). Sedangkan sektor-sektor yang lain memberikan kontribusi dibawah 10 persen. Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,18 persen, kategori Jasa Lainnya sebesar 0,57 persen, kategori Jasa Perusahaan mencatat sebesar 0,01 persen, kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 1,05 persen, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,09 persen, kategori Jasa Pendidikan sebesar 0,54 persen, kategori Real Estat 0,48 persen, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,02 persen kategori Jasa Lainnya sebesar 0,57 persen, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,93 persen, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,07 persen, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,14 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,89 persen, kategori Industri Pengolahan sebesar 53,88 persen, kategori Pertambangan dan Pengalihan sebesar 0,44 persen, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,04 persen.

b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi di suatu wilayah dan dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan bersangkutan terhadap bulan sebelumnya. Inflasi tahun kalender selama 2016 sebesar 3,98 persen. Perbandingan Inflasi terhadap nasional dan propinsi masih didominasi oleh sektor Tarif Listrik,

rokok, rumah sewa dan biaya STNK menjadi komoditi pemicu inflasi. Sedangkan deflasi terjadi di kelompok komoditi seperti Cabe Merah Bawang merah gula pasir dan bawang putih. Seperti yang terlihat pada Grafik dibawah ini :



Grafik 3.2 Inflasi Tahun Kalender Kota Dumai Menurut Kelompok Pengeluaran

Sumber : BPS Kota Dumai

Pada tahun 2014 Kota Dumai mengalami inflasi tahunan tertinggi dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015 inflasi Kota Dumai mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6% (dari 8,53% pada tahun 2014 menjadi 2,63% di tahun 2015). Kondisi ini sejalan dengan perkembangan inflasi Provinsi Riau yang menunjukkan penurunan dari 8,65% menjadi 2,65%. Kinerja perekonomian yang sudah membaik ini kemudian mulai memburuk lagi di tahun 2016 dengan angka inflasi tahunan sebesar 3,98% (meningkat 1,35%). Hal ini sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Dumai secara makro. Jika dilihat dari kondisi inflasi bulanan tahun 2016 seperti yang tersaji pada Gambar 2.15 diatas, terlihat bahwa inflasi bulanan tertinggi di Kota Dumai dan Provinsi Riau

sama-sama terjadi di bulan November. Sedangkan inflasi bulanan terendah terjadi di bulan April, dimana Kota Dumai dan Provinsi Riau sama-sama mengalami deflasi. Secara umum tingkat inflasi/deflasi bulanan yang terjadi di Kota Dumai dan Provinsi Riau sama, hanya saja pada bulan Februari kondisi perekonomian Provinsi Riau lebih baik dibandingkan dengan kondisi perekonomian Kota Dumai, dimana Provinsi Riau mengalami deflasi sebesar 0,34% sementara Kota Dumai mengalami inflasi sebesar 0.32%.

Grafik 3.3 Inflasi Bulanan Kota Dumai Tahun 2016



Terkait pengendalian inflasi, Kota Dumai telah memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kota Dumai ditambah dengan lembaga vertikal. Adapun langkah-langkah yang mungkin ditempuh sehubungan dengan program pengendalian inflasi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek Kelembagaan dan Koordinasi
 - a) Memperkuat dan menyempurnakan mekanisme koordinasi guna meningkatkan efektivitas dalam sinkronisasi kebijakan
 - b) Memperkuat fungsi sekretariat TPID untuk mendukung komunikasi yang intensif

- c) Sinergi TPID dengan produsen dan retailer
- 2) Aspek Program
- a) Program pengendalian inflasi yang dikembangkan merupakan program multiyears dan menyentuh permasalahan struktural, sehingga seluruh program memiliki tahapan, roadmap, dan target yang jelas.
 - b) Pengembangan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) untuk mendukung transparansi harga dan mengarahkan ekspektasi; penguatan kerjasama antar daerah dalam rangka mendukung kelancaran pasokan dan pengembangan ekonomi daerah, penyelarasan asumsi makro daerah dalam rangka mendorong perencanaan fiskal daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan
- 3) Aspek Komitmen dan Komunikasi
- a) Komitmen dan keterlibatan aktif seluruh elemen TPID
 - b) Komunikasi yang intensif dan didukung dengan kredibilitas tim akan mampu mengarahkan dan menjaga ekspektasi masyarakat

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

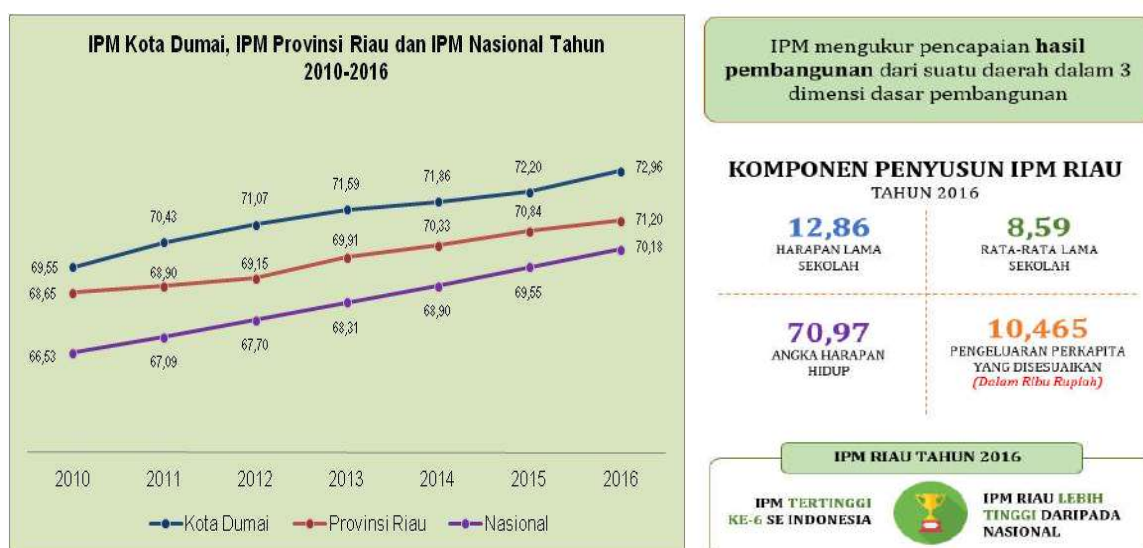
Selama periode 2010-2016 IPM Kota Dumai terus meningkat seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.2. Sejak tahun 2011 IPM Kota Dumai berada pada kategori tinggi dengan angka berturut-turut sampai tahun 2016 adalah sebesar 70,43 ; 71,07 ; 71,59 ; 71,86 ; 72,20 ; 72,96. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kota Dumai semakin membaik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kondisi ekonominya. Meskipun demikian, angka IPM yang cukup tinggi tidak sepenuhnya merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan penduduk dapat dicapai jika pemerataan hasil pembangunan telah terealisasi.

Tabel 3.2 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2016

Cakupan Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Dumai	69,55	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96
Provinsi Riau	68,65	68,90	69,15	69,91	70,33	70,84	71,20
Nasional	66,53	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18

Sumber: BPS, 2017

Jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, selama kurun waktu 2010-2016, IPM Kota Dumai menempati urutan kedua setelah Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 3.2. Pada tahun 2016, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, hanya 6 kabupaten/kota yang memiliki angka IPM dengan kategori tinggi, yaitu: Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis, Kampar, dan Pelalawan. Di sisi lain dalam lingkup yang lebih luas, IPM Kota Dumai lebih tinggi daripada IPM Provinsi Riau maupun IPM nasional seperti yang tersaji pada Tabel 3.2 di atas. Pada tahun 2016 IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau, maupun IPM nasional berada pada kategori tinggi dengan angka IPM berturut-turut sebesar 72,96 ; 71,20 ; 70,18. Seperti yang terlihat pada grafik 3.4 dan tabel 3.3 dibawah ini :



Tabel 3.3 Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2016

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kuantan Singingi	65,07	65,72	66,31	66,65	67,47	68,32	68,66
Indragiri Hulu	65,10	65,93	66,50	66,68	67,11	68,00	68,67
Indragiri Hilir	61,98	62,82	63,04	63,44	63,80	64,80	65,35
Pelalawan	65,95	66,58	67,25	68,29	68,67	69,82	70,21
Siak	69,78	70,20	70,45	70,84	71,45	72,17	72,70
Kampar	68,62	69,64	70,08	70,46	70,72	71,28	71,39
Rokan Hulu	63,59	64,20	64,99	66,07	67,02	67,29	67,68
Bengkalis	69,29	69,72	70,26	70,60	70,84	71,29	71,98
Rokan Hilir	64,13	64,76	65,09	65,46	66,22	66,81	67,52
Kepulauan Meranti	59,71	60,38	61,49	62,53	62,91	63,25	63,90
Pekanbaru	77,34	77,71	77,94	78,16	78,42	79,32	79,69
Dumai	69,55	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96

Sumber: BPS, 2017

Sedangkan untuk melihat kondisi IPM secara keseluruhan berdasarkan Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Perkapita dapat dilihat pada Grafik dibawah ini

Grafik 3.5 perkembangan IPM kota dumai berdasarkan AHH, HLS dan Pengeluaran Perkapita terhadap



Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) = 70,97

Tahun 2016 tumbuh 0,06 persen



Harapan Lama Sekolah (HLS) = 12,86

Tahun 2016 tumbuh 0,94 persen

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) = 8,59

Tahun 2016 tumbuh 1,18 persen

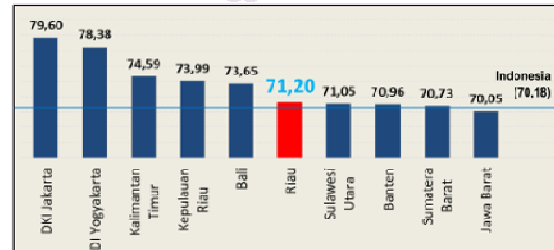


Pengeluaran Per Kapita/tahun

Disesuaikan = Rp 10,465 jt

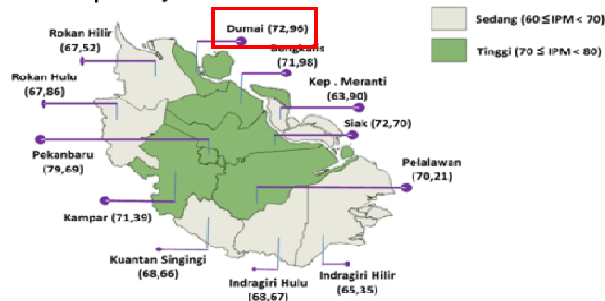
Tahun 2016 tumbuh 0,97 %

10 IPM Tertinggi di Indonesia 2016



- IPM Riau peringkat ke-5 dari 34 Provinsi dan peringkat ke-2 di Sumatera setelah Kepulauan Riau
- IPM Riau masuk kategori tinggi sejak 2014 dan berada diatas IPM Indonesia

Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota 2016



Kab/Kota	AHH	HLS	RLS	IPM
Kuantan Singingi	67,92	12,81	8,19	68,82
Indragiri Hulu	69,79	12,24	7,83	70,08
Indragiri Hilir	69,95	11,58	6,94	69,11
Pelalawan	70,30	11,68	8,18	71,64
Siak	70,59	12,56	9,21	71,82
Kampar	70,08	12,87	8,85	70,76
Rokan Hulu	69,17	12,59	7,97	69,06
Bengkalis	70,63	12,72	8,83	71,32
Rokan Hilir	69,57	12,06	7,88	69,18
Kepulauan Meranti	68,85	12,74	7,46	69,19
Kota Pekanbaru	71,70	14,87	11,20	74,22
Kota Dumai	73,31	12,75	9,58	71,53
Riau	70,97	12,86	8,59	70,46

d. Indeks Gini

Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2009-2014 tanpa data tahun 2012, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan/kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan tinggi.



Grafik 3.6 Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2009-2014
Sumber: Universitas Riau, 2016

Indikator lain yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat adalah kriteria ketimpangan pendapatan versi Bank Dunia, dimana penduduk dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

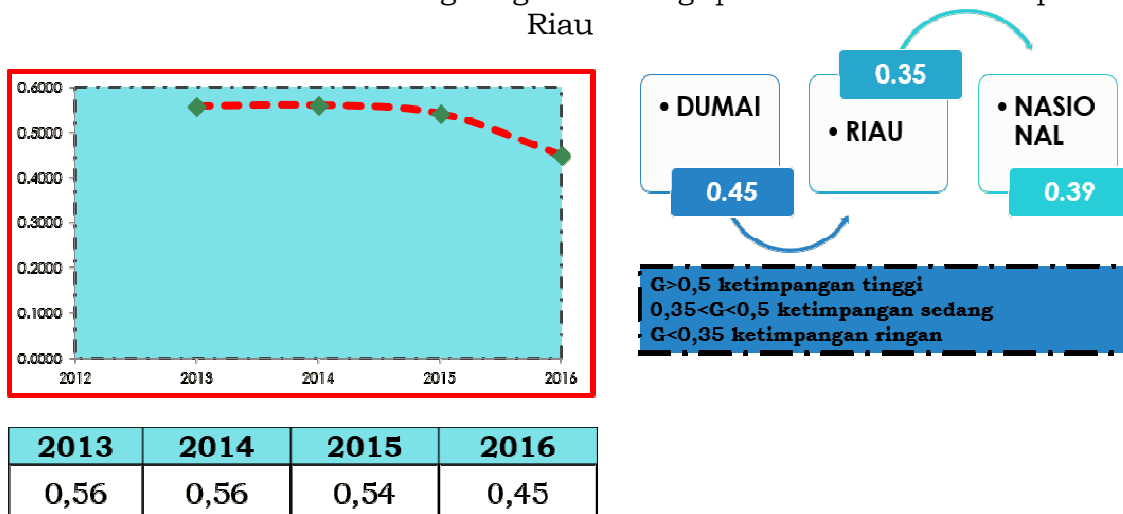
- a) Kelompok 40% termiskin pengeluarannya < 12% dari keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan tinggi.
- b) Kelompok 40% termiskin pengeluarannya 12%–17% dari keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan sedang.
- c) Kelompok 40% termiskin pengeluarannya > 17% dari keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan tinggi

Berdasarkan hasil penghitungan ketimpangan distribusi pendapatan Kota Dumai berdasarkan pendapatan kriteria bank dunia, menunjukkan bahwa secara umum tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di kota Dumai masih termasuk kategori sedang, karena

kelompok 40% termiskin pengeluarannya adalah 12,52% dari keseluruhan pengeluaran.

Grafik 3.7. Perbandingan indeks Gini Nasional, Propinsi Riau dan Kota Dumai tahun 2013-2016

Sumber : Persentasi Penganugrahan Pangripta Kota Dumai di Propinsi Riau

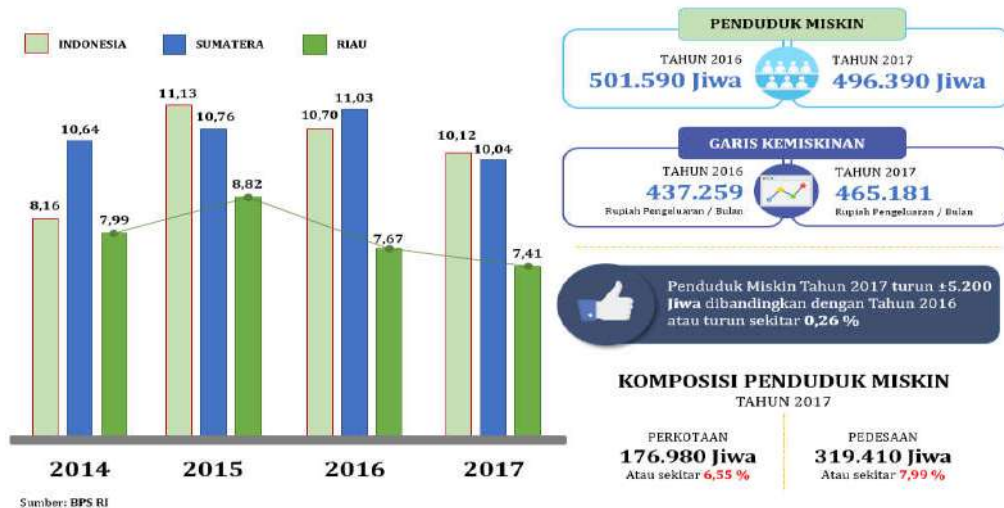


e. Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB perkapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Untuk penjelasan secara detail sudah dijelaskan pada bab II. Secara umum

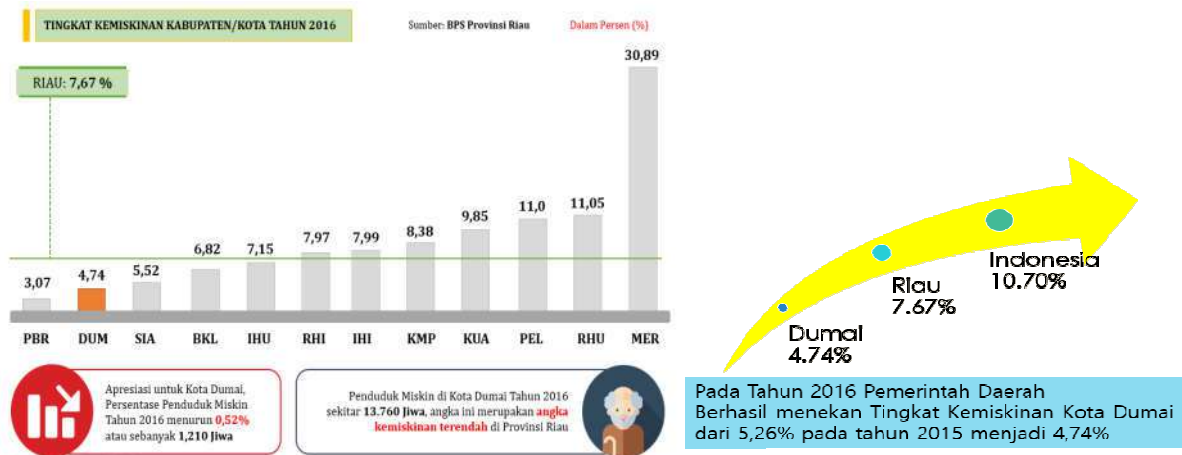
perbandingan kondisi tingkat kemiskinan nasional dan propinsi dapat dilihat pada tabel grafik dibawah ini :

Grafik 3.8 Perbandingan kondisi tingkat kemiskinan Nasional dan Propinsi tahun 2014-2017



Sedangkan untuk kondisi kota dumai pada tahun 2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.9 Kondisi perbandingan Nasional, Propinsi Riau dan Kota Dumai tahun 2016

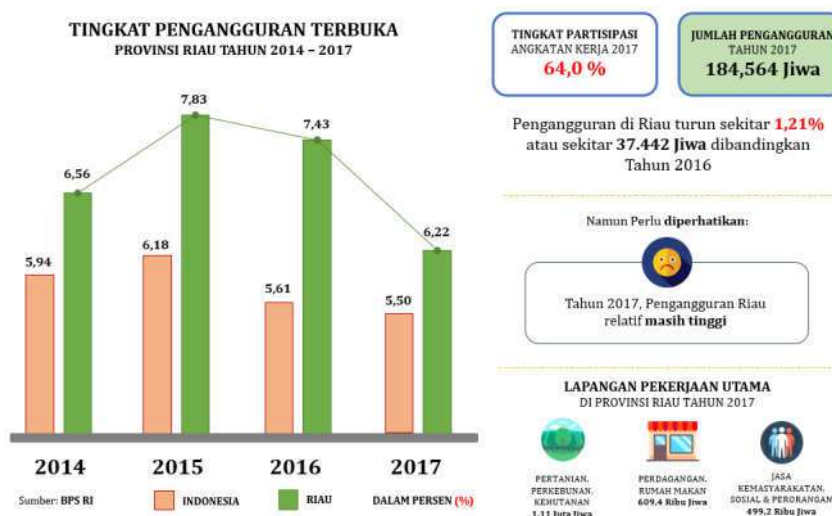


f. Pengangguran

Pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15

sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Kondisi tingkat pengangguran nasional dan propinsi riau dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.10 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kondisi Nasional dan Propinsi Riau

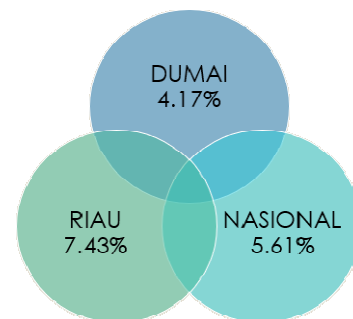
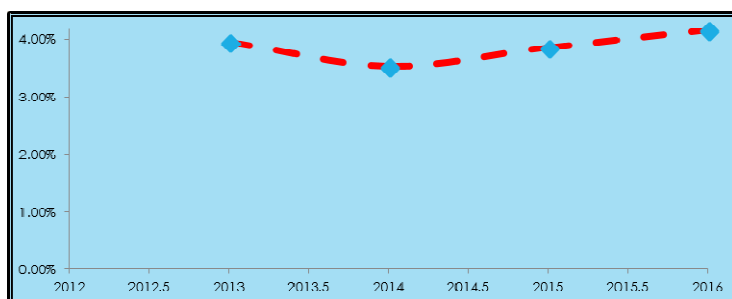


Sedangkan kondisi kota Dumai untuk tingkat pengangguran terbuka berdasarkan Data jumlah pengangguran terbuka selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 3.11 Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2010-2016

Sumber: Persentasi Penganugrahan Pangripta Kota Dumai di Propinsi Riau

Uraian	2013	2014	2015	2016
Angkatan Kerja	122,950	129,027	135,027	142,099
Pengangguran Terbuka	4,861	4,550	5,218	5,925
Persentase	3.95%	3.53%	3.86%	4.17%



3.1.2. Telaahan Kebijakan nasional yang terkait dengan Kota Dumai

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 pada buku III dijelaskan bahwa sesuai dengan potensi dan keunggulannya, maka arah pengembangan wilayah Sumatera difokuskan sebagai:

1. Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional.
2. Lumbung energi nasional termasuk pengembangan energi terbarukan biomas.
3. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin.
4. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.

Dengan fokus pengembangan wilayah Sumatera tersebut diatas maka beberapa hal terkait potensi Kota Dumai :

1. Dumai sebagai Pintu gerbang Indonesia di kawasan timur Sumatera yang langsung berhadapan dengan Selat Malaka, Malaysia, dan Singapura.
2. Dumai sebagai salah satu daerah pengolahan minyak bumi dimana terdapat Unit pengolahan yang dimiliki oleh Pertamina.
3. Dumai sebagai bagian dari hilirisasi komoditas industri kelapa sawit.
4. Dumai Bagian dari pembangunan kemaritiman nasional.
5. Mulai efektifnya Masyarakat Ekonomi Asean sejak 1 Januari 2016 menjadi tantangan dan peluang bagi Kota Dumai sebagai pintu gerbang Indonesia di pantai timur Sumatera.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa isu strategis pembangunan Dumai berdasarkan telaahan kebijakan nasional adalah:

1. Dumai sebagai Pusat kegiatan Strategis Nasional dengan fokus meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat untuk mewujudkan kemudahan aktivitas bagi masyarakat kawasan perbatasan dalam mengelola sumber daya darat dan laut.
2. Dumai merupakan pusat kegiatan nasional (PKN) dengan fokus pusat administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai outlet emasaran untuk wilayah Riau bagian timur serta berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti perkebunan, industri, perdagangan, pertambangan dan perikanan.

3.1.2. Telaahan Kebijakan Provinsi yang terkait dengan Kota Dumai (Perubahan RPJM Provinsi Riau 2014-2019)

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa isu strategis pembangunan Dumai berdasarkan telaahan kebijakan Provinsi adalah:

1. Kota Dumai sebagai bagian kawasan strategis Duri-Dumai-Rupat dengan fokus pengembangan kerjasama sektor perdagangan dan industri, pertambangan dan energi, pertanian dan peternakan, pariwisata dan transportasi, serta pendidikan dan pelatihan sebagai wahana untuk transfer teknologi. Selain komoditi hasil pertanian, terdapat juga komoditi industri hasil olahan sektor kehutanan berupa pulp dan paper yang cukup besar serta hasil galian minyak bumi dari wilayah Duri dan Rokan Hilir.
2. Dumai sebagai muara distribusi komoditi pulp dan paper serta hasil galian minyak bumi yang berada di Pelabuhan Dumai.
3. Bersama dengan Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir dan daerah-daerah sekitarnya. Dumai memiliki

potensi yang besar di sektor perikanan dan kelautan seperti industri perikanan dan kawasan pariwisata.

3.1.3. Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Dumai Secara Umum

Berdasarkan telaahan diatas terkait isu-isu strategis baik isu strategis berdasarkan urusan, telaahan isu dari nasional dan provinsi, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis pembangunan kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Dumai dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Belum optimalnya kualitas, kuantitas dan pemerataan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing kota dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.
3. Masih kurangnya kualitas dan daya saing Sumber daya Manusia masyarakat Kota Dumai dalam menghadapi tantangan pembangunan global setelah diberlakukannya kebijakan pasar bebas Asean seperti Masyarakat Ekonomi Asean dan persaingan tenaga kerja lokal dari daerah lain di Indonesia.
4. Melambatnya perekonomian Kota Dumai serta masih tingginya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang bisa meningkatkan jumlah masyarakat miskin.
5. Belum optimal kualitas pelayanan publik, akuntabilitas dan transparan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan.
6. Belum Optimalnya pembangunan dibidang pertanian, industri, perdagangan dan Jasa serta investasi yang memiliki banyak peluang setelah penetapan kota Dumai menjadi beberapa pusat kegiatan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi.

7. Perlunya peningkatan kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu dalam rangka menghadapi tantangan budaya global

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020

Perekonomian Kota Dumai pada Tahun 2019 dan perkiraan tahun 2020 dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam kota Dumai dan faktor yang berasal dari luar kota Dumai. Faktor yang berasal dari dalam kota Dumai adalah kondisi belum jelasnya **status rencana tata ruang kota Dumai** yang mempengaruhi rencana pemanfaatan ruang dalam rangka ketersediaan infrastruktur kota dan dasar masyarakat dan perizinan di kota Dumai. Produktivitas usaha industri atau perdagangan masyarakat dalam skala kecil dan Menengah (*small and medium enterprises*) juga turut mempengaruhi kontribusi barang/jasa dan jumlah tenaga kerja yang membentuk PDRB kota Dumai sehingga ketika usaha kecil dan menengah ini mengalami stagnasi, maka akan mempengaruhi kontribusinya terhadap pendapatan masyarakat termasuk jumlah tenaga kerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi prospek perekonomian kota Dumai Tahun 2019 dan tahun 2020 antara lain adalah adanya kebijakan pemerintah terkait harga bahan bakar minyak yang mengikuti trend harga pasar dunia sehingga harga bahan bakar bisa berubah setiap saat. Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kota Dumai dituntut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berfluktuasinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar yang menjadi acuan perdagangan internasional diperkirakan juga mempengaruhi nilai perdagangan kota

dumai yang berakibat pada inflasi. Situasi dan stabilitas keamanan pusat dan daerah juga turut memberi andil terhadap prospek pembangunan kota Dumai.

Di tahun mendatang, kemungkinan kondisi pembangunan ekonomi Kota Dumai masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain mencakup:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus dipacu dengan mengembangkan pertumbuhan yang lebih berimbang, yang bertumpu pada peran investasi dan ekspor non migas. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja dan akan difokuskan pada penguatan struktur perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan.
2. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.

3. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas yang selama ini masih berorientasi pada wilayah pemukiman. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi.
4. Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekspor diperlukan tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu.
5. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
6. Membangun landasan yang kokoh bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di masa-masa yang akan datang.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, namun Pemerintah Kota Dumai tetap optimis dalam cita-cita pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah

Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan ekspektasi nyata dari perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah (Perda) Yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang tersebut di atas, Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai setiap tahunnya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran, alokasi belanja diklasifikasi menurut kelompok, bagian dan jenis belanja sesuai dengan prioritas program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Sehingga dengan demikian, tersusunnya APBD secara efektif dan efisien yang mencerminkan perwujudan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan fungsi salah satu didalam 3 (tiga) domain, yaitu sektor publik, sektor swasta dan masyarakat atau "*civil society*".

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Realisasi serta proyeksi/target pendapatan Pemerintah Kota Dumai dari tahun 2016 sampai proyeksi tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 3.4. sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
serta Proyeksi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2016 s.d 2020

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Pendapatan Tahun 2018	Proyeksi/Target Pendapatan 2019	Proyeksi Pendapatan 2020
	Realisasi	Realisasi			
PENDAPATAN DAERAH	1.062.040.946.926,12	1.184.647.139.945,33	1.178.197.756.774,98	1.544.016.535.686,00	1.570.331467.001,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	192.760.175.685,61	229.030.944.323,72	245.309.400.186,50	283.995.949.872,73	293.285.098.038,04
Pendapatan Pajak Daerah	77.259.466.863,00	94.994.377.648,91	117.586.537.699,50	128.870.491.700,00	132.863.266.079,29
Pendapatan Retribusi Daerah	25.266.371.726,00	35.868.514.250,00	38.003.028.000,00	40.934.235.573,73	42.345.907.368,75
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	908.686.971,00	1.626.568.826,00	6.705.426.187,00	7.621.702.693,00	7.621.702.693,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	89.325.650.125,61	96.541.483.598,81	83.014.408.300,00	106.569.519.906,00	110.454.221.897,00
DANA PERIMBANGAN	689.119.140.681,00	755.592.886.590,00	817.066.556.588,48	1.016.314.974.555,68	1.032.682.841.769,19
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	188.564.181.908,00	184.407.972.937,00	211.723.054.588,48	267.406.094.897,78	273.521.233.928,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	406.116.504.000,00	408.643.780.000,00	427.188.089.000,00	453.264.864.000,00	478.264.864.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	94.438.454.773,00	162.541.133.653,00	178.155.413.000,00	295.644.015.657,90	280.896.743.841,19
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	180.161.630.559,51	200.023.309.031,61	115.821.800.000,00	115.821.800.000,00	115.821.800.000,00
Pendapatan Hibah	-	35.889.520.000,00	35.821.800.000,00	35.889.520.000,00	35.889.520.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Lainnya	85.088.317.014,44	84.630.386.181,00	80.000.000.000,00	100.258.360.711,17	100.916.276.647,35
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	95.073.313.545,07	79.503.402.850,61	91.416.118.678,57	107.557.730.546,42	107.557.730.546,42

Penjelasan Tabel 3.4 untuk Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Kota Dumai Pada Tahun 2019 sebesar Rp. 1.544.016.535.686,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Penyumbang PAD diantaranya berasal dari objek Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PPJ (Pajak Penerangan Jalan), Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Ret Pelayanan Pasar, Pajak Parkir, Pajak sarang Burung Walet, Retr. Pelayanan Pasar, Ret jasa usaha pemakaian kekayaan daerah (sewa alat-alat berat), Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah, Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Jasa Usaha Terminal, Ret. Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir, Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan, Ret. Pelayanan Bandar Udara, Ret. Izin Trayek, Ret. Rumah Potong Hewan, Ret. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Ret. Pemeriksaan Kualitas Air, Ret. Puskesmas, dan Ret. Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Berdasarkan Perkiraan dari masing-masing jenis objek pendapatan, maka target PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 direncanakan Rp. 283.995.949.872,73, dengan rincian diperkirakan sumber yang diterima dari pajak Daerah sebesar Rp. 128.870.491.700 , Retribusi Daerah sebesar Rp. 40.934.235.573,73, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp. 7.621.702.693, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 106.569.519.906.

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer kepada Pemerintah Kota Dumai melalui Kas Umum Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan. Pada Tahun 2019, prediksi pendapatan daerah dari sumber Dana Perimbangan sebesar Rp. 817.066.556.588,48. Hal ini akan sangat berdampak terhadap prediksi Belanja Daerah yang direncanakan pada Tahun 2019 yang akan mengalami perubahan cukup signifikan.

Rencana pendapatan yang berasal dari dana perimbangan untuk Tahun Anggaran 2019 masing-masing terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak & Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 267.406.094.897,78
- b. Dana Alokasi Umum Rp. 453.264.864.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus Rp. 295.644.015.657,90

3) Lain-lain Pendapatan yang sah

Pendapatan dari kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp. 243.705.611.257,59 yang bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp. 35.889.520.000,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi sebesar Rp. 100.258.360.711,17,- serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 107.557.730.546,42,-

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Dumai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya,

2. Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada penerimaan pendapatan, kelompok PAD dan jenis lain-lain pendapatan yang sah,
3. Alokasi dana perimbangan yang berasal dari DBH, DAU dan DAK dalam penyusunan APBD Tahun 2019 didasarkan pada alokasi dana perimbangan tahun 2018 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun 2017.

Target Pendapatan Daerah Tahun 2019 meliputi proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan daerah Tahun 2019 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan.
- c. Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- d. Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang

- dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (*investasi daerah*).
- e. Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PDAM sesuai peraturan perundang-undangan.
 - f. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penerimaan BLUD dianggarkan dalam jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.
 - g. Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
 - h. Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Dana Perimbangan

- a. Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2017.

- b. Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 107 Tahun 2017, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2019 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2019, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2017.
- c. Perhitungan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 107 Tahun 2017.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Alokasi Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2018, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
- b. Target pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi, didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil Tahun Anggaran 2017, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2018, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

c. Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan. Dalam hal penganggaran untuk bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran pemerintah provinsi atau kabupaten/kota penerima bantuan.

Proyeksi pendapatan APBD Tahun 2019 diatas didasari pada asumsi tidak ada perubahan kebijakan peraturan perundangan yang mengatur tentang pendapatan yang berakibat hilangnya obyek pendapatan seperti pembatalan perda berkaitan dengan pendapatan tidak terjadi kenaikan harga yang ekstrem seperti inflasi atau devaluasi serta kondisi perekonomian yang stabil.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam pencapaian target Penerimaan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Melakukan Intensifikasi maupun ekstensifikasi di Bidang Pendapatan;

2. Melakukan terobosan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pelimpahan kewenangan pusat ke daerah terkait dengan PAD;
3. Menyiapkan data-data penerimaan secara akurat sebagai bahan analisis potensi penerimaan atau PAD;
4. Melakukan Pengawasan dan Penertiban terhadap PAD;
5. Penegakan hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PAD;
6. Peningkatan pelayanan dengan perbaikan sistem dan prosedur yang lebih baik
7. Koordinasi antar OPD ditingkatkan sebagai upaya Peningkatan PAD
8. Koordinasi dengan BUMD dalam rangka optimalisasi pendapatan dari unit usaha.
9. Melakukan kajian terhadap regulasi yang mendorong peningkatan PAD.
10. Mendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor antara lain industri, infrastruktur, pariwisata dan lain-lain
11. Melakukan koordinasi dan Rekonsiliasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait dengan dana transfer
12. Penyempurnaan landasan hukum dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah
13. Sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah
14. Peningkatan kualitas aparat pajak dan retribusi daerah
15. Penyederhanaan dan modernisasi sistem Pajak dan retribusi daerah serta mengurangi kontak langsung wajib pajak dengan aparat.
16. Updating Basis Data pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data Pajak dan Retribusi Daerah
17. Pengkajian ulang penerapan tarif pajak dan retribusi daerah

18. Melaksanakan pemeriksaan dan penagihan pajak dan Retribusi daerah.
19. Pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang Pendapatan.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Riau dalam penyusunan APBD berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksanakannya prioritas-prioritas pembangunan di Kota Dumai Tahun 2019. Dengan kata lain prioritas pengalokasian APBD ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh kepentingan publik. Untuk menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran OPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan diperlukan sejumlah pembiayaan yang berasal dari penerimaan daerah melalui Pengeluaran langsung yang didistribusikan menurut fungsi Pemerintah Daerah. Tabel 3.5 berikut menggambarkan realisasi belanja daerah Kota Dumai tahun 2016-2017, Tahun 2018 dan Proyeksi/target tahun 2019 dan proyeksi Tahun 2020.

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kota Dumai Tahun 2016 s.d 2020

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Belanja Daerah Tahun 2018	Proyeksi/Target 2019	Proyeksi 2020
	Realisasi	Realisasi			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	490,261,650,988	475.370.758.398,00	507.020.227.369,00	534.470.000.000,00	530.989.700.000,00
Belanja Pegawai	482,812,209,388	462.005.443.318,00	495.892.458.089,00	501.970.000.000,00	506.989.700.000,00
Belanja Bunga	-				
Belanja Subsidi	-	2.442.348.000,00		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
Belanja Hibah	5,370,000,000.00	7.645.200.000,00	7.975.000.000,00	20.500.000.000,00	11.500.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial		1.032.500.000,00		4.500.000.000,00	5.000.000.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-				
Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2,055,441,600	2.245.267.080,00	2.652.769.280,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	24,000,000		500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
BELANJA LANGSUNG	624,711,201,859.61	727.884.628.675,93	635.355.729.405,98	1.009.546.535.686,00	1.039.341.767.001,00
Belanja Pegawai	157,875,160,174	150.930.292.060,00	72.922.893.106,00	211.886.013830,362	218.136.651.238,358
Belanja Barang dan Jasa	266,720,007,290.99	304.333.455.458,10	389.631.726.186,39	423.144.343.091,848	435.627.101.213,057
Belanja Modal	200,116,034,394.62	272.620.881.157,83	173.801.110.119,59	374.516.178.763,790	385.578.014.549,585

Untuk perkembangan belanja langsung yang telah masuk pada sistem pengimputan E-planning Kota Dumai berdasarkan program/kegiatan serta pagu usulan OPD dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.6 Rekap Perbandingan Belanja Langsung Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir Renja OPD Kota Dumai Tahun 2019

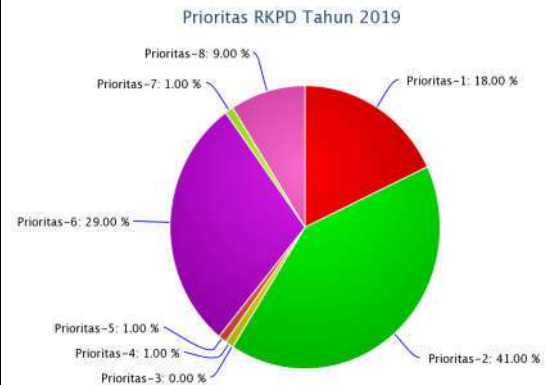
No	Pelaksana	Pagu	Rancangan Awal				Rancangan Akhir			
			Program	Kegiatan	Total Usulan (rp)	%	Program	Kegiatan	Total Usulan (rp)	%
1	Dinas Kesehatan	85.190.684.572	18	73	59.535.788.337	69,89%	18	73	85.190.684.572	100%
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.517.602.580	19	65	11.334.146.425	90,55%	19	65	12.517.602.580	100%
3	Dinas Perhubungan	23.748.166.943	13	51	20.396.276.926	85,89%	13	51	23.748.166.943	100%
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.878.583.136	9	33	4.550.583.136	93,28%	9	33	4.878.583.136	100%
5	Dinas Sosial	5.705.234.369	14	42	4.093.934.407	71,76%	14	42	5.705.234.369	100%
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.075.000.000	10	29	3.075.000.000	100%	10	29	3.075.000.000	100%
7	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat/ Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.283.834.700	11	34	4.092.158.400	77,45%	11	34	5.283.834.700	100%
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.121.076.000	10	29	3.121.076.000	100%	10	29	3.121.076.000	100%
9	Inspektorat	5.482.396.034	7	38	4.034.129.600	73,58%	7	37	5.482.396.034	100%
10	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	187.733.202.763	13	35	118.056.307.590	62,89%	13	35	187.733.202.763	100%
11	Sekretariat DPRD	55.052.039.809	8	41	22.477.200.000	40,83%	8	41	55.052.039.809	100%
12	Badan Kepegawaian,	7.152.761.900	8	36	5.839.398.000	81,64%	8	36	7.152.761.900	100%

No	Pelaksana	Pagu	Rancangan Awal				Rancangan Akhir			
			Program	Kegiatan	Total Usulan (rp)	%	Program	Kegiatan	Total Usulan (rp)	%
	Pendidikan dan Pelatihan/ Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
13	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	252.864.589.101	17	144	142.246.523.755	56,25%	17	144	252.864.589.101	100%
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	149.605.471.001	18	57	135.360.743.541	90,48%	18	57	149.605.471.001	100%
15	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	49.973.016.219	13	39	43.797.173.436	87,64%	13	38	49.973.016.219	100%
16	Dinas Lingkungan Hidup	20.728.435.836	15	43	20.728.435.836	100%	15	43	20.728.435.836	100%
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.385.965.765	11	43	4.266.288.383	97,27%	11	43	4.385.965.765	100%
18	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	12.850.723.520	12	32	3.698.971.147	28,78%	12	32	12.850.723.520	100%
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.472.385.740	9	38	6.583.215.740	62,86%	9	38	10.472.385.740	100%
20	Dinas Perdagangan	4.513.859.452	10	30	3.910.097.675	86,62%	10	30	4.513.859.452	100%
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	11.706.325.237	14	51	9.631.325.237	82,27%	14	51	11.706.325.237	100%
22	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	17.231.720.026	12	35	7.574.295.340	43,96%	12	35	17.231.720.026	100%
23	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	104.094.397.629	14	47	4.547.346.298	4,37%	14	44	104.094.397.629	100%

No	Pelaksana	Pagu	Rancangan Awal				Rancangan Akhir			
			Program	Kegiatan	Total Usulan (rp)	%	Program	Kegiatan	Total Usulan (rp)	%
24	Dinas Perikanan	3.954.330.763	10	39	3.628.070.917	91,75%	9	32	3.954.330.763	100%
25	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	4.025.525.665	14	37	4.025.525.665	100%	14	37	4.025.525.665	100%
26	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	13.264.183.740	6	59	12.468.332.716	94%	6	59	13.264.183.740	100%
27	Badan Pendapatan Daerah	13.303.800.000	6	58	10.971.995.713	82,47%	5	55	13.303.800.000	100%
28	Satuan Polisi Pamong Praja	5.183.680.000	11	39	4.595.171.200	88,65%	11	39	5.183.680.000	100%
29	Sekretariat Daerah Kota Dumai	65.042.735.149	40	131	62.696.279.750	96,39%	38	109	65.042.735.149	100%
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.755.110.640	12	34	5.755.110.640	100%	12	34	5.755.110.640	100%
31	Kec. Dumai Barat	5.629.351.360	16	52	3.048.637.550	54,16%	16	52	5.629.351.360	100%
32	Kec. Dumai Timur	5.704.759.133	16	54	3.584.365.802	62,83%	16	54	5.704.759.133	100%
33	Kec. Bukit Kapur	6.623.238.133	16	68	2.955.565.600	44,62%	16	66	6.623.238.133	100%
34	Kec. Sungai Sembilan	7.628.091.600	16	65	3.038.560.956	39,83%	16	63	7.628.091.600	100%
35	Kec. Medang Kampai	5.694.035.000	16	58	2.381.506.000	41,82%	16	58	5.694.035.000	100%
36	Kec. Dumai Kota	5.679.412.000	16	58	4.055.873.426	71,41%	15	57	5.679.412.000	100%
37	Kec. Dumai Selatan	5.923.372.000	16	57	3.611.201.084	60,97%	16	57	5.923.372.000	100%
-	Total	1.190.779.097.515	496	1.874	769.766.612.228	64,64%	491	1.832	1.190.779.097.515	100%

Table 3.7 dan Grafik 3.12 Ringkasan program dan kegiatan Tahun 2019 berdasarkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2019

No	Prioritas RKPD	Program	Kegiatan	Rp
1	Pengembangan Jaringan Pelayanan Air Bersih Dan Infrastruktur Dasar Masyarakat	32	158	211.252.864.728
2	Pengembangan Dan Pemerataan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan	25	179	492.735.670.344
3	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Penguatan Peluang Investasi Dengan Membuka Kesempatan Kerja Lokal Melalui Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Yang Sesuai Pasar Kerja Untuk Menurunkan Angka Pengangguran	6	17	2.267.786.000
4	Mengembangkan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Di Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Masyarakat	12	36	8.643.795.346
5	Penegembangan Koperasi Dan UMKM Serta Industri Kreatif Dan Pengentasan Kemiskinan	16	43	8.007.958.932
6	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan	52	1.321	340.363.993.579
7	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Sosial	14	32	15.088.232.917
8	Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Budaya Dan Pariwisata Serta Peningkatan Peran Pemuda Dan Prestasi Olahraga Kota Dumai	15	46	112.418.795.669
-	TOTAL	172	1.832	1.190.779.097.515



a. Belanja Daerah

Belanja daerah tahun anggaran 2019 berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang. Belanja daerah Tahun 2018 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Dumai, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintah daerah menetapkan target kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program dan kegiatan. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Terutama terhadap target kinerja harus mempedomani Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021.

b. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta penanggulangan kemiskinan;
2. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Penyusunan program/kegiatan merupakan kebutuhan riil dengan dianalisis segi kewajaran biaya dikaitkan dengan capaian kinerja Perubahan RPJMD 2016-2021 yang belum tercapai;
5. Mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah Tahun 2019;
6. Meningkatkan alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan, menjadi

10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat;

7. Pengalokasian Belanja terhadap suatu kegiatan dilaksanakan secara proporsional terhadap output yang ingin dicapai;
8. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap budget sharing antara pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Propinsi Riau;
9. Penganggaran honorarium dalam kegiatan sangat selektif dan sebahagian besar dihapuskan dan perjalanan dinas diatur tersendiri (Perwako) dibatasi frekuensi, waktu dan jumlah orang;
10. Program/kegiatan diupayakan tidak tumpang tindih dan disesuaikan dengan Tupoksi OPD;
11. Kebijakan pada belanja barang dan jasa yang diterapkan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - a) Penetapan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar menyesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi sisa persediaan tahun anggaran 2019. Kebutuhan riil dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, dan volume pekerjaan setiap OPD;
 - b) Alat Tulis Kantor (ATK) disetiap OPD ditempatkan pada Sekretariat OPD tersebut;
 - c) Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga atau masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa;
 - d) Pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan OPD dan dilakukan evaluasi terhadap inventaris

barang yang masih baik kondisinya maupun umur ekonomisnya;

- e) Melakukan pembatasan rapat-rapat diluar kantor, workshop, seminar dan lokakarya;
- f) Penganggaran untuk mengikuti pelatihan hanya diperkenankan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga resmi yang Akreditasi dan Kompetensinya sudah diakui.

12. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan berimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan.

13. Sesuai Permendagri Nomor 59 tahun 2007, penganggaran belanja modal harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan/dimanfaatkan;

14. Dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan, agar mempedomani/mempertimbangkan Standar Harga dan Standar Biaya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Selain hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Dumai juga telah mengajukan usulan belanja kegiatan pembangunan untuk Tahun 2019 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan (Bankeu) provinsi Riau. Usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari DAK telah disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Kementrian terkait, sedangkan usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari Bankeu Provinsi Riau telah disampaikan melalui tahapan dan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah provinsi Riau.

Adapun total usulan DAK tahun 2019 yang diajukan pemerintah Kota Dumai ke pemerintah pusat adalah sebesar Rp 585,547.21 (Juta),- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8 Rekap Perbandingan usulan belanja pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus T.A 2019

NO	USULAN PEMBANGUNAN (DAK)	PAGU DAK		PERBANDINGAN	KET
		2018	2019		
1	2	3	4	5	6
1	DAK REGULER	290,799.33	363,330.72	72.531,39	(Juta)
2	DAK PENUGASAN	255,351.00	150,189.96	(105.161,04)	(Juta)
3	DAK AFIRMASI	305,441.19	72,026,52	(233.414,67)	(Juta)
TOTAL DAK		851,591.52	585,547.21	266.044,31	(Juta)

Sumber : <http://e-musrenbang.bappenas.go.id>

Dengan rincian usulan belanja pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

Table 3.9 Lampiran rekapitulasi usulan DAK Kota Dumai tahun 2019

NAMA BIDANG/SUB-BIDANG/MENU KEGIATAN	JUMLAH USULAN	NILAI USULAN (RP.)
<i>Air Minum</i>	3	1.984.500.000,00
Air Minum Perkotaan	3	1.984.500.000,00
Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum (Reguler)	3	1.984.500.000,00
<i>Industri Kecil Menengah</i>	27	2.703.500.000,00
Industri Kecil Menengah	27	2.703.500.000,00
Revitalisasi Sentra IKM	26	2.503.500.000,00
Pembangunan Sentra IKM	1	200.000.000,00
<i>Jalan</i>	24	100.702.500.000,00
Jalan	24	100.702.500.000,00
Peningkatan (struktur dan kapasitas) Jalan/jembatan (Reguler)	24	100.702.500.000,00
<i>Kelautan dan Perikanan</i>	16	7.753.298.134,12
Perikanan Kabupaten/Kota	16	7.753.298.134,12
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)	12	7.536.720.432,00
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota)	4	216.577.702,12
<i>Kesehatan dan KB</i>	107	45.541.360.000,00
Keluarga Berencana (Reguler)	34	6.694.000.000,00
Pembangunan/Alih Fungsi Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi	1	200.000.000,00
Pengadaan Mobil Unit Penerangan KB	1	800.000.000,00
Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB	1	750.000.000,00

NAMA BIDANG/SUB-BIDANG/MENU KEGIATAN	JUMLAH USULAN	NILAI USULAN (RP.)
Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB	4	776.000.000,00
Pengadaan Sarana Pendataan	14	535.000.000,00
Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB	10	2.440.000.000,00
Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan	3	1.193.000.000,00
Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan (Reguler)	3	6.500.000.000,00
Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi Kab/Kota	1	1.500.000.000,00
Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kab/Kota	2	5.000.000.000,00
Pelayanan Kesehatan Dasar (Reguler)	70	32.347.360.000,00
Penyediaan Sarana Puskesmas non Afiriasi	4	23.550.000.000,00
Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas non Afiriasi	31	2.806.360.000,00
Penyediaan Prasarana Puskesmas non Afiriasi	35	5.991.000.000,00
<i>Pariwisata</i>	16	5.592.800.000,00
Pariwisata	16	5.592.800.000,00
Peningkatan Amenitas Pariwisata (Reguler)	2	1.250.000.000,00
Pengembangan Daya Tarik Wisata (Reguler)	14	4.342.800.000,00
<i>Pendidikan</i>	990	173.136.468.282,25
SD	357	47.243.000.000,00
Pembangunan Prasarana Belajar SD	81	20.452.000.000,00
Pengadaan Sarana Belajar SD	178	10.132.000.000,00
Rehabilitasi Prasarana Belajar SD	98	16.659.000.000,00
SKB	18	5.685.000.000,00
Pembangunan Prasarana Belajar SKB	3	1.870.000.000,00
Pengadaan Sarana Belajar SKB	3	1.180.000.000,00
Sarana dan Prasarana PAUD (hanya untuk TK Negeri, mohon cek referensi)	12	2.635.000.000,00
SMP	155	19.831.240.000,00
Pembangunan Prasarana Belajar SMP	16	6.303.390.000,00
Pengadaan Sarana Belajar SMP	132	10.441.200.000,00
Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP	7	3.086.650.000,00
Perpustakaan Daerah	456	8.421.390.282,25

NAMA BIDANG/SUB-BIDANG/MENU KEGIATAN	JUMLAH USULAN	NILAI USULAN (RP.)
Pembangunan gedung layanan perpustakaan	52	7.935.941.035,00
Pengembangan Koleksi Perpustakaan	404	485.449.247,25
Olahraga	4	91.955.838.000,00
Pembangunan baru prasarana GOR dan penyediaan sarannya	4	91.955.838.000,00
<i>Pertanian</i>	31	5.668.500.000,00
<i>Pertanian Kabupaten/Kota</i>	31	5.668.500.000,00
Pembangunan/Perbaiki Sumber-Sumber Air	6	250.000.000,00
Pembangunan/Perbaiki Jalan Pertanian	4	1.000.000.000,00
Pembangunan/Perbaiki Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya	11	2.513.500.000,00
Pembangunan/Perbaiki Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	7	1.255.000.000,00
Pembangunan/Perbaiki Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	3	650.000.000,00
<i>Perumahan dan Permukiman</i>	15	7.400.000.000,00
<i>Perumahan dan Permukiman (Reguler)</i>	15	7.400.000.000,00
Bantuan Stimulan Pembangunan Baru, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai pengganti rumah rusak total/di atas kavling tanah matang untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan	5	3.500.000.000,00
Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan	10	3.900.000.000,00
<i>Sanitasi</i>	25	12.847.800.000,00
<i>Air Limbah</i>	25	12.847.800.000,00
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan (Reguler)	11	3.497.800.000,00
Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman dan/atau Perkotaan (Reguler)	14	9.350.000.000,00
Sub Total Reguler	1254	363.330.726.416,37

Afirmasi:

NAMA BIDANG/SUB-BIDANG/MENU KEGIATAN	JUMLAH USULAN	NILAI USULAN (RP.)
<i>Air Minum</i>	8	5.292.000.000,00
Air Minum Perdesaan	8	5.292.000.000,00
Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum (Afirmasi)	8	5.292.000.000,00
<i>Pendidikan</i>	17	9.625.660.000,00
SD	10	5.280.000.000,00
Pembangunan Rumah Dinas Guru SD (Afirmasi)	10	5.280.000.000,00
SMP	7	4.345.660.000,00
Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP (Afirmasi)	7	4.345.660.000,00
<i>Perumahan dan Permukiman</i>	36	17.666.866.000,00
Penyediaan Rumah Swadaya (Afirmasi)	36	17.666.866.000,00
Bantuan Stimulan Pembangunan Baru, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai pengganti rumah rusak total/di atas kavling tanah matang untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan	10	7.000.000.000,00
Bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan bagi kab/kota yang telah melaksanakan pembangunan rumah swadaya secara berkelompok melalui DAK pada tahun sebelumnya	16	6.766.866.000,00
Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan	10	3.900.000.000,00
<i>Sanitasi</i>	24	11.847.800.000,00
Air Limbah	24	11.847.800.000,00
Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman (Afirmasi)	11	7.650.000.000,00
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perdesaan (Afirmasi)	13	4.197.800.000,00
<i>Transportasi</i>	9	27.594.201.325,60
Transportasi	9	27.594.201.325,60
Moda Transportasi Perairan	1	1.400.000.000,00
Moda Transportasi Darat	6	6.000.000.000,00
Jalan Non Status Penghubung Antar Desa	1	11.893.238.325,60
Dermaga Rakyat	1	8.300.963.000,00
Sub Total Afirmasi	94	72.026.527.325,60

Penugasan:

NAMA BIDANG/SUB-BIDANG/MENU KEGIATAN	JUMLAH USULAN	NILAI USULAN (RP.)
<i>Air Minum</i>	1	367.500.000,00
Air Minum Perkotaan	1	367.500.000,00
Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun (Penugasan)	1	367.500.000,00
<i>Jalan</i>	12	89.202.960.000,00
Jalan	12	89.202.960.000,00
Peningkatan (struktur dan kapasitas) Jalan/Jembatan (Penugasan)	12	89.202.960.000,00
<i>Kesehatan dan KB</i>	24	53.629.500.000,00
Pengendalian Penyakit (Penugasan)	10	550.000.000,00
Penyediaan Cryoterapi	10	550.000.000,00
Pelayanan Kesehatan Rujukan (Penugasan)	14	53.079.500.000,00
Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional yang belum memenuhi Standar Kelas serta RS Daerah Prioritas Pariwisata	1	30.000.000.000,00
Penyediaan Aiat Kesehatan RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional yang belum memenuhi Standar Kelas serta RS Daerah Prioritas Pariwisata	12	22.799.500.000,00
Penyediaan Prasarana RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional yang belum memenuhi Standar Kelas serta RS Daerah Prioritas Pariwisata	1	280.000.000,00
<i>Pasar</i>	3	6.000.000.000,00
Pasar	3	6.000.000.000,00
Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat, khususnya Tipe D	3	6.000.000.000,00
<i>Sanitasi</i>	3	990.000.000,00
Air Limbah	3	990.000.000,00
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan (Penugasan)	3	990.000.000,00
Sub Total Penugasan	43	150.189.960.000,00

c. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2017.

1. Kebijakan terkait Belanja Pegawai meliputi sebagai berikut :
 - a) Penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU tahun 2019 dan

- memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketigabelas;
- b) Menganggarkan belanja pegawai dalam APBD 2019 untuk mengantisipasi pengangkatan CPNS Kota Dumai sesuai dengan kebutuhan dan formasi pegawai;
 - c) Memperhitungkan *acress* sebesar maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk mengantisipasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai.
 - d) Penganggaran asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2015 tentang kecelakaan kerja dan kematian bagi .
 - e) Penganggaran tambahan penghasilan untuk PNS/CPNS baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
2. Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai serta belanja penunjang kegiatan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 4. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi

pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dibidang hibah dan bantuan sosial;

5. Bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dibidang bantuan keuangan kepada partai politik.
6. Kebijakan terkait Belanja Hibah pada tahun anggaran 2019:
 - a) Pemberian Hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan pemerintah atau semi pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 23 Tahun 2016 tentang tatacara pemberian Hibah dan Bansos serta Surat Edaran Walikota Dumai Nomor 240/97/Adm-Kesra tanggal 30 Januari 2017.
 - b) Pemberian hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
 - c) Penentuan penerima Hibah dilakukan secara selektif dan rasional serta tidak wajib, tidak mengikat serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d) Belanja Hibah kepada instansi vertikal menggunakan mekanisme penganggaran dan pemberiannya mengacu pada pengelolaan keuangan daerah, bagi instansi penerima dalam

pelaksanaan dan pertanggungjawabannya memperhatikan PMK no. 168/PMK.07/2008 tentang hibah daerah.

7. Kebijakan terkait Bantuan Sosial pada tahun 2019:

- a) Pemberian bantuan sosial diberikan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 23 Tahun 2016 tentang tatacara pemberian Hibah dan Bansos serta Surat Edaran Walikota Dumai Nomor 240/97/Adm-Kesra tanggal 30 Januari 2017.
- b) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diperuntukkan membantu korban kebakaran, banjir dan kejadian bencana tak terduga lainnya yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- c) Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun diupayakan semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrument pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar Dana APBD dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya

diskriminasi pengalokasian APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

8. Kebijakan terkait Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2019:

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam program dan kegiatan termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-

kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel 3.8. sebagai berikut:

Tabel 3.10. Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah
Kota Dumai Tahun 2016 - 2020

No	Jenis Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018	Proyeksi / Target pada Tahun 2019	Proyeksi Pada tahun 2020
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	95.078.456.348,70	41.896.118.427,21	-	-	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	90.000.000	50.000.000	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Piutang Daerah					
	Jumlah penerimaan pembiayaan	95.166.456.348,70	41.946.118.427,21	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan					
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Lainnya					

No	Jenis Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018	Proyeksi / Target pada Tahun 2019	Proyeksi Pada tahun 2020
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang					
3.2.4	Pemberian Pinjaman daerah					
Jumlah pengeluaran pembiayaan						
Jumlah pembiayaan NETTO		95.166.456.348,70	41.946.118.427,21			

a. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

b. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

c. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk meningkatkan investasi jangka panjang pemerintah daerah pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai yang pada intinya mampu menambah *deviden* (keuntungan) bagi Pemerintah Kota Dumai dan disalurkan pembiayaan dana bergulir kepada masyarakat atau lembaga ekonomi tertentu.



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 Kota Dumai merupakan penjabaran Perubahan RPJMD kota Dumai 2016-2021. Oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019 mengacu pada pencapaian visi dan misi Perubahan RPJMD 2016-2021 dan sasaran pokok serta kebijakan periode tahun 2016-2020 yang tertuang pada dokumen RPJPD kota Dumai Tahun 2005-2025.

Selain pertimbangan dokumen tersebut diatas, pemerintah kota Dumai juga mempedomani rancangan prioritas dan pembangunan daerah provinsi Riau pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2019, RKP tahun 2019 yang merupakan penjabaran RPJMN tahun 2015-2019.

Pertimbangan lain yang tak kalah penting digunakan adalah hasil evaluasi pencapaian RKPD tahun lalu, Pokok-pokok Pikiran Dewan, Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Dumai.

4.1.1. Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

Mempedomani Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka perubahan RPJMD kota Dumai Tahun 2016-2021 mempunyai visi sebagai berikut:

***“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada
Tahun 2021”***

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1) Masyarakat Dumai yang makmur: keadaan masyarakat kota Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan bathin

Arti kata :

- a) Layak : wajar; pantas; patut ; mulia; terhormat
- b) Lahir : keduniaan; jasmani
- c) Bathin : sesuatu yang terdapat di dalam hati; sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya)

- 2) Masyarakat Dumai yang madani : Keadaan masyarakat kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi berperadaban

Arti kata:

- a) Nilai : sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya
- b) Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu;
- c) Hukum : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
- d) Berperadaban: yang memiliki kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa;

- 3) Tahun 2021 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2016-2021 yang

realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

4.1.2. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan
4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
5. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan
6. Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah.
7. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu.

Misi 1 : Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Misi ini ditempuh untuk meningkatkan dan mendorong tersedianya kebutuhan air bersih bagi masyarakat kota Dumai secara merata dan terjangkau sebagai pemenuhan salah satu kebutuhan hajat hidup (biologis) utama masyarakat. Penyediaan air bersih bagi masyarakat kota Dumai merupakan harapan masyarakat Dumai sampai saat ini, dimana diharapkan cakupan pelayanan air bersih untuk masyarakat kota Dumai dapat menjangkau seluruh bagian wilayah kota yang akan dilakukan secara bertahap. Penyediaan air

bersih juga merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Dumai. Penyediaan air bersih dilakukan dengan peningkatan infrastruktur air bersih yang dikelola oleh Perangkat Daerah, Badan Usaha maupun bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota Dumai. Peningkatan infrastruktur air bersih tersebut meliputi peningkatan infrastruktur pengolahan air baku, pemeliharaan sumber-sumber air baku dan jaringan perpipaan maupun non perpipaan untuk distribusi air bersih kepada masyarakat kota Dumai.

Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastuktur dasar permukiman dan perkotaan ini merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi dalam menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan (*Amenity*) dan membuka akses yang dapat menghubungkan antar daerah maupun antar wilayah sehingga menjamin kelancaran arus mobilitas orang maupun barang dan jasa khususnya pada sektor perdagangan, Usaha Kecil Menengah, perkebunan, pertanian khususnya bagi investor untuk berinvestasi di Kota Dumai sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industri. Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan sumber pembangkit listrik; perluasan jaringan telekomunikasi; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; drainase; serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan diseluruh kelurahan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang

memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional. Hal yang sangat penting lainnya adalah adanya kesesuaian fungsi ruang dengan peruntukannya sehingga diharapkan prinsip *sustainable development* akan menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur kota Dumai kedepannya. Disamping itu misi ini juga ditempuh melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas *public space* yang lebih nyaman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan pesatnya pembangunan serta terbukanya arus globalisasi sehingga dibutuhkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing global.

Globalisasi ekonomi telah meningkatkan persaingan antar negara-negara dalam suatu sistem ekonomi internasional. Mulai berlakunya kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara mitra terkait kawasan perdagangan bebas, Masyarakat ekonomi Asean dan kesepakatan lainnya mengharuskan kita mempersiapkan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing secara global mengharuskan masyarakat Dumai mampu menjadi pelaku utama didaerah sendiri.

Oleh sebab itu misi ini ditempuh melalui peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan meningkatkan kualitas

derajat kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan dan pelatihan yang merata dan terjangkau serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Dumai, sehingga dan dapat bersaing dalam menghadapi dinamika kompetisi global sebagai akibat kemajuan IPTEK dan perekonomian dunia. Misi ini mengupayakan kualitas pembangunan kesehatan manusia dan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ini juga ditempuh untuk mempersiapkan masyarakat Dumai memiliki kemampuan ketrampilan khusus guna mengisi kesempatan dan peluang kerja yang tersedia sebagai basis dan pintu gerbang arus berkembang sektor industri, perdagangan dan kemaritiman.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional tentu akan berpengaruh dalam pada kinerja pegawai. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia sangat perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan mampu meningkatkan kualitas kinerja sehingga akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.

Misi 3: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan

Misi ini akan ditempuh untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan masyarakat. Misi ini akan memaksimalkan Sektor-sektor informal yang kreatif dan inovatif dalam skala UMKM diharapkan mampu menjadi alternatif membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menciptakan kemandirian secara swadaya didalam masyarakat.

Disamping hal tersebut, Koperasi, UMKM dan Industri kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang

efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat yang berdampak pada menurunnya tingkat angka kemiskinan.

Selanjutnya, dalam pengentasan kemiskinan kebijakan pengentasan kemiskinan berpedoman pada sebuah kebijakan yang mampu memberikan ruang gerak, fasilitas publik serta didasarkan pada kemandirian yaitu memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi tumbuhnya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri, Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya yang serius strategi penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta menciptakan pembangunan yang inklusif yang disinergiskan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Dumai

Misi 4: Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga akan ditopang dengan peningkatan partisipasi elemen-elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dalam wujud partisipasi dalam proses pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan sebagai pihak yang melakukan sosial kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah.

Misi ini untuk mencapai prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang ditandai dengan tercapainya beberapa kondisi berikut:

1. Terwujudnya organisasi pemerintahan yang ramping struktur, efektif, efisien, rasional, proporsional, transparan dan menganut asas desentralisasi pengambilan keputusan
2. Terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas. Meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap mental, cara berpikir, moral dan akhlak.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Disinilah parameter objektif dari sejauh mana aparatur mampu melayani masyarakatnya dengan baik.
4. Mencegah dan memberantas KKN melalui transparansi pengambilan keputusan, pengawasan yang intensif, dan penerapan sanksi yang konsisten. Dan yang terpenting adalah adanya suatu keteladanan dari atasan kepada bawahan.
5. Terwujudnya netralitas birokrasi dalam konteks politik.

Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan

Misi ini ditempuh dengan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan produktifitas serta keunggulan sektor pertanian, perikanan dan perkebunan agar mampu memenuhi

kebutuhan lokal dan menjadi sektor basis kota Dumai sehingga mampu menambah pendapatan masyarakat khususnya petani, pembudidaya ikan, nelayan dan peternak.

Terkait dengan hal tersebut, misi ini juga untuk meningkatkan swasembaya dan ketahanan pangan yaitu kondisi dimana terpenuhinya Pangan bagi masyarakat kota Dumai, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Kemampuan dalam memproduksi bahan Pangan utama diharapkan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Misi 6 : Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa, Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah.

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip *cooperative* (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antar wilayah dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional.

Misi ini ditempuh untuk meningkatkan citra kota dari *investability* (kondusif sehingga atraktif bagi kalangan pelaku bisnis), *visitability* (kota yang selalu dikunjungi karena kesan akan situasi dan pelayanannya) dan aspek *liveability* (menjadi tempat tinggal yang

nyaman), sehingga menjadikan kota Dumai sebagai kota tujuan bagi masyarakat lokal maupun regional. Misi ini akan dicapai melalui peningkatan citra kota secara keseluruhan baik dari segi fisik kota, pelayanan publik dan *amenity*

Misi 7 : Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis Serta Berbasis Budaya Melayu

Misi ini mengandung makna bahwa pembangunan sebuah kota tidak lepas dari adanya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur (fisik) dan pembangunan sumber daya manusia yang ada didalamnya. Misi ini ditempuh sebagai upaya untuk sumberdaya manusia masyarakat dumai agar memiliki kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang sehat dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pemantapan aspek kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.

Misi ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan kejuruan dan politeknik guna mengisi peluang kerja.

Budaya Melayu akan menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan di Kota Dumai. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya

budaya asing di tanah Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya Melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Berdasarkan analisis dari pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 di atas maka diperlukan strategi yang mewujudkan visi pembangunan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada 7 (Tujuh) misi sebagaimana yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Dumai pada masa 5 (Lima) tahun mendatang. Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih;
 - b) Meningkatnya infrastruktur perkotaan;
 - c) Meningkatnya kualitas lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan sasaran :
 - a. meningkatnya partisipasi pendidikan;
 - b. meningkatnya angka kelulusan pendidikan dasar;
 - c. meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran:
 - a. Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat;
 - b. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

4. Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga dengan sasaran meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran :
 - a) Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat;
 - b) Menurunnya persentase penduduk miskin;
 - c) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk;
 - d) Meningkatnya lapangan kerja.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik;
 - b) Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya pendapatan petani;
 - b) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah;
 - b) Meningkatnya investasi di Kota Dumai;
9. Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar;
 - a) Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar.

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
 Visi : Terwujudnya masyarakat dumai yang makmur dan madani pada
 Tahun 2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	1 Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	1 Meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih 2 Meningkatkan infrastruktur perkotaan 3 Meningkatkan kualitas lingkungan
2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing	1 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan 2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 3 Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	1 Meningkatkan partisipasi pendidikan 2 Meningkatkan angka kelulusan Pendidikan dasar 3 Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar 1 Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat 2 Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 1 Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga
3	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan	1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1 Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat 2 Menurunnya persentase penduduk miskin 3 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk 4 Meningkatkan lapangan kerja
4	Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan	1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1 Meningkatkan kualitas kelembagaan pelayanan publik 2 Meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
5	Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan	1 Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal	1 Meningkatnya pendapatan petani 2 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
6	Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah	1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	1 Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah 2 Meningkatnya investasi di Kota Dumai
7	Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu	1 Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini	1 Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar 2 Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Dumai

4.1.4. Sasaran pokok dan Arah Kebijakan Tahun Ke-3 Tahapan Lima Tahun (2016-2020) RPJP Kota Dumai Tahun 2005-2025

Arah pembangunan daerah Kota Dumai dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah diwujudkan dalam strategi yang diperlukan untuk mencapai visi Kota Dumai di tahun 2025. Sebagaimana diungkapkan dalam skenario pembangunan jangka panjang Kota Dumai yang menyatakan ingin menuju dan mencapai : *“TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG KOKOH, DENGAN MASYARAKAT YANG BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU, MENUJU DUMAI MADANI YANG HIJAU”*.

Sasaran pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah pencapaian akhir dari visi dan misi pada akhir periode ke-20 (dua puluh). Sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam misi pembangunan

jangka panjang daerah dapat diterjemahkan prioritasnya masing-masing pada setiap tahapan pembangunan lima tahunan melalui penetapan sasaran pokok 5 (lima) tahunan. Sasaran pokok merupakan instrumen pengukuran kinerja untuk memahami dengan baik bagaimana tema atau arah kebijakan pembangunan daerah dapat dipahami target kinerjanya. Sasaran pokok dikelompokkan berdasarkan tahapan-tahapan pembangunan jangka panjang dalam empat periode pembangunan Kota Dumai 2005-2025, yang selanjutnya harus menjadi acuan dalam penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah serta pedoman dalam penyusunan RPJMD periode berkenaan.

Arah kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan arahan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan kapan suatu indikator kinerja sasaran harus dicapai. Pencapaian sasaran pokok dilakukan secara bertahap dalam empat periode lima tahunan pembangunan sesuai arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD bertahap. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Dumai 2005-2025 disusun dalam tahapan pembangunan yang mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Berikut ini adalah sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Dumai 2005-2025.

Tabel 4.2 Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang kota Dumai tahapan lima tahun ketiga (RPJMD 2016-2021) dari RPJPD kota Dumai Tahun 2005-2025

Misi 1: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan lima tahun ke-3 (2016-2020)	Pengelolaan kawasan industri dan penyiapan perwujudan KEK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan terlaksananya kerjasama dalam pengembangan kawasan industri 2. Meningkatkan kawasan industri menjadi kawasan ekonomi khusus
	Semakin berkembangnya kegiatan industri, perdagangan, dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan 2. Mengembangkan kemitraan antara usaha kecil menengah dengan usaha besar 3. Mengembangkan agrobisnis 4. Mengembangkan kegiatan jasa kepelabuhanan 5. Mengembangkan kegiatan perdagangan yang melayani pasar lokal dan regional 6. Mengembangkan kerjasama dunia usaha dengan koperasi dan lembaga keuangan
	Meningkatnya investasi dari investor dalam maupun luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan kualitas pelayanan perizinan 2. Meningkatkan promosi dan kerjasama lintas regional 3. Mendorong terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat terhadap investor
	Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan hubungan harmonis antara sektor tenaga kerja, sektor penyedia lapangan kerja dan pemerintah 2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global
Misi 2: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjati diri Melayu		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan lima tahun ke-3 (2016-2020)	Meningkatnya mutu dan kreatifitas masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merevitalisasi kebijakan pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah 2. Mengembangkan pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat 3. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja 4. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 5. Mewujudkan kemudahan akses, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh

Misi 1: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
		pendidikan berkualitas dan terjangkau di semua jenjang
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan profesionalitas tenaga pelayanan kesehatan untuk dapat bersaing dengan tenaga asing 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ibu hamil dan bayi lahir sehat 3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan fasilitas kesehatan 4. Meningkatkan fasilitas pendukung dan pelayanan tenaga medis 5. Mengoptimalkan perilaku hidup sehat di berbagai lapisan masyarakat 6. Mengembangkan kebijakan dan pelaksana pembangunan berwawasan kesehatan 7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan kesehatan 8. Terciptanya kualitas hidup perempuan dan anak
	Berkembangnya karakter masyarakat yang mandiri dan berbudi pekerti luhur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam melaksanakan pendidikan keagamaan sebagai dasar pembentukan karakter bangsa yang luhur 2. Merevitalisasi kebijakan pendidikan keagamaan dan karakter bangsa yang mendukung pembentukan perilaku yang berbudi pekerti luhur
	Pengelolaan kerjasama yang mendorong berkembangnya nilai dan budaya Melayu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama ASEAN dan "SIJORI" (Singapura-Johor-Riau) untuk bidang kebudayaan Melayu 2. Merevitalisasi kebijakan yang terkait seni budaya Melayu 3. Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pengembangan dan aktualisasi seni budaya Melayu
Misi 3: Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan lima tahun ke-3 (2016 –	Meningkatnya ketersediaan sumber air baku untuk air bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya air

Misi 1: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
2020)	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kualitas dan kuantitas jalan 2. Mengembangkan dan menjaga kualitas infrastruktur transportasi 3. Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur transportasi 4. Meningkatkan jalan akses lokal antara pusat-pusat
	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pemenuhan infrastruktur ketenagalistrikan 2. Mengembangkan energi dan mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan 3. Meningkatkan sarana penerangan jalan umum (Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah/SKUTM dan Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah/SKUTR) pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN
	Meningkatnya pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman 2. Meningkatkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas 3. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih, dan air limbah domestik 4. Mengembangkan sarana prasarana penunjang untuk mewujudkan kebersihan lingkungan 5. Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
	Meningkatnya dukungan pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan memanfaatkan jaringan telekomunikasi dan informatika sesuai dengan fungsi dan keunggulannya
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas sosial dan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perluasan pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai
Misi 4: Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan lima tahun ke-3 (2016.-2020)	Meningkatnya sumberdaya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan upaya pengendalian pelaksanaan lima syarat profesionalisme 2. Merevitalisasi kebijakan yang terkait profesionalisme pegawai di kota Dumai

Misi 1: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	di bidangnya	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan kinerja pegawai melalui pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan 4. Memantapkan sistem organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien 5. Mewujudkan penyempurnaan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) pemerintahan daerah yang efektif dan efisien 6. Memantapkan pembinaan kompetensi, kinerja, serta kehandalan aparatur pemerintahan daerah secara bertahap dan berkelanjutan 7. Pemantapan kapasitas kepemimpinan dalam mencapai <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>
	Meningkatnya akses pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem pelayanan publik 2. Memantapkan pelayanan publik yang prima. 3. Menyalurkan aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik melalui forum formal
Misi 5: Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang bijaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan penelitian tentang pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan 2. Meningkatkan pembangunan Kota Dumai yang memenuhi syarat lingkungan hidup berkelanjutan 3. Merevitalisasi kebijakan yang terkait dengan peningkatan kondisi lingkungan hidup di Dumai menuju lingkungan lestari
Tahapan lima tahun ke-3 (2016-2020)	Meningkatnya peran perangkat pengelolaan/kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan peran pelaku usaha dan masyarakat dalam pencapaian pembangunan kota yang lestari 2. Merevitalisasi kebijakan yang terkait partisipasi masyarakat dalam peningkatan kondisi lingkungan hidup 3. Memperkuat kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelolaan sumber daya air di kawasan hutan lindung 4. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan 5. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam

Misi 1: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
		pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
	Meningkatnya peraturan Penataan Ruang yang tegas dan konsisten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sistem peradilan lapangan untuk pembangunan yang sesuai RTRW 2. Meningkatkan ketaatan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat tentang aturan RTRW 3. Meningkatkan upaya pelaksanaan pengendalian yang tertib sesuai RTRW 4. Merevitalisasi kebijakan yang terkait sistem implementasi dan pengendalian tata ruang bagi birokrasi dan masyarakat pelaku tata ruang

4.1.5. Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2019

Berdasarkan Rancangan awal RKPD Propinsi Riau Tahun 2019, adapun prioritas pembangunan provinsi Riau Tahun 2019 yang disampaikan pada saat Musrenbang RKPD Kota Dumai adalah sebagai berikut:

- 1) Penurunan Tingkat Kemiskinan
- 2) Menumbuhkembangkan Industri Manufaktur
- 3) Meningkatkan Produktivitas Pertanian
- 4) Pengembangan Pariwisata dan Pelestarian Nilai – Nilai Budaya
- 5) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Perbatasan

a. Sasaran Daerah Provinsi Riau

Tabel. 4.3. Sasaran Daerah Provinsi Riau

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur					
1.1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum	93,84
			2	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	1.665,93

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET
			3	Rasio Elektrifikasi	87,33
Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Pendidikan					
2.1	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,72
			2	Angka harapan lama sekolah (Tahun)	13,66
Misi 3 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan					
3.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka harapan hidup (Tahun)	71,47
Misi 4 : Menurunkan Kemiskinan					
4.1	Menurunkan Kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat	1	Tingkat kemiskinan (%)	6,20
			2	Gini Rasio	0,34
		3	Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,60	
Misi 5 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal Dan Terpercaya Serta Pemantapan Kehidupan Politik					
5.1	Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik	Terwujudnya <i>good governance and clean goverment</i>	1	Opini BPK	WTP
			2	Nilai akuntabilitas	A
			3	Skor LPPD	3,82
			4	Nilai keterbukaan informasi	53,47
			5	Nilai Reformasi Birokrasi	40,59
Misi 6 : Pembangunan Masyarakat Yang Berbudaya Melayu, Beriman Dan Bertaqwa					
6.1	Membangun masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa	Lestarnya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal	1	Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI Karya Seni)	100,00
			2	Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum	300,00

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET
				Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah)	
		Meningkatnya kerukunan hidup beragama	1	Persentase penyelesaian konflik antar umat beragama	100%
Misi 7 : Memperkuat Pembangunan Pertanian Dan Perkebunan					
7.1	Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan	Meningkatnya pembangunan sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan)	1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	25,12
			2	Nilai Tukar Petani (NTP)	107,86
Misi 8 : Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pariwisata					
8.1	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,99
			2	Jumlah kunjungan wisatawan asing	88.044
Misi 9 : Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan					
9.1	Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.	Meningkatnya nilai investasi	1	Nilai investasi PMDN (milyar rupiah)	11.523,46
			2	Nilai investasi PMA (juta USD)	1.119,90
		Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,91

Sumber : Dokumen RPJMD Provinsi Riau

4.1.6. Skala Prioritas penyusunan RKPD Tahun 2019 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019

Sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (4), pasal 265 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk menciptakan sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat, maka sasaran penyusunan RKPD tahun 2019 berdasarkan penyampaian pada saat Musrenbang RKPD Kota Dumai oleh Bappeda Provinsi Riau diarahkan pada :

Gambar. 4.1. Prioritas Pemerintah Pusat tahun 2019



1. Pembangunan Manusia terdiri dari :
 - a. Percepatan Pengurangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
 - c. Pemerataan Layanan Pendidikan berkualitas
 - d. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif
 - e. Percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja

2. Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Terdiri dari:
 - a. Meningkatkan Konektivitas
 - b. Mengembangkan telekomunikasi dan informatika
 - c. Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pengembangan pembangunan desa
 - d. Melaksanakan pembangunan daerah afirmasi
 - e. Melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu hilir perikanan
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi terdiri dari:
 - a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi
 - b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan pemerintah daerah
 - c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional
 - d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air terdiri dari :
 - a. Pembangunan dan Peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa
 - b. Reabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa
 - c. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2019

Tabel 4.4 Perbandingan Prioritas Tahun 2018 dan 2019

Tahun 2018	Tahun 2019
1. Penguatan dan penataan jaringan pelayanan infrastruktur dasar masyarakat	1. Pengembangan Jaringan Pelayanan Air Bersih Dan Infrastruktur Dasar Masyarakat.
2. Menurunkan angka pengangguran melalui optimalisasi peluang investasi dengan membuka kesempatan kerja lokal dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja yang sesuai pasar kerja.	2. Pengembangan Dan Pemataraan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan
3. Memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan UMKM serta industri kreatif dan pengentasan kemiskinan	3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Penguatan Peluang Investasi Dengan Membuka Kesempatan Kerja Lokal Melalui Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Yang Sesuai Pasar Kerja Untuk Menurunkan Angka Pengangguran
4. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan pendidikan	4. Mengembangkan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Di Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Masyarakat
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.	5. Pengembangan Koperasi Dan UMKM Serta Industri Kreatif Dan Pengentasan Kemiskinan.
6. Peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, perempuan dan anak	6. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan
7. Optimalisasi pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga kota Dumai	7. Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Sosial
	8. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Budaya Dan Pariwisata Serta Peningkatan Peran Pemuda Dan Prestasi Olahraga Kota Dumai

Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2019, maka telah ditetapkan tema pembangunan Kota Dumai tahun 2019 adalah :

“Mengembangkan Instrumen Pendukung yang Kondusif Bagi Terwujudnya Masyarakat Kota Dumai Makmur dan Madani Yang di Dukung oleh Masyarakat Yang Kompetitif, Kreatif Serta Penguatan Investasi dan Pasar Untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat”

Berdasarkan tema diatas, maka Pemerintah Kota Dumai menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Prioritas, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Dumai Tahun 2019

Prioritas Daerah	Tujuan/Sasaran		Indikator	Target Capaian tahun 2019	Satuan
1	2		3	4	5
	Tujuan 1	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak	57,1	%
Pengembangan Jaringan Pelayanan Air Bersih Dan Infrastruktur Dasar Masyarakat.	Sasaran 1.1	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	4300	Sumbangan Rumah
	Sasaran 1.2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	3,48	%
			Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	57,59	%
			Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	2,83	%
			Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	6	%
			Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	52	%
			Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	416	Ruas Jalan
	Sasaran 1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase Kualitas udara	75	%
		Persentase kualitas air	75	%	
	Tujuan 2	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	9,69	Tahun
			Harapan lama sekolah	13,25	Tahun
Pengembangan Dan Pamarataan Kualitas Dan Kuantitas	Sasaran 2.1	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka melek huruf	99,46	%
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,75	%

Prioritas Daerah	Tujuan/Sasaran		Indikator	Target Capaian tahun 2019	Satuan
1	2		3	4	5
Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	95,76	%
	Sasaran 2.2	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	%
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	%
	Sasaran 2.3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	0.277083333	per 1.000 siswa
			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	0.370138889	per 1.000 siswa
	Tujuan 3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,02	Tahun
Pengembangan Dan Pernerataan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan	Sasaran 3. 1	Terkendalnya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Persentase Terkendalnya Kejadian Mortalitas (Kematian)	100	%
			Persentase Terkendalnya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	100	%
			Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	100	%
	Sasaran 3.2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	31	%
			Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	146.887	Orang
	Tujuan 4	Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	-	Peringkat
Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Budaya Dan Pariwisata Serta Peningkatan Peran Pemuda Dan Prestasi Olahraga Kota Dumai	Sasaran 4.1	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	-	Peringkat
	Tujuan 5	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	12.391	Rp. 000
			PDRB per kapita	110.203,07	Rp. 000
Penegeembangan Koperasi Dan UMKM Serta Industri Kreatif Dan Pengentasan Kemiskinan	Sasaran 5.1	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	0,415	Indek
	Sasaran 5.2	Menurunnya persentase penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	4,50	%
Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Sosial	Sasaran 5.3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,072	%
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Penguatan Peluang Investasi Dengan Membuka Kesempatan Kerja Lokal Melalui Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Yang Sesuai Pasar Kerja Untuk Menurunkan Angka Pengangguran	Sasaran 5.4	Meningkatnya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,90	%

Prioritas Daerah	Tujuan/Sasaran		Indikator	Target Capaian tahun 2019	Satuan
1	2		3	4	5
	Tujuan 6	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	Indeks
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan	Sasaran 6.1	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	6	Peringkat
	Sasaran 6.2	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	WTP	Opini BPK
			Nilai Akuntabilitas	B	Nilai
	Tujuan 7	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal	Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan	2.018,91	Rp. Milyar
Mengembangkan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Di Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Masyarakat	Sasaran 7.1	Meningkatnya pendapatan petani	Pendapatan perkapita petani	198,10	Rp. Juta
	Sasaran 7.2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	82,09	Angka
	Tujuan 8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	4,32	%
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Penguatan Peluang Investasi Dengan Membuka Kesempatan Kerja Lokal Melalui Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Yang Sesuai Pasar Kerja Untuk Menurunkan Angka Pengangguran	Sasaran 8.1	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	21.45	%
			Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	54.46	%
	Sasaran 8.2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	5.904.033.104.282	Rupiah
	Tujuan 9	Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu	90,5	%
Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Budaya Dan Pariwisata Serta Peningkatan Peran Pemuda Dan Prestasi Olahraga Kota Dumai	Sasaran 9.1.	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	89	%
	Sasaran 9.2.	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	92	%

Untuk melihat kesinambungan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi Riau terhadap Kota Dumai pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.6 dan 4.7 dibawah yang menggambarkan sinkronisasi priroitas pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Tabel 4.6 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat Tahun 2019 kedalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2019

PRIORITAS KOTA DUMAI	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS
1	2
1. Pengembangan Dan Pamarataan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan 2. Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Sosial	Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar : 1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat 3. Pemerataan Layanan Pendidikan berkualitas 4. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif 5. Percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja
Pengembangan Jaringan Pelayanan Air Bersih Dan Infrastruktur Dasar Masyarakat	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman 1. Meningkatkan Konektivitas 2. Mengembangkan telekomunikasi dan informatika 3. Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi diwilayah timur dan pengembangan pembangunan desa 4. Melaksanakan pembangunan daerah afirmasi 5. Melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu hilir perikanan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Penguatan Peluang Investasi Dengan Membuka Kesempatan Kerja Lokal Melalui Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Yang Sesuai Pasar Kerja Untuk Menurunkan Angka Pengangguran	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif : 1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja kontruksi 2. Penyelenggaraan sistem informasi jasa kontruksi cakupan pemerintah daerah 3. Penerbitan izin usaha jasa kontruksi nasional 4. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa kontruksi
Mengembangkan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Di Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan : 1. Pembangunan dan Peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa 2. Rehailitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa 3. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi

PRIORITAS KOTA DUMAI	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS
1	2
<p>1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan</p> <p>2. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Budaya Dan Pariwisata Serta Peningkatan Peran Pemuda Dan Prestasi Olahraga Kota Dumai</p>	<p>Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber 2. Menjamin kesuksesan pemilu 3. Memperkuat pertahanan wilayah nasional 4. Meningkatkan kepastian hukum dan reformasi birokrasi 5. Memperkuat efektivitas diplomasi

Tabel 4.7. Sinkronisasi Prioritas Provinsi Riau Tahun 2019 kedalam prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2019

PRIORITAS KOTA DUMAI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI RIAU
1	2
<p>1. Pengembangan Dan Pamarataan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan</p> <p>2. Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Penurunan Tingkat Kemiskinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendidikan Menengah 2. Program Bantuan Operasional Sekolah Khusus 3. Program Pembiayaan Kesehatan 4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 5. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum 6. Program Pengembangan Perumahan 7. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman 8. Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan 9. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) 10. Program Pemerdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 11. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 12. Program Pengemangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 13. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 14. Program Pembinaan dan Pengawasan Geologi dan Migas 15. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM 16. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecapakan Hidup Pemuda 17. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Pertanian 18. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 19. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

PRIORITAS KOTA DUMAI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI RIAU
1	2
<p>Pengembangan Jaringan Pelayanan Air Bersih Dan Infrastruktur Dasar Masyarakat</p>	<p>Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Perbatasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendidikan Menengah 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 4. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 5. Program Pengendalian Banjir 6. Program Penyediaan Air Minum 7. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum 8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 9. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa 11. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 12. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konservasi Energi 13. Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika 14. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 15. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 16. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 17. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 18. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
<p>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Penguatan Peluang Investasi Dengan Membuka Kesempatan Kerja Lokal Melalui Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Yang Sesuai Pasar Kerja Untuk Menurunkan Angka Pengangguran</p>	<p>Menumbuhkembangkan Industri Manufaktur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendidikan Menengah 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 6. Program Pengembangan

PRIORITAS KOTA DUMAI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI RIAU
1	2
	Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM 7. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah 8. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 9. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Pertanian 10. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 11. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 12. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 13. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 14. Program Penelitian dan Pengembangan
Mengembangkan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Di Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatkan Produktivitas Pertanian : 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan 4. Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan 5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan
1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan 2. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Budaya Dan Pariwisata Serta Peningkatan Peran Pemuda Dan Prestasi Olahraga Kota Dumai	Pengembangan Pariwisata Dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya : 1. Program Pendidikan Menengah 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 4. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 5. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 7. Program Pengembangan Nilai Budaya 8. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 9. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 10. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan IPTEK 11. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pariwisata 12. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Seni Budaya 13. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 14. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 15. Program Perencanaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

4.3. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Target 2019 Terhadap Prioritas RKPD Tahun 2019

Selanjutnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 Walikota menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan Program, Kegiatan dan Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Dumai untuk **terhadap pelaksanaan SPM tahun 2019** yang mana telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang termaktub pada pasal 3 tentang urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dengan memperhatikan bersifat mutlak dan mudah distandarkan. Berikut sinkronisasi antara Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan yang ketentuan yang diatur pada Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 bab II jenis SPM bagian kesatu sampai bagian ketujuh kedalam prioritas pembangunan daerah kota dumai tahun 2019

Tabel 4.8. Sinkronisasi SPM Tahun 2019 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019
1	2	3
1.	Bidang Pendidikan : 1. pendidikan anak usia dini 2. pendidikan dasar 3. pendidikan kesetaraan	Pengembangan Dan Pamarataan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan
2.	Bidang Kesehatan ; 1. pelayanan kesehatan ibu hamil 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. pelayanan kesehatan balita 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019
1	2	3
	11. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : 1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Pengembangan Jaringan Pelayanan Air Bersih Dan Infrastruktur Dasar Masyarakat
4.	Bidang Perumahan Rakyat : 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota Dumai 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota Dumai	
5.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 2. pelayanan informasi rawan bencana 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan
6.	Bidang Sosial : 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota Dumai	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Sosial

4.4. Pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's) Target 2019 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

Selanjutnya sesuai dengan Isu yang berkaitan dengan pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's) Tahun 2019

pembahasan pada bab II sebelumnya, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 terkait dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 akan disajikan pada table berikut ini :

Tabel 4.9. Sinkronisasi bidang pengembangan utama SDG's kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2019

NO	Suistanable Development Goals (SDG's)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019
1	2	3
1	<p>Pilar Pembangunan Sosial :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Dan Pamarataan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan; 2. Penegembangan Koperasi Dan UMKM Serta Industri Kreatif Dan Pengentasan Kemiskinan 3. Mengembangkan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Di Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Masyarakat
2	<p>Pilar Pembangunan Ekonomi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi 2. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi 3. Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Penguatan Peluang Investasi Dengan Membuka Kesempatan Kerja Lokal Melalui Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Yang Sesuai Pasar Kerja Untuk Menurunkan Angka Pengangguran 2. Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Sosial 3. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Budaya Dan Pariwisata Serta Peningkatan Peran Pemuda Dan Prestasi Olahraga Kota Dumai
3	<p>Pilar Lingkungan Hidup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Jaringan Pelayanan Air Bersih Dan Infrastruktur Dasar Masyarakat
4	<p>Pilar Pembangunan Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2019

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2019

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kota Dumai Tahun 2019 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah disampaikan pada Bab II sampai dengan Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2019. Untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2019 yang tertuang pada Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2019, maka Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program yang dirumuskan tersaji pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Matrik Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program Tahun 2019

Prioritas Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2019	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pengembangan Jaringan Pelayanan Air Bersih Dan Infrastruktur Dasar Masyarakat	1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan	4.300 SR	Dinas PUPR
	2 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase sumber air baku yang dipelihara	25%	
	1 Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni		Dinas Perkim
		Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di Perumahan dan kawasan permukiman	3%	
	2 Program lingkungan sehat perumahan	persentase layanan rumah dan lingkungan yang memiliki sanitasi dasar	3%	
	3 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	persentase infrastruktur/ PSU (prasana,sarana dan utilitas) terutama mendukung kota madani baik perumahan maupun kawasan pemukiman	2%	
	4 Program pembangunan jalan dan jembatan	Presentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	57,59%	Dinas PU PR
5 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase Pembangunan Saluran Drainase demi kelancaran aliran air	75,76%		

Prioritas Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2019	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5		
	6	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum dikecamatan	16%	Dinas Perkim	
	7	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase jumlah PJU yang terbangun dan terpelihara di Kota Dumai	17%		
	8	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Dokumen Data perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	10 dokumen		Dinas Perhubungan
	9	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah Prasarana dan fasilitas LLAJ yang memadai	48 Unit		
	10	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase pelayanan angkutan kepada masyarakat yang optimal	0,68%		
	11	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	2 Lokasi		
	12	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah sarana dan prasarana ketertiban lalu lintas yang lengkap dan memadai	17 unit		
	13	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah fasilitas kelaikan alat uji Kendaraan Bermotor yang memadai	12 Unit		
	14	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase peningkatan pemanfaatan ruang	100%		
	15	Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase layanan pengembangan dan pemeliharaan pemakaman	17%		Dinas Perkim
	16	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah Taman kota yang terpelihara	21 Lokasi		Dinas Lingkungan Hidup
	17	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase terlaksananya koordinasi dan sinergitas tata ruang	100%		Dinas PUPR
	18	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio Pemetaan Kecamatan	2:07		
	19	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengawasan Pemanfaatan Ruang	100%		
	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani	5 Wilayah		Dinas Lingkungan hidup
	2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan lingkungan perkotaan dumai yang optimal	75%		

Prioritas Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2019	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	
	3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kerjasama dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam	85%		
	4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	85%		
	5 Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase status mutu udara di Kota Dumai	75%		
	6 Program Pengendalian Banjir	Persentase terlaksananya sarana pengendalian banjir bagi masyarakat kota dumai	30%	Dinas PUPR	
Pengembangan Dan Pamarataan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan	1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD yang memenuhi SPM	95%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase peningkatan pelayanan pendidikan	90%		
	3 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase pelayanan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baik	90%		
	4 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum daerah, kelurahan dan perpustakaan masyarakat		Dinas Perpustakaan dan Arsip	
			Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	21.500 orang	
			Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	16.786 Judul Buku	
	1 Program Pendidikan Non Formal	Persentase pelatihan Pendidikan Non Formal	95%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	90%		
	1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase SD dan SMP yang memenuhi SPM	90%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Pengembangan Dan Pamarataan	1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	21	Dinas Kesehatan

Prioritas Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2019	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	
Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan		Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	28		
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	110		
		Umur Harapan Hidup	71.02		
		Persentase Balita dengan Gizi Buruk	2%		
		Persentase Balita dengan Gizi Kurang	5%		
	2	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	21	
			Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	28	
	3	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Umur Harapan Hidup	71.02	
	4	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan peningkatan mutu pelayanan kesehatan	100%	
	5	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Persentase puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik	75%	
	6	Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular	Umur Harapan Hidup	71.02	
	7	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100%	
	8	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotik yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	100%	
			Persentase toko obat yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	100%	
			Persentase IRTP yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	100%	
		Persentase toko makanan minuman dan distributor yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan	100%		

Prioritas Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2019	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	9 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas	48%	
		Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	56%	
		Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	100%	
		Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM)	33 Kelurahan	
		Jumlah kelurahan yang telah Stop BABS	33 Kelurahan	
	10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	1	
		Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +	88%	
		Menurunnya prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	< 1	
		Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	56	
		1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	
Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	28			
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	110			
Umur Harapan Hidup	71.02			
Persentase Balita dengan Gizi Buruk	2%			
Persentase Balita dengan Gizi Kurang	5%			

Prioritas Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2019	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu terpenuhinya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu	100%	RSUD
	3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pelaksanaan standarisasi pelayanan kesehatan	100%	
	4 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standar untuk mendukung akreditasi rumah sakit Rumah Sakit	100%	
	5 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah sakit	100%	
	6 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD	persentase Peningkatan Pelayanan RSUD	100%	
	7 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase pelayanan kesehatan BLUD	100%	
	Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Budaya Dan Pariwisata Serta Peningkatan Peran Pemuda Dan Prestasi Olahraga Kota Dumai	1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase Peningkatan inovatif kreatif para pemuda	
2 Program peningkatan peran serta kepemudaan		Persentase Pemuda yang berprestasi	100%	
3 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda		Persentase Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan	100%	
4 Program Pengembangan Kebijakan dan Managemen Olahraga		Persentase Ketersediaan Data Organisasi olahraga		
5 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		Persentase Peningkatan prestasi diberbagai cabang olahraga	100%	
6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga		Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	100%	
Penegembangan Koperasi Dan UMKM Serta Industri Kreatif Dan Pengentasan Kemiskinan.	1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Peningkatan kualitas kelembagaan	90%	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah	13.250 UMKM	

Prioritas Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2019	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Sosial	1 Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase PMKS yang tertangani	27%	Dinas Sosial
	2 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase PMKS yang tertangani	27%	
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	8%	
	3 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Persentase PMKS yang tertangani	27%	
	4 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase PMKS yang tertangani	27%	
	5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	200 Orang	
	6 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	50%	
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	8%	
	7 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	50%	
		Persentase PMKS yang tertangani	27%	
		Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	82%	
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	
Pengembangan Koperasi Dan UMKM Serta Industri Kreatif Dan Pengentasan Kemiskinan.	8 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah produktif yang dibina	1.225 UMKM	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Prioritas Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2019	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Sosial	1 Program Keluarga Berencana	Persentase terpenuhinya pelayanan program keluarga berencana di kota Dumai	83%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender anak		
	3 Program pelayanan kontrasepsi	Persentase peningkatan prevalensi peserta KB aktif	86%	
	4 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Persentase peningkatan pelayanan bagi KRR kelompok remaja dan sekolah di kota Dumai	86%	
	5 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase peningkatan Pengetahuan Kader Pendamping Tribina	100%	
	6 Program Pengendalian Penduduk	Persentase peningkatan pengendalian kependudukan Kota Dumai	85%	
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Penguatan Peluang Investasi Dengan Membuka Kesempatan Kerja Lokal Melalui Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Yang Sesuai Pasar Kerja Untuk Menurunkan Angka Pengangguran	1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	1.500 orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	1 Dokumen	
	2 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	48 kasus	
	3 Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	235 Perusahaan	
4 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Kewirausahaan	80 orang		
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan	1 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Penyebarluasan Pelayanan Informasi Perizinan	80%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prioritas Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2019	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	
Pelayanan Publik Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan	2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	Jumlah Pelayanan Admnistrasi Perizinan	4.230 izin	Sekretariat Daerah
	3	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah sertifikat tanah aset, tanah masyarakat yang terinventarisasi dan tersedianya lahan untuk pembangunan Kota Dumai	10 Persil	
	4	Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	Jumlah konflik/permasalahan tanah daerah Kota Dumai yang terfasilitasi dan terselesaikan	5 kasus	
	5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penataan Administrasi Kependudukan	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	6	Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	
	7	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	85%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	8	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Peningkatan pengendalian dan pencegahan kebakaran dan bencana alam lainnya	75%	
	9	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase peningkatan penanganan kedaruratan dan logistik	85%	
	10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Persentase peningkatan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat	85%	
	11	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan keamanan dan ketertiban kota dumai	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2019	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	12 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan pengamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
	13 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100%	
	14 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Peningkatan peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100%	
	15 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Persentase pelaksanaan operasi pemberantasan penyakit masyarakat di kota Dumai	100%	
	16 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Tingkat Keberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat di Kota Dumai	90%	Sekretariat Daerah
	17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	90%	
	18 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Perempuan yang duduk di legislatif	18%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	19 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan informasi kelembagaan pengarusutamaan gender anak pada masyarakat	80%	
	20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan publikasi dan informasi tentang perlindungan anak dan perempuan	85%	
	21 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan pada pemerintahan dan masyarakat kota dumai	70%	
	22 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	75%	
	23 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	75%	Kec. Dumai Barat

Prioritas Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2019	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	24 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase meningkatnya Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	75%	
	25 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	80%	Kec. Dumai Timur
	26 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	80%	
	27 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	80%	
	28 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	75%	Kec. Bukit Kapur
	29 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	75%	
	30 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	75%	
	31 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	75%	Kec. Medang Kampai
	32 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	75%	
	33 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase pelaksanaan 10 program pokok PKK kecamatan	75%	
	34 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase peningkatan Kualitas Aparatur dalam Pelayanan Publik	75%	Kec. Sungai Sembilan
	35 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	75%	
	36 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Jumlah peningkatan Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	1 Laporan	
	37 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	75%	Kec. Dumai Kota
	38 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	75%	

Prioritas Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2019	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	39 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	75%	
	40 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100%	Kec. Dumai Selatan
	41 Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja LPMK dan RT	100%	
	42 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Persentase meningkatnya Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Kecamatan	100%	
	1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	55%	
	2 Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase pelanggaran disiplin	0.25%	
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	62%	
		Persentase pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur	76%	
	3 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Rekomendasi yang selesai di tindaklanjuti	70%	Inspektorat
		Jumlah Dokumen yang direviu setiap tahunnya	10 Dok	
		Level Maturitas SPIP	Level 3	
		Level Kapabilitas APIP	Level 3	
	4 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat /bimtek dan Sosialisasi	45 orang	
	5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau	Peringkat 5	Sekretariat Daerah
		Persentase meningkatnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	100%	
	6 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	- Persentase belanja pendidikan (20%)	20%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		- Persentase belanja kesehatan (10%)	10%	

Prioritas Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2019	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	
		- Penetapan APBD	Tepat Waktu	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		- Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP		
7	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah SKPD/Ktr/Lembaga/Instansi Pemko Dumai yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku			
		Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	61%		
8	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah dokumen/ arsip yang terkumpulkan			
		Jumlah arsip yang terjaga kelangsungannya dan tertata secara baku	61%		
9	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase terpeliharanya dokumen/ arsip yang tersimpan	85%		
10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah SKPD/Ktr/Lembaga/Instansi Pemko Dumai yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku			
		Jumlah SDM pengelola kearsipan	35 Orang		
11	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	100%		Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase jaringan, komunikasi, informasi yang cepat, tepat dan akurat	100%		
13	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase meningkatnya kualitas SDM	100%		
14	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase jaringan, komunikasi, informasi yang cepat, tepat dan akurat	100%		Sekretariat Daerah
15	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase informasi melalui media massa	100%		

Prioritas Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2019	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	
	16	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi kepada Kementerian terkait isu aktual	85%	
	17	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan kapasitas DPRD Kota Dumai	100%	Sekretariat DPRD
	18	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	10 dokumen	Bappeda
	19	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	4 dokumen	
	20	Program perencanaan sosial dan budaya	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	5 dokumen	
	21	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Tercapainya peningkatan pendapatan Kota Dumai	21%	Badan Pendapatan Daerah
	22	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Peningkatan wawasan kebangsaan solidaritas antar umat beragama	100%	OPD yang melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	23	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat/pelajar kota dumai	100%	
	24	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	100%	
25	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat tentang pendidikan politik	100%		
Mengembangkan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Di Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Untuk	1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase cakupan bina kelompok tani	57,53%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Indeks Nilai tukar nelayan	117	Dinas Perikanan

Prioritas Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2019	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Memperkuat Ketahanan Pangan Masyarakat	3 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana pertanian	10 Unit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	4 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Luas peremajaan tanaman perkebunan	100 Ha	
	5 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang meningkat Kapasitasnya	1 unit	
		Jumlah tenaga penyuluhan yang ditingkatkan kemampuan dan kompetensinya	6 Penyuluh	
	1 Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah Populasi ternak	6093 Ternak	
	2 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah kelompok tani yang mendapat penyuluhan teknologi peternakan	15 Kelompok	
	3 Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya	255.2 Ton	
		Jumlah pembudidaya terlatih	20 Kelompok	
		Jumlah kelompok aktif budidaya terbina	34 Kelompok	
	4 Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	303.65 Ton	
		Jumlah nelayan terlatih	20 Kelompok	
		Jumlah kelompok nelayan terbina	31 Kelompok	
	5 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan	31 Kelompok	
		cakupan bina kelompok pembudidaya	34 Kelompok	
		Jumlah kelompok nelayan terbina	31 Kelompok	
		Jumlah pembudidaya terbina	34 Kelompok	
		Jumlah kelompok pengolahan terbina	9 Kelompok	
6 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Produksi perikanan budidaya	255.2 Ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Luas Penanaman komoditi tanaman pangan dan hortikultura	95 Ha		

Prioritas Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2019	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	
		Skor PPH konsumsi	82.09		
	2	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah Peningkatan produksi hasil olahan	32 Ton	Dinas Perikanan
			Nilai konsumsi ikan	31 kg/kapita/th	
	3	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis	17 Kasus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	12 Kasus	
			Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis	20 Kasus	
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Penguatan Peluang Investasi Dengan Membuka Kesempatan Kerja Lokal Melalui Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Yang Sesuai Pasar Kerja Untuk Menurunkan Angka Pengangguran	1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	573 Unit	Dinas Perdagangan
	2	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Persentase peningkatan volume /nilai ekspor	5%	
	3	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah bantuan subsidi Bahan Pokok Masyarakat	15.000	
			Jumlah pengawasan distribusi Bahan Pokok Masyarakat	12	
			Jumlah pasar tradisional memenuhi standar	1 Pasar	
			Jumlah Usaha yang ikut pasar lelang	5	
	4	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah Penilaian K3 tempat usaha pedagang pasar frekuensi penertiban PKL dan asongan	10 Bulan	
	5	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Jumlah IKM yang dibina dalam penerapan manajemen mutu	160 IKM	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	6	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah Pembinaan Peningkatan teknologi Produksi IKM	40 IKM	
	7	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah Peningkatan perusahaan Industri	200 IKM	
		Jumlah pengrajin Industri Kreatif yang terlatih	200 Orang		

Prioritas Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2019	Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	
		Jumlah Pengembangan pemasaran produk kerajinan daerah	15 Produk		
	8	Program penataan struktur industri	Jumlah fasilitasi Kawasan Industri/Ekonomi		1 Kawasan
	9	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sarana Informasi Industri		9 Sarana
	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional	163 Investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Budaya Dan Pariwisata Serta Peningkatan Peran Pemuda Dan Prestasi Olahraga Kota Dumai	1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengembangan nilai budaya melayu dan kearifan lokal	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	persentase pelestarian cagar budaya melayu	100%	
	3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	persentase pelestarian keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal	100%	
	4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	persentase daerah yang mengikuti kerjasam budaya	100%	
	5	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat dan wisatawan	100%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
	6	Program pengembangan Kemitraan	Persentase Peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan	100%	
	1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah bantuan kepada tenaga pendidik keagamaan		Sekretariat Daerah
			Persentase meningkatnya motivasi dan kesejahteraan tenaga pendidik guru agama, TPQ,DTA dan madrasah	100%	
			Jumlah biaya transportasi perbulan Guru agama TPQ,DTA dan madrasah	12 Bulan	
	2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Laporan Meningkatnya Nilai Ketakwaan dan Pengetahuan Agama Pada Masyarakat dan Pemuka Agama		
		Persentase meningkatnya pengetahuan agama dan nilai ketakwaan di masyarakat	90%		

Adapun RPKD ini adalah bersifat menyeluruh, yaitu selain memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kota Dumai, Rencana Kerja ini juga memuat program dan kegiatan yang akan didanai bersama-sama (sharing program) dengan APBD Provinsi Riau Tahun 2019 dan Rencana Program dan Kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBN Tahun 2019.

Program/kegiatan pada RKPD ini masih bersifat sementara dan dapat mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 Bab II Penyusunan RKPD Tahun 2019 Pasal 2.

Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada **lampiran II Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2019**.



BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator dan target kinerja sangat penting untuk dapat memperkirakan hasil pembangunan, dan diharapkan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Kota Dumai. Indikator kinerja ini mencakup dua aspek yaitu indikator kinerja program yang bersifat mikro dan indikator kinerja pembangunan daerah yang bersifat makro.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja pembangunan daerah didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan lampiran I permendagri nomor 86 tahun 2017. Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kota Dumai

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian 2019
-1	-2		-3	-4	-5
1	Tujuan 1	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak	%	57,1
	Sasaran 1.1	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	4300
	Sasaran 1.2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3,48
			Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	57,59
			Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,83
			Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	6
			Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	52

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian 2019
-1	-2	-3	-4	-5
		Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	416
	Sasaran 1.3 Meningkatkan kualitas lingkungan	Persentase Kualitas udara	%	75
		Persentase kualitas air	%	75
2	Tujuan 2 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,69
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,25
	Sasaran 2.1 Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka melek huruf	%	99,46
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,75
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	95,76
	Sasaran 2.2 Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100
	Sasaran 2.3 Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	0.277083333
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	0.370138889
3	Tujuan 3 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,02
	Sasaran 3.1 Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Persentase Mortalitas (Kematian)	%	100
		Persentase Morbilitas (Kesakitan)	%	100
		Persentase Status Gizi Balita	%	100
	Sasaran 3.2 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31
		Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	146.887
4	Tujuan 4 Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	-
	Sasaran 4.1 Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	-
5	Tujuan 5 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	Rp. 000	12.391
		PDRB per kapita	Rp. 000	110.203,07
	Sasaran 5.1 Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Indek	0,415
	Sasaran 5.2 Menurunnya persentase penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	4,50
	Sasaran 5.3 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,072
	Sasaran 5.4 Meningkatnya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,90
6	Tujuan 6 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78
	Sasaran 6.1 Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	6
	Sasaran 6.2 Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	Opini BPK	WTP
		Nilai Akuntabilitas	Nilai	B

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian 2019
-1	-2		-3	-4	-5
7	Tujuan 7	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal	Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan	Rp. Milyar	2.018,91
	Sasaran 7.1	Meningkatnya pendapatan petani	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	198,10
	Sasaran 7.2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	82,09
8	Tujuan 8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,32
	Sasaran 8.1	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21,45
			Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	54,46
	Sasaran 8.2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	5.904.033.104.282
9	Tujuan 9	Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	90,5
	Sasaran 9.1.	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	89
	Sasaran 9.2.	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	92

Indikator kinerja pembangunan daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi: Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Sosial, dan Fokus Seni Budaya dan Olah Raga. Sedangkan Aspek Pelayanan Umum meliputi: Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Layanan Urusan Pilihan, dan Penunjang Urusan. Sedangkan aspek daya saing meliputi: Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur dan Fokus Iklim Berinvestasi. Penetapan indikator kinerja daerah tahun 2019 seperti yang tersaji pada Tabel 6.1 merujuk kepada penetapan indikator kinerja daerah yang terdapat pada dokumen perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Dumai
Tahun 2019

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2019
1	2	3	4
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI			
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
1.1	Pertumbuhan ekonomi	%	4,32
1.2	PDRB per kapita (ADHB)	(Rp. Juta)	110.203,07
1.3	Indeks Gini	Indek	0,415
1.4	Tingkat Kemiskinan	%	4,50
1.5	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indek	73,962
1.6	Angka melek huruf	%	99,46
1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,90
FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL			
1	Pendidikan		
1.1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,69
1.2	Harapan lama sekolah	Tahun	13,25
1.3	Angka Partisipasi Kasar		
	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	100
	2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	99,46
1.4	Angka Partisipasi Murni		
	1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,75
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	95,76
2	Kesehatan		
2.1.	Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD (BOR)	%	80
2.2.	ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	Hari	3
2.3.	TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	Hari	1,5
2.4.	BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	65
2.5.	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31
2.6.	NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	20
3	Ketenagakerjaan		
	Jumlah lembaga pelatihan keterampilan dalam pengembangan kewirausahaan	Lembaga	10
FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA			
1	Kebudayaan		
1.1.	Jumlah Grup Kesenian	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	40
ASPEK PELAYANAN UMUM			
LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1	Pendidikan		
1.1.	Angka partisipasi kasar PAUD	%	90,73
1.2.	Pendidikan Dasar		
1.2.1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		
	1. SD/MI	per 1.000 siswa	1 : 339

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2019
1	2	3	4
	2. SMP/MTs	per 1.000 siswa	1 : 473
1.2.2.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata		
	1. SD/MI	per siswa	1 : 26
	2. SLTP	per siswa	1 : 28
1.2.3.	Angka Kelulusan		
	1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
	2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100
	3. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	94,58
2	Kesehatan		
2.1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,02
2.2.	Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100
2.3.	Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100
2.4.	Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100
2.5.	Persentase balita dengan gizi buruk	%	2
2.6.	Persentase balita dengan gizi kurang	%	5
2.7.	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	21
2.8.	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	per 1.000 KH	28
2.9.	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 KH	110
2.10.	Angka Harapan Hidup Waktu Lahir	tahun	71,02
2.11.	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	1
2.12.	Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +	%	88
2.13.	Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	%	< 1
2.14.	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	56
2.15.	Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	146.887
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.1.	Pekerjaan Umum		
3.1.1.	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	4300
3.1.2.	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	55,35
3.1.3.	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	61,60
3.1.4.	Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat kota Dumai	%	52
3.2.	Penataan Ruang		
3.2.1.	Persentase layanan untuk penertiban Surat Keterangan Rencana Kota (K RK) terhadap permohonan K RK	%	82,5
3.2.2.	Persentase fungsi dan klasifikasi bangunan yang sesuai dengan peruntukan ruang / kawasan / lahan	%	82,5
3.2.3.	Fasilitas lahan untuk pemakaman umum	Ha	6
4	Perumahan dan Pemukiman		
4.1.	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3,48
4.2.	Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	6
4.3.	Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,83
4.4.	Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan umum	Ruas jalan	416
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2019
1	2	3	4
5.1.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Patroli/Kecamatan	2,5
5.2.	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) yang sigap dan tanggap	%	40
5.3.	Persentase penegakan peraturan daerah/perwako	%	50
5.4.	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	60
5.5.	Persentase laporan gangguan kamtibmas yang ditindaklanjuti dan pelaksanaan kegiatan politik daerah di Kota Dumai	%	80
5.6.	Persentase keberhasilan pencegahan terjadinya konflik sosial	%	100
5.7.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan bencana lainnya	%	
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	%	10
5.8.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebencanaan	waktu	-
			-
			-
	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК)		
	Peremukiman (waktu maks. 15 menit)	%	32
	Lahan (waktu maks. 30 menit)	%	20
	Hutan (waktu maks. 60 menit)	%	25
5.9.	Persentase masjid yang ditingkatkan pembinaannya menjadi masjid paripurna kecamatan	%	14,29
6	Sosial		
6.1.	Jumlah Sarana sosial	Unit	17
6.2.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	50
6.3.	Persentase PMKS yang tertangani	%	27
6.4.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	82
6.5.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100
6.6.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	8
LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			
1	Tenaga Kerja		
1.1.	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	75
	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	%	40
1.2.	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	%	40
1.3.	Besaran Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja	Dokumen	1
1.4.	Persentase Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)	%	40
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.1.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar	%	85
2.2.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	%	54,01
2.3.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88
2.4.	Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Predikat	Nindya
2.5.	Persentase Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	%	0,095

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2019
1	2	3	4
3	Pangan		
3.1.	Angka Kecukupan Protein	Gram/kapita/hari	52
4	Pertanahan		
4.1.	Jumlah konflik/permasalahan tanah di daerah Kota Dumai yang terselesaikan	Kasus	5
5	Lingkungan Hidup		
5.1.	Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani	Wilayah	5
5.2.	Persentase Kualitas udara	%	75
5.3.	Persentase Kualitas air	%	75
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
6.1.	Kepemilikan KTP Elektronik	%	80,7
6.2.	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	90
6.3.	Kepemilikan Akta Perkawinan	%	75
6.4.	Kepemilikan KIA	%	30
6.5.	Kepemilikan KK	%	95
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
7.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	274
7.2.	PKK aktif	%	100
7.3.	Posyandu aktif	%	100
7.4.	Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	%	75
7.5.	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	%	75
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
8.1.	Rasio akseptor KB	Rasio	-
8.2.	Cakupan peserta KB aktif	%	-
8.3.	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,072
8.4.	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>contraceptive prevalence rate/CPR</i>)	%	62,1
8.5.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)(%)	%	18,7
8.6.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Institusi	20
9	Perhubungan		
9.1.	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	10.26
9.2.	Persentase pemasangan rambu-rambu	%	32
9.3.	Persentase layanan angkutan darat	%	0,68
9.4.	Jumlah terminal darat, laut dan udara yang sesuai standar	Terminal	7
9.5.	Rasio ijin trayek	Rasio	01:38.7
10	Komunikasi dan Informatika		
10.1.	Kategori e-Government Kota Dumai	Indeks	2,00
10.2.	Jumlah OPD yang terkoneksi ke jaringan internet	OPD	24
		SKPD/kantor/sarana publik	-
10.3.	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	Kelompok	5
10.4.	Persentase informasi penyelenggaraan pemerintah	%	90

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2019
1	2	3	4
	daerah yang dipublikasikan ke media massa		
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
11.1.	Persentase koperasi yang aktif	%	87,50
11.2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	78,10
12	Penanaman Modal		
12.1.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	5.904.033.104.282
13	Kepemudaan dan Olah Raga		
13.1.	Prestasi olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	-
13.2.	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase	52
13.3.	Jumlah klub olahraga	Klub	82
13.4.	Lapangan olahraga	Lapangan	2
13.5.	Jumlah pembinaan cabang olahraga	Cabor	28
14	Kebudayaan		
14.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah Penyelenggaraan	2
14.2.	Sanggar Seni dan Budaya yang dibina	%	95
14.3.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	30
14.4.	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	90,5
14.5.	Persentase sekolah Pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	89
14.6.	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	92
15	Perpustakaan		
15.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	21.5
15.2.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul buku	16.786
16	Kearsipan		
16.1.	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	61
16.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	35
LAYANAN URUSAN PILIHAN			
1	Pariwisata		
1.1.	Kunjungan Wisata		
	1. Mancanegara	Pengunjung	
	2. Domestik	Pengunjung	
1.2.	Kunjungan wisata	%	42,42
2	Pertanian		
2.1.	Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan	Rp. Milyar	2.018,91
2.2.	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	198,10
2.3.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	82,09
2.4.	Cakupan bina kelompok tani	Kelompok	126
2.5.	Produksi komoditi pertanian	Ton	20.818
2.6.	Produksi komoditi perkebunan	Ton	84.756
2.7.	Populasi ternak	Satuan ternak	6.093

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2019
1	2	3	4
2.8.	Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan	kasus	10
2.9.	Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis	kasus	17
2.10.	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis	kasus	20
3 Kehutanan			
3.1.	Luas lahan yang direhabilitasi	Ha	-
4 Perdagangan			
4.1.	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21.45
4.2.	Persentase pasar tradisional yang sesuai standard	%	23
4.3.	Ekspor bersih perdagangan	Rp. Milyar	1.911,62
5 Perindustrian			
5.1.	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	62
5.2.	Persentase Pengembangan Kawasan Industri	%	70
5.3.	Persentase pelaku Industri Kecil dan menengah dan Industri kreatif yang terlatih	%	91
6 Transmigrasi			
6.1.	Persentase Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga transmigrasi	%	30
7 Perikanan dan Kelautan			
7.1.	Produksi perikanan kelompok nelayan/ produksi perikanan tangkap	ton	-
	Produksi perikanan tangkap	ton	303,65
7.2.	Kelompok pembudidaya ikan yang dibina	kelompok	-
	Cakupan Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	kelompok	34
7.3.	Kelompok nelayan yang dibina	Kelompok	-
	Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	31
7.4.	Nilai konsumsi ikan	Kg/kapita/th	31
7.5.	Produksi perikanan budidaya	ton	255,2
PENUNJANG URUSAN			
1 Perencanaan			
1.1.	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	%	20
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	2
1.3.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	100
2 Keuangan			
2.1.	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	19
2.2.	Persentase peningkatan penerimaan Pajak daerah terhadap PAD	%	44
2.3.	Persentase peningkatan pajak daerah pada Bapenda	%	80
2.4.	Persentase belanja pendidikan	%	20
2.5.	Persentase belanja kesehatan	%	10
2.6.	Penetapan APBD	Tepat waktu/Tidak tepat waktu	Tepat waktu
2.7.	Opini BPK	Opini	WTP
3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan			
3.1.	Persentase pelanggaran disiplin	%	0,25

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2019
1	2	3	4
3.2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	62
3.3.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	32
4	Pengawasan		
4.1.	Nilai SAKIP Kota Dumai	Nilai	B
4.2.	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	6
4.3.	Persentase Rekomendasi yang selesai di tindaklanjuti	%	70
4.4.	Jumlah Dokumen yang di Review setiap Tahunnya	Dokumen	10
5	Sekretariat DPRD		
5.1.	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	90
5.2.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	ada/tidak	ada
5.3.	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	ada/tidak	ada
5.4.	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	ada
ASPEK DAYA SAING DAERAH			
FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR			
1	Perhubungan		
1.1.	Jumlah terminal darat, laut dan udara yang sesuai standar	Terminal	7
FOKUS IKLIM BERINVESTASI			
1	Penanaman Modal		
1.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78
2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
2.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	%	75

Dari seluruh indikator kinerja pembangunan daerah Kota Dumai tahun 2019 seperti yang tersaji pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 diatas, maka indikator kinerja utama untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian visi Walikota Dumai ***“Terwujudnya masyarakat Dumai yang makmur dan madani pada Tahun 2021”*** adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3 Indikator Kinerja Utama
*Terwujudnya masyarakat Dumai yang makmur dan madani pada
 Tahun 2021*

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019
<i>Terwujudnya masyarakat Dumai yang makmur pada Tahun 2021</i>			
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indek	73,962
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,32
3	PDRB per kapita (ADHB)	(Rp. Juta)	107,894
4	Indeks Gini	Indek	0,415
5	Tingkat Kemiskinan	%	4,50
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,90
7	Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	6
<i>Terwujudnya masyarakat Dumai yang madani pada Tahun 2021</i>			
1	Persentase Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	%	0,095
2	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Indek	88
3	Persentase masjid yang ditingkatkan pembinaannya menjadi masjid paripurna kecamatan	Masjid	14
4	Persentase penegakan peraturan daerah/perwako	%	50
5	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan	2
6	Persentase keberhasilan pencegahan terjadinya konflik sosial	%	100
7	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	30

Dari tabel 6.3 diatas telah diuraikan bahwa untuk melihat keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat Dumai yang makmur dan madani pada tahun 2021 dapat diukur melalui 14 (empat belas) indikator kinerja utama. Adapun pengertian dari masing-masing indikator utama diatas adalah:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran pencapaian suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dalam pembangunan suatu daerah, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. IPM dipublikasikan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik;
2. Pertumbuhan Ekonomi: Tingkat aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi. Pertumbuhan Ekonomi dapat dihitung

dari seri data PDRB atas dasar harga konstan yang setiap tahun dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik;

3. PDRB perkapita (ADHB): nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Penilaian dilakukan pada harga tahun berjalan. PDRB perkapitan didapat dari perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk;
4. Indeks Gini: ukuran yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk yang nilainya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Indeks ini dihitung dengan rumus koefisien gini atau dengan menggunakan kurva lorenz;
5. Tingkat kemiskinan: ukuran yang menggambarkan proporsi masyarakat miskin dalam suatu populasi. Tingkat kemiskinan didapat dengan menghitung persentase penduduk miskin;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka: ukuran yang digunakan untuk mengetahui jumlah masyarakat Kota Dumai yang tidak mempunyai pekerjaan dalam usia angkatan kerja;
7. Persentase pembangunan rumah layak huni: ukuran yang digunakan untuk mengetahui persentase rumah layak huni yang dibangun;
8. Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO: adalah persentase penurunan perempuan yang menjadi korban kekerasan termasuk korban tindak pidana perdagangan orang;
9. Indek pembangunan gender: ukuran yang digunakan untuk menghitung kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan;

10. Jumlah masjid yang ditingkatkan pembinaannya menjadi masjid paripurna kecamatan: ukuran untuk melihat sejauhmana masyarakat Dumai memiliki keseimbangan hidup lahir dan bathin;
11. Persentase perda yang ditegakan: ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat Kota Dumai menjunjung tinggi peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang ditetapkan oleh pemerintah;
12. Penyelenggaraan festival seni dan budaya: ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat dan pemerintah melestarikan nilai-nilai kebudayaan, sejarah dan seni daerah;
13. Konflik sosial: ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana masalah sosial dapat menimbulkan pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
14. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan: ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat dan pemerintah melestarikan nilai-nilai kebudayaan, sejarah dan seni daerah.



BAB VII PENUTUP

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2019, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun ketiga dari tahap ke tiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yaitu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016 – 2021. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2019 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018, Dokumen RKPD 2019 merupakan pelaksanaan rencana kerja tahun ketiga Walikota Dumai periode tahun 2016-2021 yang merupakan tahun ***Tahap Pengembangan*** yang mendukung kondusif bagi kemajuan pembangunan kota untuk mewujudkan masyarakat kota dumai yang makmur dan madani. Kebijakan program lebih diarahkan pada pengembangan berbagai sistem, sarana, potensi dan sumber daya lokal, instrumen pendukung serta situasi kota yang kondusif untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan infrastruktur dasar perkotaan serta perekonomian dengan fokus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat kota Dumai.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2019 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2019, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan pada tahun 2019. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Dumai serta seluruh pelaku pembangunan di Kota Dumai berkewajiban untuk mempedomani program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2019, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
2. RKPD Kota Dumai tahun 2019 disusun dalam upaya meningkatkan sinergitas pusat dengan daerah, antar daerah, dan antar satuan kerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Oleh karenanya, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh *stakeholder* Kota Dumai untuk dapat mewujudkan berbagai substansi rencana pembangunan daerah Kota Dumai yang telah ditetapkan.
3. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Kota Dumai Tahun 2019, RKPD Kota Dumai Tahun 2019 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Dumai.
4. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap OPD harus menyusun dan membuat RENJA OPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2019.
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui forum Rembuk RT, Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, Forum PD serta Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodir dan dikelola secara baik.

6. Dalam rangka sinergitas dan menyadari kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka untuk mengatasinya antara lain telah ditempuh dengan cara kebijakan *sharing* pembiayaan pembangunan antar pemerintah Kota Dumai dengan Pemerintah Propinsi Riau, baik berupa *cost sharing* maupun *activity sharing* yang dimuat pada RKPD masing-masing serta mengupayakan pendanaan dari APBN serta sumber dana lainnya.
7. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, setiap OPD diwajibkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2019, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala (laporan per triwulan) kepada Walikota, melalui Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Keuangan dan BAPPEDA Kota Dumai sebagai leading sektor.
8. Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2019 dan penyelenggaraan Forum PD serta MUSRENBANG RKPD Tingkat Kota Tahun 2018, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian untuk mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintah daerah, melalui MUSRENBANG RKPD dimulai dari

rembuk RT, di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi Riau sampai dengan Tingkat Nasional, perlu mekanisme yang lebih sinergi dan selektif sesuai dengan aturan perencanaan, sehingga dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan, yaitu tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Dumai secara bertahap dan berkesinambungan.

9. RKPD Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Serta hal-hal yang bersifat perubahan akan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

WALIKOTA DUMAI



H. ZULKIFLI, AS

